BAHASA DAN SUSASTRA DALAM GUNTINGAN

NOMOR 171 **OKTOBER 1999**



PERPUSTAKAAN PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV
Jakarta 13220, Telepon 4896558, 4706287, 4706288

DAFTAR ISI

BAHASA

BAHASA DAERAH-ULASAN

"Bahasa Daerah Ibarat Kekayaan Alam" 1

"Perlu Gerakan Soaial untuk Lestarikan Bahasa Daerah" 2

"Aspek Strategis Bahasa Daerah" 4

"Penting, Pemetaan Bahasa Daerah" 5

"Bahasa Daerah Diusulkan Masuk Batang Tubuh UUD 45" 6

"Masukkan Bahasa Daerah dalam Amandemen UUD 1945" 7

"Hasil Festival Budaya Nusantara '99" 8

"Bahasa Daerah Kurang Perhatian" 9

"Bahasa Daerah, Unsur Budaya Bangsa" 10

BAHASA GAUL-ULASAN

"Bahasa Gaul, Bo!" 11

BAHASA INDONESIA-ISTILAH

"Kosakata Hari Ini" 13

BAHASA INDONESIA-PEMBINAAN

"Wisata Bahasa: Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar" 17

"Wisata Bahasa: Kekhususan Awalan me- dan Awalan pe- (2) 18

"Ulasan Bahasa dan Budaya: Bentuk Cis, Cih, Idih, Lo, dan Alkisah" 19

"Wisata Bahasa: Tanda Hubung pada Ejaan" 21

"Wisata Bahasa: Memanfaatkan Tanda Hubung (-)"..... 22

BAHASA INDONESIA-PENGAJARAN

"Bahasa Kita - Bahasa Indonesia" 23

BAHASA INDONESIA-ULASAN

"Saran untuk Padanan 'Prepaid'" 26

"Mengetaskan Kemiskinan Mengangkat Kemiskinan" 27

"Kembalikan Bahasa ke Fungsi Semula" 28

"Bulan Bahasa dan Nasib Bahasa Indonesia" 30

"Saatnya Kita Temukan Foemat Reformasi dalam Politik

"Dari Bulan Bahasa dan Sastra: 'Pintu Terbuka' yang Kurang Promosi" 33
"Kesalahan Berbahasa Bukan Hal yang Biasa" 35
"Bahasa Indonesia Sulit Mendunia" 37
"Berbahasa Indonesia Rasa Kebangsaan" 38
"Saatnya Kita Temukan Format Reformasi dalam Politik Kebahasaan" 40
"Belajar Bahasa Semata, Hambat Penguasaan" 42
"Rasa Kebangsaan Berbahasa Indonesia" 42
"Pengajaran Bahasa dan Sastra Cenderung Teori" 46
"Bahasa Indonesia menjadi Feodal" 48
"Terjadi Feodalisme terhadap Bahasa Indonesia" 49
"Pusat Bahasa: Memasuki bulan Oktober, kritik terhadap penggunaan bahasa Indonesia kembali mencuat. Apa peran Pusat Bahasa?" 51
"Pendidikan Sastra di Sekolah-sekolah Mengalami Kegagalan" 52
"Cuplikan: Bahasa Api" 53
"Semua Barang Elektronik, Wajib gunakan Petunjuk Bahasa Indonesia" 55
"Menyambut Bulan Bahasa dan Sastra: Hilangkan Budaya Eufemisme, Retorika, dan Pengaburan Makna Kalimat" 56
"Siswa di Sekolah kesulitan pelajari Bahasa Indonesia" 57
"Demokrasi Bahasa" 59
"Reformasi Bahasa Indonesia" 61
"Mereformasi Mental Bagaimana Enaknya" 63
"Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu Bangsa" 65
"Pengembangan Bahasa Ragam Ipteks" 67
"Politik Bahasa Nasional Dipraseminarkan" 69
"Bahasa: Salah Ucap yang harus Dihindarkan" 70
"Perjalanan Bahasa Indonesia setelah 71 Tahun Diikrarkan" 71
"Bahasa dan Bayang-bayang Totalitarianisme" 73
"Bahasa Indonesia di Era Globalisasi" 76

BAHASA JAWA-ULASAN
"Pelajaran Bahasa Jawa dinilai tak Berguna" 79

BAHASA LAMPUNG-ULASAN
"Ancaman Kepunahan Bahasa Lampung Diseminarkan" 81

BAHASA MELAYU-ULASAN
"Berabad-abad Bahasa Melayu jadi Bahasa Nusantara" 82
"Bahasa Nusantara Semakin Terdesak" 83
"Suram, Nasib Bahasa Melayu di Indonesia dan Malaysia" 84

BAHASA POLITIK-ULASAN
"Bahasa dalam Wacana Politik" 86
"Pemakaian Bahasa Para Elit Politik" 88

BAHASA SUNDA-ULASAN
"Bahasa Sunda masih Hidup dan dipakai oleh Masyarakat Sunda" 91

ENSIKLOPEDI JAWA-ULASAN
"LSJ Terbitkan 'Esiklopedi Kebudayaan Jawa" 93
"Perjalanan sebuah Ensiklopedi Jawa" 94

ISTILAH ASING-ULASAN
Anggota MPR/DPR Jangan Sok Berbahasa Asing" 96
"Istilah Asing di Sidang Umum MPR" 97
"Bahasa Asing Banyak Muncul di SU MPR" 98
"Terlalu Banyak Istilah Asing di Sidang Umum MPR" 100

KAMUS DAERAH-ULASAN
"Uncen dan UPNG Susun Kamus Tiga Bahasa Internasional" 102

KEBUDAYAAN-ULASAN
"Pluralitas dalam Pembentukan Wacana Kebudayaan" 103
"Indonesia Butuh Gerakan Kebudayaan" 105
"Gus Dur takkkan Lupakan Kebudayaan" 106
"Gus Dur di Mana Kebudayaan" 107
"Hasan Junus Memahat Batu" 110
"Kebudayaan Harus di Posisi Terhormat" 112
"Semua Kebudayaan Setara" 113

CERITA REKAAN INDONESIA-ULASAN
"Cerita Rekaan Indonesia Selalu 'Mengutuk'" 114

CERPEN-ULASAN
"Cerpen Umar Kayam dalam 13 Bahasa" 115
"Antologi Cerpen 'Ketika Jenderal' Diluncurkan" 116

FIKSI SURCALIS-ULASAN
"Fiksi Surealis Dipertanyakan" 117

KOMIK-ULASAN
"'La Tour' Schuiten-Peeters Menjadi 'Menara'" 118
"Ciaaat! Komik Indonesia Mengeliat!" 119

NASKAH LAMA-ULASAN
"Komikkan Naskah-naskah Lama" 121
"Naskah Jangan Hanya Disimpan" 123
"Naskah Kuno bisa Dijadikan Komik" 124
"Naskah-naskah Kuno pun Menegaskan Pria adalah Pemimpin" 125
"Buat Tambah Ketrampilan" 127
"Bukan Monopoli Naskah Kuno" 128

PUISI-ULASAN
Sepenggal Kisah dari Puisi Taufiq Ismail" 129
"Sosialisasi Puisi di Kudus" 131
"Malam Puisi Indonesia-Jerman: Ketika Ruang dan Waktu Terabaikan" 133
"Sajak-sajak Cinta Rendra di-VCD-kan" 135
"Sajak-sajak H.B. Jassin" 136

PUISI HUMOR-ULASAN
"Puisi Humor di Graha Bhakti TIM" 137

SASTRA INDONESIA-ULASAN
"Nilai Sastra: Antara yang Intrinsik dan Relasional" 139
"Apresiasi Sastra: Kriteria Penilaian Sastra yang Lazim Dipakai" 142

"Angkatan Sastra 2000 Kembali Diperdebatkan" 145
"Sebutan Angkatan Sastra 2000 Masih Prematur" 147
"Angkatam Sastra 2000, Apa pula itu?" 149
"Sastra di Sekolah: Tak Kenal maka Tak Cinta" 151
"Sastra di Dalam dan di Luar Koran" 153
"Angkatan Sastra 2000" 155
"Sajak-sajak Cinta Si 'Burung Merak' Rendra" 159
"Dari Jatiwangi ke Osaka" 160
"Pasar Tari Kontemporer 1999, Intervensi Sastra ke Dalam Tari" 164
"Musik dan Teater Tasyakuran dengan Puisi" 165
"Makna Retorika" 168
"Gus Dur Merindukan Kejayaan Majapahit" 170
"Tak Menuntut Rehabilitasi" 172
"Pesta Sastra Tasikmalaya 1999" 173
"Kesusastraan Lama perlu Direproduksi Ke Bentuk populer" 174
"Menunggu Lahirnya Penyair Angkatan Reformasi" 175
"Medy Lukito Masuk Ensiklopedi Penyair Dunia" 177
"Taufiq Ismail: 'Saya Menangis Menyaksikan Situasi Sosial-Politik Saat Ini" 178
"Generasi Yang Hilang" 180
"Sastra Buruh: Tak ada Kisah Bahagia" 182
"Angkatan Sastra 2000" 184
"'Kereta Kencana' WS Rendra di GKJ" 188
"Aneh, Guru Bahasa tak pahami Sastra" 189
"Datanglah kepada Penyair" 190
"Seni Tak Pernah Basi" 193
"Kurikulum Pengajaran Sastra Digugat" 197
"Menulis tanpa Formula Khusus" 198
"Karya Sastra Lokal di Ujung Tanduk" 199
"Rendra: Penyair harus Memiliki olah Kapujanggan" 201
"Mempermasalahkan Angkatan: Apa Perlunya?" 204
"Pengajaran Sastra Dianaktirikan" 205
"Kurangi Matematika, Tambah Sastra" 206
"Sastrawan Indonesia Diundang ke Thailand" 208
"Guru Gagal Mengajarkan Sastra yang Mencerdaskan" 209
"Tumbuhkan Pilar-pilar Kehidupan Sastra" 210
"Guru Gagal Mengajarkan Sastra yang Mencerdaskan" 211

"Desa Sosok Indonesia: Ahmad Tohari bangga disebut Sastrawan Desa" 212
"Sastra dan Tingkat Keberaksaraan" 214
"Jakob Sumardjo" 216
"Nyanyian dari Pedalaman" 222
"Sastra: Bersemi Lalu Layu" 224

SASTRA LISAN-ULASAN
"Tradisi Selalu Menjaga Keselarasan Manusia dangan Alam" 227
"Ratapan dalam Sebuah Bambu" 231
"Tradisi Lisan, Kesamaan dan Keragaman" 232
"Tradisi Lisan Nusantara Mengandung Keragaman dan Kesamaan" 234

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

BAHASA DAERAH-ULASAN

Dr Asim Gunarwan

Bahasa Daerah Ibarat Kekayaan Alam

AHLI sosiolinguistik ini, Dr Asim Gunarwan (60), lebih dikenal sebagai pakar ilmu bahasa. "Padahal saya sudah selalu membantah dan menjelaskan dalam setiap pertemuan kebahasaan, saya ini ahli sosiologi bahasa," katanya. Karena masyarakat tak bisa membedakan ilmu bahasa dan sosiologi bahasa? "Mungkin juga karena penelitian-penelitian saya banyak menyangkut soal kebahasaan. Penelitian bahasa, terutama bahasa-bahasa daerah, jadi kegemaran saya."

Kegemaran Asim terbukti paling tidak terlihat dari puluhan penelitian kebahasaan yang sudah dia lakukan. Setiap tahun, paling tidak tiga hasil penelitiannya dipresentasikan di luar negeri. Ada atau tidak biaya dari pemerintah, sponsor, atau lembaga Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI)—tempatnya mengajar selama ini—penelitian jalan terus. "Saya biayai sendiri." Tahun ini, sampai bulan Agustus kemarin, dia sudah presentasi di tiga negara; Inggris, Singapura, Jepang.

Dari seluruh hasil penelitiannya, sebagian besar menyangkut eksistensi bahasa-bahasa daerah berhadapan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Lampung, Batak, dan Jawa adalah tiga bahasa daerah terakhir yang ditelitinya. Dalam waktu dekat dia akan meneliti bahasa Melayu Banjar di Kalimantan Selatan.

Kok bahasa daerah? "Bahasa daerah itu ibarat kekayaan alam kita. Kalau hilang, ya punah. Kita tak punya apa-apa yang bisa dibanggakan," katanya kepada *Kompas* di ruang dosen Fakultas Sastra UI, Depok, Selasa (12/10). Ada tiga "peranan" bahasa daerah. Pertama sebagai lambang daerah, kedua sebagai alat komunikasi intrakelompok, dan ketiga sebagai sumber untuk memperkaya kosa kata dan mengembangkan bahasa Indonesia.

Karena itu, ia mengritik kebijakan kebahasaan yang kurang memberi perhatian pada bahasa-bahasa daerah. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, katanya, jangan hanya membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Pengembangan nasionisme—jangan keliru nasionalisme—amat terbantu oleh kebijakan tersebut. Ia pun usul, perlu dibentuk satu Dewan Pelestarian Bahasa Daerah.

Kalau bahasa daerah itu punah, katanya, hilang juga salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ibarat kekayaan alam, kalau sudah punah, yang ada tinggal penyesalan.

***

BUKAN karena berasal dari suku Jawa—lahir di Gondanglegi, Malang Selatan tanggal 16 April 1939—Asim bangga, banyak kosa kata Jawa diadopsi sebagai kosa kata Indonesia. Keadaan ini justru dia rasakan tidak adil. Seharusnya kosa kata bahasa-bahasa daerah yang lain pun harus diserap. Bukan hanya yang dipakai oleh suku-suku besar—jumlahnya lebih dari 10 juta jiwa—tetapi juga suku-suku kecil.

Adopsi semacam itu secara tidak langsung bisa memupuk rasa kesatuan dan persatuan. Kalau secara politik barangkali lewat demokratisasi pemerintahan, sebaliknya perasaan kesatuan dan persatuan berkembang pula lewat bahasa. Karena itu, ia menyayangkan semangat dan cara pembinaan lewat cara-cara mengharuskan. Pembakuan dalam pemakaian kosa kata misalnya, sebaiknya dilakukan secara persuasif. Pada akhirnya bahasa Indonesia akan berkembang secara alami, dan tak perlu lewat cara-cara instruktif yang justru memunculkan sikap melawan, sampai pernah muncul "ayatullah bahasa".

Miniatnya pada bahasa-bahasa daerah baru tumbuh setelah dia lulus doktor bidang linguistik dari University of Georgetown, AS tahun 1981. Disertasinya tentang variasi gramatikal dalam bahasa Indonesia, antara lain membahas mengapa kata "yang" dan "bahwa" sering dihilangkan, dan bagaimana kaitannya dengan kelas-kelas sosial si pemakai.

Saat ini barangkali dia tercatat sebagai satu dari sedikit orang yang masih tertarik melestarikan bahasa-bahasa daerah, sementara banyak pakar bahasa dan pakar sosiolinguistik lainnya sudah menyatakan bahasa daerah sebagai "masa lalu".

***

LULUS dari IKIP Malang tahun 1968, Asim ingin jadi penerjemah. Lantas dia belajar khusus tentang penerjemahan langsung—bukan tulisan—di Universitas Deacon, Australia. "Di sana saya belajar bagaimana caranya bisa menerjemahkan omongan orang secara cepat."

Kembali ke Indonesia, dia diminta oleh pemerintah ke AS untuk mempersiapkan rencana mendirikan satu Akademi Bahasa Asing (ABA) di Indonesia. Karena pada tahun 1975 Pertamina sebagai penyandang dana terjerat utang, rencana ABA batal. Dia diminta pindah, mengambil gelar doktor sosiolinguistik, sebab studi lanjut penerjemahan tak sampai doktor, paling tinggi master. "Masuklah saya di Georgetown, lulus tahun 1981."

Kembali ke UI, jadi dosen—katanya, dosen itu satu dos harganya lima sen—pada tahun 1993, tiba-tiba saja dia dipanggil ke Istana. Diminta jadi orang kedua penerjemah Pak Harto (mantan Presiden Soeharto—Red), bergantian dengan Widodo (penerjemah pertama Soeharto—Red). "Siapa sponsornya, saya tak tahu".

Selama setahun nasibnya belum jelas. "Saya dinilai, apakah bisa *njawani* atau tidak. Yang menentukan Pak Harto sendiri." Penilaian itu antara lain dilihat dari cara duduk. "Kalau duduk *njegang* (kaki yang satu ditumpangkan di atas kaki yang lain—**Red**), katanya jelas tak lulus." Baru tahun 1994, Mensesneg (waktu itu) Moerdiono memanggilnya. Pak Moer bilang, "Rupanya Pak Harto menyukai Anda." Asim diangkat dan sekarang setelah tak dipakai lagi—sejak Soeharto *lengser*" Baru tahu kalau pengangkatan saya didasarkan atas *like and dislike*, bukan atas kemampuan saya."

Lima tahun "dekat" dengan Pak Harto, Asim Gunarwan punya keyakinan "pemahaman bahasa Inggris Pak Harto itu bagus". Pak Harto juga tahu dan maklum, ketika Asim sulit menemukan kosa kata Indonesia atau Belanda yang pas. "Kalau sudah begitu, dia akan mengulanginya lagi, dan saya tahu, oh saya keliru," katanya.

Sebagai contoh di TPS Tapos, Pak Harto memberikan penjelasan, sebelum diinseminasi sapi-sapi itu dibiarkan birahi dulu. Asim bingung, apa bahasa Inggrisnya birahi. "Saya pakai kata *fell in lope*". Pak Harto tersenyum. Asim kikuk, lantas menggantinya dengan istilah *in the heat*, itu pun dengan keringat mengucur, takut para tamu asing itu tak mengerti.

Duka lainnya, dan pasti keringat bercucuran, kalau harus menerjemahkan pidato orang asing yang berbicara amat sangat cepat, atau tidak jelas artikulasinya. PM Australia Paul Keating, misalnya, selain beraksen Australia, mulutnya seperti tetap tertutup. Kalau sudah begitu, *dag, dig, dag, dig, dug* terus, dan keringat bercucuran.

***

MESKI telah jadi penerjemah "kepresidenan" dan sering tampil menyampaikan hasil penelitian di forum internasional, Asim Gunarwan tetap merasa, "Bahasa Inggris saya gaya Jawa atau Madura." Jadi di Sastra Inggris ini dia tidak mengajar bahasa Inggris, melainkan metode riset. Dua calon doktor, satu dari ITB Bandung dan satu dari Universitas Negeri Padang, sedang dia bimbing.

Kok belum profesor? "Saya dikejar-kejar Pak Anton Moeliono (Prof Dr Anton M Moeliono—**Red**) untuk mengumpulkan persyaratan kumnya. Saya jawab, saya mau kaya dulu, Pak." Sampai sekarang, keduanya tak tercapai. Tidak kaya, juga belum profesor. "Mungkin tidak berani dan tidak nekat," kata suami Sulistyowati, dan ayah dari anak semata wayang, Nurul Larasati, sarjana bahasa Perancis dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang sekarang bekerja di SCTV itu.

(st sularto)

Kompas, 15 Oktober 1999

Perlu Gerakan Sosial untuk Lestarikan Bahasa Daerah

* Festival Budaya Nusantara '99 Berakhir

Jakarta, Kompas

Pengajaran bahasa daerah di sekolah tidak menjamin terhindarnya dislokasi antargenerasi penuturnya, yang kemudian bisa mengancam keberadaan bahasa daerah bersangkutan. Untuk mencegah kepunahan suatu bahasa daerah, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan semacam gerakan sosial kebahasaan, sehingga bahasa daerah tersebut tetap dipelihara oleh para penuturnya.

Asim Gunarwan, ahli sosiolinguistik dari Universitas Indonesia, mengungkapkan hal ini pada sesi terakhir Konferensi Bahasa Nusantara (KBN) yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (19/10). Pada sesi yang sama tampil Irwan Abdullah (Universitas Gadjah Mada), Robert Sibarani (Universitas Sumatera Utara), Jabatin Bangun (Program Pemetaan Bahasa) dengan moderator Sindhunata SJ. Sesi terakhir KBN itu sekaligus menutup rangkaian Festival Budaya Nusantara (FBN) 1999 yang telah berlangsung di berbagai tempat sejak 9 September lalu.

Merujuk hasil penelitiannya terhadap bahasa Lampung (1994), dari skala implikasi pemilihan bahasa Indonesia atau bahasa Lampung di ranah rumah menunjukkan, kebocoran diglosia (situasi bahasa dengan pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa yang ada — **Red**) terjadi pada orang-orang Lampung pada kelompok umur 41-50 yang berimplikasi bahwa bahasa Indonesia sudah mulai dipakai di ranah rumah. Yang lebih memprihatinkan, semakin muda keluarga Lampung semakin sering bahasa Indonesia digunakan alih-alih bahasa Lampung. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebocoran diglosia menjadi makin besar. Kalau dibiarkan, kata Asim Gunarwan, kebocoran akan semakin besar dan bahasa Lampung dapat punah dalam perkiraan waktu 75-100 tahun lagi.

Dari uraian di atas dapat diinferensikan, di abad-abad yang akan datang bahasa daerah mengalami pergeseran yang lebih cepat. Kini yang harus dilakukan adalah usaha pembalikan pergeseran dengan mengupayakan kesinambungan bahasa ibu antargenerasi tersebut.

Penalarannya: bahasa ibu tidak akan pupus selama ia diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Sebaliknya, jika orang-orang tua tidak mewariskan bahasa ibu (atau bahasa daerah) kepada anak-anaknya, dalam arti bahwa orang tua menggunakan bahasa alih-alih bahasa ibu mereka, hal ini adalah penyebab utama akan terjadinya pergeseran bahasa. Jika hal itu meluas sehingga transmisi antargenerasi bahasa ibu tidak berlangsung di banyak keluarga, cepat atau lambat bahasa ibu itu menuju kematiannya.

Masalahnya, dewasa ini tampaknya banyak keluarga muda — terutama di kota-kota besar — yang menggunakan bahasa Indonesia alih-alih bahasa daerah kepada anak-anak. Dilihat dengan kacamata nasional hal itu baik. Namun, dilihat dari kacamata daerah yang berbingkai pelestarian bahasa daerah, hal itu jelas merugikan karena pewarisan bahasa daerah terkendala dan yang terjadi adalah dislokasi antargenerasi bahasa daerah.

Kampanye

Untuk mengatasi hal tersebut, Asim Gunarwan mengusulkan supaya dilakukan kampanye: "Pakailah Bahasa Daerah di Rumah." Mengajarkan bahasa daerah di sekolah saja menurutnya tidak menjamin terhindarnya dislokasi antargenerasi bahasa daerah, seperti yang terjadi di Irlandia ketika negara itu mengusahakan pelestarian bahasanya.

"Mengatakan memang selalu lebih mudah daripada melaksanakan. Jika kampanye itu dilaksanakan, orang daerah dapat dituduh anasional dan membangkit-bangkitkan primordialisme daerah," kata Asim.

Dalam kaitan itu ia melihat pentingnya cara berkampanye. Dengan kampanye itu harus diusahakan agar tidak ada kelompok yang merasa tersinggung.

"Saya justru berpendapat bahwa perlu ada gerakan sosial kebahasaan untuk melestarikan bahasa daerah. Agar putra daerah tidak dituduh macam-macam, gerakan itu hendaknya disebut 'Gerakan Pelestarian Bahasa Daerah'. Usul konkret saya: hendaknya gerakan sosial itu dimotori oleh Dewan Bahasa Daerah yang 'dititipkan' di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau langsung di Direktorat Jenderal Kebudayaan," papar Asim Gunarwan.

Kemungkinan lain dengan membentuk semacam Majelis Pelestarian Bahasa Daerah di daerah, terutama bila otonomi daerah sudah benar-benar operasional. Tugas dewan atau majelis itu adalah memikirkan secara konseptual dan terpadu serta melaksanakan pelestarian bahasa daerah-bahasa daerah yang dipelihara oleh para penutur-nya. **(lok)**

Kompas, 20 Oktober 1999

Aspek Strategis Bahasa Daerah

JAKARTA (Media): Paham kebangsaan melalui penyeragaman bahasa nasional menjadi bahasa Indonesia, hendaknya tidak menghilangkan fungsi bahasa daerah sebagai alat komunikasi dan apresiasi budaya lokal. Karena bahasa daerah juga berfungsi sebagai wahana sains, estetika, dan teknologi serta kajian wilayah multikultural. Dan, pemerintah wajib melindungi dan melestarikan bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan dan kebanggaan nasional.

Demikian antara lain hasil rumusan Konferensi Bahasa Nusantara (KBN) yang berakhir kemarin di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Ketua panitia penyelenggara KBN, Dr Bambang Kaswanti Purwo menyatakan kedudukan dan fungsi bahasa daerah perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terutama pemerintah. Sebab kelestarian bahasa daerah hanya dapat terwujud jika didukung semua komunitas yang merasakan bahwa bahasa daerah punya aspek strategis.

"Bahasa daerah yang terus berkembang di masyarakat penuturnya, membentuk dan dibentuk oleh manusia sepanjang sejarah. Keduanya saling mempengaruhi yang kemudian terekam dalam pikiran dan prilaku manusia dalam bahasa mereka," kata Bambang. Makanya, pemerintah diharapkan punya *political will* untuk mendukung pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, misalnya melalui berbagai penelitian kebahasaan.

Menurut Bambang, pengembangan bahasa daerah dapat ditingkatkan dengan melengkapi linguistik 'murni' atau hanya memperhatikan aspek kebahasaan, terlepas dari konteks penggunaan dan fungsinya menjadi linguistik 'holistik' (memperhatikan keseluruhan konteks dan sekaligus melihat bahasa selain dapat dibentuk juga dapat membentuk komunitasnya) secara empiris.

Konferensi itu juga menyatakan bahasa daerah harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam pembentukan identitas dan kepribadian bangsa. Pengkajian dan kebijakan pemerintah diharapkan mengarah pada penemuan nilai-nilai yang ada dan dapat dikembangkan untuk menata masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan yang dilandasi harmonisitas di antara keragaman yang secara alamiah telah ada.

Dilihat dari antusiasme pemerhati bahasa daerah yang terlibat dalam KBN ini cukup representatif untuk mewujudkan bahasa daerah sebagai artikulasi kepentingan nasional. Acara yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang merupakan perwakilan dari Aceh sampai Irian Jaya ini, juga melibatkan ahli linguistik, sastra, tokoh adat, tradisi lisan, tokoh pendidikan, dan budayawan serta sineas.

Rumusan hasil KBN ini direncanakan sebagai masukan dalam SU-MPR, tetapi gagal sebab pelaksanaan KBN yang rencananya bulan April baru dapat dilaksanakan sekarang yang bertepatan dengan SU-MPR. (ST/B-2)

Media Indonesia20 Oktober 1999

Penting, Pemetaan Bahasa Daerah

Cikini, Warta Kota

Bahasa daerah sebagai ekspresi budaya, pengetahuan, teknologi, etika, yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan gambaran peta kebudayaan nusantara. Penguasaan peta ini sangat bermanfaat untuk mengamati perkembangan suatu wilayah.

Hal ini terungkap pada acara Konferensi Bahasa Nusantara di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Selasa (19/10), sebagai rangkaian dari Festival Budaya Nusantara yang digelar mulai dari tanggal 14 hingga 19 Oktober 1999. Hadir sebagai pembicara, AA Navis, Pudentia, Tenas Effendi, Sam Mukhtar Chaniago, dan Garin Nugroho.

Fungsi peta bahasa adalah sebagai panduan pemecahan masalah-masalah yang terjadi antarwilayah. Selain itu, pemetaan itu akan dapat menemukan bahasa yang telah hilang dan menggali potensi lokal.

"Untuk mengetahui cara-cara menanam sagu di Irian, untuk dapat keterangannya kita harus tahu bahasa daerahnya," ujar Garin memberi contoh.

Menurut sineas muda ini, seorang arsitek, sastrawan, maupun ahli ilmu hayat, bila paham bahasa daerah, dapat mengembangkan ilmunya dengan mengggali budaya-budaya lokal. Selain itu, setiap bahasa daerah mengandung irama dan tempo yang menunjukkan asal geografis seseorang. Misalnya, untuk memanggil nama seseorang akan terdengar berbeda bila dilakukan oleh orang Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta.

"Kalau pemanggilan nama-nama tersebut di-Indonesiakan akan kehilangan rasa," ujar Garin.

Sementara itu Pudentia menambahkan, sampai kini tercatat sekitar 1000 bahasa daerah di wilayah Indonesia.

"Kita juga masih harus menyisakan kemungkinan adanya

bahasa daerah tertentu yang belum masuk (hitungan)," tuturnya.

Dijelaskan, bahasa daerah dapat mewakili ekspresi penuturnya, termasuk ekspresi kesenian. Tradisi lisan dan kesenian sudah menyertakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi masih ada bagian-bagian tertentu yang tetap memakai bahasa daerah. Seperti guyonan atau humor *hubruk*, sering diungkapkan dalam bahasa daerah yang bersangkutan, karena kalau diterjemahkan menjadi kurang lucu.

Lebih mahal

Hal yang sama dilakukan Garin Nugroho. Film-film lokal yang dibuatnya lebih banyak mempertahankan bahasa daerah. Hal tersebut tetap dilakukan, karena kalau digantikan dengan bahasa Indonesia, tidak akan tepat arti dan maksudnya. Walaupun, ongkos yang harus ditanggung oleh produsen, biayanya lebih tinggi.

"Saya itu orang yang paling menyerah dengan bahasa daerah," ujar Garin.

Untuk itu, ia selalu menyertakan terjemahan dan *subtitle* dalam film-film yang dibuatnya. Akibatnya ada bebab ongkos produksi yang harus ditanggung sebesar Rp 75 juta, hanya untuk terjemahan.

Menurutnya, film yang dibuat dengan bahasa daerah, seperti film-film impor, harus menggunakan teks terjemahan. "Ini itu dilakukan karena tak semua orang mengerti bahasa daerah yang digunakan. Sehingga dalam menggunakan bahasa Indonesia, akan mempersempit tujuan yang dimaksud. (tan)

Warta Kota, 20 Oktober 1999

Bahasa Daerah Diusulkan Masuk Batang Tubuh UUD 45

JAKARTA — Eksistensi bahasa daerah perlu dicantumkan dalam batang tubuh UUD 1945. Inilah pernyataan sikap yang dihasilkan Konferensi Bahasa Nusantara (KBN) yang diselenggarakan 18-19 Oktober 1999 di Gedung Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Acara KBN sendiri merupakan rangkaian dari gelar Festival Budaya Nusantara 1999 yang berlangsung selama 3 bulan. "Kedudukan dan fungsi bahasa daerah perlu dicantumkan dalam batang tubuh UUD 1945 yang diamandemen menjadi pasal baru yang berbunyi: Bahasa daerah adalah unsur budaya bangsa." Demikian dinyatakan dalam rumusan yang dihasilkan konferensi tersebut.

Menurut sastrawan daerah Ayip Rosyidi, upaya pengamandemenan pasal 36 UUD 1945 itu sudah dipandang perlu. "Selama ini soal bahasa daerah hanya ada pada penjelasan pasal itu. Dan kenyataannya tak pernah dilaksanakan," ujarnya di Jakarta, kemarin. Jika bahasa daerah, sambung Ayip, dimasukkan dalam batang tubuh UUD 1945, dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan hukum bahasa daerah.

Namun, Ayip tak mengelak jika ketidakberdayaan bahasa daerah selama ini diakibatkan oleh permasalahan yang kompleks. Eksistensi bahasa daerah, jelasnya, menjadi lemah bukan hanya karena hegemoni bahasa Indonesia, tapi juga berhadapan dengan masalah lainnya, seperti politik dan ekonomi. "Sikap mental masyarakat umum terhadap keberadaan bahasa daerah itulah kunci permasalahan ini," ujar ketua Yayasan Rancage, Bandung ini.

Pakar sastra Batak Toba, Dr Robert Sibarani pun menyepakati amandemen terhadap pasal 36 UUD 1945 itu. Tapi, terangnya, yang paling penting adalah realisasinya. "Kalau memang dengan diamandemen membuat kedudukan bahasa daerah menjadi kuat, baguslah itu," ujar Ketua Jurusan Sastra Daerah Universitas Sumatra Utara, Medan, ini.

Menurut Sibarani, sebenarnya keberadaan bahasa daerah cukup diakui dalam UU dan GBHN, termasuk dalam dokumen Sumpah Pemuda Oktober 1928. "Bahasa daerah menurut semuanya itu sudah dipentingkan, namun tak pernah ada realisasinya," paparnya. Bahkan, sambung Sibarani, dalam GBHN 1978-1990-an, bahasa daerah selalu ada dalam bahasan, tapi

kenyataannya tak pernah kelihatan. ''Jika sudah diamandemen, namun tetap saja tak ada realisasinya, ya percuma saja amandemen itu,'' tukasnya.

Pakar sastra Bugis Prof Dr Fachruddin AE juga menyetujui amandemen itu. ''Saya kira perlu, karena selama ini ketentuan yang ada hanya menonjolkan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa daerah tak dihiraukan sama sekali,'' paparnya. Guru besar sastra dan filologi Bugis Universitas Negeri Makassar ini mengatakan, bahwa sikap kurang menghargai bahasa daerah menjadi penyebab hilangnya bahasa daerah dalam pergaulan masyarakat. ''Selain itu orang beranggapan bahwa menggunakan bahasa daerah itu tak membawa keuntungan,'' ungkap Fachruddin. Menurutnya, bisa atau tak bisa berbahasa daerah itu memang tak membuat orang itu rugi atau untung.

Sibarani berpendapat untuk memberdayakan eksistensi bahasa daerah dan mengkondusifkan keberadaannya dalam pembangunan adalah perlu ketegasan dan penumbuhan sikap untuk menghargai bahasa daerah berikut SDM yang berkecimpung di dalamnya. ''Semestinya orang yang paham tentang suatu bahasa dan budaya suatu daerah tertentu ditempatkanpada tempat yang tepat,'' tegasnya. Seperti, sebut Sibarani, bidang pariwisata, museum, Jarahnitra adalah lahan orang-orang yang paham bahasa serta budaya daerah. ''Jangan diserahkan saja pada sarjana hukum atau ekonomi,'' tukasnya.

Hal di atas itu, papar Sibarani, berkaitan erat dengan pendistribusian alumni-alumni dari jurusan sastra daerah yang selama ini buntu. ■ rad

Republika, 21 Oktober 1999

Masukkan Bahasa Daerah dalam Amandemen UUD 1945

Cikini, Warta Kota

Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, bahasa daerah perlu dicantumkan dalam batang tubuh UUD 1945 yang diamandemen. Pasal baru itu dapat berbunyi *Bahasa Daerah adalah unsur budaya bangsa.*

Demikian hasil Seminar Pernaskahan Nusantara, Seminar Tradisi Lisan dan Konferensi Bahasa Nusantara, yang diselenggarakan mulai dari tanggal 12 hingga 19 Oktober 1999, di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta. Pernyataan lain yang dibuat dalam seminar itu adalah *reformasi bukan hanya dalam bidang hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga dalam budaya.*

Konferensi Bahasa Nusantara 1999 mengeluarkan rumusan yang mendukung dan memperkuat putusan Kongres Bahasa Indonesia VI tahun 1998, bahwa Pusat Bahasa dijadikan lembaga independen. Selain itu, struktur Pusat Bahasa dilengkapi dengan Badan Pengarah yang terdiri atas pakar bahasa, pakar sastra, sastrawan, pakar ilmu sosial, politisi, dan tokoh masyarakat. Fungsi Pusat Bahasa ditingkatkan sehingga mencakup pengelolaan pengajaran bahasa dan sastra, pada semua jenis dan jenjang lembaga pendidikan.

Akhir dari rangkaian acara itu berupa penutupan yang diadakan di Gedung Graha Bakti Budaya, TIM, Selasa (19/10) malam.

"Acara ini adalah kolaborasi pertama antara seni, seniman, ilmu, ilmuwan, dan keragaman budaya," ujar Pudentia.

Acara diselenggarakan adalah satu rangkaian berupa Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara, Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan III dan Pameran Program Pemetaan Bahasa Nusantara. Selain itu ada pentas seni budaya bangsa.

Acara penutupan rangkaian juga menampilkan tari dan lagu. Seperti Seni Tradisi Ho Ho dari Nias, musik dan tari Yospen dari Irian Jaya, Paduan Suara dari Universitas Sumatra Utara, dan sajian lagu-lagu daerah dari Ireng Maulana All Star Band.

Selain itu, juga diserahkan cindera mata berupa foto hasil kegiatan kesenian selama di TIM. Cindera mata tersebut diserahkan kepada Kesenian Ho Ho dari Nias, Gandrung Banguwangi, Joget Dangkung, Band Yospan, Tenas Effendi dan Raja Hamzah. Pemberian penghargaan juga diserahkan kepada industri rekaman, yaitu Libel Record Ujung Pandang dan Gema Nusa Pertiwi. **(tan/wik)**

Warta Kota, 21 Oktober 1999

HASIL FESTIVAL BUDAYA NUSANTARA '99

- **BALI**
  - Terlihat dinamika masyarakat.
  - Adanya komunikasi masyarakat yang moderen.
  - Adanya interaksi antar mereka.
  - Ada pemahaman dan penghargaan antar komunitas.
- **PONTIANAK**
  - Kehidupan berbudaya masyarakatnya sangat kuat sehingga seolah-olah merasa menjadi tamu di rumah sendiri.
  - Ketegangan antar etnis karena dialog antar budaya jarang dilakukan.
- **TANJUNG PINANG**
  - Terlihat identitas kemelayuan yang kuat terlihat dalam bentuk naskah dan pulau yang luas.
  - Adanya pemikiran bahasa melayu menjadi bahasa Indonesia.
- **JAKARTA**
  - Menekan pemerintah untuk memasukkan dalam amandemen UUD '45 *Budaya daerah adalah unsur budaya.*
  - Adanya penyetaraan daerah dan tak mengenal sebuah wilayah lokal, termasuk Jakarta dan bahwa Jakarta juga termasuk daerah.
  - Menghilangkan kesan bahwa Jakarta sebagai daerah pusat Indonesia sehingga tidak timbul kesan bahwa ini kesalahan Jakarta, padahal kesan yang muncul selama ini merupakan kesalahan pemerintah.
  - Budaya daerah sebagai sumber pembentukkan identitas dan akar budaya.
  - Menggunakan pendekatan budaya bangsa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat ditawar-tawar.

Warta Kota, 21 Oktober 1999

Bahasa Daerah Kurang Perhatian

JAKARTA — Bahasa daerah dianggap kurang mendapat perhatian pemerintah. Tak adanya perhatian pada keberadaan dan perkembangan bahasa daerah, akhirnya cenderung 'mematikan' jurusan pendidikan bahasa daerah di perguruan tinggi.

"Selama ini alumni jurusan sastra daerah sangat kesulitan mendapatkan lahan pekerjaan," ujar Dr Robert Sibarani, Ketua Jurusan Sastra Daerah Universitas Sumatra Utara, di sela-sela Konferensi Bahasa Nusantara di Gedung Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (19/10).

Karenanya, sambung Sibarani, *material row* yang masuk dalam jurusan itu tak jarang bukan menjadi tujuan utama target pendidikannya, belum lagi jika dikaitkan dengan kualitas. "Mahasiswa yang masuk semakin tahun kian menurun," ujarnya.

Hal senada pun terjadi pada Jurusan Sastra Daerah IKIP Ujungpandang yang kini telah berganti nama Universitas Negeri Makassar. Lulusan jurusan sastra daerah yang seyogyanya menjadi guru bahasa daerah, jelas guru besar sastra dan filologi UNM Prof Dr Fachruddin AE, ternyata tak tercantum dalam daftar Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). "Guru-guru bahasa daerah itu tak jelas statusnya, sebab tak ada kriteria bagi guru bahasa daerah," terangnya. Yang tertera, kata Fachruddin, hanya guru-guru bahasa Indonesia saja.

Oleh karenanya, papar Fachruddin, jurusan sastra daerah yang ada di UNM ditutup. "Jurusan itu lantas dijadikan satu dengan jurusan bahasa Indonesia menjadi jurusan bahasa Indonesia dan sastra daerah," ujarnya. Fachruddin juga mengatakan, bahwa lahan yang kurang menyebabkan jumlah peminat dan mahasiswa yang ingin belajar sastra daerah menurun. Belum lagi, lanjutnya, sikap mental masyarakat yang kebanyakan sama sekali tak menganggap penting bahasa daerah. "Buat masyarakat menguasai atau tidak bahasa daerah tak ada untung ruginya, bisa atau tidak sama saja," kata Fachruddin.

Bagi Sibarani, tak ditempatkannya orang-orang yang berkompeten pada banyak bidang, terutama yang berkenaan dengan kebudayaan daerah turut mempengaruhi kuantitas dan kualitas pendidikan sastra daerah. "Bidang pariwisata, permuseuman, jarahnitra yang semestinya dikerjakan oleh alumni sastra daerah justru diisi oleh sarjana hukum, ekonomi dan lainnya," ungkapnya. Padahal, sambung Sibarani, seharusnya digarap oleh SDM yang paham tentang bahasa dan budaya daerah terkait.

Berdasarkan permasalahan yang berkembang dalam masyarakat tersebut, konferensi yang digelar dalam rangkaian Festival Budaya Nusantara tersebut mengeluarkan rumusan penyelesaian masalah. Antara lain direkomendasikan bahwa siapa pun yang ditugaskan oleh pemerintah pada suatu daerah diwajibkan memahami budaya setempat secara sungguh-sungguh, misalnya menguasai bahasa daerah yanag bersangkutan. "Prioritas hendaknya diberikan kepada tenaga lulusan Program Studi Bahasa Daerah," kata Sibarani.

Selain itu, direkomendasikan pula bahwa politik bahasa nasional yang dirumuskan pada tahun 1975 perlu ditinjau kembali dan disusun ulang lagi. Terutama dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing serta pengajarannya pada sesama jenis dan jenjang lembaga pendidikan.

Menurut Sibarani, sangat tak adil juga jika tak berkembangnya bahasa daerah adalah tanggung jawab pendidikan sekolah dan Pusat Pengembangan Bahasa. "Orang tua dan keluarga menjadi ujung tombak bagaimana anak-anaknya bersikap bangga menggunakan bahasa daerah," tandasnya. Setidaknya, sambung Sibarani, orangtua menggunakan bahasa daerah jika berkomunikasi dengan anak-anaknya. "Jika dalam kawin antar suku, buat komitmen bahasa dari suku mana yang akan digunakan atau bisa bahasa dari suku ibu dan ayahnya," ujarnya.

Kemauan orang tualah, tegas Sibarani, untuk membuat anak-anaknya bisa menghargai dan bangga jika menggunakan bahasa daerah dalam percakapan mereka. "Kalau anak-anak itu bisa mempelajari bahasa asing, kenapa tidak juga belajar bahasa daerah," tandasnya. ■ rad

Republika, 22 Oktober 1999

Bahasa Daerah, Unsur Budaya Bangsa

KONFERENSI Bahasa Indonesia menganggap kedudukan dan fungsi bahasa daerah perlu dicantumkan dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 yang akan diamandemenkan. Konferensi itu mengusulkan, pasal baru yang akan tertulis dalam batang tubuh tersebut nantinya dapat berbunyi "bahasa daerah adalah unsur budaya bangsa".

Demikian menurut sumbangan pikiran dari para peserta Konferensi Bahasa Nusantara 18-19 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara Dr Bambang Kaswanti Purwo pekan lalu di Jakarta. Pemikiran ini juga bertolak dari aksi penyeragaman budaya selama 30 tahun lebih yang diterapkan di hampir seluruh aspek kehidupan sehingga keragaman budaya semakin mendekati titik punah.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia Prof Dr Harimurti Menurut Harimurti, bahasa Jawa menjadi seperti sekarang disebabkan dua faktor. Pertama, kuantitas penuturnya cukup besar dan tersebar luas. Kedua, bahasa Jawa mampu keluar dari "tempurung" kebanggaan lokal.

Berdasarkan pengamatannya, bahasa Jawa sebagai bahasa daerah cukup akomodatif terhadap perkembangan. Ketika terjadi perguliran dengan bahasa nasional, bahasa Jawa mampu mengatasi seleksi secara alamiah. Agar masyarakat semakin menghargai keragaman budaya bangsa, bahasa daerah dapat diperkenalkan lewat terjemahan ke bahasa daerah lain.

Konferensi Bahasa Nusantara juga menghasilkan 23 butir keputusan yang dibuat oleh 13 orang tim perumus. Secara keseluruhan, hasilnya mengungkapkan keberadaan bahasa daerah yang hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam Kridalaksana mengatakan, pemikiran tersebut memang penting secara sosial politis karena penggunaan bahasa nasional itu sendiri sudah mengandung muatan politis. Selain itu, usulan amandemen itu timbul karena selama ini kehadiran bahasa nasional dinilai melindas peran bahasa daerah.

Di sisi lain Harimurti yang turut menghadiri konferensi menilai, kenyataan itu terjadi saat bahasa daerah cenderung menjadi kebanggaan lokal bukan menjadi kebanggaan nasional. Sebenarnya, kebanggaan lokal itu harus diperluas dan diperkenalkan pada daerah lain. Namun, sumbangan pikiran itu dapat dianggap sebagai "obat penawar" yang diharapkan dapat mengangkat bahasa daerah menjadi jati diri bangsa.

Lebih lanjut dikatakan, tuduhan yang menganggap bahasa Jawa telah mendominasi bahasa Nusantara adalah tidak benar. banyak sendi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bahasa Nusantara telah mampu menyesuaikan fungsinya sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Perhatian terhadap nasib perkembangan bahasa Nusantara agaknya masih tampak kurang. Masyarakat tersita oleh publikasi krisis moneter, skandal perbankan dan disintegrasi bangsa.

Padahal, hasil Program Pemetaan Bahasa-bahasa Nusantara yang dilakukan oleh delapan komite tidak sedikit yang menawarkan solusi dari berbagai masalah yang tengah dialami bangsa ini.

Untuk memahami keadaan dengan lebih baik, bahasa-bahasa daerah perlu didekati dari berbagai aspek yang lebih luas. Misalnya dalam bentuk penelitian yang juga berorientasi pada bidang-bidang di luar bahasa sesuai prinsip pendekatan antardisiplin ilmu.

(UW/W-9)

Suara Pembaruan, 29 Oktober 1999

kiwari

Bahasa Gaul, Bo!

Sore itu, di serambi rumah, seorang ibu diberitahukan anaknya tentang satu kosa kata baru. "Ma, di Kampus ada istilah baru, *funkeh*, artinya 'gaya' gitu" tutur sang anak. Tak lama kemudian, tiba sang ayah dari kantor, sebagai layaknya keluarga, terjadilah saling menyindir. Si ibu dengan *pedenya* segera menyindir balik : "Papa, Funkeh, lu!". Si anak bingung dan segera meralat bahwa ekspresi *funkeh* bukan buat mencela semacam "Jelek Lu!", tapi untuk memuji. Ralat tadi dijawab: "Iya, itu kan pujian. Maksudnya, papa gaya, bow!"

Demikian. gaya bahasa anak muda selalu diminati dan menjadi *trend*. Dan dari hari ke hari selalu berubah. Simak saja di awal 1970-an ada ungkapan "Mana Tahan", "Gengsi Dong", "Gile, Mek!". Bahasa prokem juga marak di generasi ini. " Bokap gue make boil, Ogut suping di rokum, nih! Mana gara da'e doku, lagi...". Tahun 1980-an, *trend*-nya berubah. Ungkapan seperti "Niyee..." muncul. Lantas istilah "Memble aje, mending kece". Bahkan, ketika itu, sempat dibuat organisasi IRMA, Ikatan Remaja Memble Aje.

Lantas tahun 1990-an, kalimat plesetan mulai marak belum lagi penambahan kosa kata dan singkatan seperti "...Lah ya", "...layaw", "...coy". "...man", mupeng (muka pengen), "...ke laut aje!", "...ember!", EGP (Emangnye Ge Pikirin), PD (percaya diri), Curhat (mencurahkan harti), BT (Bad Tempered), BGAG (Biar Gerah Asal Gaya), Lucu (Cantik dan imut), CLBK (Cinta Lama Bangkit Kembali), PL (Problem Lo). Kamus Bahasa Gaul pun mulai disusun, dipimpin oleh Debby Sahertian.

Kini, generasi termuda, tata bahasanya nyaris tidak bisa diteliti secara ilmiah, karena hampir murni berasal dari kesepakatan (*arbirtrer*) saja. Simak saja dialog berikut.

"Akika. lapangan banget, bo. Mawar Macarena ah..."

"Nyi Blorong aja. Kan ada nasihat Gorbachev yang endang surendang di sana."

Anak muda yang biasa bermain internet dan *chatting*, dan kelompok eksekutif muda dan mahasiswa, lain lagi istilahnya. Sebenarnya gejala apa ini?

Profesor James Dananjaya, seorang Antropolog dan pakar folklor yang pernah meneliti dan membuat Kamus Bahasa Prokem, dalam bukunya pernah menyatakan bahwa bahasa prokem pada mulanya

adalah bahasa sandi yang dipakai penjahat untuk berkomunikasi agar tidak diketahui pihak yang berwajib di tahun 1960-an. Namun lama-kelamaan penggunaan bahasa ini menjadi meluas dan menjadi bahasa pergaulan anak muda. Maka, fungsinya berubah menjadi pengidentifikasian jati diri. "Kalau gue mau dibilang gaul, harus bisa bahasa gaul", begitu kira-kira. Kalau menurut ilmu sosiolinguistik, memang, setiap kelompok sosial pempunyai ujarannya sendiri yang disebut sosiolek dan dialek.

Menurut Ferdinand de Sous-soure, bapak ilmu bahasa, ujaran-ujaran semacam itu sangat bersifat personal dan susah dipelajari karena berada di luar garis pake... aturan tata bahasa yang resmi. Bila ujaran bahasa gaul disebut *parole*, dan bahasa resmi yang baku disebut langue, maka para linguis seyogyanya hanya berkonsentrasi pada *langue* dan tidak perlu membahas *parole*, karena memang susah untuk dipelajari. Di samping itu, *parole* dinilai lebih rendah dari *langue*. Terbukti adanya slogan "Berbahasa Indonesia-lah yang baik dan benar".

Tapi, *thanks to* posmo dan para pendukungnya, *parole* marak dibicarakan secara ilmiah, dan dinilai sama sahnya dengan *langue*. *Parole* kini tidak berdiri di pinggiran, karena bagi kaum posmo, tidak ada pusat dan pinggir. Dengan kata lain, pemakai ujaran *parole* adalah bentuk perlawanan mereka dari ketertindasan langue yang selama ini dianggap pemilik kebenaran satu-satunya. Penutur bahasa gaul adalah pemberontakan terhadap segala kemapanan dan aturan baku yang beku. Dengan begitu, penurut adalah orang yang kritis dan juga kreatif dalam memperjuangkan identitas dan identifikasi jati diri mereka.

Ngomong-ngomong, bukankah Soeharto sudah sejak lama ber-*parole*-ria?

Ekky al-Malaky

Agenda, 30 Oktober 1999

BAHASA INDONESIA-ISTILAH

KOSAKATA HARI INI

preventif : tindakan pengamanan atau pencegahan sebelum terjadi apa-apa

alokasi dana : pembagian atau penentuan atau penyediaan dana

Contoh: Selama ini upaya *preventif* pembangunan kesehatan di Indonesia kurang mendapat perhatian. Model kebijakan program dan *alokasi dana* banyak diarahkan pada upaya-upaya penyembuhan penyakit yang jumlahnya sangat kecil dibanding manusia yang sehat (dalam berita Universitaria, halaman 7) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

milenium: perhitungan tahun dalam kelipatan seribu

tantangan: hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah

kasus bahasa: soal, perkara atau kondisi khusus yang berurusan dengan bahasa

Contoh: Dikatakan Gianto, menjadi ahli bahasa memasuki *milenium* III penuh dengan *tantangan* karena informasi begitu mudah didapatkan, sejumlah *kasus bahasa* juga bermunculan (dalam Universitaria, halaman 7) **(KR)-o**

Kedaulatan Rakyat, 4 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

ironis: hal yang bertentangan dengan harapan atau yang seharusnya terjadi

kendala: hambatan, halangan

Contoh: *Ironis*nya, dalam perjalanan yang masih terseok-seok ini bukan hanya 6 tuntutan yang dapat terwujud. Tetapi banyak *kendala* yang membuat mereka merasa harus berbuat sesuatu (dalam Universitaria, halaman 5) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 5 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

delegasi: utusan yang dikirim ke sebuah pertemuan besar

walk out: meninggalkan ruangan (bisa karena tidak setuju dengan keputusan atau kebijakan yang diterapkan)

Contoh: Dalam pertemuan yang dilaksanakan di TMII Jakarta tersebut 40 utusan *delegasi* beberapa PT sempat melakukan *walk out* dan menyatakan menolak pengatasnamaan Kongres Mahasiswa Indonesia pada pertemuan tersebut (dalam Universitaria, halaman 5) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 6 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

dimensi: ukuran, matra
direduksi: dikurangi, dipotong (untuk harga)
ad hoc: khusus (dari bahasa Inggris)
Contoh: Memang ada beberapa *dimensi* pendidikan yang tidak dapat *direduksi* dalam kebutuhan *ad hoc* (dalam Universitaria, halaman 7) **(KR)-o**

Kedaulatan Rakyat, 9 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

anti klimaks: kemerosotan atau kemunduran mendadak sampai taraf yang tidak berarti dan amat mengecewakan, juga berlawanan dengan kemajuan yang telah dicapai sebelumnya
mantan: sudah tidak menjabat lagi, bekas (untuk jabatan seseorang)
Contoh: Benar-benar *anti klimaks* penantian panjang masyarakat bangsa terhadap hasil penyelidikan dan penyidikan kasus KKN yang dituduhkan kepada diri *mantan* Presiden Soeharto selama berkuasa (dalam Universitaria, halaman 5) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 13 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

varietas : kelompok tanaman dengan sifat-sifat tertentu
pakar : ahli
Contoh: Bahkan akan lebih baik bila dapat diciptakan *varietas* baru dengan mutu yang jauh lebih baik ... Hal demikian merupakan tantangan bagi para *pakar* terutama bidang pemuliaan tanaman (dalam Universitaria, halaman 5) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 14 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

paradigma: kerangka berpikir
relevansi: hubungan
relevan: sesuai dengan kebutuhan
revisi silabus: perbaharuan kurikulum
Contoh: Yang kedua adalah *paradigma relevansi*. "Agar *relevan* perkembangan zaman yang demikian cepat berubah, lakukan *revisi silabus* atau kurikulum supaya sesuai dengan perkembangan di luar (dalam Universitaria, halaman 7) **(KR)-z**

Kedaulatan Rakyat, 16 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

gerabah: kerajinan (tradisional) bahannya dari tanah liat
inovasi: pembaharuan, mencari bentuk-bentuk baru
Contoh: Keberhasilan perajin *gerabah* di Kasongan Bantul, dalam melakukan *inovasi* sangat ditentukan oleh bentuk jaringan yang ada pada para perajin itu sendiri (dalam Universitas, halaman 7) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 18 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

pemantauan: melakukan pengamatan, penyelidikan, perhatian khusus
anjlok: turun dari suatu ketinggian tertentu
Contoh: Hasil *pemantauan* di pusat penjualan sayuran di Pasar Wonosari, banyak petani yang mengeluh karena *anjlok*nya harga jual sayuran tersebut (dalam berita Ekbis, halaman 5) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 19 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

situasi: keadaan yang tampak
instabilitas: keadaan atau kondisi yang tidak stabil
Contoh: Bahwa dalam *situasi* politik nasional yang cenderung mengarah pada kondisi *instabilitas*, sebagai Panglima TNI Wiranto lebih terpanggil untuk mengemban tugas pokoknya (dalam tajuk rencana, halaman 6) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 20 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

agenda: catatan yang harus dilakukan biasanya sudah terencana atau terjadwal dalam waktu tertentu, acara, kegiatan rutin
urgen: sangat penting, mendesak, dalam keadaan gawat
Contoh: Untuk itu, ada beberapa *agenda* yang *urgen* dikerjakan bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara (dalam artikel Asep Purnama Bahtiar, halaman 6) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 22 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

subsidi: bantuan, sumbangan (biasanya berupa uang)
energi: kekuatan, daya, kemampuan
kompleks: banyak, tersebar dalam satu himpunan
Contoh: *Subsidi energi* yang dibawa manusia ke dalam lingkungan semakin lama semakin bertambah *kompleks* (dalam Universitaria, halaman 7) **(KR)-k**

Kedaulatan Rakyat, 23 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

konsentrasi: pemusatan pikiran
fluktuatif: tidak datar, gejala yang menunjukkan turun dan naik
grafik: lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar, semacam statistik
Contoh: Kemampuan *konsentrasi* manusia sifatnya *fluktuatif*, jika digambarkan akan membentuk *grafik* yang naik turun (dalam Universitaria, halaman 5) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 26 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

mental: bersangkutan dengan batin dan watak menusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga
korup: buruk, rusak, busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, atau dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)
Contoh: Mental *korup* juga menjadi ciri utamanya (dalam artikel Faisal Ismail, halaman 6) **(KR)**

Kedaulatan Rakyat, 27 Oktober 1999

KOSAKATA HARI INI

ikrar: janji yang sungguh-sungguh, sumpah
otomatis: dengan sendirinya
jaminan: tanggungan, janji seseorang untuk menanggung, garansi
Contoh: Toh, meskipun generasi mudanya sudah mencetuskan *ikrar*, tidak secara *otomatis* menjadi *jaminan* terciptanya persatuan dan kesatuan (dalam Tajuk Rencana, halaman 6) **(KR)-z**

Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober 1999

WISATA BAHASA asuhan Syofyan Zakaria

Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

SUDAH sering kita mendengar ungkapan "Bahasa Indonesia yang baik dan benar". Dalam dunia pengajaran di sekolah, guru-guru menyusun Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang di dalamnya tercantum Tujuan Instruksional Umum (TIU) pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam TIU itu antara lain dicantumkan bahwa tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah diarahkan kepada keterampilan siswa agar dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; baik secara lisan maupun secara tertulis. Penyuluhan bahasa Indonesia melalui media massa maupun secara tatap muka, selalu berpegang kepada "Bahasa Indonesia yang baik dan benar" itu.

Apakah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu?

Bahasa Indonesia dikatakan "baik" apabila bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, orang yang berbicara, serta tepat bahasa itu digunakan.

Bahasa Indonesia dikatakan "benar" apabila bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa menyangkut masalah susunan kalimat (sintaksis), bentuk kata (morfologi), pilihan kata (diksi), serta lafal pada bahasa lisan, dan ejaan pada bahasa tertulis.

Dengan demikian, bahasa yang baik dan benar itu selain tetap memperhatikan kaidah bahasa, juga bergantung kepada situasi serta tempat pembicaraan itu berlangsung.

Sebagai contoh, saya pergi ke pasar dan melihat buah mangga yang besar dan kuning dijual orang. Saya tertarik, dan menawarnya. Kemudian terjadilah percakapan berikut.

+*"Berapakah harga mangga ini satu kilogram?*
-*"Sepuluh ribu, Pak."*
+*"Bolehkah saya menawarnya enam ribu rupiah?"*
-*"Kalau beli banyak, boleh delapan ribu."*
+*"Saya hanya akan membeli dua kilogram saja."*

Bagaimana pendapat Saudara mendengar percakapan seperti itu di pasar? Kalimat-kalimat yang saya ucapkan kepada penjual mangga itu "benar" sekali. Kalimat itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Susunan kalimat serta pilihan katanya betul. Jadi, bahasa Indonesia yang saya gunakan "benar".

Akan tetapi, bahasa yang saya gunakan dalam situasi tawar-menawar itu terasa janggal. Saya menggunakan bahasa yang tidak cocok dalam situasi itu di pasar dan di tempat orang tawar-menawar. Bahasa Indonesia yang saya gunakan "tidak baik" karena dalam bahasa percakapan ketika tawar-menawar di pasar saya tidak perlu menyusun kalimat dan menggunakan pilihan kata seperti di atas.

Kalimat-kalimat saya sebenarnya cukup begini.

+*"Berapa satu kilo, Pak?"*
+*"Enam ribu boleh?"*
+*"Saya beli dua kilo saja!"*

Jadi, bahasa yang "benar" belum tentu "baik".

Dalam sebuah diskusi ilmiah, seorang pembicara berkata, *"Setelah melihat perbedaan yang signifikan antara kedua pembicara, saya mengajak forum ini untuk menetapkan lebih dahulu prinsip-prinsip materi yang akan didiskusikan."*

Bahasa yang diucapkan peserta diskusi di atas adalah bahasa yang "baik dan benar". Bahasanya "benar" dengan menggunakan kaidah bahasa yang benar. Juga bahasanya "baik" karena sesuai dengan situasi diskusi ilmiah.

Bagaimana pula bahasa yang diucapkan orang ini?

Besok saya ke Jakarta tapi uang saya tidak cukup. Boleh saya pinjam uangmu?

Bahasa yang digunakan orang itu "baik" tetapi "tidak benar". Ada kata-kata yang kurang, ada kata yang belum sempurna, dan imbuhan yang dihilangkan begitu saja. Kaidah bahasa Indonesia tidak terpenuhi.

Seharusnya dia berkata, *"Besok saya pergi ke Jakarta, tetapi uang saya tidak cukup. Boleh saya meminjam uangmu?"*

Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tertulis ada pula bedanya. Dalam ragam bahasa lisan lafal atau ucapan kata demi kata.***

Pikiran Rakyat, 3 Oktober 1999

WISATA BAHASA asuhan Syofyan Zakaria

Kekhususan Awalan me- dan Awalan pe- (2)

AWALAN *me-* seperti uraian yang lalu adalah awalan pembentuk kerja. Artinya, kata jenis lain kalau diberi awalan *me-* akan menjadi kata kerja.

Contoh:
rokok (kata benda) ---> merokok
gergaji (kata benda) ---> menggergaji
tinggi (kata keadaan) ---> meninggi
susah (kata keadaan) ---> menyusahkan
dua (kata bilangan) ---> mendua (hati)
tujuh (kata bilangan) ---> menujuh (hari)
aduh (kata seru) ---> mengaduh*

Sekarang kita bicarakan awalan *pe-*. Seperti halnya awalan *me-*, awalan *pe-* ini juga menimbulkan persengauan jika diikuti oleh kata lain. Persengauan pada awalan *pe-* sama betul dengan bersengauan pada awalan *me-*

me- --- *pe-*
mem- --- *pem-*
men- --- *pen-*
meny- --- *peny-*
meng- --- *peng-*
menge- --- *penge-*

Fonem awal yang menimbulkan persengauan pada awalan *pe-* itu sama betul dengan fonem awal pada awalan *me-*.

Contoh:
1. *me*lawan --- *pe*lawan
   *me*makan --- *pe*makan
   *me*nasihati --- *pe*nasihat
   *me*mukul --- *pe*mukul
   *me*nyanyi --- *pe*nyanyi
2. *mem*bawa --- *pem*bawa
   *mem*fitnah --- *pem*fitnah
   *mem*ukul --- *pem*ukul
   *mem*veto --- *pem*veto
3. *men*curi --- *pen*curi
   *men*dorong --- *pen*dorong
   *men*jual --- *pen*jual
   *men*inju --- *pen*inju
   *men*ziarahi --- *pen*ziarah
4. *men*yuruh --- *pen*yuruh
5. *meng*ambil --- *peng*ambil
   *meng*ekor --- *peng*ekor
   *meng*ulai --- *peng*gulai
   *meng*hasut --- *peng*hasut
   *meng*acau --- *peng*acau
   *meng*khianati --- *peng*hianat
6. *menge*cat --- *penge*cat
   *menge*las --- *penge*las
   *menge*bom --- *penge*bom

Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa awalan *me-* adalah awalan kata kerja atau pembentuk kata kerja, sedangkan awalan *pe-* adalah kata benda atau pembentuk kata benda.

Contoh:
tulis (kata kerja) ---> penulis
lempar (kata kerja) ---> pelempar
tembak (kata benda) ---> penembak
malas (kata keadaan) ---> pemalas
takut (kata keadaan) ---> penakut
diam (kata keadaan) ---> pendiam

Kebanyakan arti awalan *pe-* itu adalah kata benda yang menunjukkan "alat" atau kata benda yang menunjukkan "orang yang melakukan kerja".

Penjahit = alat untuk menjahit
(Untuk menjahit kasur digunakan *penjahit* yang ukurannya besar.)
penjahit = orang menjahit
(*Penjahit* di depan rumah kami terkenal karena jahitannya bagus.)***

RALAT Berhubungan ada kesalahan teknis, tulisan *Kekhususan Awalan me dan Awalan pe* bagian kedua baru bisa dimuat sekarang. Atas kesalahan tersebut, kami mohon maaf.

Pikiran Rakyat, 10 Oktober 1999

ULASAN BAHASA & BUDAYA

Bentuk Cis, Cih, Idih, Lo, dan Alkisah

Rubrik ini terbuka bagi pembaca. Kirimkan masalah dan pertanyaan Anda, langsung ke e-mail pengasuh <kunjana@indosat.net.id> atau via pos atau faksimile *Media Indonesia* (021) 5812102/5812105.

Oleh
Dr. R. Kunjana Rahardi M. Hum.

TATA TULIS BAKU

Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata tertentu yang diperlakukan sebagai kata.

Contohnya: Akabri (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), TNI (Tentara Nasional Indonesia), SIM (Surat Izin Mengemudi), Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), tilang (bukti pelanggaran), pemilu (pemilihan umum), rapim (rapat pimpinan), raker (rapat kerja), radar (radio detecting and ranging)

LEWAT e-mail, Sdr Daniswara menanyakan pemakaian bentuk "cis, cih, lo", dan "alkisah" yang sering ditemukan dalam cerita pendek maupun buku novel. Dalam hal apa bentuk-bentuk itu dapat dipakai, apa maksudnya, dan apa kelas katanya (kalau ada).

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa berdasarkan peranannya dalam kalimat, kata dapat dibedakan menjadi dua, yakni kata penuh (*full word, content word*) dan kata tugas (*function word*). Kata penuh sering disebut kata leksikal (lexical word). Dikatakan begitu karena kata tersebut memang memiliki makna leksikal. Adapun kata tugas tidak memiliki makna leksikal melainkan memiliki makna gramatikal.

Jadi, kata tugas itu akan diketahui maknanya apabila dipakai bersama kata lainnya dalam sebuah frase atau kalimat. Berbeda dengan kata tugas, kata penuh atau kata leksikal tanpa harus disertai kata lain sudah dapat memiliki makna sendiri.

Dalam bahasa Indonesia, kata penuh mencakup verba, adjektiva, adverbia, dan nomina —termasuk di dalamnya numeralia dan pronomina. Adapun kata tugas terdiri dari preposisi, konjungsi, interjeksi, artikel, dan partikel.

Bentuk "cis, cih, lo", dan "alkisah" yang

Sdr Daniswara tanyakan termasuk dalam kelompok kata tugas ini. "Cis, cih", dan "lo" termasuk dalam kelas kata seru atau interjeksi, sedangkan "alkisah" termasuk kelas kata sambung atau konjungsi.

Interjeksi adalah kata tugas yang berfungsi mengungkapkan nilai rasa atau perasaan hati seseorang. Karena berkenaan dengan nilai rasa, kata ini sering disebut kata afektif, kata emotif, atau kata ekspresif.

Untuk mengungkapkan rasa jengkel orang bisa menggunakan bentuk "breksek" di awal frase atau kalimat yang mengungkapkan kejengkelannya itu. Orang menggunakan bentuk "idih" di depan frase atau kalimat yang mengungkapkan makna ejekan itu.

Berdasarkan maksudnya, interjeksi dapat dibedakan menjadi empat, yakni yang bernada (a) negatif, (b) positif, (c) keheranan, dan (d) netral. Interjeksi yang bernada negatif contohnya adalah "cih, cis, bah, ih, idih, breksek, sialan", sedangkan yang bernada positif contohnya adalah "syukur, insya Allah, alhamdulillah, asyik, amboi, aduhai". Interjeksi yang bernada keheranan contohnya adalah "ai, lo, astagfirullah, masyaallah", sedangkan yang bernada netral contohnya "ayo, hai, halo, he, wahai, astaga, wah, nah, ah, eh, oh, ya, aduh, hem".

Dengan demikian, pertanyaan bagian pertama yang menyangkut bentuk "cih, cis, idih, lo" dapat dilihat penjelasannya pada uraian di atas. Keempat-empatnya tergolong kata tugas dengan interjeksi atau seru sebagai kelas katanya. "Cih, cis, idih" termasuk interjeksi yang bernada negatif, sedangkan "lo" bernada keheranan.

Contohnya di dalam kalimat berturut-turut adalah sebagai berikut: (1) "Cih, tidak sopan sudah ditolak berani datang lagi"; (2) "Cis, jijik aku mendengarkan rayuan gombalmu"; (3) "Idih, giginya sudah tumbuh dua lagi"; dan (4) "Lo, perutmu sekarang sudah jadi besar sekali."

Berbeda dengan keempat bentuk di atas yang semuanya merupakan interjeksi, "alkisah" termasuk kelas kata sambung atau konjungsi. Konjungsi dapat dibedakan menjadi lima, yakni (a) konjungsi koordinatif seperti "dan, atau, tetapi"; (b) konjungsi subordinatif seperti "selagi, manakala, andaikan, agar, kendatipun, seperti, karena, sampai-sampai, bahwa, dengan"; (c) konjungsi korelatif seperti "baik...maupun..., tidak hanya... tetapi juga..., demikian rupa... sehingga..., entah...entah..., jangankan..., ...pun..."; (d) konjungsi antarkalimat seperti "sesudah itu, walaupun, lagi pula, sebaliknya, dengan demikian, sebelum itu, bahkan"; dan (e) konjungsi antarparagraf seperti "mengenai, dalam pada itu, adapun, akan hal, alkisah, arkian, syahdan, sebermula".

Empat macam bentuk konjungsi antarparagraf yang disebut terakhir, yakni "alkisah, arkian, syahdan, sebermula" tergolong arkhais atau kuno dan sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kalaupun ada, bentuk-bentuk itu digunakan pada karya-karya sastra lama seperti cerita pendek dan buku novel yang kebetulan Sdr. Daniswara baca itu.

Contohnya di dalam kalimat berturut-turut adalah sebagai berikut: (a) "Alkisah maka pada masa lalu pedukuhan Klampis Ireng dipimpin oleh Kyai Semar Nayantaka"; (b) "Arkian Kyai Nayantaka yang bijaksana itu bisa berubah rupa menjadi gandarwa"; (c) "Syahdan ketika itu datanglah Begawan Drona ke Negeri Amarta"; (d) "Sebermula pada zaman dahulu kala lahirlah seorang putri yang molek rohannya bernama Dewi Ambika".

Jadi jelas bahwa "alkisah" yang Saudara tanyakan termasuk dalam kelas kata sambung atau konjungsi antarparagraf yang berciri arkhais.***

Media Indonesia, 11 Oktober 1999

WISATA BAHASA asuhan Syofyan Zakaria

Tanda Hubung pada Ejaan

TANDA hubung (-) merupakan salah satu bagian dalam sistem ejaan yang berlaku sekarang, yaitu Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Yang dimaksud dengan tanda hubung adalah garis pendek yang biasa dipakai untuk menghubungkan atau menyambung suku-suku kata yang terpisah. Biasanya suku kata itu terpisah oleh pergantian baris.

Contoh :

Harian *Pikiran Rakyat* yang terbit di Bandung *su-dah* berusia lebih dari 33 tahun.

Dalam memisahkan suku kata itu harus pula diingat bahwa suku kata yang dipisahkan itu *tidak boleh* terdiri atas satu vokal saja yang diletakkan di baris atas atau di baris bawah.

Contoh :

a. Pada waktu ini banyak orang tua kaya yang *i-ngin* menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

b. Kalau engkau bekerja di tempat itu, mau tak *ma-u* engkau harus berdisiplin.

Kalau terjadi hal seperti di atas usahakanlah agar sebuah vokal yang ada di baris atas dipindahkan saja ke baris bawah sehingga kata *ingin* ditulis utuh. Begitu pula kata *mau* harus ditulis utuh. Penempatannya boleh di baris atas seluruhnya atau di baris bawah seluruhnya.

Tanda hubung menyambung awalan dengan kata dasar atau kata dasar dengan akhiran pada pergantian baris.

Contoh :

a. Kalau uang sudah sampai, kami akan segera *me-ngirimkan* barang yang Saudara pesan.

b. Kedua suami-istri itu sudah lama *meng-inginkan* anak laki-laki karena anak mereka perempuan semua.

c. Para kepala keluarga hadir pada upacara *peletak-an* batu pertama kantor RW.

D. Ibu menyuruh anaknya segera *meletak-kan* piring itu di atas meja.

Selain pada pergantian baris, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang.

Contoh :

anak-anak
bermain-main
berkejar-kejaran
tangkap-menangkap

Tanda hubung menyambung huruf demi huruf kata yang dieja dan bagian-bagian tanggal.

Contoh :

p-r-o-k-l-a-m-a-s-i
17-8-1945

Tanda hubung *boleh* dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan.

Contoh :

be-ruang (mempunyai ruang)
ber-uang (mempunyai uang)
tiga puluh dua-pertiga (30 2/3)
tiga-puluh-dua pertiga (32/3)

Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan 9i) awalan *se-* dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, (ii) awalan *ke-* dengan angka, (iii) angka dengan akhiran *-an,* dan (iv) singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan.

Contoh :

se-Jawa Barat
pemain ke-2
tahun 80-an
mem-PHK-kan
sinar-X

Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing.

Contoh :

di-*smash*
pen-*tackle*-an.***

Pikiran Rakyat, 12 Oktober 1999

WISATA BAHASA asuhan Syofyan Zakaria

Memanfaatkan Tanda Hubung (-)

BAHASA ragam tulis memang agak sulit dibandingkan dengan bahasa ragam lisan. Pada ragam tulis kita harus berhati-hati sekali dalam menyusun kalimat supaya kalimat yang kita susun jelas dan komunikatif. Pada bahasa lisan kita dibantu oleh lafal dan intonasi sehingga bahasa yang kita ucapkan cepat ditangkap si pendengar sesuai dengan maksud kita yang berbicara. Kalau kalimat itu ditangkap oleh pendengar persis sama dengan maksud si pembicara, itu berarti kalimat yang diucapkan itu adalah kalimat yang komunikatif.

Susunan kata yang sama tetapi diucapkan dengan intonasi yang berbeda akan menimbulkan makna yang berbeda. Susunan kata seperti di bawah ini kalau diucapkan dengan intonasi yang berbeda akan menimbulkan makna yang berbeda pula.

(dia anak orang kaya)

Apabila susunan kata itu diucapkan dengan intonasi kalimat berita, maknanya akan sama dengan kalimat tertulis berikut.

Dia anak orang kaya.

Tanda titik pada akhir kalimat menunjukkan kalimat itu kalimat berita.

Akan tetapi, jika kalimat itu diucapkan dengan intonasi kalimat tanya, maknanya akan sama dengan makna kalimat tertulis berikut.

Dia anak orang kaya?

Tanda tanya pada akhir kalimat, mengubah makna kalimat menjadikalimat tanya.

Pada contoh di atas, bahasa tertulis mempunyai tanda titik (.) dan tanda tanya (?) untuk membedakan kedua kalimat itu.

Tanda baca pada ejaan merupakan tanda yang sangat penting guna membantu para penulis dalam menyusun kalimat. Gunanya supaya makna kalimat yang dibaca oleh orang lain itu sama dengan makna kalimat yang dimaksud oleh penulis. Jadi, supaya kalimat itu menjadi kalimat efektif.

Salah satu tanda baca dalam sistem EYD adalah tanda hubung (-) berupa garis pendek yang diletakkan di antara dua kata atau dua unsur kata.

Kalimat "Kami menyerahkan dua karung beras kepada panitia." dapat menimbulkan makna yang berbeda. Kalimat itu ternyata bukanlah kalimat yang efektif karena mempunyai makna ganda atau maknanya dua.

Pertama, yang kami serahkan adalah "beras" dua karung.

Kedua, yang kami serahkan adalah "karung beras" dua buah.

Kedua makna itu akan kita jumpai jika yang membaca kalimat itu salah menggunakan intonasi serta jeda dalam kalimat.

Untuk menjadikan kalimat itu kalimat efektif, penulis hendaklah mengubah susunan kalimat itu, atau menggunakan tanda baca yang tepat.

a. Susunan kalimat diubah:

Kami menyerahkan beras dua karung kepada panitia.

b. Menggunakan tanda baca:

Kami menyerahkan dua-karung beras kepada panitia.

Tanda hubung (-) adalah tanda dalam sistem ejaan yang sangat besar gunanya guna menghindarkan kalimat bermakna ganda.

Para penulis pemula kadang-kadang agak kesulitan membuat kalimat efektif. Mereka berpikir apabila kata-kata sudah disusun sesuai dengan fungsi (jabatan) kalimat maka kalimat itu sudah beres.

Anggapan demikian tentu tidak tepat karena bahasa Indonesia tidak mempunyai alat untuk menandai jabatan kalimat itu. Bahasa Indonesia hanya mengandalkan "letak kata" dalam susunan kalimat tertulis untuk menentukan jabatan dan maknanya.

Kesulitan itu akan terlihat jelas apabila salah satu jabatan kalimat itu berupa sebuah frase.

Istri prajurit yang setia.....

Siapakah "yang setia" itu? Mungkin "istri"; mungkin pula "prajurit".Itu bergantung kepada intonasi ketika membacanya. Jadi, terserah kepada pembaca. Dua orang pembaca yang membacanya dengan intonasi yang berbeda, akan mendapatkan dua makna yang berbeda pula.

Kalau dia membacanya "Istri prajurit // yang setia...", maka "istri"-lah yang setia. Akan tetapi, kalau dia membaca "Istri // prajurit yang setia....", tetu "prajurit"-lah yang setia itu.

Buah ini paling tidak dapat dimakan.

Kalimat itu juga bermakna ganda. Hal itu akan lebih kentara jika dibaca dengan intonasi yang berbeda:

1). Buah ini // paling tidak // dapat dimakan.

2). Buah ini // paling tidak dapat // dimakan.

Kalimat nomor 1) sama artinya dengan kalimat "Buah ini setidak-tidaknya dapat dimakan".

Kalimat nomor 2) sama artinya dengan kalimat "Buah ini sangat tidak dapat dimakan."

Kalau penulis memanfaatkan tanda hubung, kesalahpahaman tidak akan terjadi. Kalimat-kalimat itu ditulis sebagai berikut.

Istri-prajurit yang setia...

Istri prajurit-yang-setia....

Buah ini paling-tidak dapat dimakan.

Buah ini paling tidak-dapat dimakan. **

Pikiran Rakyat, 24 Oktober 1999

RUANGAN

BAHASA KITA - BAHASA INDONESIA

印度尼西亞語文園地

DIASUH OLEH: DRS. FARID HADI

PELAJARAN KE-2027

(2) Ia memandangku { sebentar. / sejenak. / sepintas. / sekilas. / sekejap. / sejurus. }

(3) Bacalah { sebentar / sejenak / sepintas / *sekilas / *sekejap / *sejurus } halaman tu- juh belas itu

(4) Budi { berhenti / bepikir / tertegun } { sebentar / sejenak. / *sepintas. / sekilas. / *sekejap. / sejurus. }

(5) a) { Sebentar, / *Sejenak, / *Sepintas, / *Sekilas, / *Sekejap, / *Sejurus, } ya!

b) { Sebentar, Sejenak, Sepintas, Sekilas, Sekejap, Sejurus } saja

c) Coba ke sini { sebentar!, *sejenak!, *sepintas!, *sekilas!, *sekejap!, *sejurus! }

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa keenam kata itu tidak selalu dapat dipakai pada setiap bentukan kalimat. Mengapa demikian?

Bagaimana cara membedakan pemakaian kata-kata itu?

Sekurang-kurangnya ada empat cara yang dapat digunakan untuk melihat perbedaan pemakaian keenam kata itu, yaitu

1) dengan mengamati jenis verba (kata kerja) yang didampingkan dengan setiap kata di antara kata itu, misalnya verba yang menyatakan tindakan yang dilakukan mata *(melihat, memandang, dan menyaksikan)* atau verba yang berkaitan dengan aktivitas tubuh *(berhenti, tertegun,* dan *diam);*
2) dengan mengamati jenis-jenis bangun kalimat yang menggunakan setiap kata di antara keenam kata itu, misalnya bangun kalimat deklaratif (kalimat berita) atau bangun kalimat impertif (kalimat perintah);
3) dengan mengamati makna semantis kata-kata itu;
4) dengan mengamati ragam bahasa yang menggunakan kata itu, misalnya ragam tulis atau ragam lisan, ragam resmi atau ragam tak resmi.

Sebantar dan sejenak

Dari contoh-contoh yang disajikan di atas, ternyata kata *sebentar* dan *sejenak* hadir dalam contoh 1–4. Akan tetapi, di antara kedua kata itu, kata sebentar memiliki peluang paling besar dalam pemakaiannya, apalagi dalam ragam lisan atau ragam tak resmi, lihat contoh (5), kata sebentar kecil kemungkinannya dapat diganti dengan kata sejenak.

Sekejap dan sekilas

Kedua kata ini, *sekejap* dan *sekilas*, cenderung hanya dapat didampingi dengan verba yang berkaitan dengan indera penglihatan seperti memandang, melihat, dan tampak, misalnya.

(6) a) Orang itu memandang *sekejap/sekilas.*
b) Orang tua itu menghilang dalam *sekejap* mata.

c) *Sekilas* tampak bayangan wajahnya.

Sepintas

Kata *sepintas* tampaknya dapat didampingkan dengan verba yang berkaitan dengan indera penglihatan *(memandang)*, verba kesadaran *(merenung)*, dan verba komunikasi *(berbicara)*, serta verba yang berkaitan dengan indera pendengaran, misalnya:

(7) a) "Mungkin saja hal itu terjadi," pikirnya *sepintas* lalu.

b) Ia terlibat dalam percakapan *sepintas*.

c) *Sepintas* (lalu) saya pernah melihat tontonan sulap itu.

d) Saya mendengar siaran berita *sepintas* (lalu).

Dalam bangun kalimat imperatif (kalimat perintah), kata *sepintas* tampak janggal digunakan jika didampingkan dengan verba kesadaran dan verba yang berkaitan dengan indera pendengaran. Perhatikan contoh berikut.

(8) a) *Dengarkanlah nyanyian itu *sepintas*!

b) *Pikirkanlah masalah itu *sepintas*!

Kejanggalan itu timbul karena, secara semanis, kata *sepintas* itu bermakna 'sepenggal' atau 'sepotong'. Oleh karena itu, kata *sepintas* sangat mungkin didampingkan dengan verba yang menyangkut indera penglihatan *(bacalah, amatilah,)* dalam bangun kalimat imperatif misalnya:

(9) a) Bacalah halaman 17 itu *sepintas*!

b) Amatilah lukisan itu *sepintas*!

Sejenak

Kata *sejenak* lebih luas kemungkinan perangkainnya daripada kata *sekejap, sekilas,* dan *sepintas*. Kata *sejenak* menggambarkan ketenangan ketaktergesaan atau ketak-tegangan. Oleh karena itu, kata *sejenak* dapat dirangkaikan dengan verba seperti *bergembiralah, nikmatilah, duduklah, bacalah,* lihat contoh (10) atau verba seperi *renungkan, pandanglah, amatilah, dengar-kan, pikirkan,* lihat contoh (11) yang menggambarkan suasana tenang, tanpa ketegangan.

(10) a) Bergembiralah sejenak bersama kelompok lawak itu.

b) Nikmatilah sejenak sajian musik itu.

c) Duduklah sejenak sambil menikmati hidangan sekedarnya.

d) Bacalah sejenak cerpen itu.

(11) Coba { renungkan / pandanglah / amatilah / dengarkan / pikirkan } sejenak/sebentar.

(BERSAMBUNG)

Harian Indonesia, 11 Oktober 1999

Saran untuk Padanan 'Prepaid'

SAYA tertarik dengan persoalan yang dikemukakan oleh BH Hoed pada *MI*, 27 September 1999 tentang terjemahan *prepaid* menjadi *prabayar*. Ini memang salah kaprah. Kalau dibiarkan, kita menjadi kehilangan ungkapan untuk menamai konsep sesuatu yang terjadi sebelum dilakukan pembayaran. Misalnya, penyerahan barang yang dibeli sebelum pembeli membayar harga barang itu sebetulnya dapat disebut penyerahan prabayar.

Sebetulnya para pakar dari Pusat Bahasa dan Telkom pernah membahas upaya pelurusan istilah *prepaid* yang telanjur diindonesiakan menjadi *prabayar*. Hanya, jalan keluarnya agaknya tidak memuaskan atau, kalau mengikuti ulasan pengasuh rubrik ini, tidak layak pasar. Hal itu disebabkan, antara lain, panjangnya istilah pengganti, yaitu *kartu bayar di muka*, yang kalau dipendekkan menjadi *kartu bayar muka* pun malah dapat menimbulkan tafsiran yang kurang mengena.

Di sini saya mengusulkan terjemahannya menjadi *purnabayar*. Kata *purnabakti* artinya sudah sepenuhnya berbakti atau selesai menjalankan bakti, *purnakarya* artinya sudah sepenuhnya berkarya atau selesai melaksanakan karya. Dengan demikian, *purnabayar* artinya sudah selesai melakukan pembayaran. Lebih panjang satu suku kata dari *prabayar*, tetapi perubahannya tidak jauh dan artinya lebih tepat.

Selain itu, saya ingin menanggapi ulasan pengasuh rubrik ini yang tidak konsisten. Di satu pihak dikatakan kita perlu menghindari pemerkosaan lewat penerjemahan yang tidak tepat (contoh yang diberikan *public relations* menjadi *hubungan masyarakat*, tetapi di pihak lain membenarkan *prepaid* menjadi *prabayar* hanya demi pertimbangan pemasaran.

Pengasuh memberi contoh lain tentang diabaikannya istilah dalam penamaan tidak saya gunakan karena dapat ditafsirkan secara salah kesepadanan makna dalam menerjemahkan nama perumahan. Hendaknya dibedakan antara pengindonesiaan nama diri atau nama produk yang semata-mata menjadi urusan pemiliknya dengan pengindonesiaan istilah. Perubahan nama itu tidak harus mempertimbangkan kesepadanan makna. Liem Sioe Liong boleh menjadi Sudono Salim. Nama toko, merek dagang, perumahan yang diubah dari asing ke Indonesia juga tidak harus berpegang kesamaan makna, tetapi bagaimanapun juga tidak terlepas dari kepatutan linguistik, apalagi kepatutan sosial. Misalnya, saya tidak dapat membayangkan ada orang yang akan menggunakan nama *Xm2uys?twyspp* untuk tokonya.

Istilah memerlukan kecermatan makna karena digunakan oleh banyak orang. Kata *prepaid* adalah salah satu contohnya. Kata ini tidak menjadi monopoli produsen kartu telepon sebab kalangan lain, bahkan yang tidak berkaitan dengan urusan telepon, mungkin saja menggunakannya. Yang boleh dimonopoli adalah merek atau nama kartu itu. Produsennya boleh menamai Mentari, Merpati, Merapi, Surya, atau apa pun. Supaya tidak terjadi "pemerkosaan", marilah kita terjemahkan *prepaid* menjadi *purnabayar*.

C RUDDYANTO
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Monash
12/9 Browns Rd, Clayton, VIC 3168, Australia

Media Indonesia, 1 Oktober 1999

Yang Benar: "Mengentaskan dari Kemiskinan"

Mengentaskan Kemiskinan Mengangkat Kemiskinan

BANDUNG, (PR).-

Seiring dengan dimasukinya era reformasi yang dipelopori mahasiswa dengan dukungan sejumlah pihak, ternyata dari segi kebahasaan terjadi bias makna yang mengakibatkan dampak perubahan sosial.

Hal itu ditegaskan Prof.Dr.Hj.T.Fatimah Djajasurdarma dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar madya dalam Semantik dan Dialektologi pada Fakultas Sastra Unpad, Sabtu (2/10).

"Bias makna itu antara lain dapat kita amati dari ekspresi *mengentaskan kemiskinan* mempunyai dampak sosial," katanya.

Kata "mengentaskan" berarti mengangkat. Dengan demikian mengentaskan kemiskinan sama dengan mengangkat kemiskinan."Hal tersebut selalu muncul sebelum era reformasi, dengan dampak kemiskinan merebak di seluruh tanah air. Sebenarnya kesalahan ada pada makna kata atau memang merupakan hukuman karena salah berbahasa. Sebab ekspresi yang benar adalah 'mengentaskan dari kemiskinan' dengan acuan positif *mengangkat dari kemiskinan*,"jelasnya.

Bagian keseharian

Fatimah mempertanyakan apakah kecermatan hanya (perlu) dimiliki para peneliti bahasa? Padahal kesalahan mengungkapkan atau memakai bahasa memungkinkan membiaskan makna dan berdampak negatif.

Pada dasarnya, lanjut dia, setiap situasi dapat diamati dari segi bahasa, karena bahasa bagian keseharian manusia, sedangkan peristiwa merupakan keseharian sastra. Bahasa dapat dikemas ke dalam leksikon (kamus), dan peristiwa ke dalam karya sastra.

Situasi dewasa ini menuntut para ilmuwan untuk memikirkan arah langkah reformasi ke dalam maupun keluar melalui bidang ilmu masing-masing.

Pentingnya peran dan fungsi bahasa tergambarkan pada kenyataan yang menunjukkan persatuan bangsa Indonesia direkat oleh bahasa. Sejarah membuktikan, Bahasa Indonesia menjadi identitas bahasa dan budaya Indonesia. "Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928, dan di sini berkat bahasa kita mempunyai alat perekat bangsa demi persatuan dan kesatuan".

Melalui Sumpah Pemuda, bahasa berinteraksi secara erat dengan masyarakat dan kebudayaan. Dalam hal itu bahasa berfungsi lebih dari struktur dan semantisnya, mempunyai tempat utama dan menentukan eksistensi bangsa.

Dalam kalimat *Kami putera puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*, memperlihatkan fungsi eksternal bahasa sebagai alat persatuan, bukan sekadar alat berkomunikasi!***

Pikiran Rakyat, 5 Oktober 1999

Kembalikan Bahasa ke Fungsi Semula

Jakarta, Kompas

Fungsi bahasa Indonesia yang selama 30 tahun terakhir menjadi bahasa dan alat penguasa, sudah waktunya segera dikembalikan ke fungsi dan posisi semula, yakni sebagai simbol, alat komunikasi (memahami dan menyatakan pikiran, perasaan) serta alat berpikir. Demikian seruan ahli komunikasi Prof Dr A Muis dan sejarawan Dr Anhar Gonggong. Keduanya dihubungi *Kompas* secara terpisah hari Senin (4/10) di Jakarta dan Ujungpandang.

Mendudukkan bahasa pada fungsi semula dipandang penting dan mendesak dilakukan, sebab selama ini bahasa Indonesia telah menjadi bahasa dan alat kekuasaan. Posisi seperti itu haruslah segera dikembalikan lagi; jika tidak, menurut Anhar Gonggong, ia akan menghambat upaya demokrasi yang sedang diupayakan terjadi atas bangsa ini. "Adalah sangat tidak mungkin kita menginginkan demokrasi namun bahasa yang digunakan masih berpihak kepada penguasa yang jelas tidak menunjukkan simbol demokratisasi itu sendiri," katanya.

Dalam bahasa lain, Muis menyebut dengan mendudukkan kembali bahasa pada fungsi sebenarnya, dalam politik berarti mengubah budaya komunikasi politik dari *top down* ke *bottom up*. Awal mulainya pemerintahan baru dinilainya bisa menjadi momen memulai upaya itu, terutama oleh para wakil rakyat yang kini tengah bersidang.

Menurut keduanya, media massa, kalangan eksekutif dan legislatif sangat berperan dalam memulai upaya mengembalikan fungsi bahasa Indonesia. "Kalau mengritik, gunakanlah bahasa kritik yang baik dan sopan. Media pada dasarnya juga menjadi alat mendidik. Dengan bahasa yang baik dan tepat, apa yang dimaksudkan akan dengan mudah dan cepat dipahami," ujar Anhar.

Di sisi lain, Muis mengingatkan soal masih seringnya pejabat mengumbar kata-kata kasar seperti menyebut orang lain 'kurang ajar', juga bersikap tak sopan kepada wartawan yang ditunjukkan seorang pejabat tinggi di era reformasi. "Sebaiknya kebiasaan seperti itu tidak terjadi lagi, karena bahasa verbal lebih tajam daripada tulisan, langsung ke telinga pendengar," tuturnya.

Sepanjang pengamatan Muis, yang juga pengajar di Program Pascasarjana Universitas Hasa-

nuddin dan Universitas Indonesia, selama sekitar dua tahun ini sudah terjadi perubahan wacana atas bahasa Indonesia sampai 50 persen. Sekali pun demikian, eufemisme masih sering digunakan semisal dalam pidato pejabat. "Coba saja dengar, ditangkap dikatakan diamankan. Eufemisme itu tetap perlu, sebab ia bagian dari budaya komunikasi tetapi jangan berlebihan," tuturnya.

Pendapat berbeda dikemukakan Anhar Gonggong yang mengaku memang tidak secara amat intensif mengikuti perkembangan pemakaian bahasa Indonesia di media massa. Dikatakan, tampaknya belum ada perubahan wacana, sebab pada dasarnya tidak mudah mengubah keadaan. Apalagi setelah sekian puluh tahun dari pejabat di atas sampai paling bawah (kepala desa/lurah) terkungkung pada kebiasaan atasannya, yang lalu mereka lakukan juga kepada rakyatnya. Dicontohkannya masih adanya pembedaan pemakaian terhadap kata 'Ibu' dan 'Nyonya'. Dosen sejarah di beberapa perguruan tinggi itu mengingatkan, padahal arti dua istilah itu berbeda, *toh* untuk orang tertentu penyebutannya memakai kata Ibu.

Terbawa eforia

Pada zaman reformasi, perubahan mencolok justru terjadi pada beberapa surat kabar (tabloid baru) yang cenderung menggunakan bahasa yang kasar untuk menghujat, misalnya. "Barangkali mereka itu terbawa oleh eforia politik. Maklum, selama ini terbendung kemudian saat ada kesempatan bagaikan bendungan yang bobol," jelas Muis. Hal seperti itu telah berdampak pada pelanggaran kode etik, sebab pada dasarnya media massa harus tetap mengikuti aturan yang ada pada kode etik jurnalistik. **(tri)**

Kompas, 6 Oktober 1999

Bulan Bahasa dan Nasib Bahasa Indonesia

SETIAP bulan Oktober, kita memperingati Bulan Bahasa dan Sastra. Peringatan semacam ini, pada hemat kita, masih bisa diterima karena akan memberi dampak positif bagi perkembangan bahasa, khususnya sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai alat komunikasi, dan sebagai identitas bangsa. Bahasa, mempunyai tempat yang penting, karena dengan bahasa itulah kita menyampaikan berbagai hal. Dalam kaitan ini, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia.

Tahun ini Bulan Bahasa dan Sastra dibuka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Juwono Sudarsono, Senin (4/10/1999) yang dilaksanakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia di Jakarta. Bulan Bahasa dan Sastra itu sendiri, seperti biasanya, diisi berbagai kegiatan yang bernuansa kebahasaan dan kesastraan. Dengan meletakkan bahasa sebagai fokus, kiranya kita sepakat bahwa menggunakan bahasa Indonesia sebaik-baiknya menjadi semacam kewajiban semua orang Indonesia. Artinya, dengan menggunakan bahasa itu sebaik-baiknya, kita telah ikut melestarikan dan memasyarakatkan bahasa kita. Selain memang sudah sesuai dengan apa yang tersirat dalam Sumpah Pemuda 1928, yakni pada butir berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Tetapi, hendaknya jangan lantas teringat harus menggunakan bahasa yang baik dan benar hanya pada peringatan Bulan Bahasa dan Sastra seperti ini saja. Bulan itu hanya akan menandai, bahwa kita masih memiliki satu perangkat penting, yang bisa dipakai untuk menciptakan kekuasaan bangsa, identitas bangsa, dan peran bangsa. Apa pun eksistensi kita di tengah masyarakat, bahasa adalah faktor yang utama karena kita akan selalu terlibat dalam komunikasi.

Lebih spesifik lagi adalah keterlibatan media massa dalam soal menjunjung bahasa persatuan ini. Tidaklah bisa diabaikan begitu saja. Sebab, media massa itulah yang lebih kerap memasuki kehidupan masyarakat dengan berbagai macam informasinya. Justru masyarakat itu akan bisa memahami informasi — baik sosial, politik, maupun ekonomi — yang disampaikan melalui bahasa. Apalagi sekarang ini kebebasan pers — telah diberikan oleh pemerintah yang dahulu begitu sangat membatasi dan menguasai [illegible]

Bahasa Indonesia, memang telah berkembang pesat. Hampir bisa dipastikan setiap hari ada istilah baru yang muncul, sehingga kamus yang sudah disusun itu bisa saja ketinggalan — karena istilah baru belum sempat dimasukkan ke dalam daftar kosakata. Contoh kongkret, kata *madani*, yang muncul pada era reformasi dan sangat produktif digunakan oleh media massa. Kamus belum memasukkannya dalam daftar kosakata, tetapi masyarakat sudah menggunakan untuk pengertian 'sipil'. Begitu pula dengan istilah lain, yang muncul selaras dengan terjadinya perubahan politik dan transisi politik.

Perkembangan bahasa Indonesia, khususnya dalam kosakata, menarik diperhatikan. Ketika pada gilirannya media massa memasyarakatkan, kita berharap tidak membingungkan masyarakat pemakainya. Kita ingin mengatakan bahwa bagaimanapun media massa itu punya peran besar dalam menjaga bahasa dari penyelewengan penggunaannya. Bahkan diharapkan menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengikuti bahwa apa yang dilakukan media massa itu benar. Namun, tidak selamanya hal tersebut sesuai dengan kenyataannya. Oleh sebab itu, konteks Bulan Bahasa dan Sastra ini juga harus dipahami sebagai alat kontrol.

Alat kontrol itu, ternyata bukan saja ditujukan pada media massa yang dalam banyak hal harus menjadi anutan. Tetapi, terutama kepada tokoh-tokoh panutan. Dahulu, kita menandai bahwa apabila dirinya merasa sebagai pejabat lantas mengucapkan *ken* untuk setiap kata yang seharusnya diucapkan *kan*. Ini diawali oleh Pak Harto, lantas Lurah di pelosok pun ikut-ikutan. Hal-hal semacam ini, perlu diperhatikan, sehingga dalam berbahasa pun juga harus benar.

Dahulu juga ada koreksi yang dilakukan pada pejabat, siapa pejabat yang selalu baik dan benar dalam berbahasa. Tetapi koreksi itu ternyata tidak ditujukan pada kepala negara, sehingga dampaknya tetap saja sama. Masyarakat masih belum bisa benar sesuai dengan harapan. Upaya-upaya semacam ini pada hemat kita sehat, sejauh tujuannya untuk pemberdayaan. Kita memang tidak bisa berharap bahwa orang Indonesia otomatis juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Sebab, pada kenyataannya tidak demikian. Masih terjadi banyak

kesalahan bahasa, sehingga masih perlu ada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau badan-badan lain yang tak jemu-jemunya memberi pembinaan.

Nasib bahasa Indonesia, memang harus ditentukan oleh bangsa Indonesia yang memakai bahasa itu. Era globalisasi, akan banyak ditandai meningkatnya perkembangan kehidupan sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang maju pesat. Dalam hubungan itu kita perlu menyadari, seberapa jauh bahasa Indonesia itu tetap berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi, sarana pendukung kebudayaan nasional, serta sarana pengembangan iptek? Peringatan Bulan Bahasa dan Sastra ini, kiranya tak bisa dianggap remeh. ❑ k

Kedaulatan Rakyat, 7 Oktober 1999

Saatnya Kita Temukan Format Reformasi dalam Politik Kebahasaan

SEPINYA "pintu terbuka" selama Bulan Bahasa di Kantor Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Rawamangun, tak perlu kita cemaskan. Di luar "pintu terbuka", bahasa Indonesia memperoleh suasana segar. Di dalam masyarakat, tempat bahasa Indonesia hidup dan dipakai sebagai sarana komunikasi, mengalami perubahan mendasar.

Di gedung MPR Senayan, dalam kosa kata dan konsep-konsep politik sehari-hari, bermunculan kosa kata baru. *Stembus accoord*, poros tengah, milisi, kita sebut beberapa yang belum ada padanannya secara langsung, dan baru muncul pasca-reformasi. Sementara di luar sudah tak terdengar lagi kosa kata *trade mark* orde kemarin, seperti pembangunan, indoktrinasi, penataran, selaras dan seimbang, dan sebagainya.

Mengapa Bulan Bahasa—sebulan penuh Pusat Bahasa menyelenggarakan pameran kebahasaan di kantornya, Rawamangun—sepi? Kondisi dan inklinasi masyarakat tidak sedang ke persoalan bahasa. Perhatian masyarakat sedang tercurah pada persoalan politik dan ekonomi.

Wacana dan proses pemilihan presiden, nasib ratusan ribu pengungsi Timtim menyusul keputusan penentuan pendapat, skandal Bank Bali, memang tidak langsung menyangkut soal bahasa Indonesia. Wacana persoalan-persoalan besar bangsa di atas, barangkali tidak jadi pembicaraan masyarakat kebanyakan, tetapi dampak dan gemanya menelikung perhatian kita semua.

Ditambah dengan isu-isu akan terjadinya kerusuhan dan perasaan waswas, "pintu terbuka" yang tahun-tahun lalu ditengok banyak pengunjung, sekarang sepi. Hari efektif sekolah sudah pasti tak tercapai. Membawa anak khusus datang ke Rawamangun berarti merelakan satu hari sekolah atau tujuh jam pelajaran hilang. Belum lagi "konsentrasi" puluhan anak di satu tempat, bisa jadi pemicu tawuran pelajar—fenomen anak sekolah Jakarta, selain narkoba dan pergaulan tidak sehat lainnya.

GAMBARAN sepintas di atas menunjukkan suasana umum psikologi masyarakat, salah satu sebab sepinya "pintu terbuka" Bulan Bahasa. Gambaran di atas bukanlah pembenaran dan jawaban satu-satunya. Sebab, di tengah hiruk-pikuk SU MPR dengan fokus terakhir pemilihan presiden, tetap kita lihat cukup ramai dan gemplta kegiatan-kegiatan kese-

nian, bahkan pementasan karya-karya klasik serta eksperimental di teater dan tari yang suasananya jauh lebih ramai dibandingkan dengan seni lukis, misalnya.

Juga, dalam berbahasa Indonesia—artinya dalam hal memfungsikan bahasa Indonesia sebagai sarana argumentasi, ekspresi, impresi dan deskripsi—sejak Gerakan Reformasi bergulir mengalami pertumbuhan radikal (*radix*=akar). Bahasa Indonesia dipakai dan dikembangkan sesuai dengan fungsi awal sebagai sarana argumentasi (sarana komunikasi sosial).

Lebih dari 30 tahun bahasa Indonesia dipakai sebagai alat kekuasaan, konkretnya sarana penguasa memperkuat dan mengumpulkan posisi politik-kemasyarakatan, kini perannya berubah. Reformasi dalam berbagai bidang, di dalam bahasa Indonesia berarti bagaimana bahasa dikembalikan fungsinya sebagai sarana demokratisasi.

Menarik kita cermati kata-kata yang muncul dan dipakai selama pascareformasi. Bahasa Indonesia bernuansa reformatif itu tidak hanya terlihat dalam spanduk-spanduk yang hari-hari ini masih bisa kita lihat, tetapi juga dalam pemakaian dan pilihan kosa kata. Sebutan sepihak oleh penguasa yang telah berjalan lebih dari 30 tahun, ditinggalkan.

Berbahasa sepihak, seperti terlihat dari kosa kata yang dipakai seperti penataran, indoktrinasi, santiaji, komando, gerakan pengacau liar atau titah kalau itu berasal dari atas, sekarang diganti oleh kosa kata yang berkesan demokratis, yang mencerminkan fungsi awal bahasa sebagai sarana dialog.

Dalam konteks itu kita dukung Prof Andi Muis dari Universitas Hassanudin dan sejarawan Dr Anhar Gonggong. Bahwa setelah 30 tahun lebih, jati diri bahasa *dihaki* sebagai milik penguasa dan menjadi alat penguasaan, sudah saatnya dikembalikan pada fungsi semula sebagai sarana komunikasi. Artinya, marilah kita kembangkan bahasa Indonesia sebagai simbol—meminjam filsuf bahasa Altusser—demokratisasi berbahasa. Bahasa dikembangkan sebagai sarana argumentasi, impresi, ekspresi, dan deskripsi.

MENARIK juga kita amati pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa pascareformasi. Pemakaian kosa kata, kalimat dan ungkapan-ungkapan konsepnya transparan dan lugas. Eufemisme—gaya menghaluskan yang memang selamanya ada, sekarang mulai berkurang. Kalau bahasa tulis adalah ungkapan gagasan dan penghurufan pernyataan lisan, sebenarnya demokratisasi bahasa telah berkembang sejalan dengan cita-cita Gerakan Reformasi.

Kalau pada era sebelum Reformasi, dalam beberapa hal kita menyaksikan eufemisnya berlebihan, sebegitu rupa sampai justru kalimatnya tak lagi bicara tentang fakta, gaya itu mulai ditinggalkan. Apa yang tersurat adalah juga yang tersirat, tak lagi seperti dulu karena represi kekuasaan amat besar, fakta adalah yang tersirat, bukan yang tersurat (tertulis).

Karena persoalan politik dan ekonomi—jangan lupa juga kerusuhan dan kecemasan—mendominasi kehidupan kita belakangan ini, sejak tiga tahun belakangan muncul banyak kosa kata baru berkaitan dengan konsep-konsep di atas. Mendikbud Juwono Sudarsono pun mengingatkan, kosa kata baru di bidang politik selama Reformasi, perlu didokumentasikan dan dicarikan padanannya dalam bahasa sehari-hari. Secara halus dia mengingatkan, jangan sampai wacana politik yang rumit itu diperumit oleh para elite politik dengan kosa kata asing, padahal kosa kata itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Kosa kata *stembus accoord*, poros tengah, milisi memang baru atau diberi arti baru. Akan tetapi untuk percakapan sehari-hari dalam diskusi di gedung parlemen, diharapkan dipakai bahasa Indonesia, tak usah dibumbui kosa kata asing yang sebenarnya tidak perlu.

Kompas, 8 Oktober 1999

MENGEMBALIKAN bahasa Indonesia pada jati diri dan fungsi esensial bahasa, tidak berarti kita tanggalkan rambu-rambu. Rambu-rambu itu, apakah menyangkut kesepakatan semacam Ejaan yang Disempurnakan, pembakuan kosa kata atau tata sopan santun, tetap diperlukan. Rambu-rambu tidak kita tempatkan sebagai penghambat demokratisasi berbahasa, melainkan sebagai sarana kesepakatan sehingga tidak terjadi anarki berbahasa.

Kita tak perlu cemas dengan sepinya "pintu bahasa" yang baru berlangsung sepuluh hari ini. Pengembangan bahasa Indonesia justru sedang memperoleh lahan subur, sebaliknya dalam suasana reformatif (bukan "reformati" seperti guyonan Prof James Dananjaya). Pusat Bahasa perlu melakukan otokritik atas perannya selama ini dengan acuan, bahwa suasana gerah selama 30 tahun lebih, tergantikan suasana segar sekarang (sekali lagi dalam berbahasa).

Kompas, 8 Oktober 1999

Dari Bulan Bahasa dan Sastra

"Pintu Terbuka" yang Kurang Promosi

"ANDA ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia? Inilah saatnya. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayan sepanjang bulan Oktober (efektif 19 hari dikurangi libur hari Sabtu-Minggu) dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra 1999 memberi kesempatan untuk keperluan itu. Ada banyak kegiatan yang bisa diikuti masyarakat selain seminar, lokakarya, berbagai lomba (berbalas pantun, deklamasi siswa SMU), sayembara penulisan naskah siaran, festival musikalisasi puisi sampai bengkel sastra yang kegiatannya antara lain pengajaran membuat puisi.

Secara khusus, panitia membuka Seksi Pintu Terbuka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 1999. Seksi yang satu ini, menurut Eem Suhaemi dan Agnes Santi dari pihak panitia, mengadakan kegiatan konsultasi bahasa, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dan simulasi kebahasaan. Inti semua kegiatan itu adalah memberi kesempatan masyarakat untuk mendapat informasi tentang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang memberi pelayanan berupa konsultasi kebahasaan secara cuma-cuma.

Lulusan SLTA yang ingin mengetahui tingkat kemahiran berbahasa Indonesia bisa ikut UKBI yang sifatnya seperti TOEFL dalam bahasa Inggris. "Pengisian soal seperti pada UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri)," jelas Eem.

Sedangkan simulasi berupa semacam permainan monopoli yang tiap kotak terdapat pertanyaan yang harus dijawab peserta. Ada enam topik yang disediakan panitia: Penggunaan Huruf Kapital dan Miring, Penulisan Kata, Penulisan Kalimat, Kosakata, Pengunaan Tanda Titik dan Titik Koma, serta Penggunaan Tanda Koma. Tidak ada topik sastra. Meskipun jam pembahasannya di sekolah tak banyak, untuk sastra ini sudah ada bengkel sastra dan lainnya.

Entah bagaimana konsepnya, simulasi diberikan hanya dengan memberi pertanyaan dengan jawaban tiga pilihan (*multiple choice*). Jadi tugas tutor hanya membacakan pertanyaan dan sesekali menerangkan satu-dua topik. Tak ada diskusi apalagi debat di antara peserta, semuanya serba pasti. Tidak mengherankan kalau permainan ini hanya berlangsung satu jam per topik.

Panitia memberi hadiah buku semisal kamus, buku cerita rakyat dan buku pintar untuk peserta UKBI dan simulasi.

***

KEGIATAN sudah beragam, lantas seberapa besar minat masyarakat datang ke situ? Yang jelas, jumlah peserta semua kegiatan boleh dikata minim. Simulasi kebahasaan pada Jumat (8/10) siang kemarin hanya diikuti empat siswa SMUN 43 Jakarta Selatan. Karena sang calon lawan tak kunjung da-

tang, akhirnya siswa-siswi itu saling berhadapan dipandu seorang tutor wanita.

Menurut Agnes Santi, jumlah peserta sebuah kegiatan sama dengan target yang ditetapkan. Untuk simulasi ditargetkan diikuti 16 regu per hari atau 100 sekolah selama Bulan Bahasa berlangsung, namun sampai hari kelima, *Kompas* menghitung baru ada 16 sekolah mengirimkan wakilnya. Padahal, melihat jadwal ulangan caturwulan dan libur caturwulan pada pertengahan hingga akhir bulan, jumlah peserta diperkirakan akan turun tajam.

Hal sama terjadi pada UKBI yang diikuti 50 orang, tetapi 23 orang di antara peserta merupakan 'orang dalam' (staf kantor itu sendiri yang datang dari daerah). Sisanya, 27 orang berstatus mahasiswa yang sekali lagi kebanyakan berasal dari Universitas Negeri Jakarta (IKIP Jakarta). Ketua Panitia Bulan Bahasa dan Sastra 1999 Adi Sunaryo menambahkan, jumlah peserta lomba pidato mahasiswa yang mendaftar baru 50 orang. "Saya semula berharap akan diikuti 100-an mahasiswa, namun pendaftarnya sedikit sekali," tutur Adi.

Melihat gejala di atas, pantas dipertanyakan, mengapa jumlah peserta minim padahal edaran acara Bulan Bahasa dan Sastra 1999 sudah dikirim ke banyak pihak? Adi Sunaryo menjawab, "Promosinya kurang." Keputusan diadakannya acara yang ia koordinasikan hanya sekitar satu setengah bulan sebelum hari "H". Pemberitahuan hanya diberikan kepada kalangan tertentu, sedang untuk masyarakat luas belum sempat dilakukan. Dukungan dari instansi yang berkait erat dengan peningkatan keterampilan berbahasa ternyata juga sangat minim.

Alhasil seperti itulah yang terjadi. Patut disayangkan jika momen ini lewat begitu saja. Masyarakat (tak hanya guru atau kalangan industri yang bertanya soal penulisan pada papan nama) juga ingin tahu ada apakah di balik Pintu Terbuka. Maka, keberadaan Pintu Terbuka sendiri semestinya harus dibuka dulu seluas-luasnya, termasuk promosinya. (tri)

Kompas, 9 Oktober 1999

Kesalahan Berbahasa Bukan Hal yang Biasa

BAHASA memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi dengan masyarakat sehingga manusia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan maupun kuantitanya. Dengan demikian bahasa itu sendiri akan mengalami perkembangan.

Bahasa adalah alat komunikasi utama yang digunakan oleh manusia dalam mengidentifikasi diri dan berinteraksi dengan sesamanya. Bahasa adalah lambang berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, mempunyai sistem dan mengandung arti yang bersifat arbitrer; dipakai oleh manusia dalam kehidupannya sebagai alat komunikasi sesamanya untuk membentuk, mengungkapkan, dan menyampaikan pikiran dan perasaannya (Sitindaon, 1987:17).

Berkomunikasi (menggunakan bahasa) berarti tunduk dan taat terhadap peraturan dan tata krama bahasa. Masing-masing bahasa mempun aturan dan tata krama. Aturan dan tata krama bahasa yang satu akan berbeda dengan aturan dan tata krama bahasa yang lain. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai aturan dan tata krama yang fardhu digunakan oleh setiap orang yang memakai bahasa Indonesia, entah itu orang asing atau orang Indonesia sekalipun.

Dewasa ini peraturan berbahasa Indonesia memang belum seperti peraturan pemilu atau yang lainnya yang sudah sampai pada tahap dibentuknya sebuah undang-undang. Bila seseorang melanggar peraturan (undang-undang) yang telah ditetapkan, hukuman pidana minimal sanksi (denda) merupakan konsekuensinya. Lain halnya bila seseorang (pejabat teras sekalipun) melanggar atau kaidah berbahasa.

Keslahan (kecil sekalipun) tetap merupakan kesalahan yang kian lama kian membawa diri seseorang pada kebiasaan berbuat salah.

Kesalahan berbahasa (language error) akan menjadi duri dalam daging. Selama ini bangsa Indonesia begitu bangga dengan bahasa persatuannya yang mampu menyatukan berbagai suku dan bahasa yang ada di bumi nusantara. Tapi sungguh kontras dengan fenomena berbahasa yang ada, orang sudah biasa melihat pejabat negara misalnya, memakai bahasa Indonesia yang salah di media-media massa, cetak maupun elektronik.

Alangkah baiknya bila tiap putra-putri Indonesia mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, serta dengan sadar mempunyai keinginan untuk memelihara tumbuhnya bahasa nasional itu sehingga kelak kita benar-benar dapat memiliki bahasa yang baik dan benar, yang mantap dan teratur, karena tiap pemakainya dapat mempergunakan bahasa itu engan baik oleh penguasaan bahasanya yang baik. Kalau bahasa asing kita pelajari sebaik-baiknya, supaya kita dapat mempergunakan bahasa itu dengan baik pula, bukankah sudah pada tempatnya (adil) bila sikap seperti itu kita ejawantahkan pula dalam bahasa nasional kita. Sehingga kelak bahasa Indonesia benar-benar dapat menjadi bahasa yang mempunyai kesanggupan besar sebagai bahasa pendukung kebudayaan Indonesia dalam arti yang luas.

Akan lebih parah dan memprihatinkan, tatkala kesalahan berbahasa (language error) dilakukan de-

ngan sadar dan sengaja. Hal demikian sering kita jumpai ketika bahasa diperkosa oleh politikus misalnya. Sehingga pak J.S. Badudu sempat berang ketika muncul istilah eufimisme dalam bahasa politik (language politics). Misal. adanya sebutan rawan pangan (kelaparan). Pak Badudu mengatakan bahwa ntara rawan pangan dengan kelapar an tidak bisa disamaartikan atau sebagai bahasa penghalus. Beliau (Badudu) berpendapat bahwa kasus seperti itu bukan eufimisme tapi pemerkosaan dan penipuan bahasa untuk kepentingan politik kelompok atau golongan tertentu. Contoh lain, kata negara berkembang (negara miskin).

Keslahan berbahasa bisa juga terjadi oleh penguasaan bahasa yang minim dari para pemakai bahasa. Contoh kasus, orang sering menganggap sama antara kata hampir dengan nyaris, atau sering kebingungan dalam pemakaian sehari-hari. Hampir dan nyaris keduanya merupakan kosa kata yang berterima dalam bahasa Indonesia dan mempunyai kesamaan arti hanya pemakaian dalam kalimat yang berbeda.

Hampir dipakai untuk menyatakan sesuatu yang bersifat positif sedangkan kata nyaris untuk mengungkapkan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh kalimat / Kurniawan hampir membobol gawang Vietnam. Kurnia Sandy nyaris kebobolan lebih dari satu gol. selanjutnya, tugas memelihara bahasa tidak melulu tertumpu di pundak-pundak ahli bahasa (linguis) tapi sudah merupakan pekerjaan nasional. Semua warga negara Indonesia wajib membina dirinya masing-masing dalam pemakaian bahasa Indonesia agar bahasa itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan aturan dan tatakrama yang berlaku. Kita tidak sepatutnya mengatakan, "Ah, masa bodoh dengan aturan dan tata krama bahasa, itu kan urusan ahli bahasa (linuis), atau "Ah, salah tentang aturan dan tata krama berbahasa tidak apa-apalah, yang penting bagi kita, bahasa dapat dimengerti dan komunikatif.

Pertanyaan esensial yang timbul sekarang adalah siapakah yang ditugaskan membina pemakaian bahasa Indonesia dan siapa pula yang harus menjadi anutan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Jawabnya, secara resmi yang ditugaskan membina dan mengembangkan bahasa Indonesia adalah pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang "mendelegasikan" wewenangnya kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa.

Lalu siapakah yang patut menjadi anutan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Salah satu putusan kongres V bahasa Indonesia 1988 menyatakan bahwa dalam konteks budaya yang memberi penekanan pada konsep anutan, kongres mengimbau agar para pejabat lebih berhati-hati dalam memakai bahasa Indonesia sehingga masyarakat mendapat masukan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Putusan kongres itu cukup beralasan sebab dalam masyarakat kita terdapat budaya yang banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh pembesar, atasan dan senior (Koentjaraningrat,1974:69).

Akhirnya, semoga eksistensi bahasa Indonesia antara cita dan realita terwujud dengan baik.

(MUKHSIN R) ***

Pikiran Rakyat, 10 Oktober 1999

■ Belum Ada 'Political Will' dari Pemerintah

Bahasa Indonesia Sulit Mendunia

BANDUNG (Media): Pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing belum berkembang semestinya, karena belum ada *political will* yang memadai dari pemerintah. Akibatnya, bahasa Indonesia akan sulit untuk diakui sebagai salah satu bahasa Internasional, seperti yang dicita-citakan selama ini.

Hal itu diungkapkan Dr H Chaedar Alwasilah MA, mantan Kepala Balai Bahasa Indonesia IKIP Bandung. "Jangankan mendirikan fasilitas berupa lembaga pengajaran bahasa Indonesia di wilayah kerja Kedutaan Besar RI, untuk mahasiswa asing yang mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi di Indonesia pun masih harus mengalami kendala birokrasi," kata Chaedar, di sela acara Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (Kipbipa) III yang dimulai kemarin, di Bandung.

Kippbipa III diikuti 232 peserta, dengan menyajikan berbagai makalah dari pakar, termasuk di antaranya sepuluh makalah dari ahli bahasa Indonesia asal Australia, Jepang, Malaysia, Vietnam, Rusia, dan Amerika Serikat.

Chaedar Alwasilah yang juga Ketua Panitia Kipbipa III itu mengemukakan birokrasi yang panjang, serta layanan instansi Imigrasi yang buruk, juga sering kali menjengkelkan mahasiswa asing yang sedang studi bahasa Indonesia.

Padahal, di luar negeri, bagi mahasiswa asal luar negeri prosedur birokrasi tidak begitu berbelit-belit. "Sudah saatnya pemerintah menunjukkan *political will* agar bahasa Indonesia terwujud menjadi salah satu bahasa internasional," ujar Pembantu Dekan I Fakultas Bahasa dan Sastra IKIP Bandung.

Konkretnya, antara lain, ia mengusulkan agar bagi mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi di Indonesia, tidak lagi diharuskan memperpanjang paspor secara sendiri-sendiri ke Imigrasi, melainkan dibolehkan diurus melalui lembaga tempat mahasiswa asing itu sedang menuntut ilmu.

IKIP Bandung hanyalah salah satu dari beberapa lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Perguruan tinggi lain yang melakukan hal yang sama di antaranya adalah UGM dan UI. Menurut Chaedar, IKIP Bandung selain telah banyak mengajarkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing dari Australia, Amerika Serikat, Jepang, juga kepada beberapa orang Vietnam yang dikirim oleh pemerintahnya untuk tugas belajar di STT Telkom.

Kipbipa III yang diselenggarakan IKIP Bandung dan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Depdikbud yang berlangsung hingga besok itu, antara lain untuk mendeklarasikan terbentuknya wadah profesional pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, memilih ketua dari organisasi tersebut, serta mendeklarasikan penerbitan jurnal *Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing* (BIPA).

Standardisasi

Chaedar Alwasilah juga mengungkapkan di Australia bahasa Indonesia sudah diajarkan di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tingggi. Sementara di dalam negeri sendiri belum ada kurikulum khusus bagi mahasiswa Indonesia sebagai penutur asli untuk mengajarkannya kepada penutur asing dengan baik dan benar.

Secara teknologi, bahkan sistem pengajaran bahasa Indonesia di Australia sudah sangat maju. "Teman-teman di Australia bahkan telah memasukkan bahan-bahan pelajaran bahasa Indonesia ke dalam CD-ROM," ujarnya.

Kelemahan lain yang harus

diperbaiki kalangan pakar dan pemerintah, katanya, adalah dalam soal standardisasi tingkat-tingkat penguasaan bahasa Indonesia.

Dalam hal itu ia merujuk pada bahasa Inggris yang telah lama mempunyai sistem TOEFL (ujian bahasa Inggris sebagai bahasa asing), di mana bagi siswa yang meraih nilai di bawah angka 400 dapat disebut menguasai tingkat dasar, di atas 400 termasuk menengah, dan kalau nilainya di atas 500 disebut *advanced* (mahir).

(Ant/B-1)

Media Indonesia, 12 Oktober 1999

Berbahasa Indonesia Rasa Kebangsaan

Oleh: Khaerudin Kurniawan

Di saat krisis multidimensional menimpa bangsa kita sekarang ini, masih ada satu harapan yang dapat kita banggakan yakni Bahasa Indonesia sebagai budaya bangsa. Para elite politik kita sekarang sibuk bersidang di MPR untuk memilih presiden, wakil presiden, menetapkan GBHN, dan membuat ketetapan-ketetapan lain untuk mempersiapkan diri memasuki milenium ketiga. Dalam persidangan itu, tentu saja mereka menggunakan Bahasa Indonesia kendati pun muncul kata dan istilah asing seperti *power sharing, voting,* dan lain-lain.

Kita menyadari, masih banyak masyarakat kita, termasuk elite politik yang belum memiliki kepedulian yang tinggi serta penghargaan terhadap Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dalam rangkaian Bulan Bahasa dan Sastra, bulan Oktober ini, semua pihak yang terkait menyadari akan pentingnya menanamkan rasa kebangsaan pada setiap individu dengan cara menggunakan Bahasa Indonesia secara baik, jelas, dan benar dalam berbagai keperluan dan komunikasi. Bulan Bahasa dan Sastra ini merupakan momen yang baik dalam rangka pembudayaan Bahasa Indonesia agar gerakan tersebut semakin dihayati, diresapi, dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bersamaan dengan pembudayaan Bahasa Indonesia serta gerakan disiplin nasional, patutlah kiranya kita merenungkan kembali masa sebelumnya, ketika benih-benih kesadaran kebangsaan (nasionalisme) mulai disemaikan. Awal pergerakan kebangsaan Indonesia bermula dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 (kini berusia lebih dari 91 tahun). Itulah sebabnya tanggal itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Tujuan gerakan Budi Utomo adalah "kemajuan nusa dan bangsa yang harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, serta kebudayaan". Selanjutnya, Budi Utomo berupaya mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat lewat persatuan semua lapisan masyarakat dan kemudian mengantarkan rakyatnya ke ger-

bang kemerdekaan Indonesia.

Cita-cita kebangsaan itu kemudian dilanjutkan oleh berbagai perhimpunan pemuda, yang pada awalnya bersemangat kedaerahan. Pada tahun 1928, anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia dalam kongresnya yang kedua menyatakan kebulatan semangat dan kesadarannya bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu, dan memiliki satu bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah, dapat disaksikan bahwa bendera Merah Putih menjadi lambang Tanah Air yakni negara Republik Indonesia. Lagu Indonesia Raya menjadi lambang kebangsaan Indonesia, dan Bahasa Indonesia menjadi lambang persatuan semua suku bangsa.

Dalam pergerakan kebangsaan, bahasa nasional tidak dapat dipisahkan dari cita-cita pembinaan kepribadian atau identitas nasional yang mengatasi primordialisme kesukuan. Bahasa Indonesia yang sebelum 1928 dinamakan Bahasa Melayu, juga menjadi gerbang ke alam kemajuan. Sudah sejak 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi Pustaka Rakyat yang kemudian bernama Balai Pustaka, menyebarkan terbitan dalam Bahasa Melayu, yang mengandung informasi praktis di bidang pertanian, pertukangan, dan kerajinan, juga menjadi persemaian bagi karya sastra yang baru.

Menakjubkan

Selama 71 tahun berfungsi sebagai bahasa nasional/persatuan, Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang menakjubkan di berbagai sektor kehidupan. Dan, kini telah menjadi wahana komunikasi pengungkapan pikiran dan pendapat yang sangat ampuh. Di semua sektor, perkembangan kosakata meningkat dengan cepat. Demikian juga pengaruhnya telah berkembang ke mancanegara, yakni Bahasa Indonesia sekarang ini telah diajarkan di 29 negara.

Jika pada akhir tahun 1920-an, penutur asli Bahasa Melayu hanya berjumlah 4,9 persen di antara tiga puluh juta orang penduduk, maka dewasa ini menurut sensus BPS 1990, kemajuan pemakai Bahasa Indonesia sangat mengesankan. Di antara penduduk yang berusia lima tahun ke atas, terlihat tiga kelompok.

Pertama, anggota masyarakat yang memakai Bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kira-kira 24 juta atau 15 persen. *Kedua,* orang yang mengaku dapat berbahasa Indonesia tetapi tidak memakainya sebagai alat komunikasi sehari-hari berjumlah 107 juta atau 68 persen. *Ketiga,* orang yang belum paham Bahasa Indonesia masih 27 juta atau 17 persen dari jumlah penduduk.

Diproyeksikan oleh BPS, pada tahun 2010 semua orang Indonesia di atas lima tahun atau 215 juta orang dapat memahami Bahasa Indonesia dengan berbagai tingkat kemahiran. Yang menarik dalam angka-angka statistik tersebut adalah bahwa jumlah yang belum paham Bahasa Indonesia itu hampir sama dan sebangun dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Angka statistik yang disebutkan di atas menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kemahiran berbahasa dengan tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia. Perolehan Bahasa Indonesia yang baik tercapai lewat pendidikan formal. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik yang bersangkutan dapat memakai dan mengungkapkan diri dalam Bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

BPS juga menyajikan data angkatan kerja yang berumur sepuluh tahun ke atas yang pendidikannya maksimal SD sejumlah 78,1 persen; yang pendidikannya maksimal SLTP 10,7 persen; yang pendidikannya maksimal SMU dan SMK 9,7 persen; dan yang pernah duduk di perguruan tinggi berjumlah 1,5 persen.

Kepulauan Indonesia merupakan kawasan geografis yang luasnya sama dengan rentangan batas timur laut dan barat benua Eropa atau benua Amerika. Tidak kurang dari 500 bahasa dan logat yang dipakai oleh penduduk Indonesia yang terdiri atas 250 lebih suku bangsa. Lagi pula, bahasa-bahasa itu juga berbeda-beda dalam muatan budayanya. Hanya Bahasa Indonesia-lah sebagai bahasa nasional yang mampu mendekatkan berbagai golongan etnis, sehingga warganya dapat berkomunikasi dengan lancar dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang dianggap milik bersama ini juga memberikan kesadaran kepemilikan (*belonging*) pada satu Tanah Air dan satu bangsa.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan alamiah bahasa nasional, kontak budaya antarbangsa mengakibatkan pula kontak bahasanya. Budaya yang lebih berkembang sering menjadi sumber bagi pemungutan kata dan ungkapan yang kemudian diserap dan dipadukan dengan kosakata asli.

Jika dulu kontak-kontak budaya dan agama

(Bersambung ke hal 9 kol 5-7)

Penulis adalah staf pengajar FBSS, Universitas Negeri Yogyakarta

Suara Pembaruan, 15 Oktober 1999

Saatnya Kita Temukan Format Reformasi dalam Politik Kebahasaan

SEPINYA "pintu terbuka" selama Bulan Bahasa di Kantor Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Rawamangun, tak perlu kita cemaskan. Di luar "pintu terbuka", bahasa Indonesia memperoleh suasana segar. Di dalam masyarakat, tempat bahasa Indonesia hidup dan dipakai sebagai sarana komunikasi, mengalami perubahan mendasar.

Di gedung MPR Senayan, dalam kosa kata dan konsep-konsep politik sehari-hari, bermunculan kosa kata baru. *Stembus accoord*, poros tengah, milisi, kita sebut beberapa yang belum ada padanannya secara langsung, dan baru muncul pasca-reformasi. Sementara di luar sudah tak terdengar lagi kosa kata *trade mark* orde kemarin, seperti pembangunan, indoktrinasi, penataran, selaras dan seimbang, dan sebagainya.

Mengapa Bulan Bahasa—sebulan penuh Pusat Bahasa menyelenggarakan pameran kebahasaan di kantornya, Rawamangun—sepi? Kondisi dan inklinasi masyarakat tidak sedang ke persoalan bahasa. Perhatian masyarakat sedang tercurah pada persoalan politik dan ekonomi.

Wacana dan proses pemilihan presiden, nasib ratusan ribu pengungsi Timtim menyusul keputusan penentuan pendapat, skandal Bank Bali, memang tidak langsung menyangkut soal bahasa Indonesia. Wacana persoalan-persoalan besar bangsa di atas, barangkali tidak jadi pembicaraan masyarakat kebanyakan, tetapi dampak dan gemanya menelikung perhatian kita semua.

Ditambah dengan isu-isu akan terjadinya kerusuhan dan perasaan waswas, "pintu terbuka" yang tahun-tahun lalu ditengok banyak pengunjung, sekarang sepi. Hari efektif sekolah sudah pasti tak tercapai. Membawa anak khusus datang ke Rawamangun berarti merelakan satu hari sekolah atau tujuh jam pelajaran hilang. Belum lagi "konsentrasi" puluhan anak di satu tempat, bisa jadi pemicu tawuran pelajar—fenomen anak sekolah Jakarta, selain narkoba dan pergaulan tidak sehat lainnya.

GAMBARAN sepintas di atas menunjukkan suasana umum psikologi masyarakat, salah satu sebab sepinya "pintu terbuka" Bulan Bahasa. Gambaran di atas bukanlah pembenaran dan jawaban satu-satunya. Sebab, di tengah hiruk-pikuk SU MPR dengan fokus terakhir pemilihan presiden, tetap kita lihat cukup ramai dan gempita kegiatan-kegiatan kesenian, bahkan pementasan karya-karya klasik serta eksperimental di teater dan tari yang suasananya jauh lebih ramai dibandingkan dengan seni lukis, misalnya.

Juga, dalam berbahasa Indonesia—artinya dalam hal memfungsikan bahasa Indonesia sebagai sarana argumentasi, ekspresi, impresi dan deskripsi—sejak Gerakan Reformasi bergulir mengalami pertumbuhan radikal (*radix*=akar). Bahasa Indonesia dipakai dan dikembangkan sesuai dengan fungsi awal sebagai sarana argumentasi (sarana komunikasi sosial).

Lebih dari 30 tahun bahasa Indonesia dipakai sebagai alat kekuasaan, konkretnya sarana penguasa memperkuat dan mengumpulkan posisi politik-kemasyarakatan, kini perannya berubah. Reformasi dalam berbagai bidang, di dalam bahasa Indonesia berarti bagaimana bahasa dikembalikan fungsinya sebagai sarana demokratisasi.

Menarik kita cermati kata-kata yang muncul dan dipakai selama pascareformasi. Bahasa Indonesia bernuansa reformatif itu tidak hanya terlihat dalam spanduk-spanduk yang hari-hari ini masih bisa kita lihat, tetapi juga dalam pemakaian dan pilihan kosa kata. Sebutan sepihak oleh penguasa yang telah berjalan lebih dari 30 tahun, ditinggalkan.

Berbahasa sepihak, seperti terlihat dari kosa kata yang dipakai seperti penataran, indoktrinasi, santiaji, komando, gerakan pengacau liar atau titah kalau itu berasal dari atas, sekarang diganti oleh kosa kata yang berkesan demokratis, yang mencerminkan fungsi awal bahasa sebagai sarana dialog.

Dalam konteks itu kita dukung Prof Andi Muis dari Universitas Hassanudin dan sejarawan Dr Anhar Gonggong. Bahwa setelah 30 tahun lebih, jati diri bahasa *dihaki* sebagai milik penguasa dan menjadi alat penguasaan, sudah saatnya dikembalikan pada fungsi semula sebagai sarana komunikasi. Artinya, marilah kita kembangkan bahasa Indonesia sebagai simbol—meminjam filsuf bahasa Altusser—demokratisasi berbahasa. Bahasa dikembangkan sebagai sarana argumentasi, impresi, ekspresi, dan deskripsi.

MENARIK juga kita amati pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa pascareformasi. Pemakaian kosa kata, kalimat dan ungkapan-ungkapan konsepnya transparan dan lugas. Eufemisme—gaya menghaluskan yang memang selamanya ada, sekarang mulai berkurang. Kalau bahasa tulis adalah ungkapan gagasan dan penghurufan pernyataan lisan, sebenarnya demokratisasi bahasa telah berkembang sejalan dengan cita-cita Gerakan Reformasi.

Kalau pada era sebelum Reformasi, dalam beberapa hal kita menyaksikan eufemisnya berlebihan, sebegitu rupa sampai jusuu kalimatnya tak lagi bicara tentang fakta, gaya itu mulai ditinggalkan. Apa yang tersurat adalah juga yang tersirat, tak lagi seperti dulu karena represi kekuasaan amat besar, fakta adalah yang tersirat, bukan yang tersurat (tertulis).

Karena persoalan politik dan ekonomi—jangan lupa juga kerusuhan dan kecemasan—mendominasi kehidupan kita belakangan ini, sejak tiga tahun belakangan muncul banyak kosa kata baru berkaitan dengan konsep-konsep di atas. Mendikbud Juwono Sudarsono pun mengingatkan, kosa kata baru di bidang politik selama Reformasi, perlu didokumentasikan dan dicarikan padanannya dalam bahasa sehari-hari. Secara halus dia mengingatkan, jangan sampai wacana politik yang rumit itu diperumit oleh para elite politik dengan kosa kata asing, padahal kosa kata itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Kosa kata *stembus accoord*, poros tengah, milisi memang baru atau diberi arti baru. Akan tetapi untuk percakapan sehari-hari dalam diskusi di gedung parlemen, diharapkan dipakai bahasa Indonesia, tak usah dibumbui kosa kata asing yang sebenarnya tidak perlu.

MENGEMBALIKAN bahasa Indonesia pada jati diri dan fungsi esensial bahasa, tidak berarti kita tanggalkan rambu-rambu. Rambu-rambu itu, apakah menyangkut kesepakatan semacam Ejaan yang Disempurnakan, pembakuan kosa kata atau tata sopan santun, tetap diperlukan. Rambu-rambu tidak kita tempatkan sebagai penghambat demokratisasi berbahasa, melainkan sebagai sarana kesepakatan sehingga tidak terjadi anarki berbahasa.

Kita tak perlu cemas dengan sepinya "pintu bahasa" yang baru berlangsung sepuluh hari ini. Pengembangan bahasa Indonesia justru sedang memperoleh lahan subur, sebaliknya dalam suasana reformatif (bukan "reformati" seperti guyonan Prof James Dananjaya), Pusat Bahasa perlu melakukan otokritik atas perannya selama ini dengan acuan, bahwa suasana gerah selama 30 tahun lebih, tergantikan suasana segar sekarang (sekali lagi dalam berbahasa).

Kompas, 12 Oktober 1999

Belajar Bahasa Semata, Hambat Penguasaan

BANDUNG, (PR).-

Bagi orang asing yang berminat menguasai bahasa Indonesia, tidak cukup belajar bahasa semata. Bersamaan dengan itu hendaknya mereka juga mempelajari budaya setempat. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kendala budaya yang bisa menghambat proses penguasaan bahasa.

Menurut dosen Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Manado, Aaltje Tallei P, dalam proses pengajaran bahasa, termasuk bahasa Indonesia, secara silang budaya seringkali menimbulkan berbagai kendala.

"Akibatnya proses pemerolehan bahasa yang dipelajari sering tidak mulus," katanya dalam konferensi internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) III di IKIP Bandung yang berlangsung Senin hingga Rabu ini.

Kendala budaya tersebut bisa bersifat verbal dan non verbal. "Kegiatan verbal terlaksana pada keseluruhan domain kehidupan, mulai bertemunya dua orang sampai kepada terlaksananya interaksi verbal yang melibatkan sekelompok orang pada situasi tertentu".

Sedangkan kendala budaya non verbal antara lain meliputi jarak berbicara dan penggunaan waktu yang tidak tepat.

Karena itu penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia harus membiasakan diri dengan cara hidup dan cara berpikir orang-orang Indonesia.

Tak lazim

Aaltje menegaskan masalah akan mudah muncul tatkala bertemunya perbedaan-perbedaan budaya yang menyolok. Misalnya kelompok etnis tertentu di Indonesia yang tidak lazim menentang mata mitra bicara akan dianggap aneh atau kurang sopan oleh penutur asing tertentu.

"Di samping itu, penutur bahasa Indonesia akan merasa tersinggung kalau disodori sesuatu dengan tangan kiri tanpa alasan yang jelas".

Hasan Alwi dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengatakan dalam proses pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) di luar Indonesia, para pengajar pun harus mengenal dan akrab dengan rakyat dan negara bersangkutan.***

Pikiran Rakyat, 13 Oktober 1999

Rasa Kebangsaan Berbahasa Indonesia

Di saat krisis multidimensional menimpa bangsa kita sekarang ini, masih ada satu harapan yang dapat kita banggakan yakni Bahasa Indonesia sebagai budaya bangsa. Para elite politik kita sekarang sibuk bersidang di MPR untuk memilih presiden, wakil presiden, menetapkan GBHN, dan membuat ketetapan-ketetapan lain untuk mempersiapkan diri memasuki milenium ketiga. Dalam persidangan itu, tentu saja mereka menggunakan Bahasa Indonesia kendati pun muncul kata dan istilah asing seperti *power sharing, voting,* dan lain-lain.

Kita menyadari, masih banyak masyarakat kita, termasuk elite politik yang belum memiliki kepedulian yang tinggi serta penghargaan terhadap Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dalam rangkaian Bulan Bahasa dan Sastra, bulan Oktober ini, semua pihak yang terkait menyadari akan pentingnya menanamkan rasa kebangsaan pada setiap individu dengan cara menggunakan Bahasa Indonesia secara baik, jelas, dan benar dalam berbagai keperluan dan komunikasi. Bulan Bahasa dan Sastra ini merupakan momen yang baik dalam rangka pembudayaan Bahasa Indonesia agar gerakan tersebut semakin dihayati, diresapi, dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bersamaan dengan pembudayaan Bahasa Indonesia serta gerakan disiplin nasional, tentulah kiranya kita merenungkan kembali masa sebelumnya, ketika benih-benih kesadaran kebangsaan (nasionalisme) mulai disemaikan. Awal pergerakan kebangsaan Indonesia bermula dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 (kini berusia lebih dari 91 tahun). Itulah sebabnya tanggal itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Tujuan gerakan Budi Utomo adalah "kemajuan nusa dan bangsa yang harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peter-

Oleh: Khaerudin Kurniawan

rahan, perdagangan, teknik dan industri, serta kebudayaan". Selanjutnya, Budi Utomo berupaya mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat lewat persatuan semua lapisan masyarakat dan kemudian mengantarkan rakyatnya ke gerbang kemerdekaan Indonesia.

Cita-cita kebangsaan itu kemudian dilanjutkan oleh berbagai perhimpunan pemuda, yang pada awalnya bersemangat kedaerahan. Pada tahun 1928, anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia dalam kongresnya yang kedua menyatakan kebulatan semangat dan kesadarannya bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu, dan memiliki satu bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah, dapat disaksikan bahwa bendera Merah Putih menjadi lambang Tanah Air yakni negara Republik Indonesia. Lagu Indonesia Raya menjadi lambang kebangsaan Indonesia, dan Bahasa Indonesia menjadi lambang persatuan suku bangsa.

Dalam pergerakan kebangsaan, bahasa nasional tidak dapat dipisahkan dari cita-cita pembinaan kepribadian atau identitas nasional yang mengatasi primordialisme kesukuan. Bahasa Indonesia yang sebelum 1928 dinamakan Bahasa Melayu, juga menjadi gerbang ke alam kemajuan. Sudah sejak 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi Pustaka Rakyat yang kemudian bernama Balai Pustaka, menyebarkan terbitan dalam Bahasa Melayu, yang mengandung informasi praktis di bidang pertanian, pertukangan, dan kerajinan, juga menjadi persemaian bagi karya sastra yang baru.

Menakjubkan

Selama 71 tahun berfungsi sebagai bahasa nasional/persatuan, Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang menakjubkan di berbagai sektor kehidupan. Dan, kini telah menjadi wahana komunikasi pengungkapan pikiran dan pendapat yang sangat ampuh. Di semua sektor, perkembangan kosakata meningkat dengan cepat. Demikian juga pengaruhnya telah berkembang ke mancanegara, yakni Bahasa Indonesia sekarang ini telah diajarkan di 29 negara.

Jika pada akhir tahun 1920-an, penutur asli Bahasa Melayu hanya berjumlah 4,9 persen di antara tiga puluh juta orang penduduk, maka dewasa ini menurut sensus BPS 1990, kemajuan pemakai Bahasa Indonesia sangat mengesankan. Di antara penduduk yang berusia lima tahun ke atas, terlihat tiga kelompok.

Pertama, anggota masyarakat yang memakai Bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari [illegible] atau 15 persen. *Kedua*, orang yang mengaku dapat berbahasa Indonesia tetapi tidak memakainya sebagai alat komunikasi sehari-hari berjumlah 107 juta atau 68 persen. *Ketiga*, orang yang belum paham Bahasa Indonesia masih 27 juta atau 17 persen dari jumlah penduduk.

Diproyeksikan oleh BPS, pada tahun 2010 semua orang Indonesia di atas lima tahun atau 215 juta orang dapat memahami Bahasa Indonesia dengan berbagai tingkat kemahiran. Yang menarik dalam angka-angka statistik tersebut adalah bahwa jumlah yang belum paham Bahasa Indonesia itu hampir sama dan sebanding dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Angka statistik yang disebutkan di atas menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kemahiran berbahasa dengan tingkat pen-

didikan angkatan kerja Indonesia. Perolehan Bahasa Indonesia yang baik tercapai lewat pendidikan formal. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik yang bersangkutan dapat memakai dan mengungkapkan diri dalam Bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

BPS juga menyajikan data angkatan kerja yang berumur sepuluh tahun ke atas yang pendidikannya maksimal SD sejumlah 78,1 persen; yang pendidikannya maksimal SLTP 10,7 persen; yang pendidikannya maksimal SMU dan SMK 9,7 persen; dan yang pernah duduk di perguruan tinggi berjumlah 1,5 persen.

Kepulauan Indonesia merupakan kawasan geografis yang luasnya sama dengan rentangan batas timur laut dan barat benua Eropa atau benua Amerika. Tidak kurang dari 500 bahasa dan logat yang dipakai oleh penduduk Indonesia yang terdiri atas 250 lebih suku bangsa. Lagi pula, bahasa-bahasa itu juga berbeda-beda dalam muatan budayanya. Hanya Bahasa Indonesia-lah sebagai bahasa nasional yang mampu mendekatkan berbagai golongan etnis, sehingga warganya dapat berkomunikasi dengan lancar dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang dianggap milik bersama ini juga memberikan kesadaran kepemilikan (*belonging*) pada satu Tanah Air dan satu bangsa.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan alamiah bahasa nasional, kontak budaya antarbangsa mengakibatkan pula kontak bahasanya. Budaya yang lebih berkembang sering menjadi sumber bagi pemungutan kata dan ungkapan yang kemudian diserap dan dipadukan dengan kosakata asli.

Jika dulu kontak-kontak budaya dan agama

(Bersambung ke hal 9 kol 5-7)

Penulis adalah staf pengajar FBSS, Universitas Negeri Yogyakarta

Bahasa

(Sambungan dari hal 4)

yang memberi dorongan bagi diserapnya bahasa asing, maka sekarang kekuatan lain mendorong penyerapan pengaruh asing itu dengan cepat, yaitu kebutuhan hidup dan tantangan informasi di berbagai sektor. Dorongan ini semakin kuat terasa dengan adanya tantangan kompetisi dan globalisasi, yang membuat kontak dengan dunia luar lebih intensif.

Pembudayaan

Upaya pembudayaan Bahasa Indonesia harus berlolak dari dua visi. Visi *pertama* harus ada kesinambungan antara hakikat bahasa dulu dan sekarang. Artinya, bahasa nasional jangan kehilangan identitasnya. Itulah sebabnya, mengapa dewasa ini konsep baru sedapat-dapatnya diterjemahkan dengan padanan Indonesianya. Jika penerjemahan itu menimbulkan kesulitan pemahaman, baru bentuk bahasa asing diserap bersamaan dengan konsepnya.

Visi yang *kedua* adalah hasil penyerapan itu harus mampu mempertajam daya ungkap pemakai Bahasa Indonesia dan harus memudahkan orang menyatakan isi akal budinya dengan cermat dan tepat. Jadi, penyerapan itu harus bersifat selektif. Unsur bahasa asing yang mengisi kekosongan akan memperkaya Bahasa Indonesia; sedangkan unsur yang berlebih dan mubazir lambat-laun akan mengikis ciri-ciri dirinya.

Saat ini pemerintah mempercayakan perencanaan bahasa pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud. Seleksi dan penetapan unsur baru dalam Bahasa Indonesia, sudah selayaknya berupa hasil kerja sama (*networking*) antara Pusat Bahasa dengan para pakar dari berbagai bidang: politik, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan sebagainya. Kerja sama itulah yang menyusun rambu-rambu serta garis haluan apa yang sebaiknya dimajukan, dan apa yang sepatutnya disingkirkan.

Yang penting dalam pembudayaan Bahasa Indonesia adalah motivasinya. Apakah warga negara pemakai Bahasa Indonesia didorong oleh pertimbangan laba-rugi semata-mata sebagai pengusaha, ataukah ada cukup ruang untuk diisi dengan motivasi lain yang juga penting? Misalnya, apakah kita dapat mengenal benang merah, yakni motif yang berkelanjutan, antara cita-cita kemerdekaan dan bahasa nasional sebagai sarana persatuan dan sarana pembangunan?

Antara cita-cita pembangunan bangsa (*nation building*) dan pengungkapan *nation* itu dengan bahasanya sendiri? Satu hal yang menakjubkan seluruh dunia ialah keberhasilan Bahasa Indonesia yang telah melancarkan integrasi nasional. Integrasi tidak saja terjadi secara horizontal di antara suku bangsa, tetapi juga secara vertikal antara berbagai lapisan masyarakat.

Selanjutnya, karena Bahasa Indonesia bercorak kerakyatan, artinya tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa seperti beberapa bahasa daerah yang terkemuka, maka bahasa itu dapat dipakai dengan leluasa antara golongan yang dituakan dengan yang lebih muda, antara golongan yang kuat dan yang lemah, antara atasan dan bawahan, antara pejabat negara dan rakyat biasa, dan sebagainya. Sebenarnya Bahasa Indonesia, tanpa disadari telah berhasil membuat kita bersikap lebih demokratis.

Sikap bahasa seperti itulah yang membuat orang Indonesia menemukan kebangkitannya kembali dan berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain. ***

Suara Pembaruan, 15 Oktober 1999

Pengajaran Bahasa dan Sastra

Cenderung Teori

Oleh WILSON NADEAK

MEMPERHATIKAN buku teks yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa penerbit Bandung dan beberapa kota besar lainnya di P. Jawa menunjukkan semangat idealisme yang tinggi, dari pengarangnya. Dari sekian banyak buku teks yang beredar di pasaran mengenai bahasa dan sastra Indonesia - tidak mustahil bahwa buku itu diikutsertakan dalam penilaian buku teks Depdikbud - kebanyakan berorientasi kepada teori-bahasa dan sastra. Mungkin sekali penulisnya "terjebak" kepada penyediaan materi sebagaimana yang dimuat dalam GBPP, dan dengan tekun memasukkan teori guna memboboti bahan yang hendak disajikan di depan kelas sehingga bukunya menjadi amat tebal.

Idealisme

Ada kesan yang muncul dari buku teks pelajaran bahasa Indonesia yang tebal-tebal itu. Kesan pertama ialah pengarangnya memiliki idealisme bahasa sesungguhnya bahan inilah yang perlu diketahui dan dikuasai oleh pelajar SMU jika ia sudah tamat dari jenjang studi ini. Menilik kepada materi yang disajikan, alangkah idealnya pengarang buku itu! Pengetahuan kebahasaan tentu saja mendapat porsi yang cukup besar, ditambah dengan pengetahuan umum yang luas dalam masalah retorika. Saking idealnya, kita merasa bahwa seorang anak yang telah tamat dari SMU sudah mampu menjadi ahli teori sastra, menjadi ahli pidato, menjadi ahli bahasa dan memiliki pengetahuan umum yang amat luas.

Dibandingkan dengan materi pelajaran dan teknik penyajian bahan dalam buku yang diterbitkan 4-5 dekade yang lalu, buku teks yang beredar sekarang jauh lebih "maju". Buku teks yang lama berisi bahwa wacana yang terdiri dari dua-tiga halaman kemudian disusul dengan latihan-latihan yang memerlukan banyak waktu siswa baik di ruang kelas maupun di luar kelas. Mereka dirangsang mencari tahu lebih dalam, sedangkan teks yang sekarang, siswa dijejali dengan sejumlah pengetahuan teori yang serba luas namun tidak mendalam.

"Kemajuan" buku teks yang sekarang dibandingkan dengan buku teks pada dekade yang telah disebutkan di atas, tidak sebanding dengan keterampilan yang didapat dan dikuasai siswa yang sudah tamat. Siswa-siswa yang dahulu akrab dengan teori dan akrab juga dengan praktik atau pengetahuan lapangan. Teori yang dimiliki adalah teori yang berkaitan dengan kenyataan di lapangan. Pada zaman sebelum tahun 60-an para siswa akrab dengan hasil karya sastra sementara pada dakade sekarang ini, siswa akrab dengan sejumlah teori dan nama-nama pengarang tanpa mengenal karya-karya mereka melalui penikmatan.

Dekade 50-an dan 60an, pengajaran bahasa sarat dengan bahan sastra. Artinya teori pengajaran bahasa dan tatabahasa mengambil bahan dari karya-karya sastra. Contoh-contoh kalimat misalnya, selalu diambil dari karya-karya sastra yang dihasilkan oleh pengarang. Cobalah perhatikan buku tatabahasa yang ditulis oleh C.A. Mees dan ahli-ahli tatabahasa lainnya, mereka mengutip kalimat dari buku karya sastgra pengarang Indonesia. Pola kerja yang demikian sedikit-banyaknya mengajak siswa membaca buku sumbernya, yakni karya sastra itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi, penyusun tatabahasa itu menjadi akrab dengan karya-karya sastra. Jadi, pada dekade yang lalu itu, kesenjangan antara pengajar masalah kebahasaan dengan sastra nyaris tidak

ada karena keduanya saling mendukung dalam pengajaran bahasa dan kesusasteraan. Dua-duanya saling mengisi! Barangkali itulah akar pemikiran mengapa sekarang ini mata pelajaran kebahasaan dan sastra disatukan.

Keinginan dan kenyataan

Banyaknya buku teks yang tampak begitu "berbobot" justru membuat siswa menjadi takut dan ngeri serta kurang berminat mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Dunia pengajaran bahasa Indonesia tampaknya sudah dibuat "angker" sehingga menjadi pelajaran yang membosankan dan dihindari. Kita tidak tahu dari mana asal-usul kesan seperti ini. Tetapi paling sedikit kita dapat menyusuri akar masalah pada latar belakang pengajar bidang studi ini.

Di lembaga pendidikan tinggi, mahasiswa dijejali sejumlah teori kebahasaan dan teori sastra. Bagi orang yang tidak memiliki apresiasi terhadap sastra lebih suka mendalami masalah kebahasaan yang bersifat teoretis. Ia tidak memiliki waktu untuk membaca karya-karya sastra. Bila ia hendak memberi contoh latihan yang diberikannya adalah kalimat-kalimatnya sendiri, atau guntingan dari majalah atau surat kabar. Jarang ia mengutip kalimat dari buku sastra.

Dari iklim seperti ini tidak mustahil lahir tenaga pengajar yang berorientasi kepada angan-angan bahwa sesungguhnya siswa sudah harus memiliki pengetahuan seperti ini dan itu.

Bayang-bayang yang ada di dalam benak penyusun tidak sama dengan bayang-bayang yang terpatri di dalam benak siswa. Siswa menangkap "angan-angan" penulis buku teks sebagai suatu beban yang tidak praktis -- karena memang dalam segi praktika banyak penyusun yang tidak akrab dalam bidang studi yang digarapnya -- sehingga hubungan antara teori dan praktik atau yang diharapkan dikuasai di lapangan tidak sejalan.

Para pengajar menyediakan ringkasan sebuah karya sastra -- atau paling sedikit, kalau ia tidak mau ambil pusing, menyuruh siswa membaca ringkasan novel ini dan itu -- yang memuat jalan cerita dan tokoh yang terdapat dalam novel itu -- siswa menjadi objek yang pasif! Daya aspirasi siswa seperti ini terhadap karya sastra amat rendah, dan itu ditularkannya kelak kepada generasi berikutnya!

Sekitar buku teks

Kalau kita memperhatikan buku teks kebahasaan (juga mencakup sastra) dalam bahasa Inggris, kita tidak usah terkejut jika bukunya tebal-tebal. Kalau kita perhatikan isinya, sesungguhnya adalah pengajaran apresiasi sastra dan bahasa melalui karya-karya pengarang yang terkenal. Cerpen-cerpen dari pengarang terkemuka dijadikan sebagai bahan pengajaran (untuk pendidikan 'akademi' yang sederajat dengan SMU di negeri kita). Oleh karena itu, keberatan kita terhadap 'ketebalan' buku bukanlah keberatan yang serius, melainkan penyusunan bahasa pengajaran itu sendiri, jangan terlalu sarat dengan teori, atau dijejali dengan teori yang harus dihapal oleh siswa.

Sudah tentu siswa tidak harus membaca bahan pengajaran (cerpen) di kelas. Mereka sudah akrab dengna sistem SKS yang memiliki unsur belajar terstruktur alias mandiri, studi pustaka di luar jam belajar dan sebagainya. Sementara kita mengikuti sistem SKS secara separo-separo, serba tanggung dan malu-malu.

Sudah saatnya kita memikirkan buku teks yang praktis tapi apresiatif dengan meniru metode penyusunan yang digunakan di negeri yang sudah maju!***

Pikiran Rakyat, 17 Oktober 1999

Bahasa Indonesia Menjadi Feodal

Cikini, Warta Kota

Feodalisme dalam pemakaian bahasa Indonesia terus berkembang, dari keadaan pada awalnya yang tak mengenal tingkatan bahasa. Bahasa Nasional, yang tak mengenal kosa kata *halus*, sering menggunakan kata-kata dari bahasa Jawa. Terutama ketika berhadapan dengan orang yang jabatannya lebih tinggi. Bahkan, diikuti dengan sikap badan yang bagian dari tata krama feodal.

Pemikiran tersebut dikemukakan sastrawan Ajip Rosidi, yang membawakan makalah *Demokratisasi dan Politik Bahasa di Indonesia*, pada acara Konferensi Bahasa Nusantara di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Senin (18/10). Selain Ajip, hadir juga sebagai pembicara, Amran Halim, yang menyampaikan makalah *Politik Bahasa Nasional: Tinjauan Masa Kini*. "Selama kurang lebih 40 tahun, bangsa kita hidup dalam rezim otoriter yang feodalistis. Dan bahasa Indonesia yang semula demokratis, dibuat menjadi feodalistis," ujar Ajip.

Selain itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tak pernah dengan tegas menolak kecenderungan tersebut. Lembaga tersebut lebih memperhatikan pemakaian bahasa Indoneisa yang baik dan benar dan mengotak-atik istilah yang sudah mapan.

Ajip menjelaskan, istilah *pemerintah* berasal dari kata *perintah*, yang mengandung arti berhak bahkan berkewajiban memberikan perintah. Kata *pejabat* berkonotasi dengan jabatan, yang menunjukkan jabatan penting. Sehingga, rakyat yang menjadi obyeknya, merasa dirinya sebagai orang yang diperintah.

Mantan Presiden Soekarno, pada masa mudanya terkenal sebagai demokrat. Tapi pada masa Demokrasi Terpimpin, ia memerintah bagaikan raja. Untuk membuat pejabat takut dan tak berani menentang kebijakannya, ia menciptakan istilah *ritooling*. Yang melanggar akan *diritool*. Masa Orde Baru, istilah *ritooling* diganti dengan *recalling*, orang yang *vokal* niscaya *direcall*.

Ajip menambahkan, kosa kata terus bertambah, tapi tak dibarengi dengan kemajuan konsep berpikir. Latah menciptakan kosakata baru pun didukung wartawan, yang gemar mencari kosakata baru.

"Apa kurang indah dan plastisnya kata *buahdada*. Namun kurang cukup, sehingga lahir kata *payudara*. Padahal nenek-nenek 'kan juga punya, bukan hanya dara saja," tutur Ajip. (tan)

Warta,Kota, 19 Oktober 1999

Festival Budaya Nusantara '99

Terjadi Feodalisasi terhadap Bahasa Indonesia

Jakarta, Kompas

Pemilihan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang kemudian dinobatkan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sesungguhnya sangat tepat untuk menjadi wahana pembentukan demokrasi. Namun, dalam perkembangannya terjadi semacam feodalisasi terhadap bahasa Indonesia, terutama akibat campur tangan kekuasaan. Oleh karena itu perlu dilakukan reorientasi mendasar dengan menyusun politik bahasa yang baru.



"Politik bahasa yang harus menjadi landasan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, daerah, dan bahasa asing di Indonesia, tampaknya perlu mengalami reorientasi mendasar. Selain melibatkan para teknokrat bahasa, perlu juga mengajak para pemikir sosial dan politik khususnya, serta para pakar ilmu sosial dan kemanusiaan umumnya," ujar budayawan Ajip Rosidi pada sesi pertama Konferensi Bahasa Nusantara yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Senin (18/10).

Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional, kata Ajip, karena berlainan dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali dan sejumlah bahasa daerah lainnya yang mengenal *undak-usuk* (tingkat-tingkat bahasa). Bahasa Jawa yang sangat canggih dalam tingkat-tingkat bahasa misalnya, tak dapat dibayangkan akan dapat menjadi wahana komunikasi dalam masyarakat demokratis yang setiap orang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Meski bahasa Melayu juga mengenal kata-kata khusus untuk raja atau Tuhan, namun itu hanya sekadarnya saja, sama dengan bahasa-bahasa lain di dunia.

Feodalisasi

Namun, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia yang sebenarnya demokratis justru dibuat feodalistis. Ajip Rosidi memaparkan, dalam masa Demokrasi Terpimpin feodalisasi dirasakan kian meningkat. Dengan cara pemerintahan demikian, demokrasi yang menjadi cita-cita para penyusun UUD menjadi kabur. Meskipun feodalisme—bersama kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme—sering dikutuk dalam pidato-pidato Soekarno, namun dalam kehidupan sehari-hari justru kian diperteguh. Ini tampak dari istilah "paduka", "yang mulia" dan semacamnya

yang dihidupkan kembali oleh pemerintahan Soekarno.

Pada masa Orde Baru, demikian Ajip, meskipun niatnya hendak mengoreksi Orde Lama yang dianggap telah menyeleweng dari UUD 1945 dan semangat proklamasi, namun pada praktiknya feodalisme dan kepatuhan abdi dalem kian dipupuk. Kalau Soekarno semasa mudanya banyak membaca gagasan tentang demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya yang dijadikan rujukan, ternyata Soeharto hanya mempunyai satu rujukan, yaitu peradaban Jawa priyayi yang feodal. Ia pun sering mengutip ungkapan-ungkapan Jawa yang dianggapnya sebagai kebijaksanaan tertinggi, walaupun sebenarnya tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi dan asas negara hukum.

Akibatnya feodalisme pun kian berkembang dalam pemakaian bahasa Indonesia. Di lingkungan birokrat mulai dikembangkan *undak-usuk* bahasa. Oleh karena dalam kosakata bahasa Indonesia tidak ada kata-kata "halus", maka dipakailah kata-kata halus dari bahasa Jawa seperti *dalem* (rumah), *rawuh* (datang), *dahar* (makan). Pemakaian kata-kata halus itu disertai pula dengan *unggah-ungguh* sikap badan, tangan dan wajah yang merupakan bagian dari tata krama peradaban feodal.

Selama kurang lebih 40 tahun bangsa kita hidup dalam rezim otoriter feodalistis, maka bahasa Indonesia yang semula demokratis pun sudah banyak dibuat feodalistis. Anehnya, tutur Ajip, para ahli bahasa di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pun tidak pernah terdengar menolak kecenderungan feodalisasi pemakaian bahasa Indonesia itu. Mereka agaknya lebih menempatkan diri sebagai alat kekuasaan dalam bidang bahasa, yang merasa berkewajiban hanya untuk mengajar masyarakat agar berbahasa yang baik dan benar saja.

Pembacaan cerpen

Sementara itu, bersamaan kegiatan FBN '99, di Galeri Cipta II TIM kemarin sore diluncurkan empat buku, yakni cerpen karya Umar Kayam *Seribu Kunang-kunang di Manhattan* yang diterjemahkan dalam 13 bahasa daerah, *Pesona Bahasa Nusantara Menjelang Abad 21* yang disusun oleh Parakitri T Simbolon, *Bahasa Nusantara Suatu Pemetaan Awal: Gambaran tentang Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia* disunting oleh Ajip Rosidi — pengantar Prof Dr EKM Masinambow, dan buku berjudul *Wulan Sedhuwuring Geni: Antologi Cerpen dan Puisi Daerah.*

Pada saat peluncuran buku-buku tersebut dilakukan pembacaan cerpen *Seribu Kunang-kunang di Manhattan* dalam sembilan bahasa daerah, yaitu oleh Putu Wijaya (Bali), Yus Rusyana (Sunda), Slamet Riyadi (Sasak), Robert Sibarani (Batak), N Riantiarno (Cirebon), AA Navis (Minangkabau), Irwan Abdullah (Aceh), Sujiwo Tejo (Madura) dan Mohamad Sobary (Jawa). (lok)

Kompas, 19 Oktober 1999

Voting, Pak?

Pusat Bahasa: Memasuki bulan Oktober, kritik terhadap penggunaan bahasa Indonesia kembali mencuat. Apa peran Pusat Bahasa?

Ini sisi lain dari SU MPR 1999. Diam-diam, Mendikbud Juwono Soedarsono mencermati penggunaan bahasa para wakil rakyat di sidang-sidang resmi kenegaraan itu. Ujung-ujungnya, Mendikbud sedih karena kebanyakan mereka berbahasa Indonesia secara tidak baik dan benar. Terutama, mereka banyak menggunakan bahasa asing seperti *voting, political will, lobbying, hearing,* dan *concern.* Mendikbud mengungkapkan kesedihannya itu saat memberikan kata sambutan dalam acara peringatan Bulan Bahasa dan Sastra ke-20 di Jakarta, Senin pekan lalu. "Padahal, kata-kata itu banyak yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kenapa masih menggunakan kata asing?" kata Juwono.

Kritik seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir sepanjang tahun, terutama menjelang peringatan Bulan Bahasa, para pakar bahasa mengeluhkan penggunaan bahasa para pejabat kita. Pada masa Orde Baru, kritik itu memang tak segalak sekarang. Maklum, Presiden Soeharto yang represif terkenal sebagai pengguna bahasa Indonesia yang buruk. Kini, pada era keterbukaan, kritik itu bisa dilontarkan lebih leluasa, tapi juga tidak ada jaminan hasilnya akan lebih efektif. Anjuran penggunaan bahasa yang baik dan benar menyangkut pengubahan perilaku masyarakat tak memiliki perangkat pengukur dan pemaksa yang jelas.

Oleh karena itu, kritik Mendikbud tadi, seperti biasa, tak banyak mendapat tanggapan berarti. Hanyalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusat Bahasa), sebagai organ di lingkungan Depdikbud dan penyelenggara rutin peringatan Bulan Bahasa, yang merespons ucapan Menteri Juwono. Seperti dikemukakan Kepala Pusat Bahasa Hasan Alwi, lembaga ini tengah menginventarisasi kata-kata asing yang masih sering digunakan para anggota DPR/MPR untuk dicarikan padanan kata Indonesianya. "Nah, jika sudah ditemukan, maka Pusat Bahasa akan berusaha untuk mengingatkan mereka," ujar Hasan.

Untuk menjalankan tugasnya sebagai pembina dan pengembang bahasa Indonesia, Pusat Bahasa memang hanya mengandalkan jalur-jalur kebudayaan seperti pendidikan formal, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan media massa. Wajar pula bila hasil kerja lembaga ini hanya bisa diukur dengan indikator budaya seperti penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pejabat, orang-orang terpelajar, di forum-forum resmi, dalam surat kabar, dan penerbitan lainnya. Karya Pusat Bahasa yang dianggap paling monumental hingga saat ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang berhasil diterbitkan pada 1988.

Pakar bahasa Harimurti Kridalaksana mengidealkan Pusat Bahasa memiliki sebuah bank kosa kata yang menyimpan semua kosa kata yang dipakai para penutur. "Di AS, ada sebuah pusat dokumentasi leksikologis yang memiliki gedung megah bertingkat dua," kata Harimurti, mengisyaratkan kegiatan perkamusan sebagai salah satu ukuran keberhasilan sebuah lembaga semacam Pusat Bahasa. Kegiatan perkamusan meliputi pengumpulan kosa kata (termasuk dari bahasa asing seperti yang gemar digunakan para wakil rakyat kita tadi), menyesuaikannya dengan kaidah baku, mencari padanan kata dan atau penjelasannya, dan tentu, membukukannya.

Untuk kegiatan itu saja, Pusat Bahasa sudah cukup kenyang mendapat kritik dari berbagai kalangan. Sastrawan Sutan Takdir Alisjahbana pernah menjuluki Pusat Bahasa sebagai "ayatullah" bahasa karena dianggap tertutup dalam menyusun dan menerapkan kaidah pengadopsian kata. Wartawan Rosihan Anwar lebih tandas lagi, "Bubarkan saja Pusat Bahasa," ujarnya menanggapi beberapa kekeliruan dalam

penyusunan KBBI. Kamus itu disempurnakan beberapa kali, pada 1991 dan 1995.

Itu baru dalam masalah perkamusan. Beralih ke kegiatan lain, yaitu menyebarkan tata bahasa dan tata kata baku, Pusat Bahasa tak kurang juga mendapat kecaman. Di jalan-jalan, bahkan di kantor-kantor pemerintah, kita masih dengan mudah menemukan tulisan yang tak sesuai dengan kaidah berbahasa. Misalnya, tulisan "Di larang merokok" (di dan larang ditulis terpisah) di salah satu ruang di Kantor Bappenas, Jakarta. Contoh lainnya, ya menjamurnya penggunaan kata asing di SU MPR tadi.

Menurut pengamat bahasa Lie Charlie, untuk urusan sosialisasi ini, Pusat Bahasa pernah menerbitkan *Lembar Komunikasi* secara berkala. Isinya meliputi bagan pengindonesiaan sejumlah kata asing. Entah kenapa, apa-apa yang disiarkan di media itu kurang memasyarakat. "Buktinya, tahukah Anda bahwa 'selampai' itu *tissue*, 'umpan tekak' itu *appetizer*, dan 'mendedahkan' itu *to expose*?" ujar Charlie, menyebutkan beberapa kata yang pernah dimuat *Lembar Komunikasi*.

Namun, tentu semua itu bukan semata-mata karena kelemahan Pusat Bahasa. Ini menyangkut dunia pendidikan, sikap masyarakat, rasa nasionalisme, dan banyak lagi. Hasan Alwi bercerita, seorang pimpinan sidang di DPR berkata, "Karena itu, jangan sampai kita *keprucut* menggunakan kata asing." *Keprucut* itu sendiri bukan bahasa Indonesia. ■

MUZAKKIR HUSAIN
LAPORAN: *RINI SUSANTI*

Panji Masyarakat, 20 Oktober 1999

Pendidikan Sastra di Sekolah-sekolah Mengalami Kegagalan

JAKARTA (Media): Pengajaran kesusastraan pada siswa melalui media komunitas belajar, dianggap lebih tepat dibanding diberikan melalui materi teoritis di sekolah-sekolah. Sementara, minat siswa terhadap bidang sastra sangat memprihatinkan.

Pendapat tersebut mengemuka dalam seminar *Sastra Masuk Sekolah* yang diadakan oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski) di Jakarta, kemarin. Acara tersebut merupakan rangkaian acara "Bulan Bahasa dan Sastra" ke XX.

Menurut Suroso M.Pd, ketidaktertarikan siswa pada bidang kesusastraan disebabkan metode pengajarannya bersifat teoritis. "Siswa merasa bosan bila disuruh membaca karya sastra yang halamannya tebal tanpa melibatkan emosinya. Dengan demikian apresiasi siswa terhadap sastra hanya pada penglihatan, tanpa melibatkan emosi mereka," katanya.

Keterlibatan siswa dalam pemahaman kesusastraan adalah hal yang mutlak, sebab bidang ini tidak dapat dihayati hanya dengan membaca dan menghafalkan tema-temanya. Makanya, dalam pembelajaran sastra, seorang guru harus kreatif membentuk wadah berupa komunitas sastra yang berfungsi untuk membina siswa secara teoritis dan praktis.

Pembentukan media komunitas belajar tersebut, tidak harus dalam lokasi atau pada tempat yang sifatnya formal. Tapi dalam satu kesempatan, siswa diberi peluang untuk berkolaborasi melakukan apresiasi sastra dengan melibatkan emosinya, sehingga pemahaman kesusastraannya semakin tajam. "Bila siswa paham tentang sastra, maka secara otomatis akan mencintai kesusastraan."

Selain itu Suroso menilai kurikulum 1994 yang berlaku saat sekarang cenderung memarginalkan mata pelajaran kesusastraan. Hal itu mempengaruhi minat siswa pada bidang kesusastraan. "Birokrasi dan kurikulum sering menganggap kesusastraan tidak penting, padahal bisa membentuk karakter siswa secara positif," ujarnya.

Sementara Ahid Hidayat melalui makalahnya bertajuk *Guru dan Kaki Langit Pengajaran Sastra*, mengungkapkan pengenalan kesusastraan pada siswa belum berhasil. Ini dapat dilihat dengan adanya minat lulusan SMU atau masyarakat terhadap sastra yang sangat minim.

Minimnya minat baca buku sastra menjadi indikasi bahwa masyakarat (yang pernah menge-nyam pendidikan) memang tidak mencintai dan tidak memahami sastra. "Itu artinya pendidikan apresisasi sastra tidak berhasil," tegasnya.

Pemakalah lain, MS Hutagalung juga mengemukan pemahaman dan pengetahuan sastra dari mahasiswa cenderung berkurang. "Banyak hal yang sepatutnya diketahui siswa tamatan SMU, apalagi mahasiswa yang memilih jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, ternyata tidak. Ini indikasi kurangnya pemahaman mereka terhadap sastra."

(ST/Daf/B-2)

Media Indonesia, 20 Oktober 1999

cuplikan

Bahasa Api

"Bagaimana *sih* sebenarnya kondisi perempuan-perempuan Jepang. Apakah kehidupan mereka masih terjepit kultur budayanya."

"Oh.. itu sara," jawab perempuan manis berkulit kuning langsat, bermata sipit yang memandangku malu-malu dari dua belah kelopak matanya.

Tanpa pikir panjang aku pun menutup pembicaraan di tengah hari itu. Aku tak ingin memperpanjang perbincangan itu, sebagai wujud rasa hormatku, untuk tidak menyinggung masalah-masalah sensitif kawan bicaraku.

Percakapan itu terjadi ketika pertama kalinya saya mengenal salah seorang kawan dari negeri sakura itu. O*mong* punya *omong* akhirnya saya ketahui bahwa yang dimaksud Michiko adalah *'salah,'* dan bukan *'sara'* seperti kedengarannya, dua kata yang jauh berbeda arti. Hanya karena dia tidak dapat melafalkan huruf l, maka yang keluar adalah *r.* dalam bahasa Jepang tidak dikenal —tidak ada— bunyi itu Keunikan ini membuat saya sedikit banyak mempertimbangkan untuk lebih memperdalam ilmu bahasa. Tentunya jika saya dan Michiko tahu akan hal itu, perbincangan kami tidak akan berhenti sampai di situ.

Dalam definisinya, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang *arbitrer* (mana suka) yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama berkomunikasi dan mengindentifikasikan diri. Artinya, penentuan sistem bahasa itu berdasarkan mana suka dan sesuai kesepakatan masing-masing masyarakat pemakainya. Hal itu merupakan jawaban logis atas keragaman dan kekayaan bahasa yang ada di dunia ini. Salah satu hal terpenting dalam bahasa dan berbahasa adalah fungsinya dalam menciptakan sebuah pemahaman. Definisi bahasa tidak hanya sebatas sistem lambang bunyi tetapi juga sebuah medium atau alat untuk menciptakan komunikasi.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sadari bahwa kita mengalami beraneka macam situasi kebahasaan dengan berbagai macam jenis masyarakat. Untuk itu pengetahuan kebahasaan dari lawan bicara kita sangat diperlukan. Dalam konteks hidup bernegara, apakah pemakaian bahasa parlementer cukup dapat dimengerti oleh para pemakai bahasa kebanyakan, bahasa rakyat?

Mencermati perkembangan terakhir di tanah air, khususnya perkembangan di gedung MPR RI yang penuh dengan detik-detik mendebarkan, telah terjadi berbagai macam peristiwa, *kasak-kusuk* politik. Akhirnya bangsa ini menghadapi sebuah pengalaman baru. Pengalaman bahwa pada akhirnya kita memiliki presiden keempat.

Berbagai macam bahasa digunakan masyarakat dalam menyikapi hasil lembaga yang mencoba menegakkan alam demokrasi itu, alam ideal bernegara. Bahasa yang digunakan tataran elite berbeda dengan rakyat kebanyakan. Realita baru terbentang di depan mata bangsa ini. Bahwa telah ada seorang manajer baru atas dua ratus juta penduduk bangsa yang bernama I.n..d.o.n.e.s.i.a. Realita mencatat bahwa pernah terjadi untuk berkomunikasi sebagian dari kita lebih memilih bahasa kekerasan untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran.

Perbedaan penggunaan bahasa sah-sah saja sepanjang kita masih mempunyai satu kerangka pemikiran yang sama yaitu demi terciptanya alam demokrasi. Tapi mungkinkah perbedaan bahasa itu masih mempunyai benang merah untuk dimengerti. Ketika sebagian dari kita lebih memilih menggunakan bahasa api, bahasa golok, bahasa molotov, bahasa kekerasan untuk bisa *nyambung* dengan bahasa parlemen. Ataukah perangkat bahasa parlemen tidak cukup diketahui oleh pemakai bahasa yang lain. Atau sebaliknya justru pemakai bahasa parlemen tidak hanya tidak tahu perangkat bahasa api, bahasa golok, bahasa molotov, bahasa bom, bahasa kekerasan tetapi juga keberadaannya.

Bukankah—semestinya—parlemen adalah penjelmaan dari suara rakyat? Kemandekan –kalau toh bisa dikatakan kemandekan- komunikasi ini perlu dicurigai apakah karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu.

Bahasa demokrasikah ini ataukah demokrasi berbahasa. Inikah cara kita memberi arti kata demokrasi, bertindak sendiri-sendiri tanpa mengetahui perangkat bahasa masyarakat lainnya. Semoga bahasa api tidak menjadi kesepakatan bersama dalam berkomunikasi berbangsa. Ternyata, kita masih perlu banyak belajar.

Ade Setyawati

Agenda, 22-27 Oktober 1999

Semua Barang Elektronik, Wajib Gunakan Petunjuk Bahasa Indonesia

JAKARTA, (ANT/PR).-

Semua barang elektronik lokal maupun impor yang dipasarkan di dalam negeri tiga bulan mendatang, wajib dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan (Garansi) dalam Bahasa Indonesia. Misalnya, radio kaset atau mini compo, alat perekam atau reproduksi gambar dan suara (VCD, DVD, VCR Player), televisi, printer, monitor computer, lemari es, AC, mesin cuci, kompor gas, pompa air listrik untuk rumah tangga dan microwave oven.

Pernyataan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 608/MPP/Kep/10/1999, tentang Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Elektronika, di Jakarta, Jumat.

Petunjuk Manual barang elektronik tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi petunjuk operasional, petunjuk perbaikan dan pemeliharaan, serta spesifikasi produk. Sedang kartu jaminan atau garansi minimal diberikan dalam waktu satu tahun, termasuk ongkos perbaikan gratis selama garansi, dan jaminan ketersediaan suku cadang.

Petunjuk Manual dan Kartu Jaminan/Garansi tersebut wajib didaftarkan pada Ditjen Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA), untuk produksi dalam negeri dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) bagi produk elektronik impor, yang dapat dilakukan oleh asosiasi terkait, produsen ataupun importir sendiri.

Demikian pula dengan setiap perubahan Petunjuk Manual dan Kartu Jaminan/Garansi, pengusaha wajib mendaftarkan kembali ke direktorat itu. Pendaftaran dapat dilakukan bila perusahaan memiliki Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) bagi produsen dalam negeri. Bagi importir harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT). Juga pengusaha harus punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan jaminan pelayanan purna jual.

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan itu dilakukan oleh Menperindag bersama asosiasi, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan masyarakat sendiri. Dalam hal pengawasan Menperindag membentuk Tim Pemeriksa, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak dari Departemen Keuangan, Ditjen ILMEA dan IKAHH dari Deperindag.

Bagi perusahaan elektronika nasional yang melanggar ketentuan itu terkena sanksi pencabutan IUI atau TDI, dan bagi importir yang melanggar akan dicabut API atau APIT mereka. Sedang penjual yang mengedarkan atau memperdagangkan produk elektronika tanpa dilengkapi Petunjuk Manual dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia terkena sanksi pencabutan SIUP. Keputusan itu berlaku mulai tiga bulan mendatang, sejak ditetapkan SK No. 608/MPP/Kep/10/1999 itu pada 14 Oktober 1999 ***

Pikiran Rakyat, 25 Oktober 1999

Menyambut Bulan Bahasa Dan Sastra

Hilangkan Budaya Eufemisme, Retorika, Dan Pengaburan Makna Kalimat

Jakarta, *Pembaruan*

Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Gus Dur dan Megawati harus menghindari penggunaan kalimat-kalimat berbau eufemisme, pembenaran, jargon, retorika dan pengaburan makna bahasa. Ini merupakan tantangan besar, karena selama 32 tahun rakyat negeri ini telah dibius oleh ribuan kata dan bahasa tanpa makna.

"Rakyat sudah jengah, pengab, bosan dan ingin terbebas dari kepalsuan kata-kata rezim yang telah tumbang. Di era Indonesia baru ini, kita harus mengatakan benar jika benar, dan salah jika salah, sekalipun itu pahit dan menyakitkan. Ini lebih baik dari pada berbohong kepada 200 juta rakyat.

Demikian benang merah pembicaraan *Pembaruan* dengan pakar bahasa Indonesia, Dra Jumariam MEd; penyair, HS Djurtatap; guru SMK 46, Dra Astuti; guru SMP 216, Drs Supriyatno, dan guru SMU Nurul Iman, Drs Wahyu Ridwan, di sela-sela acara Bulan Bahasa dan Sastra 1999 di Jakarta, Senin (25/10). Tema bulan bahasa tahun ini adalah, "Melalui Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia dan Apresiasi Sastra, Kita Mantapkan Jati Diri Bangsa dalam rangka Memperkukuh Persatuan Bangsa".

Menurut Jumariam, pembodohan serta pemasungan bahasa tersebut terjadi karena metode pelajaran dan tata bahasa Indonesia kepada siswa selama puluhan tahun tidak benar. Hal ini menyebabkan munculnya para pemimpin bangsa yang tidak menguasai logika bahasa, makna kalimat, idiom bahasa dan semantik.

Membingungkan

Kerap terjadi di masa Orde Baru, pernyataan pejabat yang tidak bermakna, membingungkan masyarakat, cenderung eufemisme dan keluar dari kaidah bahasa. Itu semua adalah pembohongan dan pembodohan masyarakat, sehingga harus dihapuskan dan dibenahi.

Di sisi lain, apresiasi siswa sekolah dasar dan menengah terhadap pelajaran bahasa Indonesia masih sangat rendah. Tidak bisa dipungkiri, mata pelajaran ini masih dianggap sepele, kurang menyenangkan dan tidak bermanfaat. Ironisnya, sikap seperti ini terus terjadi selama 32 tahun, karena guru bahasa Indonesia kurang dapat menguasai materi secara tepat.

Djurtatap menambahkan, pembodohan masyarakat lewat pemaksaan bahasa dan pengaburan makna kalimat banyak terdapat dalam pernyataan pejabat. Penyusun naskah pidato atau

sambutan resmi tidak mengindahkan akidah berbahasa Indonesia secara benar. Fakta yang disajikan lewat kalimat panjang, berbelit-belit dan kurang memiliki logika, sering terjadi.

Menurutnya, yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini adalah pemimpin bangsa bermoral, memiliki hati nurani tinggi terhadap permasalahan sosial kebangsaan, mau berkata jujur, dan bersih terhadap permasalahan di tengah krisis multidimensional ini.

Tanpa ada kepekaan nurani terhadap jerit hati rakyat, pemimpin yang bersangkutan sebaiknya menyingkir sebelum disingkirkan oleh api kebenaran yang sedang berkobar di hati masyarakat.

"Saya berharap di era Indonesia baru ini, para pejabat tidak lagi mengeluarkan kalimat atau pernyataan yang membingungkan, menyesatkan, serta membohongi rakyat seperti yang terjadi pada masa lalu. Komitmen serta kemauan politik secara tegas untuk menjawab masalah ini perlu secara tegas dimiliki oleh barisan pemimpin pemerintahan Indonesia baru," tegas Djurtatap.

Apresiasi Siswa

Para guru yang dimintai komentarnya tentang masalah lemahnya apresiasi siswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia, sependapat bahwa hal itu terjadi karena banyak siswa tidak mengetahui secara jelas manfaat positif dari pelajaran bahasa di kemudian hari.

"Padahal dengan menguasai bahasa Indonesia secara tepat dan benar, mereka bisa menjadi penulis, pemikir, wartawan, sastrawan atau peneliti. Dengan menguasai bahasa berarti mereka menguasai dunia. Ini yang tidak disadari oleh para murid. Kami harus bekerja keras agar kesadaran akan pentingnya berbahasa secara baik dan benar dapat dikuasai," papar Wahyu Ridwan dari SMU Nurul Iman.

Berkaitan dengan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 1999, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa membuka kesempatan bagi anggota masyarakat.

Terutama pelajar dan pecinta bahasa Indonesia, untuk memanfaatkan pelayanan kebahasaan berupa konsultasi, tes, dan simulasi kebahasaan melalui program Pintu Terbuka.

Program berlangsung setiap hari dari pukul 09.00 sampai 15.00 WIB selama bulan Oktober. Pelayanan kebahasaan ini disediakan bagi anggota masyarakat yang memerlukan konsultasi langsung atau informasi melalui media telepon atau faksimil (E-5)

Suara Pembaruan, 26 Oktober 1999

Siswa di sekolah kesulitan pelajari bahasa Indonesia

- Pola pengajaran yang dikembangkan guru terlalu kaku
- Masyarakat cenderung meremehkan keberadaannya

BELAJAR bahasa Indonesia ternyata tak semudah seperti yang dikira banyak pihak. Ini terbukti antara lain dari nilai pelajaran bahasa siswa di sekolah yang umumnya lebih rendah jika dibandingkan pelajaran lain, padahal bahasa Indonesia digunakan mereka sehari-hari. Bahkan, seorang siswa bisa tidak naik kelas 'gara-gara' nilai pelajaran tersebut merah.

Bukan hanya itu karena saat ini kalangan siswa maupun kaum intelektual pun biasanya tidak 'becus' menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. "Ketidakmampuan mereka jelas akibat kesalahan dari awal ketika mereka masuk SD. Pola pengajaran bahasa Indonesia di sini cenderung kaku sehingga tidak menarik siswa," ujar Dra. Jumariam, MEd kepada *Terbit dan Suara Pembaruan*, Senin.

Jadi jangan heran ketika jam pelajaran bahasa Indonesia akan dimulai, banyak siswa di sekolah yang berusaha menghindarinya. Hal ini, kata ketua panitia Simulasi Kebahasaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, sebenarnya bukan karena siswa enggan mempelajari, tetapi karena mereka merasa pelajaran bahasa itu sulit.

Menurutnya, belajar bahasa Indonesia memang sulit karena untuk menguasainya siswa harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Meski begitu, katanya,sulit tidaknya belajar bahasa Indonesia, tergantung kepada gurunya. Kalau metode pembelajarannya kaku siswa jelas tidak tertarik.

"Karena itu guru harus mampu membuat bahasa Indonesia itu diminati siswa. Caranya mereka menguasai pola pemberian materi yang baik. Misalnya dengan simulasi atau dengan memberi tugas kepada siswa untuk mencari kata-kata atau kalimat di suratkabar," ujar Jumariam.

Simulasi, kata Jumariam, yang juga guru sebuah SMU di Jakarta, merupakan metode belajar bahasa yang mampu menarik minat siswa untuk belajar bahasa Indonesia. Simulasi adalah belajar sambil bermain. Melalui simulasi kebahasaan ini siswa dirangsang untuk tertarik belajar bahasa.

Metode seperti itu telah diterapkan beberapa guru bahasa di antaranya Drs. Suprayitno, guru bahasa SLTP 216. Menurutnya, untuk menarik siswa belajar bahasa dirinya menggunakan gaya yang mudah dan murah, tetapi diminati siswa. Misalnya merekam siswa membaca berita atau membaca puisi atau pantun dengan menggunakan tape recorder.

"Cara ini ternyata dapat menarik siswa belajar bahasa. Jika mereka malas atau sulit belajar bahasa, bisa dibayangkan bagaimana tingkat penguasaan bahasa generasi kita di masa mendatang. Saat ini banyak orang pintar, tetapi penguasaan bahasanya jelek," tambahnya.

Jumariam mengatakan saat ini siswa lebih tertarik belajar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. "Ini karena belajar bahasa Inggris lebih menantang, sedangkan bahasa Indonesia tidak. Karena itu agar siswa tertarik belajar bahasa Indonesia diperlukan penyeragaman metode mengajar." **(mya)**

Terbit, 26 Oktober 1999

Demokratisasi Bahasa

TAJUK RENCANA

WALAUPUN euforia reformasi sudah memasuki tahun kedua, mungkin baru saat ini terasa adanya hubungan erat antara reformasi dan dunia kebahasaan, yakni hal yang berkaitan dengan demokratisasi bahasa.

Dengan membiasakan rakyat berbicara apa adanya, memakai kata-kata seperti yang dimaksudkan, kita mengajar mereka untuk bicara sesuai dengan hati nuraninya. Berani berkata benar tentang segala hal, sekaligus bisa menjadi acuan untuk menangkap persoalan dan gejolak yang ada di masyarakat...

PRESIDEN Abdurrahman Wahid yang sudah kita ketahui bersama tidak suka pada formalitas, memperkuat sikapnya itu ketika memberi sambutan dalam pengumuman kabinet, Selasa. Dia menegaskan, kalau seseorang sudah biasa menyebutnya Gus Dur, tidak usah diubah hanya semata karena dia sudah menjadi presiden. Gus Dur sendiri langsung memprakkan kata-katanya itu dengan memanggil Wakil Presiden sebagai Mbak Mega saja. Kecuali dalam surat menyurat dan suasana resmi sesuai dengan ketentuan protokoler.

Tindakan yang dilakukan Gus Dur itu seharusnya segera membuka mata dan hati ahli bahasa untuk mengangkat lagi soal demokratisasi bahasa. Selama ini mereka umumnya ragu-ragu atau bahkan takut untuk bicara karena pemimpin negara ini masih suka yang berbau feodal. Kalau mengritik dan mengatakan yang sesungguhnya, maka bisa-bisa lembaga mereka menjadi bulan-bulanan. Maka kesalahan berbahasa, yang dilakukan dengan sengaja, dalam upaya memberikan penghormatan berlebihan pada atasan, berjalan seenaknya.

***

SALAH satu kesalahan fatal yang sampai kini masih dilakukan oleh kebanyakan media massa—dan bahasa lisan—adalah menyebutkan *Nyonya* dengan *Ibu*. Dua kata ini memiliki arti yang berbeda, tetapi karena kata *Ibu* dinilai lebih terhormat—dan juga pasangan Bapak—maka dia dipakai sebagai pengganti. Kita lalu terbiasa menyebut Ibu Tien Soeharto, Ibu Hasri Ainun Habibie, Ibu Panglima, dsb, meski yang dimaksud nyonya, bukan orangtua (perempuan) mereka.

Kesalahan ini terjadi karena ada penambahan kata *Bapak* di setiap jabatan, sebagai sebutan yang tidak diperlukan. Sebenarnya orang cukup menyebut *Presiden, Menteri, Gubernur,* dsb tanpa *Bapak*, sehingga istrinya pun tidak usah disebut dengan *Ibu*, cukup *Nyonya*.

Masih banyak kata-kata yang dipergunakan secara kurang pas, yang terkait dengan sikap feodal itu tadi. Misalnya beliau, yang kadang kurang pas karena ditujukan anak buah kepada *boss*-nya, atau seseorang tentang tetangganya. Padahal mestinya hanya orang-orang tertentu yang pantas dipanggil dengan kata *beliau*.

Pemuliaan kata-kata berperan besar dalam membentuk jarak antara dua orang yang berkomunikasi. Jarak ini lalu menciptakan formalitas dan mengurangi keakraban. Lalu terjadilah kesenjangan.

***

AHLI bahasa harus bisa memanfaatkan media massa, yang selama ini sangat berperan besar dalam sosialisasi bahasa, untuk semakin memasyarakatkan bahasa yang lebih egaliter dan demokratis.

Salah satu tindakan penting adalah mengembalikan kata-kata kepada arti sebenarnya. Tidak perlu lagi menyebut (orang) *ditangkap* dengan *diamankan*, (harga) *dinaikkan* dengan *disesuaikan*, karena hal itu sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

Sidang Umum MPR lalu memberi contoh secara langsung kepada kita bagaimana kalimat-kalimat yang lugas, apa adanya, tidak akan menjadi masalah karena memang begitulah maksudnya.

Dengan membiasakan rakyat berbicara apa adanya, memakai kata-kata seperti yang dimaksudkan, kita mengajar mereka untuk bicara sesuai dengan hati nuraninya. Berani berkata benar tentang segala hal, sekaligus bisa menjadi acuan untuk menangkap persoalan dan gejolak yang ada di masyarakat.

Tidak seperti selama ini. Ketika HM Soeharto mengadakan temu wicara, semua tampak beres, padahal di luar semesta "komunikasi" ala Orde Baru itu masalah begitu banyak. Ini karena Soeharto sudah menciptakan bahasa yang dia mau. Kita semua tahu dia jatuh karena tidak ada kebenaran dalam kata-kata para anggota MPR yang mengangkat dan lalu menjatuhkannya.

Kalau sudah begini, bahasa itu penting, bukan? ****

Warta Kota, 28 Oktober 1999

Reformasi Bahasa Indonesia

SARI OPINI

HARI ini,Kamis (28 Oktober) merupakan hari peringatan ke-71 Sumpah Pemuda, sekaligus sebagai puncak bulan bahasa yang kurang mendapatkan perhatian masyarakat luas. Padahal Bahasa Indonesia yang berperan vital dalam berbagai bidang kehidupan kini mengalami banyak masalah terutama dalam penggunaannya. Kedua opini edisi ini membahas masalah penggunaan Bahasa Indonesia di masyarakat

Tri Widati Wahyuningsih; *Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya* **:**

Jakarta Seharusnya Menjadi Pelopor

SEBAGAI pusat pemerintahan dan berbagai kegiatan lainnya, Jakarta dengan jajaran Pemda DKI-nya diharapkan selalu memberikan perhatian serius terhadap sikap disiplin dalam menjalankan tugas pelayanannya. Sikap disiplin itu tentu harus diterapkan dalam semua bidang termasuk dalam penggunaan Bahasa Indonesia (BI). Tercapainya sikap disiplin ber-BI akan memantapkan peran utama bahasa nasional sebagai sarana strategis pembangunan bangsa, pengembangan ilmu dan teknologi serta budaya bangsa. Kepeloporan Jakarta dalam penggunaan BI juga sangat berpengaruh bagi daerah lain. Sebut misalnya, penggunaan BI oleh para petinggi, media massa, "dunia" iklan dan sebagainya.

DALAM masyarakat patriarkhat, sosok pimpinan adalah panutan, apalagi jika pimpinan itu memiliki otoritas dan kharisma. Sudah umum terjadi, bawahan mudah mengimitasi tingkah laku atasan, termasuk dalam berbahasa. Berbagai kesalahan ber-BI berlatar belakang pengaruh akumulatif bahasa etnis maupun asing pada lidah para panutan, sering diimitasi begitu saja oleh khalayak ramai padahal latar belakang budaya mereka memiliki kosakata dan cara ucap yang jauh berbeda. Penertiban terhadap penggunaan bahasa nasional, terutama pada para tokoh atau di wilayah DKI Jakarta, memiliki urgensi dan arti penting tersendiri, karena sejauh ini masih banyak tokoh dalam ber-BI bukan sebagai sarana persatuan, melainkan hanya sebagai simbol ke-

banggaan primordial atau kelompok.

Meskipun tidak mudah, menjunjung tinggi eksistensi BI merupakan tugas bersama. Oleh karena semua pihak perlu menyadari bahwa upaya ke arah tertib ber-BI merupakan tanggung jawab bersama. Untuk meyakinkan bahwa hal ini merupakan tugas penting, kita bisa menengok sejumlah negara sebagai bahan perbandingan. Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, India, Arab Saudi senantiasa mempertahankan kualitas bahasa nasionalnya. Di sana bahasa negara juga dibina dan dijunjung tinggi di Ibu Kota negara yang sebagai tempat pemerintahan pusat melakukan segala aktivitasnya. Di sana, nama-nama gedung, pusat perbelanjaan, dan sebagainya, selain menggunakan bahasa nasional, juga mencantumkan bahasa asing sebagai informasi bagi pendatang.

Penertiban di DKI

Kalau kita perhatikan, Peraturan Daerah (Perda) No.1 Th 1992, yang berlaku sejak 7 Juli 1993, jelas mewajibkan penggunaan BI secara baik dan benar kepada warganya. Bahasa iklan, papan nama, papan petunjuk, dan kain rentang (spanduk) termasuk menjadi sasaran utama Perda tersebut. Di situ, antara lain ditetapkan bahwa pihak yang tidak mempedulikan peraturan tersebut diancam sanksi kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.

Selain Perda, Pemda DKI juga memiliki peraturan resmi yang mewajibkan masyarakat disiplin dalam ber-BI. Instruksi Gubernur DKI No 174 tanggal 8 Juni 1995 tentang Penggunaan BI secara Baik dan Benar seperti pada Papan Penunjuk, Reklame, Kain Rentang, dan Papan Nama menunjukkan hal itu. Kiranya peraturan-peraturan itu perlu mendapatkan perhatian serius terutama dari kalangan petinggi di bidang pemerintahan, partai politik, organisasi kemasyarakatan maupun bisnis. Apalagi dalam Perda itu diinstruksikan, agar pimpinan organisasi politik dan sosial-kemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta, menghindari nama atau istilah asing. Jika kini masih ada pemakaian nama atau istilah asing hal itu jelas telah melanggar Perda yang memberikan batas waktu hingga tanggal 17 Agustus 1995.

Pemda DKI hendaknya selalu meminta kepedulian para pengusaha jasa media promosi dan pemilik papan promosi agar senantiasa menggunakan BI dalam tayangan promosinya. Pada dasarnya, penggunaan beberapa istilah bahasa asing dalam BI dimaksudkan untuk mengundang daya tarik dan untuk berekonomi kata. Misalnya, istilah *coffee shop, fitness centre, fast food, dan sea food restaurant,* terasa lebih menarik dibanding dengan melafalkannya dengan *kedai kopi, pusat kebugaran, restauran siap santap dan restauran makanan laut.* Selain itu, penggunaan istilah asing dianggap enak dibaca dan didengar serta menimbulkan gengsi. Misalnya, *Niaga Tower, Ratu Plaza, Pondok Indah Mall, Lippo City, Jakarta Design Centre.*

Masalah menarik dan enaknya istilah tersebut, sebenarnya lebih berkait dengan sikap mental. Namun, sebagai jalan tengah, mengingat Jakarta sebagai pintu gerbang masuk para tamu asing dan daerah tujuan wisatawan yang potensial, mungkin perlu dipertimbangkan pencantuman nama/istilah asing di belakang (atau dalam kurung) nama atau istilah dalam BI. Dengan demikian, secara psikososial, kita tetap memiliki apresiasi yang tinggi terhadap BI sebagai kebanggaaan nasional, apalagi di tengah adanya ancaman proses disintegrasi bangsa saat ini.

Pada kalangan intelektual/cendikiawan, eksekutif, politisi, dan kalangan yang mendapat pendidikan di luar negeri, kata-kata atau istilah asing kerap digunakan, baik dalam bahasa lisan lebih-lebih dalam bahasa tulisan. Hal ini boleh jadi agar mereka tampak lebih terpandang. Perihal kegetolan orang terhadap istilah/kata asing, secara jelas dapat kita saksikan ketika para anggota DPR/MPR bersidang atau memberikan keterangan pers kepada wartawan tentang seputar hasil-hasil Sidang Umum MPR.

Penggunaan istilah asing dalam berbahasa Indonesia, sebenarnya boleh saja dilakukan, sepanjang belum ada padanannya dalam BI. Sedangkan dalam penulisannya, istilah/kata asing harus ditulis dengan huruf miring/garis bawah. Sehubungan ini, kita harapkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), aktif melakukan penelitian, bahkan mencari masukan untuk mendapatkan padanan kata



atas istilah-istilah asing yang dibakukan. Kata-kata/istilah asing yang padanannya sudah dibakukan dalam BI, dapat kita peroleh dari P3B yang juga memberikan jasa konsultasi mengenai tertib ber-BI.



Keluwesan berbahasa

Kita sadar bahwa pemakaian kata/istilah asing, misalnya bahasa Inggris, perlu banyak dihindari demi ketertiban ber-BI. Lalu, apakah istilah asing harus ditolak? Tentu tidak. Sebab banyak kosakata dan istilah menyangkut dunia iptek yang belum atau tidak ada padanan kata atau istilahnya dalam BI. Jika terpaksa, ia dapat dipakai sambil menunggu bentuk serapan atau padanan bakunya dalam BI yang sesuai dengan tuntutan zaman pada Era Reformasi dan globalisasi ini.

Sekadar contoh, kata *revolution* menjadi *revolusi*, *action* menjadi *aksi*, *transaction* menjadi *transaksi*, dan sebagainya.

Jadi rasa nasionalisme kita tidak sampai pada tingkat menolak sama sekali kosakata/istilah asing, tetapi juga bukan berarti menerima begitu saja. Tentunya ini merupakan PR bagi P3B.***

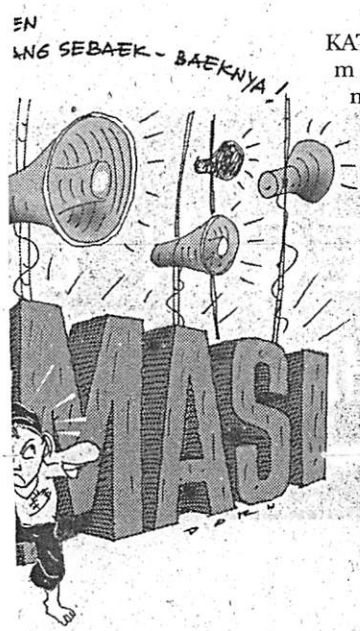
Warta Kota, 28 Oktober 1999

Soekirno; *Staf Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI* :

Mereformasi Mental Bagaimana Enaknya

PADA setiap bulan Oktober, porsi perhatian kita terhadap masalah bahasa dan berbahasa Indonesia meningkat. Sebab bulan Oktober memang merupakan bulan penting bagi bangsa ini untuk menengok kembali peristiwa yang berwawasan jauh ke depan, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kaum cerdik-cendekia menyatakan bahwa saat itu angkatan muda yang disebut sebagai Generasi 1928 meletakkan dasar tentang bangsa (*nation*), negeri (tanah air) dan bahasa persatuan. Khusus tentang bahasa, Generasi 1928 secara futuristis telah memilih Bahasa Indonesia (BI) d.h. Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan.

DALAM perjalanannya, terlihat jelas bahwa penggunaan BI secara nasional telah memberikan sumbangan besar bagi kemerdekaan bangsa. Sebab tidak mungkin kemerdekaan tercapai tanpa persatuan yang di dalamnya meletakkan bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif. Pada Era Reformasi (ER) ini, apalagi di tengah ancaman disintegrasi bangsa, disiplin dalam ber-BI kiranya memiliki urgensi dan relevansi psikologis yang nyata, karena BI merefleksikan realitas kehidupan manusia Indonesia. BI yang mantap akan memberikan sumbangan besar bagi pengutuhan rasa berbangsa dan bertanah air. Dan pada gilirannya ia merupakan daya bagi pemerolehan solusi terbaik dari terpaan krisis yang multidimensional saat ini.



***

KATA *reformasi*, misalnya, merupakan salah satu kata serapan dari bahasa asing (Inggris: *reformation*) kini demikian populer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata itu memiliki arti *perubahan secara radikal terhadap tatanan dalam segala aspek atau bidang kehidupan*. Artinya, jika perubahan atau perbaikan itu dilakukan setengah hati, maka tentu ia bukanlah reformasi, apalagi dalam pemahaman yang radikal ia justru mengandung implikasi keharusan adanya perubahan secara total.

Jadi kalau kita mengacu kepada KBBI untuk menjunjung tinggi BI sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan, maka dari segi ini pemerintah juga dituntut untuk melakukan reformasi secara total. Lebih-lebih, karena sebelum Orde Reformasi, pemerintah Orde Baru telah menciptakan dan memberlakukan suatu sistem kehidupan berbangsa maupun bernegara yang memberikan peluang bagi tumbuh suburnya praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan kronisme (KKNK) termasuk mengorupsi bahasa dengan segala implikasi buruknya.

Karena itu pula menjadi tuntutan mutlak bahwa secara moral-intelektual Pemerintah dan seluruh jajarannya bersama kelompok-kelompok masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap nasib BI. Bahkan pada ER ini, kita tidak cukup menggunakan BI secara baik dan benar, melainkan juga mampu ber-BI secara tepat. Jadi, jika Pemerintah tidak dapat mengartikan reformasi sebagai perubahan secara radikal, maka ia belum bisa dikatakan menggunakan BI secara tepat. Tentu tidak tepat sasaran jika dalam hal ini kita mengkambinghitamkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (PPPB). Sebab PPPB secara konsisten terus berupaya menjaga dan menumbuhkan BI dengan penuh rasa tanggung jawab terutama dilihat dari kaidah-kaidah linguistik. Kita tentu tidak menghendaki adanya kebekuan dalam ber-BI. Oleh karena itu BI perlu ditumbuhkembangkan secara dinamis. Namun baik disadari atau tidak, sikap mental kita sering kurang mendukung usaha pengembangannya, sehingga kita mudah tergelincir ke dalam penggunaan BI secara tidak "terjaga". Didorong sikap mental *bagaimana enaknya saja* dalam berbahasa, maka kita sering berfikir bagaimana mudahnya saja dengan berprinsip: yang penting apa yang disampaikan bisa difahami lawan bicara. Padahal kaidah berfikir ilmiah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berucap dan berperilaku asal-asalan, apalagi bila dilakukan dalam situasi atau forum-forum resmi. Ini penting bukan hanya dari segi "bahasa menunjukkan bangsa", melainkan — relevansinya pada ER ini — yaitu bahwa taat asas dalam penggunaan BI yang baik dan benar ikut memberikan dampak psikologis sebagaimana disebutkan terdahulu.

Sikap mental "bagaimana enaknya saja" dalam berbahasa merupakan hambatan psikologis bagi penggunaan BI yang baik dan benar atau yang dibakukan oleh PPPB, sebab masing-masing orang akan ber-BI sesuka hatinya sendiri. Ketidaktertiban dalam berbahasa ini mengakibatkan penggunaan BI kehilangan fungsinya sebagai bahasa persatuan. Itulah sebabnya diperlukan adanya reformasi kebahasaan, khususnya dalam mengimplementasikan penggunaan BI yang bukan saja baik dan benar, melainkan juga dalam hal ketepatan menggunakan logika berbahasa.

Untuk melakukan reformasi kebahasaan

tersebut, tentunya kita perlu mereformasi sikap mental lebih dulu, sehingga sikap mental *bagaimana enaknya saja* harus diubah menjadi *bagaimana baiknya dan bagaimana benarnya*. Misalnya, Kita tentu tidak akan dibenarkan apabila kita menggunakan kata 'merubah' untuk bentuk *verba*, jika yang dimaksudkan bersinonim dengan kata *menggantikan* karena ia berasal dari kata dasar *ubah*. Namun dalam ber-BI. umumnya logika berbahasa masyarakat kita bahkan masyarakat perguruan tinggi kita pun menurut pakar bahasa Dr Soenjono Dardjowidjojo, masih rendah. Menurut hemat penulis, biang keladinya ialah sikap mental "bagaimana enaknya saja" tadi. Padahal jika pengguna BI bersikap taat asas terhadap rambu-rambu ber-BI, kita sesungguhnya boleh saja menikmati 'keenakan' berbahasa.

Maka seyogianya upaya peningkatan ber-BI tidak hanya memaparkan secara merenik kaidah-kaidah BI dan ber-BI. Tidak kurang pentingnya ialah upaya membangun dan menumbuhkan sikap mental baru, berpindah posisi dari sikap mental *bagaimana enaknya* ke sikap mental *bagaimana baik dan benarnya* dalam ber-BI, khususnya dalam bahasa tulis atau forum-forum resmi. Juga sangat penting menumbuhkan rasa kebanggaan ber-BI, sehingga muncul rasa percaya diri untuk tidak "kemaruk" menyelipkan bahasa asing saat berbicara dalam BI.

Gedoran atmosfer reformasi yang mengedepankan keterbukaan, menurut Dr Imam Syafe'i, pakar bahasa dari IKIP Malang, berimbas pada menurunnya mutu kesantunan. Jika pada era Orde Baru BI cenderung eufemistis, pada ER bahasa yang dipakai acapkali bernuansa sarkastis atau kasar. Sebenarnya eufemisme bukanlah hal yang ditabukan dalam berbahasa. Namun selama Orde Baru, eufemisme telah disesatkan secara tersistem oleh penguasa untuk melancarkan/melindungi praktik KKNK. *Pelanggaran hukum* dimanipulasi sebagai kesalahan prosedur, agar pelaku lolos dari jerat hukum. Kenaikan harga (barang) direduksi menjadi *disesuaikan*, agar rakyat tidak memiliki alasan untuk melakukan protes dan banyak contoh lainnya. Mungkinkah istilah *koruptor* akan diperhalus menjadi *tuna hukum*?

Kalau ya, sikap dan perilaku semacam itu pasti akan sangat merugikan. ****

Warta Kota, 28 Oktober 1999

Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu Bangsa

Di tengah ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, perenungan tentang implementasi Sumpah Pemuda yang diikrarkan 28 Oktober 1928, sungguh sangat relevan. Satu bangsa: bangsa Indonesia. Satu tanah air: tanah air Indonesia. Satu bahasa: bahasa Indonesia. Kenyataan historis tersebut, melalui peringatan Sumpah Pemuda kali ini, kiranya dapat menyadarkan segenap bangsa Indonesia, agar berbagai kelompok tertentu surut dari tuntutan memisahkan diri dari negara kesatuan RI dengan alasan apa pun, meskipun Timor-Timur telanjur lepas dari wilayah Indonesia.

Dewasa ini masih ada kesan, seperti yang secara mencolok kita lihat waktu menyimak SU-MPR, bahwa meski padanan bahasa Indonesia dari istilah asing yang bersangkutan secara baku jelas ada, namun banyak anggota MPR yang seolah terkena demam bahasa Inggris. Kiranya kita perlu memiliki kesadaran untuk merasa bangga dengan bahasa Indonesia. Bukan hanya agar ketertiban dalam berbahasa Indonesia dapat kita laksanakan, tetapi juga dengan penalaran sehat bagaimana bangsa lain akan menghargai bahasa Indonesia, jika kita saja kurang mampu menghargai bahasa sendiri?

Pada bulan Oktober, wajar jika porsi perhatian kita terhadap masalah bahasa Indonesia meningkat. Pada 28 Oktober 1928, segenap pemuda kita tempo dulu bersumpah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jelas penggunaan bahasa Indonesia secara nasional memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia, sebab kita tak mungkin mencapai kemerdekaan tanpa persatuan bangsa.

Maka pada era reformasi ini, apalagi di tengah ancaman disintegrasi bangsa, disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia memiliki urgensi dan relevansi psikologis yang sungguh nyata. Dengan demikian rasa satu bangsa, satu bahasa dan satu Tanah Air, harus lebih ditingkatkan, agar kita secepatnya memperoleh solusi terbaik dari krisis multidimensi yang berkepanjangan.

Oleh: Soekirno

Konsekuensi Berbahasa

Berbahasa mengandung konsekuensi bagi si pemakai. Kata 'reformasi' misalnya. 'Reformasi' diadopsi dari bahasa Inggris *reformation*, dan kini demikian populer, paling tidak di Indonesia. Kalau kita tengok *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata reformasi diartikan sebagai perubahan secara radikal terhadap tatanan dalam segala aspek atau bidang kehidupan. Ini artinya, jika perubahan atau perbaikan dilakukan tanggung-tanggung alias setengah hati, (tentunya) bukan lagi reformasi, apalagi pengertian radikal justru mengandung implikasi keharusan adanya reformasi secara total.

Jadi kalau kita mengacu kepada kamus tersebut untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan, maka dari segi itu pemerintahan baru sekarang juga dituntut melakukan reformasi secara total. Lebih-lebih, karena sebelum Orde Reformasi, pemerintahan Orde Baru menciptakan dan memberlakukan suatu sistem untuk kehidupan berbangsa maupun bernegara yang memberikan peluang bagi tumbuh suburnya berbagai praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Sikap Netral

Karena kita tidak menghendaki adanya kebekuan dalam berbahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia perlu ditumbuhkembangkan secara dinamis. Namun baik disadari atau tidak, seringkali sikap mental kita kurang mendukung bagi usaha pengembangan kebahasaan tersebut, sehingga mudah tergelincir ke dalam penggunaan bahasa Indonesia secara tidak baik dan tidak benar.

Didorong sikap mental "bagaimana enaknya saja", dalam berbahasa kita sering berpikir bagaimana mudahnya saja dengan berprinsip: yang penting apa yang disampaikan bisa dipahami lawan bicara. Padahal kaidah berpikir ilmiah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berucap, berperilaku atau berbuat asal-asalan, apalagi bila dilakukan dalam situasi atau forum-forum resmi.

Hal tersebut penting bukan hanya dari segi "bahasa menunjukkan bangsa", tetapi yang lebih relevan di masa reformasi ini yaitu bahwa konsistensi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ikut memberikan dampak psikologis sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk melakukan reformasi kebahasaan tersebut, tentunya kita perlu mereformasi sikap mental (*mental attitude*) kita lebih dulu, sehingga sikap mental "bagaimana enaknya saja" harus diubah menjadi "bagaimana baiknya dan bagaimana benarnya". Kita misalnya, tidak dibenarkan untuk menggunakan kata 'dirubah' atau 'merubah', sebab berasal dari kata dasar 'ubah' yang mendapat awalan 'di' atau awalan 'me'.

Namun logika berbahasa dari mahasiswa dan pendidik perguruan tinggi di Indonesia, menurut pakar bahasa Dr Soenjono Dardjowidjojo, umumnya justru masih rendah. Mengapa demikian? Karena menurut kacamata penulis, mentalitas "bagaimana enaknya saja" masih melekat di antara kita. Meski demikian, asalkan konsisten memperhatikan rambu-rambu kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita sesungguhnya boleh saja menikmati 'keenakan' dalam berbahasa.

Maka seyogianya dalam memberikan penerangan kepada masyarakat, selain memaparkan bagaimana kita mesti berbahasa, tak kurang pentingnya adalah bagaimana memotivasi masyarakat agar bisa diajak untuk berpindah posisi dari sikap mental "bagaimana enaknya saja" ke sikap mental "bagaimana baik dan benarnya" dalam penggunaan bahasa Indonesia, lebih-lebih dalam bahasa tulis atau fo-

rum-forum resmi.

Ketika Habibie mau lengser dari tahta kepresidenan, 'mengundurkan diri' termasuk kosakata paling akrab di telinga/mata kita, karena semua media massa cetak maupun elektronik setiap hari memuatnya. Begitupun ketika Wiranto, Akbar Tandjung dan Yusril Ihza Mahendra mundur dari capres. Kata 'mengundurkan' tentunya berasal dari kata 'undur', dan bukan berasal dari kata 'mundur'. Padahal, yang dimaksud 'mengundurkan diri' dalam hal itu, yang bersangkutan mundur dari jabatan/pencalonan. Memang sangat terasa kata 'mundur' memiliki substansi yang sama dengan kata 'undur', namun konteks kalimatnya jelas berbeda.

Sesuai tuntutan reformasi total, Habibie itu 'mundur' atau 'undur' dari bursa calon presiden ke-4 RI? Jelas jawabannya, dia bukan 'undur' tetapi 'mundur'. Dengan pengertian ini, maka baru baik dan benar tata-bahasanya jika dikatakan Habibie 'memundurkan diri'. Sinonim kata 'undur' adalah 'tunda', sehingga hanya cocok untuk mengatakan sesuatu yang terkait dengan 'waktu'. Seperti dalam kalimat: "Karena desakan rakyat begitu kuat agar Habibie mundur dari jabatan presiden, lebih-lebih pidato pertanggungjawabannya jelas ditolak DPR/MPR, maka keputusannya untuk mundur dari pencalonan presiden ke-4 tidak dapat diundur-undur lagi".

Gedoran atmosfer reformasi yang mengedepankan keterbukaan, menurut Dr Imam Syafii, pakar bahasa dari IKIP Malang, berimbas pada menurunnya mutu kesantunan. Jika pada era Orde Baru bahasa Indonesia cenderung eufemis (penghalusan), pada masa reformasi bahasa yang dipakai acapkali bernuansa sarkastis atau kasar. Namun eufemisme selama Orde Baru, menurut hemat penulis, justru disalahgunakan para penguasa untuk melancarkan/melindungi berbagai praktik KKN.

(Bersambung ke hal 9 kol 6-9)

Penulis adalah staf pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-LIPI Jakarta

Suara Pembaruan, 28 Oktober 1999

Pengembangan Bahasa

Ragam Ipteks

Kurang lebih dua bulan lagi, kita akan memasuki tahun 2000. Kehidupan umat manusia dan masyarakat pada saat itu secara luas dan mendalam akan bergantung pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Dari pengalaman terbukti, ipteks baru dapat dikuasai dengan memuaskan kalau proses bernalar masyarakat telah terlatih. Latihan penalaran sampai tingkat tertentu (singkat, jelas, lengkap, teliti dan sistematis) secara mutlak menuntut penguasaan bahasa dengan sifat itu pula. Antara bahasa dan penalaran terdapat hubungan resiprokal.

Penalaran dan bahasa itu identik, hanya berbeda dalam soal status. Penalaran itu berada dalam otak manusia dan tidak dapat diketahui oleh siapa pun. Penalaran baru dapat diketahui oleh sesama manusia, jika sudah dinyatakan dan diaktualisasikan dalam salah satu bahasa, baik lisan maupun tulisan. Demikian pula manusia tidak dapat bernalar dengan jelas kalau tidak mempergunakan bahasa.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dalam usia yang ke-71 ini (28 Oktober 1999), dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan yang bercakupan amat luas itu mesti dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia oleh seseorang kepada orang lain, oleh seorang pembicara kepada lawan bicaranya, atau oleh seorang penulis kepada pembaca.

Pernyataan sikap "... menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia" dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada 17

Oleh: Khaerudin Kurniawan

Agustus 1945. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa negara (lihat pasal 36 UUD 1945).

Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Ipteks berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ipteks yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, melaju dengan pesat terutama menjelang abad ke-21 ini.

Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan ipteks dan zamannya. Pengalihan konsep-konsep ipteks dari bahasa asing belum seluruhnya dapat dicarikan padanannya ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, kosakata dan istilah asing mengalir deras ke dalam khasanah kosakata bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategis bahasa Indonesia sebagai bahasa ipteks masih memerlukan pengembangan yang lebih serasi dengan perkembangan ipteks.

Pengembangan Ipteks

Ikhwal pengembangan bahasa Indonesia ragam ipteks, hal itu dapat dihubungkan dengan klasifikasi bidang ilmu yang lazim berlaku di Indonesia. Yaitu ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS) dan ilmu pengetahuan budaya (IPB). Persoalannya, unsur "ip" pada "ipteks' itu merujuk pada bidang ilmu yang mana?

Berdasarkan pemakaian kata "ilmu pengetahuan" sebagai padanan kata *science (s)* dengan muatan makna *natural science*, maka unsur "ip" pada kata "ipteks" itu merujuk pada ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, bahasa Indonesia ragam ipteks itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Upaya pengembangan konsep ipteks dalam bahasa Indonesia itu hanya mungkin dapat dilakukan dengan baik, apabila istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bidang ipteks itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Itu berarti untuk dapat mengembangkan bahasa Indonesia ragam ipteks, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun peristilahannya.

Untuk keperluan itulah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dengan bantuan sejumlah pakar perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia menyusun istilah untuk berbagai bidang ilmu dengan memberikan prioritas pada empat bidang ilmu dasar, yaitu fisika, matematika, biologi dan kimia.

Keempat bidang ilmu tersebut masing-masing diberi judul *Glosarium Fisika, Glosarium Matematika, Glosarium Biologi,* dan *Glosarium Kimia.*

Berkaitan dengan arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai dan mengembangkan konsep-konsep ipteks modern, yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing. Agar konsep-konsep ipteks modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing, yang jumlahnya tentu tidak berarti dibandingkan dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukan demi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga penyebarluasan konsep-konsep ipteks itu harus dilakukan dengan bahasa Indonesia.

Sampai sekarang ini berhasil disusun tidak kurang dari 25 kamus istilah. Penerbitan daftar dan kamus istilah itu sangat penting dan bermanfaat untuk memasyarakatkan dan

menyebarluaskan perangkat istilah yang sudah dibakukan. Kalau upaya penerbitan itu tidak dilakukan, hasil penyusunan dan pembakuan istilah itu pun akan tetap tinggal sebagai harta karun.

Jika, para ilmuwan diharapkan menggunakan istilah yang dibakukan itu dengan taat asas, harus pula diupayakan agar arus balik yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam proses pengembangan bahasa selanjutnya. Karena itu, dipandang dari segi pembinaan bahasa, istilah-istilah yang masuk dan sudah dibakukan ke dalam buku ajar, makalah, laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah atau karangan-karangan ilmiah yang lain itu merupakan langkah berikut yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Penggunaan bahasa dalam bidang ipteks itu khas. Ciri dan karakteristik yang utama adalah lugas, lurus, monosemantik dan ajek. Dalam suatu uraian singkat, seorang ahli ipteks mampu mengemukakan banyak hal yang menuntut uraian panjang lebar bila hal tersebut dijelaskan oleh seseorang di luar bidang ipteks. Para pendengarnya akan memberikan respons yang tepat dan seragam. Seorang pakar ipteks menggunakan bahasanya secara efektif dan efisien.

Bahasa yang efektif adalah bahasa yang mencapai sasaran yang dimaksudkan. Bahasa yang efektif membuahkan efek atau hasil yang diharapkan pembicaraan, karena cocok dengan peristiwa atau sesuai dengan keadaan yang menjadi latarnya. Bahasa yang efisien ialah bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dipandang baku, dengan mempertimbangkan kehematan kata dan ungkapan. Baku atau norma bahasa itu jadi ukuran umum, yang mengatasi variasi dialek atau ideolek (perseorangan), bagi pemakaian bahasa yang

(Bersambung ke hal 9 kol 7-9)

Penulis adalah dosen FBSS Universitas Negeri Yogyakarta

Suara Pembaruan, 28 Oktober 1999

Politik Bahasa Nasional Dipraseminarkan

SEPULUH kertas kerja oleh sepuluh ahli bahasa mulai disajikan Selasa 29 Oktober ini, hingga Kamis sore 31 Oktober, dalam "Praseminar Politik Bahasa Indonesia" di Gedung Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, di Jl. Hang Jebat III/3, Kebayoran Baru, Jakarta.

Dr. Amran Halim, dari Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, merupakan penyaji kertas-kertas pertama, yang disusul oleh S. Effendi, dari Lembaga Bahasa Nasional. Masing-masing judulnya "Fungsi Politik Bahasa Nasional" dan Lembaga Bahasa Nasional dan Pengembangan Bahasa Indonesia.



Delapan kertas kerja berikutnya adalah "Politik Bahasa Nasional dan Pembinaan Bahasa Indonesia" (Prof. S. Takdir Alisjahbana SH), "Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Unsur Kebudayaan Nasional" (Prof. Dr. Koentjaraningrat), "Beberapa Masalah Sosial dalam Perumusan Politik Bahasa Nasional" (Dr. Harsja W. Bachtiar), "Politik Bahasa Nasional dan Ketahanan Nasional" (Imam Sukarsono), "Politik Bahasa Nasional dan Pengembangan Pendidikan" (Basjuni Suriamihardja), "Politik Bahasa Nasional dan Pengembangan Kesusastraan" (Ajip Rosidi), "Persoalan Bahasa Indonesia untuk Pers" (Goenawan Mohamad), dan "Politik Bahasa Nasional dan Pengajaran Bahasa" (Jazir Burhan). Menurut rencana, praseminar, yang seminarnya baru akan diselenggarakan Februari 1975 itu, akan ditutup dengan pembahasan perumusan hasilnya. (**Kompas**)

Warta Kota, 28 Oktober 1999

F1

BAHASA

Salah Ucap yang Harus Dihindarkan

WALAUPUN Bulan Bahasa tahun ini tidak dilaksanakan secara menggebu-gebu, namun fungsinya tetap relevan untuk mengingatkan kita bahwa pernah pada suatu ketika kita berikrar untuk tetap bersatu apa pun yang terjadi. Bahasa Indonesia sebagai lambang dan sarana persatuan merupakan salah satu kebanggaan bangsa yang masih dapat diketengahkan dalam suasana yang sangat tidak nyaman akhir-akhir ini. Siapa pun yang peduli sadar bahwa banyak aspek penggunaan bahasa yang perlu dibenahi dan disempurnakan, antara lain menyangkut pengucapan kata-kata asli maupun pinjaman.

Penulis langsung teringat pada kata Belanda yang sudah puluhan tahun hilang dari peredaran, tetapi tiba-tiba muncul kembali, *stembus akkoord*, yang hingga kini belum ada padanannya dalam bahasa kita. Kita tidak perlu heran bahwa kata itu diucapkan secara salah oleh beberapa tokoh politik, pembaca berita, dan wartawan di radio dan televisi, karena banyak di antara kita yang sudah tidak menguasai bahasa Belanda.

Jangankan kata yang sangat asing seperti itu, kata asli Indonesia yang tinggi frekuensinya, seperti *peka* dan *bentrok*, atau kata yang sudah diserap secara penuh, seperti *pasca* dan *kinerja*, pun sering diucapkan secara salah. Ternyata—kami catat— humor juga bisa menjadi sebab pengucapan (dan ejaan) yang salah.

Beberapa kali seorang pelawak dari grup Srimulat mengucapkan kata *musyawaroh* dan *istirohat* semata-mata sebagai lelucon; tetapi karena ia melafalkannya dengan penuh percaya diri, orang mengira itulah ucapan yang benar, sehingga kata *umrah* dan *salat* yang sudah betul dilafalkan dan dieja secara salah sebagai *umroh* dan *solat*!

***

NAMUN yang meresahkan dalam dunia lafal bahasa Indonesia dewasa ini ialah kecenderungan tokoh-tokoh masyarakat mengucapkan kata-kata yang sudah dibakukan dan sudah resmi menjadi warga kata Indonesia dengan cara bahasa Inggris. Kata *produk* dilafalkan sebagai *prodak*; dan *klien* dibaca *klain*; kata *fluorida* dibaca *fluoraid*. Huruf *y* yang sudah lama dibakukan sebagai [*yé*] pun dibaca [*wai*]. Kata yang bukan kata Inggris seperti *ad hoc* pun dalam laporan Sidang Umum MPR yang lalu dibaca [*èd hok*], padahal kata itu kata Latin yang aturan lafalnya hampir serupa dengan bahasa Indonesia dan tidak seruwet bahasa Inggris. Kata Latin *fac simile* [*faksimilé*] yang menjadi *faximile* dan disingkat *fax* sudah dibakukan menjadi *faksimile* dan *faks* ternyata diinggriskan kembali menjadi *faksimili* dan [*fèks*]; begitu pula halnya kata Yunani *systema* yang sudah dibakukan menjadi *sistem* dan dilafalkan [*sistém*] ternyata diinggriskan kembali sebagai [*séstem*].

Memang pengetahuan tentang asal usul kata tidak harus dimiliki semua orang, tetapi bahasa mana pun di dunia ini mempunyai konvensi lafal yang menjadi salah satu rambu kerja sama sosial yang dinamai bahasa. Untuk melafalkan unsur-unsur bahasa tidak diperlukan pengetahuan etimologi, karena kita sudah mempunyai kamus yang siap untuk dirujuk setiap saat. Lafal yang tepat itu ibarat pakaian rapi yang memberi suasana nyaman dalam pergaulan manusia yang santun.

(Harimurti Kridalaksana, *ahli bahasa dari Fakultas Sastra UI*)

EJAAN	UCAPAN	
	Salah	Betul
peka	peka	péka
pasca	paska	pasca
y	wai/èi	yé
umrah (bukan: umroh)	umroh	umrah
salat (bukan: solat	solat	salat
atau sholat)		
klien	klain	klièn
sistem	séstem	sistém
produk	prodak	produk
fluorida	fluoraid	fluorida
faks (bukan: fax)	fèks	faks
faksimile	faksimili	faksimilé
ad hoc (Latin)	èd hok	ad hok

Kompas, 28 Oktober 1999

Perjalanan Bahasa Indonesia Setelah 71 Tahun Diikrarkan

Oleh Arwan Tuti Artha

MENGAMATI perjalanan bahasa Indonesia — bahasa yang banyak kita pakai untuk berbagai kegiatan formal atau nonformal seperti berkomunikasi, menulis, menyampaikan gagasan, dsb — sungguh menarik karena mengandung dinamika. Perjalanan itu sendiri sesungguhnya masih belum dikatakan final, meskipun sudah menempuh perjalanan lebih 70 tahun. Setelah diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 — yang sudah 71 tahun kita peringati — ternyata tidak secara otomatis orang memahaminya sebagai bahasa persatuan, sehingga masih dibutuhkan pembakuan-pembakuan.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih terjadi hiperkorek, pemborosan kata, bahasa campuran, perkecualian, yang ditunjukkan oleh masyarakat penutur bahasanya. Artinya, gambaran bahwa sebagai orang Indonesia sudah secara otomatis bisa berbahasa Indonesia dalam praktiknya, belum tentu benar. Karena itu, bahasa harus dipelajari. Harus dipahami. Sehingga tercipta pemakai bahasa yang mumpuni dan tidak melakukan kesalahan bahasa.

Memang, dibandingkan sepuluh atau lima belas tahun lalu, kesalahan-kesalahan berbahasa itu sudah mulai kecil terjadi. Ini tentu berkat peran lembaga bahasa yang melancarkan kampanyenya melalui berbagai macam media. Termasuk beberapa kali kegiatan Bulan Bahasa yang tak pernah putus. Selain itu, pers juga banyak andil dalam hal sosialisasi perkembangan bahasa.

Namun, bila kita mencermati, kesalahan-kesalahan bahasa itu terjadi antara lain karena lemahnya pemahaman terhadap ejaan, kata, dan kalimat — terutama hubungannya dengan bahasa tulis. Masih sering kita baca kalimat tidak gramatikal ditulis besar-besar. Juga banyak kalimat yang tidak jelas maksudnya, karena rancu dalam menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kesalahan-kesalahan semacam itu apabila dibiarkan tentu saja akan menggiring masyarakat menirukan hal yang tidak benar.

Tidak salah apabila dikatakan bahwa bahasa pada dasarnya adalah proses menirukan. Apabila yang ditiru itu salah, maka yang berkembang adalah yang salah. Kata *pasca* apabila diucapkan *paska*, tentu belum sejalan. Begitu pula kata *syarat* bila ditulis *sarat*, tentu bisa menimbulkan arti yang berbeda. Tidak salah bila media massa punya tanggung jawab sangat besar, karena langsung berhadapan dengan masyarakat, untuk memberi contoh bahasa yang benar.

Kesalahan-kesalahan berbahasa bisa terjadi, karena bahasa akan selalu terikat dengan gramatika — yakni semacam aturan main yang diberlakukan pada suatu kurun zaman. Sehingga, apabila kita tidak memahami tata bahasanya, kita akan kesulitan dan akan tersandung dalam berbahasa. Padahal, bahasa Indonesia apabila dibandingkan dengan bahasa Jerman atau bahasa Sanskerta, sesungguhnya tidak terlalu sulit dipelajari. Apalagi, dari sejak kelahirannya bahasa Indonesia sudah menunjukkan demokratisasinya.

Kosakata bahasa Indonesia tidak dibedakan oleh skala waktu sebagaimana bahasa asing, sehingga tidak menyulitkan. Kemarin, hari ini dan besok, misalnya, kosakata yang digunakan tidak menunjukkan perubahan. Bahkan antara apa yang ditulis dan ucapannya sama saja, tidak seperti bahasa Inggris, misalnya. Sehingga, siapa pun akan sangat mudah menggunakan bahasa Indonesia.

***

MESKIPUN bahasa Indonesia sudah diikrarkan sejak 28 Oktober 1928 itu, sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi, toh masih menyisakan banyak catatan. Misalnya apa yang diberi nama dengan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu yang dalam perkembangan serta pertumbuhannya, terus berubah, terus diperkaya dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Dengan kata lain, bahasa Indonesia yang kita kenal ini adalah bahasa Melayu yang sudah berubah. Bahasa suatu bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia.

Tetapi, Indonesia adalah sebuah karakteristik. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, ternyata tidak cuma bahasa Indonesia. Karena itu jangan terkejut apabila masih ada masyarakat yang menggunakan bahasa daerah. Hal ini dimungkinkan pada masyarakat di wilayah yang bahasa daerahnya besar jumlah pemakainya dan bahasa itu hidup dalam masyarakat sebagai alat komunikasi.

Di sisi lain kita pun masih melihat kenyataan lain. Bahwa ada penutur bahasa Indonesia yang tidak dapat menggunakan sepenuhnya bahasa Indonesia untuk mengungkapkan perasaan, terutama pikirannya, sehingga harus lari ke bahasa daerah atau bahasa asing yang dikuasainya. Masyarakat yang kental bahasa daerahnya, akan merasa lebih pas bila menggunakan bahasa daerah itu untuk menyebut suatu istilah, misalnya *kunduran*. Begitu pula dengan bahasa asing, yang biasanya tampak pada kalangan terpelajar.

Di dalam konteks politik bahasa, kita harus menyadari bahwa bahasa Indonesia itu digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman dalam bahasa, adat-istiadat, kebudayaan, pendidikan, bahkan kepentingannya. Selain itu, bahasa Indonesia juga diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing melalui penyerapan berbagai unsur fonologi, morfologi, sintaksis dan kosakatanya.

Memang, tidak ada sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran bahasa, sebagaimana dikatakan Dr JS Badudu dalam bukunya, *Cakrawala Bahasa Indonesia* — yang sebagian besar mengilhami lahirnya tulisan ini. Tetapi, barangkali kita ingin bahasa kita itu tumbuh menjadi bahasa yang mantap. Sehingga dibutuhkan kesadaran untuk mencintai bahasa itu sendiri sebagai bahasa persatuan dan kesatuan. Orang boleh tidak paham pada bahasa daerah atau bahasa asing, umpamanya, tetapi orang harus paham pada bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia.

Kesadaran menjadikan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, harus didukung. Program pembelajaran bahasa yang menjanjikan seseorang terbebas dari buta bahasa, harus menjadi tanggungjawab kita bersama. Sebab, kurangnya penguasaan bahasa Indonesia, menyebabkan rendahnya apresiasi mereka terhadap bahasanya sendiri. Kekhawatiran ini bisa menyebabkan alienasi, rasa keterasingan, dan kendurnya semangat nasional dalam pengembangan bahasa. □ - k

*)Drs Arwan Tuti Artha, wartawan SKH Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober 1999

Bahasa dan Bayang-bayang Totalitarianisme

Mustaqim
Pemerhati Bahasa

Mengherankan sekali, setelah Soeharto "terjungkal" dari kursi kepresidenan, para ahli bahasa tak tergerak membebaskan diri dari totalitarianisme Orde Baru. Mereka, terutama dewa-dewa yang menjadi denyut kehidupan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) tetap saja merasa yakin, "bahasa yang baik dan benar" masih berkuasa atas kehidupan realitas bahasa yang lain. Karena itulah, peminggiran dan penyingkiran terhadap bahasa-bahasa yang berada di luar ciptaan mereka, terus saja berlangsung sebagaimana akhiran kan yang tetap dilafalkan sebagai ken oleh sebagian pejabat kita.

Memang harus diakui, sebagai "bahasa nasional", bahasa Indonesia memiliki implikasi politik. Karena itulah, dalam kehidupannya yang terpenjara, mau tidak mau ia hanya bisa tampil sebagai pengukuh hegemoni rezim yang berkuasa. Tetapi, sesungguhnya cita-cita Sumpah Pemuda yang pada 28 Oktober 1999 ini genap berusia tujuh puluh satu tahun dalam "menjunjung bahasa persatuan", bukanlah untuk sekadar menjadikan bahasa melayu tinggi sebagai penyangga kekuasaan. Dalam pandangan Ben Anderson (1985), sebenarnya ia justru difungsikan sebagai bahasa perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan bahasa pengharapan akan masa depan.

Sayang sekali, seperti yang ditunjukkan Ariel Heryanto (1980), oleh rezim Orde Baru —melalui P3B— bahasa yang benar-benar hidup di masya-

rakat dianggap "jelek dan keliru". Selain itu, ia cuma dijadikan sebagai komoditas sosial yang penciptaannya dimonopoli. Malah, tak jarang bahasa yang dianggap tak berguna dibuang dan "yang asing" ditendang seraya bangga saat seluruh sistem sarafnya mengidap xenophobia yang berlebihan.

Masalahnya, apa yang terjadi ketika bahasa berada di bawah bayang-bayang semangat totalitarianisme semacam itu? Bagaimana jika seluruh unsur asing dilarang untuk digunakan? Tak sulit menjawab pertanyaan ini. Yang paling mungkin, kita bakal terasing dari ilmu-ilmu canggih, sebab sebagaimana teknologi canggih lain, ilmu-ilmu itu tak diciptakan dengan "bahasa yang baik dan benar". Kenyataannya, bahasa asinglah yang mampu menciptakan ilmu-ilmu yang menyejahterakan umat manusia itu.

Peminggiran bahasa

Ilmu (apalagi ilmu pasti dan alam) tentu tak bisa dinasionalisasikan dengan bahasa yang diciptakan P3B. Karena itulah, wajar jika Ariel Heryanto (1980) berpendapat, pengkajian kebijakan bahasa tak bisa ditempatkan pada "lingkungan terbatas". Tak mungkin di dalam lingkungan yang menempatkan linguistik sebagai sosok yang memperlakukan bahasa sekadar sebagai alat komunikasi dalam pembangunan itu, bisa diperoleh politik bahasa yang objektif.

Akibat dari kebijakan bahasa yang seperti itu tentu mudah ditebak. Bahasa informal dan populer akan cuma dianggap sebagai "bahasa pinggiran", sementara "bahasa pidato pejabat" yang terlalu banyak semangkin, daripada, dan ken-nya itu menjadi sakral dan "wajib" digunakan serta ditirukan.

Selain yang disusupi unsur asing, ragam bahasa apa lagi yang kehidupan dan perkembangannya dipinggirkan? Jawabannya banyak sekali. Antara lain ragam kreatif (sastra), jurnalistik (koran), usaha (iklan), ilmiah (ilmu), lokal (daerah), dan berbagai slang (bahasa khas preman, waria, sandi para profesional), dan ragam-ragam yang lain. Semua ragam itu dimarginalkan oleh kepatuhan publik atas bahasa yang baku, sehingga dalam kuliah analisis bahasa di fakultas sastra misalnya, kehidupan dan perkembangannya cenderung dibantai secara sadis.

Pertanyaannya, benarkah telah muncul sebuah kepatuhan publik yang tidak bisa ditawar-tawar? Benarkah tak ada lagi keresahan untuk menggunakan ragam kreatif dalam dunia sastra kita? Tentu saja ada. Namun sepanjang yang bisa diamati, ragam semacam itu hanya hidup di dalam dunia yang dihuni segelintir pengguna bahasa. Begitu "bahasa sastra" menyusup ke dalam pidato pejabat, dianggap tidak memunculkan situasi yang interaksional.

Karena itulah, pidato-pidato pejabat cenderung beku. Ini berbeda dari pidato Presiden RI yang pertama, Soekarno, yang sangat inspirasional dan persuasif lantaran tak menisbikan penyangga bahasa yang lain. Maka, tak perlu heran jika Soekarno bisa "menyihir" publik saat dalam amanat proklamasi mengatakan: "Aku bukan hanya berhadapan dengan rakyat Indonesia, pada saat ini aku juga berhadapan dengan seluruh dunia, seluruh rasa kemanusiaan".

Pemakaian kata aku dan gaya repetisi yang menggugah semangat itu, tentu hampir tidak mungkin ditemui pada pidato-pidato pejabat Orde Baru. Bahasa yang digunakan pejabat, seperti yang dikemukakan Virginia Matheson Hooker (1990), cenderung menologis, tak bisa ditawar, berwibawa, dan hadir sebagai komunikasi yang terencana, terarah berulang-ulang. Pidato yang semacam itu tentu tak interaktif, represif, dan tak membuat pendengarnya memiliki empati. Jadi jangan heran jika kita sering melihat banyak anggota DPR/MPR terkantuk-kantuk saat mendengarkan pidato para pejabat.

Persoalannya sekarang, apa yang harus dilakukan agar bahasa-bahasa yang dipinggirkan mendapatkan hak hidup kembali. Tidak ada cara lain, kecuali membebaskan para pengguna bahasa melakukan pemberontakan (tentu saja tak dengan pertumpahan darah) terhadap *grand narative* yang telah dibangun oleh P3B sejak 1975 silam.

Di antara ragam lain yang disingkirkan, bahasa iklan agaknya menjadi korban yang paling menyedihkan. Lantaran menganggap bahasa asing bisa mengatrol penjualan barang-barang yang dikomoditaskan, para pedagang memang lantas menggunakan kata-kata asing di neon sign, spanduk, dan papan-papan iklan lain. Parahnya, P3B tak setuju pada tindakan itu. Karena itu, terjadilah pempribumian bahasa dalam iklan-iklan kita. Semua nama toko mesti menggunakan bahasa yang sudah diresmikan, sehingga seolah-olah tak ada bahasa lain, kecuali "bahasa yang baik dan benar".

Yang menarik, ragam jurnalistik justru "main mata" dengan ragam baku. Meski masih bertumpu pada bahasa yang efektif, koran tetap berseteru

dengan ragam lokal (bahasa daerah) dan ragam asing (kosa kata nonresmi). Hal ini, ditunjukkan dengan masih diperlukannya cetak miring ketika di dalam sebuah berita nyelonong kata-kata semacam gebug, lengser keprabon, dan revolution.

Di antara semua itu, tentu yang menyangga "bahasa yang baik dan benar" adalah ragam bahasa pejabat. Yang unik, saat melafalkan bahasa yang disangka paling baik dan benar itu, para pejabat justru kedodoran. Kasus pengucapan semangkin, daripada, dan ken yang tak hanya diucapkan oleh mantan Presiden Soeharto, rasanya cukup untuk menjelaskan fenomena ini.

Otonomi Semantik

Namun bisa jadi sangat keliru jika kita beranggapan telah muncul kepatuhan buta terhadap bahasa yang diresmi-resmikan oleh P3B. Seperti yang telah diungkapkan Dede Oetomo (1987), P3B diragukan telah bisa menguasai, menyeragamkan, memodifikasi, dan merekayasa bahasa dan kehidupan sosial.

Dede Oetomo tidak keliru, sekalipun tak sepenuhnya benar. Memang, di masyarakat masih muncul ragam-ragam bahasa yang disingkirkan. Namun penggunaannya seperti ketika para aktivis prodemokrasi menggunakan kosa kata reformasi dan demokrasi. Keduanya sama-sama dianggap telah melawan tatanan rezim yang tengah berkuasa.

Malah, karena "bahasa yang baik dan benar" dikondisikan sebagai bahasa yang bergengsi, kelas menengah Indonesia merasa risi berbahasa daerah ketika berada di sebuah lokasi yang bergengsi semacam mal, supermarket, restoran ternama, dan tempat-tempat yang menyimbolkan kemodernan yang lain. Jika tidak percaya, tengoklah hiruk-pikuk di sebuah terminal kumuh. Anda pasti akan masih mendengar para pengguna bahasa memakai bahasa daerah masing-masing. Sebaliknya, para pelayan toko di Airport dengan aksen yang aneh menggunakan "bahasa yang baik dan benar" ketika berkomunikasi dengan para pembeli dagangannya.

Meski begitu, bukan tak ada sama sekali gerakan-gerakan yang berupaya menuntut hak hidup bahasa-bahasa yang dimarginalkan. Para sastrawan misalnya, sudah sejak lama menggugat monolitisme nilai bahasa Indonesia melalui karya-karya kreatifnya. Kasus puisi kotak Danarto, pembebasan kata dari makna Sutardji Calzoum Bachri, teater minikata Rendra, dan "komposisi puisi gegar bahasa" Afrizal Malna cukuplah untuk menjelaskan pemberontakan pengguna bahasa atas penyeragaman dan pembakuan bahasa yang dilakukan P3B.

Sayang sekali *counter culture* semacam itu tak dilakukan pengguna bahasa yang lain. Karena itu, tak perlu kaget jika menemui bahasa-bahasa iklan yang cenderung beku dan tak persuasif sama sekali. Sementara karena bahasa jurnalistik justru berproses menjadi *bureaucratic slang*, akhirnya ragam ini secara tak sadar telah menjadi alat P3B untuk mempropagandakan bahasa yang telah direkayasa itu.

Persoalannya sekarang, apa yang harus dilakukan agar bahasa-bahasa yang dipinggirkan mendapatkan hak hidup kembali. Tidak ada cara lain, kecuali membebaskan para pengguna bahasa melakukan pemberontakan (tentu saja tak dengan pertumpahan darah) terhadap *grand narative* yang telah dibangun oleh P3B sejak 1975 silam.

Caranya? Banyak cara bisa dilakukan, namun yang pertama dan terutama adalah memberikan semacam "otonomi semantik" kepada para pengguna bahasa agar bisa menciptakan dan memaknai bahasa seperti yang mereka kehendaki. Hal itu akan terwujud manakala pemerintah —dalam hal ini P3B— tidak lagi memaksakan penggunaan bahasa-bahasa yang telah disusupi ideologi. Bahasa, dengan demikian, harus "bebas ideologi", sekalipun memang tidak mungkin bebas dari politik.

Agar lebih jelas, mari kita ungkap kasus kata "revolusi" yang di Indonesia pernah dipuja (pada masa Soekarno) sekaligus ditakuti (pada masa Soeharto dan Habibie). Karena tidak "bebas ideologi", revolusi pada masa Soekarno dimaknai sebagai cara yang harus dipakai untuk melajukan perahu bangsa yang mahabesar. Aneh, pada masa Soeharto dan Habibie, kata yang tak menakutkan itu dimaknai; disifatkan sebagai ekstrem, fanatikus, dan radikal. Ini jelas membingungkan para pengguna bahasa yang ingin memandang bahasa secara objektif.

Karena itulah, pada peringatan Bulan Bahasa kali ini, ada baiknya digugat lagi peran P3B yang cenderung totalitarian dan otoriter itu. Mereka mesti dituntut mulai memberi hak hidup dan otonomi kepada berbagai ragam bahasa yang sejak dulu dipinggirkan dan disingkirkan keberadaannya.

Pendeknya, mereka tak perlu menolak unsur yang dulu dianggap "jelek dan salah" jika ternyata justru memperkaya kosa kata bahasa Indonesia. Bukankah kata "reformasi" yang berasal dari sesuatu yang dianggap "asing" serta "jelek dan keliru" itu ternyata justru bisa membikin Soeharto terjungkal? Mengapa kita tak menyadarinya? ■

Republika, 28 Oktober 1999

Bahasa Indonesia di Era Globalisasi

Oleh ABDUL HASIM

MENCERMATI perubahan tatanan dunia yang kian mengglobal terpaksa menyeret kita pada "pemahaman baru" bahwa kita – bangsa Indonesia – tidak mesti lagi berpandangan purisme terhadap bahasa Indonesia; ia harus tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perkembangan tatanan dunia dewasa ini.

Tak patut lagi kita mempersoalkan, misalnya suatu kata itu asli bahasa Indonesia atau bukan.

Pandangan purisme yang selalu menuntut "keaslian" justru akan terperangkap pada lingkaran setan, terutama dalam soal bahasa Indonesia. Mengingat, mempersoalkan keaslian bahasa Indonesia akan menyeret kita pada perdebatan kapan sesungguhnya bangsa Indonesia ada. Di samping itu, fakta menunjukkan bahwa kata-kata bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang sesungguhnya berasal dari berbagai bahasa yang ada di dunia, seperti bahasa Arab, Portugis, Belanda, Cina, Inggris, dan sebagainya. Sekadar contoh dapat dilihat pada kata-kata berikut: hadir, hafal (berasal dari bahasa Arab), kemeja (berasal dari bahasa Portugis), pakem (berasal dari Bahasa Belanda), bakmi (berasal dari bahasa Tionghoa/Cina), informasi (berasal dari bahasa Inggris), dan banyak contoh lain yang dapat kita temukan.

Guna memperkuat contoh di atas, contoh-contoh berikut yang dikemukakan Alif Danya Munsy (Yapi Tambayong) dalam bukunya "9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia adalah asing" (1996) menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mendapat pengaruh dari bahasa daerah dan juga bahasa-bahasa lain di dunia, misalnya, kata meski (Portugis: masque), setelah (Kawi: telas), sembahyang (Sanskrit: sembahyang), lohor (Arab: dzuhur), pasar (Persia: bazar), mengayuh (Minangkabau: kayuh), toko (Tionghoa: to-ko), listrik (Belanda: elektrisch), berfoto (Yunani: photos), artis (Inggris: artist), ditaburkan (Ibrani: tabbwur), perabotan (Betawi: perabot), unik (Prancis: unique), dan ternyata (Jawa: nyata).

Fakta di atas seakan menggugah kesadaran kita bahwa bahasa Indonesia memang terbuka untuk masuknya berbagai unsur dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Oleh karena itu, munculnya berbagai kata dalam perkembangan bahasa Indonesia sekarang – yang berasal dari bahasa asing (terutama bahasa Inggris) – tidak relevan dipersoalkan, asal kehadirannya berdasarkan kaidah penyerapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Justru – dengan kemunculan kata-kata yang berasal dari bahasa asing – Bahasa Indonesia menjadi kaya yang sekaligus juga menggambarkan betapa bahasa Indonesia berpotensi menjadi "bahasa dunia" sebagai mana ia mampu menyerap berbagai kata dari banyak bahasa di dunia.

Keterbukaan bahasa Indonesia untuk menyerap berbagai kata dari bahasa-bahasa di dunia hendaknya diikuti oleh pengguna bahasa Indonesia. Pengguna bahasa Indonesia harus rela hadirnya berbagai pengaruh dari bahasa asing itu, seraya kita tetap berpatokan pada kaidah yang ada dalam bahasa Indonesia. Artinya, ketika suatu kata yang berasal dari bahasa asing itu sudah masuk dan menjadi bahasa Indonesia kita harus melafalkannya dalam lafal bahasa Indonesia, tidak mesti dilafalkan setengah hati seolah-olah "tercium bau asingnya".

Era informasi

Jika kita beranggapan bahwa kita sekarang sudah

memasuki gelombang peradaban informasi (meminjam istilah Toffler), maka sesungguhnya peran bahasalah yang sangat menentukan. Oleh karena itu, jika bahasa Indonesia tidak mampu berkiprah dalam percaturan global informasi, maka bahasa Indonesia akan "dimakan" oleh bahasa lain yang mendominasi informasi dunia. Dengan demikian, perlu dipikirkan agar bahasa Indonesia mampu "go internasional".

Gambaran untuk menuju terealisasinya ke arah itu tidaklah terlalu buram, justru mulai temaram menuju terang. Perkembangan terakhir menunjukkan banyak negara di dunia mulai memalingkan perhatiannya pada bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kini telah diajarkan hampir di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Australia, Jepang, dan negara-negara kawasan Asia lainnya, termasuk Thailand Selatan.

Di Australia, bahasa Indonesia tidak hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi melainkan sudah merambah ke tingkat sekolah dasar. Bahkan, mulai tahun 2000 pemerintah Victoria di Australia telah menetapkan kebijakan memprioritaskan delapan bahasa asing - termasuk bahasa Indonesia – untuk diajarkan di sekolah-sekolah mulai tingkat persiapan (Prep School) (Nenden, 1999).

Dalam "Internasional Conference the Teaching of Bahasa Indonesia to Speaker of Other Languages" (Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing III) yang diselenggarakan pada 11-13 Oktober 1999 di Universitas Pendidikan Indonesia/IKIP Bandung terbukti banyak hadir delegasi dari negara-negara tersebut. Hal ini menandakan bahwa realitas bangsa-bangsa di dunia dalam mempelajari bahasa Indonesia tidak perlu diragukan.

Sementara itu, hasil survei terhadap 30 sekolah bahasa asing di Jepang menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia termasuk 10 besar bahasa asing yang diminati dunia industri Jepang, selain bahasa Cina, Thailand, Vietnam, Prancis, Inggris, Rusia, Korea, Spanyol, dan Portugal (*Asahi Shinbun Weekly AERA*, 1995).

Perlu diingat bahwa minat mempelajari bahasa asing di Jepang tidak sekadar untuk kepentingan akademis melainkan gambaran adanya minat masyarakat Jepang terhadap negara yang bersangkutan, misalnya, ketika pada tahun 1990-an jumlah wisatawan Jepang ke luar negeri meningkat tiga kali lipat, maka orang (Jepang) yang ingin mempelajari bahasa asing selain bahasa-bahasa Eropa – seperti bahasa Thailand, Korea, Cina, dan sebagainya – pun tiba-tiba meningkat secara tajam.

Begitu pula, tatkala dunia perdagangan dengan negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia mulai tumbuh, maka minat dunia industri di Jepang yang ingin mendidik stafnya agar menguasai bahasa yang digunakan di negara tersebut pun semakin meningkat.

Kenyataan itu, hendaknya tidak sekadar menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, lebih dari itu kita harus turut bertanggung jawab dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia.

Penataan, baik dalam konsep linguistik maupun penggunaan secara deskriptif-empirik, harus bersama-sama kita lakukan sehingga tercipta bahasa Indonesia yang mantap (dari segi aturan) dan dinamis (dari segi penggunaan).

Di samping itu, mengingat bahasa sesungguhnya

cermin budaya suatu negara, selayaknya pihak-pihak yang menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing niscayanya mempunyai gambaran "peta budaya" Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia yang memiliki keragaman budaya dari berbagai daerah dapat diinformasikan secara memadai kepada mereka (orang asing) yang sedang belajar bahasa Indonesia. Dengan ini pula diharapkan orang asing akan mampu memahami adanya keanekaragaman budaya Indonesia sehingga mereka tidak akan "merasa terkecoh" manakala menemukan perbedaan-perbedaan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia dari daerah yang berbeda.

Pada gilirannya mereka pun akan menjadi tahu dengan adanya variasi bahasa Indonesia yang ada dan digunakan di berbagai daerah di Indonesia.

Persoalan yang muncul sekarang adalah siapkah kita menyongsong gelombang informasi ini dengan menghadirkan bahasa Indonesia ke kancah dunia? Jawaban optimisnya adalah kita harus siap untuk itu, jika tidak maka bahasa kita akan tergilas oleh bahasa-bahasa besar lain di dunia (terutama bahasa Inggris).

Muara dari "kekalahan" pertarungan bahasa adalah kita akan mengalami akses informasi yang sempit - - yang justru sangat diperlukan dalam gelombang peradaban informasi sekarang.

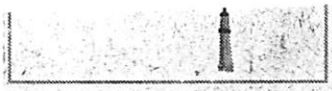
Dengan demikian, akhirnya kita tidak saja sulit untuk bangkit dan menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa beradab lain di dunia, tetapi justru kian terpinggirkan. Semoga tidak! *Wallahu'alam bis-shawab.****

- Abdul Hasim, siswa S-3 PPs Universitas Pendidikan/IKIP Bandung.

Pikiran Rakyat, 30 Oktober 1999

BAHASA JAWA-ULASAN

Pelajaran Bahasa Jawa Dinilai Tak Berguna



PERNAHKAH Anda disapa seseorang dengan menggunakan tutur bahasa yang lembut, sopan dan santun ? Mungkin Anda akan merasa sangat senang dan membalas dengan santun pula. Namun bagaimana rasanya jika suatu saat Anda disapa dengan tutur bahasa yang kasar ? Mungkin Anda akan menjawab dengan ketus dan kasar, atau Anda akan berpura-pura tidak mendengar.

Seperti pepatah bilang, *bahasa menunjukkan bangsa*. Begitulah, siapa diri kita akan terlihat —antaralain— dari bagaimana kita bertutur kata. Seperti dikatakan oleh Dr Pranowo, dalam Seminar Bahasa-Sastra Daerah dan Pengajarannya, yang berlangsung di Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (9/10) siang.

Menurut Pranowo, sikap santun dalam berbahasa menunjukkan kematangan emosional seseorang. Kematangan emosi anak-anak akan semakin baik jika ditanamkan kesantunan berbahasa sejak dini. Menanamkan kesantunan berbahasa kepada anak-anak tidak mudah, karena menuntut kemampuan untuk memberi-tahu dan memberi contoh bahasa yang santun serta membetulkan jika ada kesalahan.

Dalam konteks Bahasa Jawa, kesantunan seseorang dalam berbahasa dapat ditunjukkan melalui beberapa prinsip. Menunjukkan sikap arif yang bercirikan, selalu memberikan keuntungan kepada orang lain, misalnya *Dhahar dhisik sak durunge tindak, lho Nak!*. Sikap dermawan, yakni selalu berusaha agar orang lain untuk dan dirinya merugi, misalnya *Yen kersa, agemen sepedaku!*. Sikap rendah hati, dengan cara memuji diri sendiri sesedikit mungkin dan mengecam diri sendiri sebanyak mungkin, *Lha menawi mung sak kula menika, menapa ta Mas!*

Memberikan Pujian

Kesantunan berbahasa juga dapat ditunjukkan melalui sikap suka memuji orang lain. Dengan cara memberikan pujian sebanyak mungkin kepada orang lain dan tidak suka mengecam, *Sliramu kok malah saya tambah timur.*. Kalau terpaksa mengecam orang lain, hendaknya dipilih bentuk positif, *Sesuk maneh, sliramu kudu luwih ngati-ati!* Selain itu, kesantunan berbahasa juga dapat dibangun melalui sikap kecocokan, dengan cara menunjukkan banyaknya kesepakatan dengan orang lain. *Dheweke pancen bocah sing lantip tenan pangrahitane; Ha..a ya!* Tunjukkan pula sifat simpati, misalnya *Aku mireng panjenengan saiki saya laris anggone dadi Pranata Cara.*

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Ekalawya bekerjasama dengan Pusat Studi Budaya

Lemlit UNY hadir pula Dr Sudaryanto, Dra Kuswa Endah MHum, dan Drs Sudartomo M MHum sebagai pembicara. Kuswa Endah mengingatkan, bahwa menanamkan kesantunan berbahasa pada anak bukan perkara gampang.

Menurutnya ada beberapa hal yang menghalangi pengajaran *unggah-ungguh* bahasa Jawa terhadap anak-anak. Kemajuan teknologi hiburan, misalnya. Membuat anak-anak lebih suka menirukan perilaku dan pembawaan tokoh yang ditontonnya di layar televisi. Padahal perilaku tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa khususnya Jawa. Cukup banyak guru SD yang kurang memperhatikan pelajaran Bahasa Jawa karena dinilai tidak berguna.

Tidak Digunakan

Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari Bahasa Jawa sudah tidak digunakan dalam percakapan di keluarga. Pergaulan antar-sukubangsa yang menyebabkan lahirnya bahasa campuran. Kurangnya waktu untuk belajar Bahasa Jawa, serta kurangnya buku teks yang berkaitan dengan *unggah-ungguh* bahasa serta budi pekerti yang mendorong siswa dapat belajar secara mandiri.

Bagaimanapun, pengenalan dan pemahaman *unggah-ungguh* bahasa sangat diperlukan. Karena sebagaimana disampaikan oleh Sudartomo dalam kesempatan tersebut, ungkapan dalam bahasa Jawa memiliki keragaman jenis yang perlu diperhitungkan dalam pemaknaan. Ungkapan dalam bahasa Jawa merupakan salah satu bentuk optimalisasi potensi bahasa yang dapat membangun pesan dan informasi secara komprehensif. Selain itu, pemaknaan ungkapan dalam bahasa Jawa perlu dikonfrontasikan dengan ungkapan-ungkapan lain guna mendapatkan pemahaman secara mendalam dan meluas.

Berbeda dengan ketiga rekannya, Dr Sudaryanto mengingatkan keberadaan bahasa dan sastra Jawa yang lebih dikenal sebagai bahasa lisan. Meskipun sebenarnya memiliki tradisi tulis yang pada awalnya dipelihara oleh kraton. Namun tradisi lisannya lebih dominan dan mendasar. Hal ini mengandaikan atau mempersyaratkan adanya kondisi dan situasi tatap muka atau bersemuka. Artinya, penggunaan bahasa mutlak mempertimbangkan jarak lihat dan jarak dengar dengan mereka yang terlibat dalam proses berbahasa atau bersastra.

Sebagai konsekuensi, pragmatika dan semiotika merupakan dua hal yang sangat terkait dalam berbahasa dan bersastra. Berkaitan dengan hal ini, fenomen keikonikan (gambaran apa yang dimaksud-red.) menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pengikonikan menjadi strategi dalam berbahasa untuk menghadirkan apa yang diinginkan atau dimaksudkan dalam konteks kekinian yang lingual.

(S Edi Santosa) o

Kedaulatan Rakyat, 11 Oktober 1999

BAHASA LAMPUNG-ULASAN

Ancaman Kepunahan Bahasa Lampung Diseminarkan

UNIVERSITAS Lampung (Unila) bekerja sama dengan ormas atau paguyuban Lampung Sai, akan menyelenggarakan 'Seminar Bahasa dan Tulisan Lampung' guna mengantisipasi ramalan para ahli linguistik tentang kemungkinan punahnya aksara dan bahasa Lampung. Rencana seminar itu disampaikan pengurus Lampung Sai perwakilan Lampung Ir Anshori Djausal MT, Chairul Anom, SH, dan Ketua Panitia dari Unila, Dra Farida Aryani MPd, di Kampus Unila Gedongmeneng Bandarlampung, Senin. "Kita tidak ingin tulisan dan bahasa Lampung akan punah. Makanya, kita berinisiatif menyelenggarakan seminar dalam usaha mencari sebab-sebab adanya ancaman itu. Sehingga diharapkan kita bisa mengembangkannya di kemudian hari," ujar Anshori. Seminar ini akan menghadirkan pakar linguistik Dr Asim Gunarwan, praktisi tradisional bahasa Lampung dan pejabat Pemda Lampung. Seminar akan berlangsung pada 28 Oktober 1999 berkaitan peringatan bulan bahasa di Lampung dan di Unila. Selain itu sejumlah kegiatan seni budaya bernuansa pelestarian dan pemasyarakatan adat dan tradisi Lampung juga dilaksanakan di kampus Unila dan di daerah Lampung. Banyak pihak memperkirakan, tulisan dan bahasa Lampung akan punah dalam waktu sekitar 50 sampai 70 tahun. Ini semua bisa terjadi, karena penduduk asli Lampung sendiri tampak enggan menggunakan bahasa ibunya. "Apalagi penduduk pendatang, jelas tidak mau lagi menggunakan bahasa ibunya. Dan, penduduk asli Lampung sendiri kini jadi minoritas dibandingkan dengan penduduk pendatang, seperti dari Jawa atau daerah lainnya," ujar Anshori lagi.

Media Indonesia, 5 Oktober 1999

BAHASA MELAYU-ULASAN

Berabad-abad Bahasa Melayu Jadi Bahasa Nusantara

BAHWA bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau, tampaknya tidak ada yang membantah. Tetapi, kenapa bahasa itu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda.

Masalah itu kemarin mendapat sorotan utama dalam Konferensi Bahasa Nusantara (KBN) sebagai rangkaian acara Festival Budaya Nusantara (FBN) yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Tampil dalam konferensi ini pakar bahasa Amran Halim, budayawan Ayib Rosidi serta pakar sastra dari Fakultas Sastra UI Harimurti Kridalaksana. Amran Halim bersama Ajip Rosidi menjadi pembicara dalam Sesi I yang membahas *Bahasa Nusantara dan Politik Bahasa*. Tema lainnya yang menjadi pokok bahasan dalam KBN adalah *Kebahasaan dan Orientasi Teoretis, Bahasa Daerah dan Identitas Budaya*, serta *Fungsi Bahasa Nusantara*.

Ajip Rosidi yang mendapat giliran bicara setelah Amran membawakan makalah bertajuk *Demokratisasi dan Politik Bahasa di Indonesia* menguraikan mengapa bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu Riau, padahal bahasa derah yang banyak penuturnya bahasa Jawa dan Sunda.

Di situlah letak demokrasinya. Bahasa Melayu Riau dipilih menjadi basis bahasa Indonesia karena telah berabad-abad bahasa itu menjadi *lingua franca* di seluruh Nusantara.

"Bahasa itu umum dipakai sebagai alat komunikasi antarsuku bangsa, bahkan para pedagang asing seperti Belanda, Cina, India, Arab, dll juga mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan dengan orang-orang pribumi," ujar Amran.

Adapun bahasa Melayu berubah namanya menjadi bahasa Indonesia, menurut Amran erat kaitannya dengan Sumpah Pemuda yang dihasilkan dalam Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Menurut Harimurti Kridalaksana, dari FS-UI, konsep pertama tentang bahasa yang dirumuskan oleh Moh Yamin dalam Sumpah Pemuda butir ketiga berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa yang satu, bahasa Melayu." Usul itu ditolak oleh Moh Tabrani yang mengusulkan dengan tegas; "Kami putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa yang satu, bahasa Indonesia."

Konsep Sumpah Pemuda itu dirumuskan oleh panitia perumus yang terdiri dari Moh Yamin, Sanusi Pane, Jamaluddin, dan Moh Tabrani sebagai ketua merangkap anggota. Pertemuan pertama mereka barlangsung pada 2 Mei 1926. "Jadi, hari ulang tahun bahasa Indonesia itu bukan 28 Oktober, melainkan 2 Mei, karena pada hari itulah istilah bahasa Indonesia digunakan," ungkap Harimurti.

Pada hari ini, sekitar pukul 17.00-17.30, hasil KBN akan dirumuskan setelah sebelumnya dilaksanakan diskusi secara *floor*.

Selain KBN, putaran terakhir FBN ini juga diisi dengan representasi kesenian tradisional dari berbagai daerah yang berlangsung sejak 14 hingga 19 Oktober, Selasa hari ini. Minggu malam telah digelar *Gandrung Banyuwangi* dan grup Band Yospan dari Irian. Nyanyian etnis yang mereka lantunkan telah beradaptasi dengan musik Barat yang umumnya bernada diatonis. (Daf/B-2)

Media Indonesia, 19 Oktober 1999

HARUS SEGERA DIANTISIPASI

Bahasa Nusantara Semakin Terdesak

YOGYA (KR) - Dalam memasuki millenium III, sudah saatnya memberi perhatian yang lebih besar pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Masalahnya, dari berbagai penelitian, bahasa Nusantara semakin terdesak dari kehidupan sehari-hari. Kecenderungan ini harus diantisipasi. Sebab, jika tidak segera diantisipasi, bahasa Nusantara akan punah dan kehilangan penuturnya.

Demikian diungkapkan antropolog UGM Dr Heddy Shri Ahimsa Putra, yang menjadi 'keynote speech' dalam seminar sehari bertema 'Bahasa Nusantara Menuju Millenium III', di Pendapa Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (Jarahnitra) DIY, Jl Brigjen Katamso, Kamis (28/10). Seminar tersebut diselenggarakan Asosiasi Antropologi Indonesia Cabang Yogya, Jarahnitra, The Ford Foundation, Puslitbang Kemasyarakatan-Kebudayaan LIPI, dengan menghadirkan pembicara Dr Irwan Abdullah, Dr Faruk Ht, Prof Dr Soepomo Poedjosoedarmo, Dr I Putu Wijana, Dr Sindhunata, Dr Anhar Gonggong, Dr PM Laksono.

Lebih lanjut dikatakan Heddy, belakangan ini memang ada fenomena menarik, yakni meningkatnya kesadaran sejumlah pakar ilmu budaya tentang pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih dalam hubungan fenomena politik. Meski kesadaran yang meningkat dan semakin luas tentang pentingnya dinamika bahasa untuk memahami berbagai gejala sosial-budaya, itu lahirnya terlambat.

Kalaupun ada kesadaran, kata Heddy, fenomena bahasa Nusantara yang terdesak itu menggelisahkan penutur bahasa Nusantara. Dijelaskan, bahasa Nusantara, yakni dapat didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan oleh suku-suku bangsa, kelompok-kelompok, golongan, atau lapisan sosial tertentu dalam batas-batas geografis negara RI, untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. "Dalam percakapan sehari-hari bahasa Nusantara lebih umum disebut bahasa daerah, yang di Indonesia mungkin lebih tepat disebut bahasa suku atau etnik," kata dosen Antropologi Budaya Fakultas Sastra UGM.

Terdesaknya bahasa Nusantara, kata Heddy, karena masih kurangnya perhatian yang memadai dari para ilmuwan terhadap hubungan antara bahasa dan kebudayaan di Indonesia, ketika bahasa-bahasa daerah di Indonesia terlihat semakin terdesak dari kehidupan sehari-hari. Padahal bahasa adalah pintu masuk yang paling strategis untuk masuk budaya masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan penelitian tentang bahasa di Indonesia pada umumnya yang dilakukan oleh ahli bahasa atau linguis, sehingga pola pendekatan dan problem penelitian mereka pada umumnya berasal dari ilmu bahasa murni.

Dalam kesempatan itu, Heddy juga menyinggung soal bahasa Nusantara merupakan jendela untuk memahami pola pikir, sumber pengayaan budaya Indonesia, simbol identitas suku. Bahkan bahasa Nusantara dapat dipergunakan untuk ketahanan dan perlawanan budaya. "Bahasa yang digunakan sebagai media dalam melakukan perlawanan budaya, maka posisi bahasa Nusantara menjadi semakin penting dalam upaya mempertahankan identitas budaya di tengah makin gencarnya arus globalisasi yang melanda Indonesia," tandasnya.

Pada bagian lain, Heddy menyinggung, ketika bahasa Nusantara dipelajari, baik secara linguistik, antropologis, sosiologis, maka sebenarnya tengah berada dalam sebuah proses refleksi, proses mengenali diri sendiri sebagai bangsa, melalui berbagai simbol yang mewujudkan pikiran-pikiran kolektif. Proses refleksi semacam ini menjadi semakin perlu dilakukan pada saat sekarang ini. (Jay/R-4)-z

Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 1999

Suram, Nasib Bahasa Melayu di Indonesia dan Malaysia

Pekanbaru, Kompas

Meskipun dengan latar belakang berbeda, nasib bahasa Melayu di Indonesia dan Malaysia ternyata masih suram. Selain itu, tidak mustahil bahwa bahasa nasional kedua negara yang berasal dari bahasa Melayu tersebut, malahan akan makin jauh berbeda sebagaimana telah dirasakan sekarang. Ini semua terutama disebabkan oleh ego nasionalisme yang berlebihan dari masing-masing pemerintah dengan memandang bahasa hanya demi untuk kepentingan politik."

Hal itu merupakan benang merah yang dapat ditarik *Kompas* dalam dialog bahasa Melayu, dilaksanakan Yayasan Sagang Harian Pagi *Riau Pos*, di Pekanbaru, Kamis (28/10). Tampil sebagai pembicara adalah Ketua Gabungan Penulis Nasional (Gapena) Malaysia Prof Dr Tan Sri Ismail Hussein, Kepala Pusat Pengkajian Bahasan dan Kebudayaan Melayu Universitas Riau (P2BKM UNRI) Dr Yusmar Yusuf, Ketua Pengkajian Melayu Universitas Islam Riau (PKM UIR) Al azhar MA, dan pengamat politik dari UNRI Drs Andi Yusran.

Menurut Ismail, sejak tahun 1990-an, bahasa Melayu di Malaysia memperoleh saingan ketat Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad menyerukan bahwa bahasa Malaysia tidak hanya bahasa Melayu, tetapi juga bahasa Inggris atau bahasa kedua. Sebelumnya, organisasi politik yang berkuasa di Malaysia, UMNO, justru menghapus biro kebudayaan di dalam tubuh organisasi tersebut seperti hendak mengatakan bahwa kebudayaan tidak begitu penting dalam kehidupan negara. Dengan berbagai kelebihannya, bahasa Inggris tentu akan lebih menarik perhatian daripada bahasa Melayu.

Di Indonesia, kata Yusmar, Al azhar, dan Yusran senada, bahasa Melayu diabaikan. Untuk mencari padanan dalam bahasa Indonesia, orang tidak lagi mengacu pada bahasa Melayu, tetapi pada bahasa daerah, bahkan kadang-kadang meloncat ke bahasa asing. "Kata *lengser* saat Soeharto jatuh; kini sudah menjadi bahasa umum untuk menyatakan kalau seseorang turun dari

jabatannya," kata Andi Yusran.

Secara politik, keadaan tersebut menyebabkan Riau sebagai tempat bahasa Melayu dibina sejak lama, makin tersisih dalam pergaulan kebangsaan. Pada gilirannya, orang Riau kehilangan bahasa. Dengan kesadaran semacam ini menyebabkan apa yang disebut sekarang dengan bahasa Indonesia dinilai sebagai pengkhianat. Malangnya, kelompok yang menggunakan bahasa Melayu di Indonesia tidak banyak, sehingga perlawanan terhadap keadaan seperti ini juga terbatas.

Percaya diri

Kenyataan yang dihadapi bahasa Melayu saat ini di Malaysia, kata Ismail Hussien, mematahkan apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh warga Malaysia sejak awal kemerdekaan, terutama sejak tahun 70-an. Waktu itu, bahasa Melayu misalnya, terbenam dalam kehidupan negara sebagaimana halnya nasib orang Melayu secara ekonomi dan politik. Orang-orang Melayu bahkan merasa malu berbicara dalam bahasa Melayu yang pada gilirannya menanamkan rasa kurang percaya diri untuk ikut berperan dalam kehidupan negara.

"Kemudian di bawah pimpinan Tun Abdul Razak, tahun 1971, kebudayaan Melayu dan khasnya bahasa Melayu, digerakkan sebagai kebudayaan negara. Sekolah-sekolah berbahasa Melayu, misalnya," kata Ismail Hussein. Ia menambahkan, dalam 20 tahun kemudian atau saat ini, orang-orang Melayu bangkit menguasai berbagai bidang kehidupan negara. Kaum elite Cina kini juga fasih berbahasa Melayu.

Menurut Ismail Hussien, keadaan demikian menyebabkan lahirnya manusia Melayu yang penuh percaya diri dibandingkan tahun 1960-an. Tidak seperti pada awal kemerdekaan, mereka kini merasa dapat melakukan apa saja, termasuk tidak lagi mengkhawatirkan tersingkirnya bahasa Melayu oleh bahasa Inggris ketika bahasa asing ini dijadikan sebagai bahasa kedua di negara jiran tersebut. Mereka beralasan, bahasa Inggris amat perlu untuk meraup pengetahuan.

"Padahal kita dapat bercermin dari Filipina. Ratusan tahun orang-orang Filipina diinggriskan. Tetapi kenyataannya, hanya 15 persen dari penduduk Filipina yang dapat berbahasa Inggris sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan, sedangkan selebihnya hanya sebagai komunikasi sehari-hari," kata Ismail Hussien. **(ti)**

Kompas, 29 Oktober 1999

BAHASA POLITIK-ULASAN

Bahasa dalam Wacana Politik

Oleh Arwan Tuti Artha

PERINGATAN Bulan Bahasa 1999 secara kebetulan bersamaan dengan pelaksanaan Sidang Umum MPR. Keduanya sama-sama diselenggarakan pada bulan Oktober 1999. Keduanya menarik dibicarakan dalam tulisan ini, terutama yang menyangkut masalah bahasa. Di satu sisi bahasa dijadikan titik fokus peringatan Bulan Bahasa, di sisi lain bahasa juga mutlak dipergunakan oleh wakil-wakil rakyat kita untuk bersidang dan mengemukakan pendapat.

Mengamati pemakaian bahasa, barangkali paling mudah dilihat melalui media massa, khususnya media massa cetak. Sejauh mana bahasa dipergunakan dengan tepat dan tidak meleset dari tujuan penyampaian informasi. Karena itu biasanya panitia Bulan Bahasa memilih media massa mana yang mempergunakan bahasa komunikasi dengan baik dan tepat. Tahun-tahun sebelumnya kita pernah mencatat *Jawa Pos* dan *Republika*, misalnya, sebagai surat kabar yang mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pers dengan baik dan tepat versi Bulan Bahasa.

Ketika wakil-wakil rakyat kita bersidang, bahasa yang dipergunakan dalam membahas suatu rancangan ketetapan, rancangan keputusan, menyusun maksud dan tujuan sebuah pernyataan, dan sebagainya, juga menarik perhatian kita. Sidang yang bisa diikuti secara langsung — karena disiarkan televisi — menyebabkan kita bisa memperhatikan secara cermat, bagaimana bahasa itu dikomunikasikan.

Dalam sidang-sidang wakil rakyat yang berlangsung seru dan terbuka itu, kita bisa bertanya, bagaimana bahasa itu dipergunakan sebagai wacana politik. Karena bagaimana pun, sidang-sidang yang diikuti oleh wakil-wakil partai politik sebagai cerminan wakil rakyat hasil pemilihan umum, adalah dalam konteks peristiwa politik. Misalnya keterlibatan mereka untuk menyatakan suatu keberatan, interupsi, dukungan, atau sekadar ekspresi pernyataan.

Kita banyak mencatat dipakainya istilah atau terminologi politik, terutama setelah Orde Baru tumbang. Istilah-istilah itu kadang tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Banyak yang hanya dipahami secara khusus oleh kalangan tertentu. Dipakainya istilah-istilah dalam wacana politik, seperti *stembus accoord*, atau *single majority, money politics, civil society, reshuffle*, dan beberapa istilah lain itu kadang belum dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan semiotis bagi masyarakat kebanyakan.

Fenomena itu sungguh mengingatkan kita betapa bahasa sebenarnya punya peran besar, khususnya dalam percaturan politik. Lebih spesifik lagi dalam sidang-sidang wakil rakyat, yang kita saksikan melalui televisi. Sebab, apabila pilihan kata itu tidak tepat, bisa menimbulkan penyimpangan makna. Apabila terjadi penyimpangan makna, maka apa yang dimaksudkan menjadi tidak mengenai sasaran. Keberhati-hatian wakil-wakil rakyat dalam merumuskan suatu pernyataan — melalui pasal-pasal atau ayat-ayat, misalnya — harus diartikan sebagai upaya agar kata atau bahasa itu tidak ditafsirkan menyimpang.

Berbicara menggunakan bahasa dalam kaitan itu bisa dijadikan salah satu ukuran, apakah seseorang itu mampu, cerdas, cakap, dan bisa memahami perkembangan. Di sisi lain, berbicara menggunakan bahasa juga menjadi soal yang penting dalam mencari rumusan, pengingkaran, pembenaran atau solusi. Sebab, bukan tidak mungkin apabila wakil-wakil rakyat itu bersidang dan membicarakan suatu masalah, akan timbul pemikiran-pemikiran yang kadang satu dengan lainnya bisa bertentangan.

***

BAHASA sudah lama kita kenal sebagai alat komunikasi. Tetapi, bahasa juga bisa dimanfaatkan secara politis untuk kepentingan kekuasaan. Ini menyebabkan fungsi hakiki bahasa menjadi berubah. Jangan heran apabila pada masa Orde Baru — yang berkepentingan dengan terciptanya stabilitas nasional itu — punya urusan penting dengan bahasa. Pemakaian bahasa dalam wacana politik di masa Orde Baru itu misalnya bisa dimanfaatkan untuk menopang pencalonan presiden.

Salah satu syarat menjadi presiden di Indonesia, masa Orde Baru, pernah dirumuskan dengan bahasa diplomatis: setidaknya orang-orang yang sudah punya pengalaman menjadi presiden. Padahal, tidak ada lagi orang yang sudah pernah menjadi presiden di Indonesia ini kecuali Pak Harto. Tetapi, kita tahu, tidak ada yang berani menolak, tidak ada yang berani menentang atau melakukan interupsi. Sehingga melalui rumusan bahasa seperti itu, Orde Baru memanfaatkan jalan mulus Pak Harto menjadi presiden berkali-kali.

Kita barangkali baru menyadari sekarang, ketika bahasa dalam wacana politik juga mengandung implikasi kepentingan. Kesadaran kita itu belumlah terlambat. Kita pun bisa menerima secara terbuka, ketika era keterbukaan itu menggantikan era penuh tekanan, bahasa harus dipahami lebih lugas, lebih transparan. Tidak lagi dipahami dalam pengertian tersembunyi, pengalusan, atau pelembutannya demi kekuasaan.

Pada era keterbukaan ini kita menyadari ruang demokratisasi pun sudah terbuka. Sehingga, pada dasarnya, orang akan lebih bebas menggunakan bahasa sebagai pernyataan ekspresinya. Khususnya dalam wacana politik, pemakaian bahasa lebih terbuka dan tidak lagi dibatasi oleh pagar-pagar ketakutan dimusuhi atau disudutkan oleh suatu rezim.

Melalui momentum sidang umum, wakil-wakil rakyat kita itu bisa memulai menempatkan bahasa dalam fungsinya yang hakiki, yang bukan lagi harus dijadikan alat kekuasaan. Dengan meletakkan kembali peran bahasa dalam wacana politik itu, khususnya oleh wakil-wakil rakyat kita yang sedang bersidang, bahasa akan berada pada posisinya yang demokratis. □

*) *Drs Arwan Tuti Artha, wartawan SKH Kedaulatan Rakyat*

Kedaulatan Rakyat, 11 Oktober 1999

Pemakaian Bahasa Para Elit Politik

Oleh Pranowo

DI tengah maraknya Sidang Umum MPR, hampir setiap hari dapat dilihat dan didengar pernyataan, pendapat, maupun komentar para elit politik di media masa baik cetak maupun elektronik mengenai berbagai kondisi politik yang terjadi di negeri kita. Komentar-komentar itu ternyata memiliki efek komunikatif yang beraneka ragam. Ada komentar yang menyejukkan hati rakyat, karena intonasi bicaranya lembut, pilihan katanya halus, dan isi komentarnya *bener* dan *pener*.

Namun, ada pula komentar para elit politik yang justru membikin emosi rakyat terbakar dan semakin menambah keruhnya suasana. Tidak sedikit elit politik kalau berbicara di media elektronik menggunakan intonasi bicara yang keras, pilihan kata bernuansa provokatif dan isi komentar yang penuh dengan celakan dan hujatan terhadap orang lain yang dianggap sebagai lawan politiknya. Semua itu dapat dibaca dan didengar oleh masyarakat karena semakin terbukanya kran kebebasan pers.

Masyarakat memang sudah banyak yang mulai sadar politik. Namun, bila elit politik dalam berbicara tidak mau menjaga etika berkomunikasi dan sopan santun berbicara, betapa pun mereka sebagai tokoh yang dikagumi oleh penganutnya, mereka tidak akan mendapat simpati dari masyarakat luas. Akibatnya, meskipun ide yang dikemukakan sebenarnya baik, akan sulit untuk dapat diterima oleh masyarakat luas.

Yang harus dihadapi oleh para elit politik bukanlah satu masyarakat yang homogen yang hanya terdiri atas pendukung fanatiknya. Mereka adalah public figure yang setiap pernyataan dan komentarnya akan selalu disimak oleh masyarakat luas, termasuk orang awam, intelektual, dan lawan politiknya.

Memang, bila penyimaknya hanya kelompok masyarakat pendukungnya, segala kesalahan ucapan dan tindakannya akan selalu dipahami dengan penuh kemaklumam. Namun, bila penyimaknya adalah mereka yang tidak peduli dengan aktivitas politik, tetapi mereka lebih berpihak pada humanisme universal, segala ucapan dan tindakannya akan dinilai melalui kriteria umum yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa peduli faham politik yang diyakini.

Oleh karena itu, para elit politik hendaknya belajar lebih bersifat arif dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Kebesaran seorang elit politik bukan karena mereka didukung oleh banyaknya masa kelompok pendukungnya, tetapi justru dapat diterimanya oleh kelompok lain yang dianggap sebagai lawan politiknya.

Saya sangat respek pada para elit politik yang berbicara di muka umum tidak pernah secara eksplisit menyebut afiliasi poli-

tiknya tetapi setiap ucapan dan tindakannya selalu memperjuangkan idiologi yang diyakininya. Seorang tokoh politik kontroversial seperti Sanana Gusmao, betapa pun secara politik berhadapan dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia, tetapi setiap kali berbicara, baik ketika dia masih di penjara maupun ketika mereka berbicara di tempat lain, tidak pernah satu kata pun muncul ejekan dan hujatan pada masyarakat Indonesia. Dia selalu mengatakan bahwa di masa yang akan datang Timor Timur tidak pernah dapat meninggalkan Indonesia sebagai negara besar yang selalu bertetangga. Padahal isi yang dibicarakan tidak pernah terlepas dari kegigihannya untuk terus berjuang mewujudkan Timor Timur sebagai negara yang merdeka. Alias terlepas dari Indonesia.

Bila demikian, seorang elit politik yang banyak berbicara di muka publik dan diliput oleh media massa, yang jauh lebih penting harus diperhatikan adalah bagaimana cara mengatakan/mengungkapkan gagasannya, dan bukan gagasan apa yang ingin disampaikan. Sebagai ilustrasi, masyarakat merasa tersakiti oleh pernyataan seorang tokoh elit politik yang mengatakan, "hanya uang sebesar 900 miliar saja dipermasalahkan, sementara yang 150 triliun tidak pernah disinggung". Pernyataan itu nampak disengaja sekaligus sebagai bentuk pembelaan diri. Memang, bila dibandingkan dengan jumlah 150 triliun uang negara yang tidak dapat diselamatkan karena dikorupsi, angka 900 miliar hanya kecil. Namun, sadarkah dia bahwa lebih dari 100 juta rakyat Indonesia hidup digaris kemiskinan? Dengan kata lain, dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Elit politik seperti itu sungguh tidak tahu etika komunikasi dan sopan santun berbahasa sehingga berbicara seperti itu. Memang, apabila dilihat dari segi apanya memang nalar ucapannya logis dan benar, tetapi dari segi bagaimana dalam kaitannya dengan etika dan sopan santun, benar-benar tidak etis dan tidak santun.

Bahasa dan Ketahanan Bangsa

Meskipun ketahanan ekonomi, politk, dan hukum suatu bangsa sudah hancur, bangsa dan negara itu tidak akan kehilangan citra apabila mereka masih memiliki ketahanan budaya. Manifestasi ketahanan budaya suatu bangsa, ciri yang paling menonjol dan dapat diamati adalah melalui tindak bahasa yang dilakukan.

Bila masyarakat suatu bangsa masih tetap mau menjaga etika komunikasi dan sopan santun dalam berbahasa, niscaya kehancuran bidang ekonomi, politik, dan hukum masih dapat dibangun dengan mudah. Krisis terparah yang dialami oleh bangsa Indonesia sesungguhnya bukan krisis politik, ekonomi, hukum, maupun kepercayaan, tetapi adalah krisis mental dan kebudayaan. Krisis mental dan kebudayaan ini dapat dilihat secara nyata apabila kita mau melihat bagaimana sikap dan tindakan para pemimpin bangsa kita dalam mengkomunikasikan idenya menggunakan bahasa Indonesia.

Bila kita lihat elit politik kita melalui ucapan dan tindakan yang dapat diamati melalui bahasanya, sungguh telah banyak melanggar etika komunikasi dan sopan santun berbahasa. Akibatnya, setiap pernyataan yang keluar dari ucapannya bila tidak menyakiti hati rakyat, ya merendahkan martabat bangsanya sebagai manusia.

Bagaimana kita harus hormat pada seorang pemimpin bangsa yang mengatakan bahwa tindakan unjuk rasa mahasiswa sudah mulai beringas. Kata beringas lajimnya dipakai untuk memberi

sifat pada binatang liar dan tidak dapat lagi dikendalikan. Jika demikian, mahasiswa dianimalisasi dengan sifat binatang. Tega-teganya seorang pemimpin bangsa mempersamakan mahasiswa dengan seekor binatang.

Bila mahasiswa sebagai kelompok masyarakat intelektual saja dipersamakan dengan binatang, lantas mereka yang bukan mahasiswa akan dipersamakan dengan apa. Dan, mereka yang sekarang sedang duduk sebagai tokoh dan pemimpin bangsa yang tidak sedikit menyalahgunakan kekuasaannya harus disebut sebagai apa?

Kondisi bangsa dan negara yang semakin memprihatinkan ini, di samping harus ada usaha memperbaiki situasi politik, ekonomi, dan hukum, kiranya para elit politik harus mau merenungkan kembali peranan bahasa dan budaya sebagai ketahanan bangsa Indonesia. Bila etika berkomunikasi dan sopan santun berbicara saja tidak lagi dimiliki, lantas nilai kebajikan apa yang masih tersisa dalam lubuk hatinya.

Kembalikan Rasa Bahasa

Kemahiran para elit politik dalam beretorika di muka publik memang tidak disangsikan lagi. Mereka dapat "menghipnotis" masyarakat pendengarnya dengan gaya seorang orator yang ulung. Namun, di balik retorika kata-kata itu, ternyata tidak sedikit diantara mereka yang tidak lagi memiliki rasa bahasa.

Rasa bahasa itu berupa kehalusan budi dan kelenturan jiwa yang tercermin melalui bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi. Hal ini ternyata sudah banyak para elit politik yang tidak memilikinya. Perasaan mereka sudah banyak terkikis oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan karena ingin memperjuangkan aspirasi politiknya.

Mereka sudah menjadi robot politik yang hanya tahu satu tugas, yaitu menghancurkan lawan dan memenangkan kawan. Kehalusan budi dan kelenturan jiwa untuk menghargai perbedaan pendapat dan idiologi sama sekali tidak menampak dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.

Bahasa tinggal dipakai dan disadari sebagai kata-kata yang mengandung makna untuk mengungkapkan pikiran. Mereka sudah banyak yang tidak sadar bahwa bahasa juga memiliki rasa bahasa yang dapat menghaluskan budi seseorang. Karena sudah hilang rasa bahasanya, tidak sedikit tokoh elit politik yang secara sengaja dan terang-terangan menghujat dan mencela lawan politiknya dengan kata-kata yang sangat kasar dan arogan.

Betapapun lawan politik yang dihadapi adalah orang yang tidak seidiologi, tetapi mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air yang juga termasuk putra-putra bangsa terbaik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka harus dihormati dan dihargai sebagaimana kita menghargai kawan-kawan sendiri yang seidiologi. Semua ini hanya bisa diwujudkan apabila diantara para elit politik mau mengasah nilai rasa kebahasaannya. □ z

*) *Dr Pranowo, dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Anggota Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa, dan Wakil Ketua Pelaksana Harian Yayasan Ekalawiya.*

Kedaulatan Rakyat, 21 Oktober 1999

BAHASA SUNDA-ULASAN

Bahasa Sunda Masih Hidup dan Dipakai oleh Masyarakat Sunda

Oleh CECE HIDAYAT

ADA kekhawatiran di kalangan sebagian budayawan, akademisi, ahli bahasa, dan para pecinta Bahasa Sunda, bahwa Bahasa Sunda dewasa ini sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakatnya sebagai bahasa ibu dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bahkan ada yang agak berlebihan menyikapinya dengan mengatakan bahwa suatu saat Bahasa Sunda akan mati secara perlahan. Paling tidak, itulah yang dikhawatirkan oleh seorang Gugun Gunardi pada PR Minggu 10 Januari 1999 lewat tulisannya dengan judul yang nadanya bertanya "Bahasa Sunda Bukan Bahasa Ibu Keluarga Sunda Masa Kini ?".

Benarkah Bahasa Sunda akan mengalami nasib seperti yang dikhawatirkan ? Mungkinkah Bahasa Sunda akan mengalami kepunahan secara perlahan-lahan dimakan oleh zaman ? Untuk menjawabnya, tentu tak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan pembuktian yang akurat dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tulisannya, Sdr. Gugun Gunardi berasumsi bahwa orang Sunda sekarang sudah banyak melupakan bahasa ibunya sendiri. Salah satu indikator yang dijadikan contohnya yaitu ketika *kakawihan* tidak dikenal lagi oleh anak-anak sekarang, karena telah banyak bentuk permainan moderen yang menggantikannya. Padahal menurutnya, *kakawihan* sebagai bentuk permainan anak *urang lembur* merupakan sarana yang sangat mudah untuk mengenalkan Bahasa Sunda kepada anak-anak.

Selain itu, katanya, sudah banyak orangtua yang enggan menggunakan Bahasa Sunda dalam pergaulan sehari-harinya sebagai bahasa pengantar dalam percakapan; sebagai bahasa ibu. Mereka lebih memilih menggunakan Bahasa Indonesia ketimbang Bahasa Sunda, karena anggapannya dengan menggunakan Bahasa Indonesia, gengsinya akan naik, tidak malu, tidak terkesan kampungan.

Benar, bahwa sebagian masyarakat kota dan masyarakat yang terkena polusi budaya kota, kini mulai enggan menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa percakapan sehari-hari dalam pergaulan. Benar pula, bahwa *kakawihan* sudah tidak dikenal lagi sebagai sarana atau alat permainan anak-anak; kecuali dikenal hanya lewat buku pelajaran. Tapi itu hanya berlaku bagi masyarakat tertentu saja, terutama masyarakat kota besar seperti Kota Bandung. Sementara di beberapa perkampungan di pinggiran Kota Bandung, masih banyak anak-anak yang menyenandungkan kakawihan, seperti misalnya saat main layang-layang di sawah atau di tegalan. Mereka auntuk menantang angin agar datang menyenandungkan kakawihan "Bah Deong" : Bah Deong ! Bah Deong !

Pangmukakeun iwang angin.... dst.

Di lingkungan yang masih akrab dengan alam, dan di mana tumbuh masyarakat agraris, Bahasa Sunda belum banyak tercemar oleh sikap hidup dan pandangan orang kota. Jikapun ada itu hanya sebagian kecil saja yang punya prinsip *gagayaan* seperti orang kota itu. Sementara masyarakat pada umumnya masih tetap cinta dan bangga menggunakan Bahasa Sunda. Yang bersikap ingin disebut orang kota, atau orang moderen, hanya segelintir orang saja. Pada umumnya dilakukan oleh kalangan remaja anak sekolahan, yang telah banyak gaul dengan budaya kota. Dan kalaupun ada orangtua yang berprinsip seperti apa yang dikatakan oleh Sdr. Gugun Gunardi, itu suatu realitas yang harus diterima.

Untuk bukti bahwa Bahasa Sunda masih dipakai dan dicintai oleh masyarakat Sunda, tengoklah ke daerah-daerah yang belum terkena polusi budaya kota. Di pedesaan-pedesaan Cianjur, Garut, Tasik, Sumedang, Subang, atau Purwakarta sebagian besar masyarakatnya dalam pergaulan sehari-harinya masih menggunakan bahasa ibunya; Bahasa Sunda. Kalaupun terpaksa harus menggunakan Bahasa Indonesia, misalnya saat acara-acara formal; biasanya dalam bidang pemerintahan, mereka sangat kentara sekali logat, *lentong*, dan perbendaharaan katanya masih sangat *Nyunda*. Demikian halnya dengan anak-anak *urang lembur*. Mereka masih akrab dan setia menggunakan Bahasa Sunda, khas mereka. Juga bentuk-bentuk *kakawihan, sisindiran,* atau permainan masih tetap mereka gunakan. Jadi jelas, bahwa mereka yang enggan atau tidak mau menggunakan Bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari di pergaulan hidupnya itu hanya sebagian kecil masyarakat, terutama di perkotaan dan sebagian masyarakat yang sudah terkena polusi budaya kota.

Bagaimanapun, suatu bahasa itu hidup dan berkembang di masyarakat tergantung pada pemakainya. Jika Bahasa Sunda ingin tetap hidup tentu saja tanggung jawabnya diserahkan kepada masyarakat pemakainya. Dan perlu diingat bahwa suatu bahasa itu hidup dinamis mengikuti perkembangan zaman; tidak statis dalam satu titik tertentu. Bahasa mengalami perubahan. Bahasa Sunda pun demikian. Dari satu kurun waktu ke kurun lainnya terus berubah, seiring perubahan zaman.

Mungkin Bahasa Sundazamannya Sdr. Gugun Gunardi semasa anak-anak, berbeda dengan Bahasa Sunda zaman sekarang. Lagi pula, suatu bahasa hidup dan dipakai oleh suatu masyarakat sosial tertentu. Mungkin saja Bahasa Sunda masyarakat kota akan berbeda dengan Bahasa Sunda masyarakat pedesaan. Kita tidak perlu khawatir dan pesimis dengan adanya sebagian masyarakat yang enggan menggunakan Bahasa Sunda dalam pergaulannya, karena masih banyak masyarakat lainnya yang tetap setia berbahasa ibu di rumah dan di lingkungannya, kendati telah dapat berbicara bahasa lainnya.

Anggap saja sebagian masyarakat yang enggan berbahasa Sunda itu sebagai bagian dari perubahan. Bahasa Sunda tidak akan mati atau *tumpur ludes* selama ada orang Sunda dan selama dipakai oleh masyarakat Sunda. Bahasa Sunda akan hilang jika etnis Sunda dan tanah air Sunda dihancurkan atau dibinasakan dengan sengaja. Jadi selama masih ada orang Sunda di tanah Sunda, penulis yakin Bahasa Sunda akan tetap hidup sampai akhir zaman. Bahasa Sunda masih jadi tuan rumah di "lemburnya" sendiri. Bahasa Sunda kini masih tetap dipakai dan hidup di masyarakat Sunda.

Beberapa contoh kasus

Contoh kasus yang dialami Sdr. Gugun Gunardi saat pulang kampung banyak familinya yang menyapa anaknya menggunakan Bahasa Indonesia, padahal ia berada di lingkungan orang Sunda dan jelas orang tuanya pun *Sunda tulen*. Itu adalah realitas yang tak perlu sangat dikhawatirkan, karena itu hanya kasus kecil yang didasari oleh pandangan bahwa orang kota itu identik dengan modernisme dan salah satu bentuk pandangan bahwa menggunakan bahasa moderen adalah Bahasa Indonesia. Saya yakin itu dasarnya karena sikap kepolosan dan ketidaktahuan dari orang tersebut. Jadi bukan pandangan yang berlaku bagi semua masyarakat Sunda pada umumnya.

Di samping menemukan kasus seperti yang dialami oleh Sdr. Gugun Gunardi di atas, saya malah menemukan kasus sebaliknya. Beberapa contoh kasus yang pernah atau sering saya alami adalah seperti berikut:

Saya bekerja sebagai guru di sebuah SLTP di pinggiran Jakarta. Kebetulan lingkungan sehari-harinya yang dominan adalah budaya Betawi. Kawan-kawan saya terdiri dari berbagai suku seperti Sunda, Jawa, Batak, Padang, Betawi, dan lain-lain. Demikian pula murid-murid saya. Dalam percakapan resmi antar kawan tentu saja menggunakan Bahasa Indonesia, namun ketika berbicara dengan kawan sesuku, bahasa daerah masing-masinglah yang dipakainya. Dengan menggunakan bahasa daerah, terasa ada ikatan batin yang kuat. Kawan-kawan saya yang dominan Sunda, tidak malu menggunakan Bahasa Sunda, karena terasa lebih akrab.

Dalam kereta api jurusan Merak - Jakarta, para pedagang yang umumnya orang Rangkasbitung, tidak malu menggunakan Bahasa Sunda, bahkan bila orang yang menawarnya menggunakan Bahasa Indonesia si pedagang itu memasang harga tinggi, namun bila ditawar dengan menggunakan Bahasa Sunda otomatis tawar menawar itu tidak sulit bahkan bisa memberi harga yang lebih murah. Dan pembicaraanpun berlangsung terus menggunakan Bahasa Sunda.

Di pinggiran Jakarta lainnya, tepatnya di sekitar daerah Cibubur Jakarta Timur, yang notabene masuk wilayah DKI Jakarta, ada satu masyarakat yang umumnya sehari-hari menggunakan Bahasa Sunda. Dalam berkomunikasi dengan siapapun ciri kesundaannya tidak lepas misalnya bicara menggunakan Bahasa Sunda lengkap dengan logat medoknya yang *nyunda*. Mereka tidak *unggah adat* jadi orang Betawi.

Di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, banyak terdapat pedagang, buruh pikul, kernet bus antar kota, atau sopir jurusan Bandung atau Banjar. Kebanyakan mereka bila mengetahui para penumpangnya mau ke Bandung atau logat bicaranya Sunda, otomatis memberikan pelayanan dan penawaran menggunakan Bahasa Sunda. Karena pada umumnya mereka orang Sunda atau yang telah mahir bicara Sunda.

Dari contoh-contoh kasus di atas saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Bahasa Sunda masih tetap dipakai dan dicintai oleh masyarakat Sunda. Kalaupun menggunakan Bahasa Indonesia, itu karena faktor situasional atau menyikapi bahasanya yang salah.

Usaha yang harus diupayakan

Menyikapi kasus adanya sebagian masyarakat Sunda yang enggan menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa ibunya, kita patut bersikap bijak. Kita tidak perlu berlebihan menyikapi mereka dengan cara mencap yang kurang baik. Anggaplah itu sebagai sebuan tantangan bagi para ahli bahasa, akademisi, pemerintahan daerah dan para guru serta orangtua.

Usaha yang harus segera diupayakan oleh kita adalah dengan memberikan perhatian yang lebih terutama dalam pengajaran Bahasa Sunda di sekolah-sekolah. Selain itu pihak Pemerintahan Daerah mesti mengeluarkan kebijakan dalam upaya pelestarian dan pengembangan Bahasa Sunda. Dalam hal ini Pemda Jawa Barat dan Pemda Tingkat II di setiap kabupaten. Dalam penentuan RAPBD, pihak pemda tingkat I dan II semestinya menganggarkan biaya untuk upaya pelestarian dan pengembangan Bahasa Sunda.

Di sisi lain, dari kalangan akademisi atau Perguruan Tinggi yang memiliki Jurusan Bahasa Sunda seperti IKIP, Unpad atau Unpas misalnya, perlu meningkatkan kualitas tenaga ahli bidang Bahasa Sunda. Para lulusan dari Perguruan Tinggi tersebut mesti dibekali dengan pengetahuan yang cukup memadai. Serta yang lebih penting, mereka mesti dibekali sikap cinta Bahasa Sunda dan punya rasa tanggung jawab akan nasib bahasa daerah, bahasa ibunya; Bahasa Sunda.

Juga tak kalah pentingnya, lembaga-lembaga kebudayaan Sunda seperti LBSS, PP-SS, Caraka Sundanologi, Paguyuban Pasundan, DAMAS, atau yayasan-yayasan kesundaan lainnya seperti Bujangga Manik, Yayasan Atikan Sunda, Yayasan Dana Budaya Sunda, dan lain-lain, perlu bekerja sama melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan mutu, penelitian bahasa dan sastra, pengembangan serta pelestarian Bahasa Sunda di masyarakat.

Semua upaya di atas patut kita dukung dan kita laksanakan, dalam rangka menjaga agar Bahasa Sunda tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemakainya sehingga tetap lestari hingga akhir zaman.

Juga tak boleh diremehkan peran media massa, baik yang berbahasa Sunda, maupun yang berbahasa Indonesia, dalam upaya membantu pengembangan Bahasa Sunda. Apalagi di era informasi dan globalisasi seperti sekarang ini, di mana pengaruh dari luar begitu hebatnya menyerang budaya kita, baik lewat media massa cetak, maupun media elektronik. Dengan upaya-upaya tersebut, semoga Bahasa Sunda akan tetap menjadi tuan rumah di "lemburnya" sendiri.***

Pikiran Rakyat, 4 Oktober 1999

INSKLOPEDI JAWA-ULASAN

LSJ Terbitkan "Ensiklopedi Kebudayaan Jawa"

Yogyakarta, Kompas

Lembaga Studi Jawa (LSJ) yang sempat "mati suri" beberapa waktu dan tidak melakukan aktivitas, Kamis (21/10) siang ini, meluncurkan hasil kerja keras mereka berupa *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*. Peluncuran buku ensiklopedi setebal 349 halaman dan memuat 1.128 entri dari 3.383 yang diolah, dengan 500 foto dan 100-an ilustrasi lain dan tulisan itu dilakukan dengan peresmian beroperasinya Museum Kebudayaan Jawa yang terletak satu kompleks dengan Kantor LSJ di Desa Tembi, Desa Timbulharjo, Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Peluncuran buku akan diawali diskusi dengan pembicara Drs P Swantoro —penggagas penerbitan ensiklopedi sekaligus Ketua Yayasan Lembaga Studi Jawa— dengan pembahas mantan Rektor ISI Yogyakarta, Prof Dr RM Soedharsono.

"*Ensiklopedi Kebudayaan Jawa* (EKJ) sebenarnya sudah kami siapkan sejak lima tahun lalu, namun tim penyunting dan validasi menghadapi banyak tantangan karena banyak data dari kontributor tidak mencantumkan acuan mereka. Ketika dicocokkan; ternyata banyak hal yang bertentangan dalam proses validasi, oleh sebab itu baru sekitar 1.000 entri itulah yang bisa kami siapkan. Banyak yang menulis laporan secara cepat, tetapi setelah dicek ulang tidak valid," ujar Direktur LSJ, Ir Fadzar Vyaktatomo MM.

Peluncuran buku *EKJ* dan pembukaan museum LSJ, menurut Ir Totok panggilan akrab Fadzar Vyaktatomo— merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun LSJ keempat yang jatuh pada 6 September lalu. Selain kedua acara pokok itu, LSJ akan memeriahkan acara dengan mujahadahan, pentas kesenian daerah, wayang kulit, wayang golek, ketoprak, pertunjukan musik konteplatif.

Pertama di Indonesia

Pada bagian lain, Sekjen LSJ Feri Indriarto Timur menjelaskan, *EKJ* dipersiapkan selama lima tahun dan melibatkan sekitar 25 orang kontributor naskah dari Yogyakarta, Surakarta dan kota lain. Sedangkan proyek yang semula dipimpin Roestam Afandi, salah satu pimpinan LSJ itu, selanjutnya digantikan tim editor yang dipimpin Dr Marsono SU dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Drs Waridi Hendrasaputra dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).

"Menurut kami, tidak mudah menyusun ensiklopedi kebudayaan Jawa ini, apalagi belum pernah ada sebelumnya. Meskipun *Serat Centhini* pernah dianggap memuat budaya Jawa, tetapi sebenarnya hanya menyangkut adat-istiadat dan kehidupan orang Jawa. Demikian juga tentang *Ensiklopedi Wayang* hanya menyangkut kesenian," kata Feri.

Buku setebal 349 halaman ini berisi entri berbagai bidang yang disusun mengacu pada tujuh aspek kebudayaan sebagaimana pembagian menurut Prof Dr Koentjaraningrat, yaitu kesenian, teknologi, bahasa, adat-istiadat, organisasi sosial, sistem mata pencaharian, dan sistem pengetahuan. Entri spesifik yang termuat dalam *EKJ* misalnya pembahasan cukup panjang tentang dua kitab kuno Jawa, yaitu *Parargaton* dan *Negara Kertagama*. "Dan seperti kami katakan tadi, *EKJ* bukan cuma berisi tentang bahasa dan sastra, tetapi juga tentang religi misalnya," kata Feri menambahkan.

Buku yang dicetak pertama kali sebanyak 3.000 eksemplar oleh Percetakan Pass Ofset Yogyakarta ini, 100 di antaranya dicetak dalam *hard cover*. "Untuk langkah pertama, kami tidak akan menjual *EKJ*, tetapi mengirimkannya kepada berbagai perguruan tinggi, lembaga-lembega penelitian, dan pusat-pusat kebudayaan serta kalangan bahasawan dan budayawan," kata Feri sambil menambahkan bahwa biaya cetaknya saja menghabiskan Rp 40 juta.

Beberapa nama kontributor yang menyumbang *EKJ* antara lain: Drs MT Arifin, Drs Bambang Indrianto, Dr Damardjati Supadjar, Drs Darto Harnoko, Dewantoro SE, RM Dinusatomo BA, Eko Swandono, Dra Etty Maharyanti, Drs Harmanto, RAy Hilmiah Darmawan Pancawala, Heru Kesawa Murti, Herry Saebani, J Sumarko Saptoputro, R Karjono (almarhum), GRAy Koesraspiah Soerjohadiprano-to, KRMH Kusumahadi, KRT Kusumotanoyo, Drs MM Sukarto Kartoatmodjo (almarhum), Drs G Moedjanto MA, Moeljono, BPH Prabuwinata, Dra Siti Kolimah, Drs RS Soebalidinata, Drs Sudharmono SU, Th Suharti M Hum, Ign Suharto, Drs RPA Soerjanto Sastroarmodjo, Dra Surtiyati DT, RM Sutedjo Partokusumo, Suwarti BA, serta Drs Tamdaru Tjokrowerdojo.

Sedangkan Jun Saptohadi selaku pimpinan unit museum LSJ mengemukakan, Museum Kebudayaan Jawa diakui belum sepenuhnya terisi karena keterbatasan dana dan keterbatasan waktu perburuan benda-benda yang dipamerkan. Namun seba-

gai langkah awal, museum tersebut juga diupayakan mengoleksi benda-benda khusus seperti peralatan kuno, bahkan hal-hal menyangkut spiritual orang Jawa. **(hrd)**

Kompas, 20 Oktober 1999

Perjalanan Sebuah Ensiklopedi Jawa

HADIRNYA Ensiklopedi Kebudayaan Jawa dan Museum Kebudayaan Jawa, memberikan nuansa tersendiri bagi perkembangan kebudayaan Jawa di Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya. Setelah melalui perjalanan yang cukup lama, Lembaga Studi Jawa (LSJ) yang bercita-cita *nguri-uri* kebudayaan Jawa dan menciptakan kehidupan kebudayaan yang dinamis, akhirnya mampu menerbitkan ensiklopedi dan membangun museum tersebut. Hal ini memang sesuai dengan missi LSJ yang memang aktif dalam kegiatan penelitian, pendokumentasian dan pengembangan kebudayaan Jawa.

Ensiklopedi Kebudayaan Jawa dan Museum Kebudayaan Jawa yang diluncurkan dalam rangkaian peringatan HUT ke 4 LSJ ini sebenarnya telah disiapkan sejak 5 tahun lalu, namun baru dapat diterbitkan sekarang. Peluncuran dan peresmiannya dilakukan Kamis (21/10) di Kantor LSJ, Dusun Tembi Timbulharjo Sewon Bantul dengan upacara Jawa dan dihadiri para budayawan dan pemerhati kebudayaan Jawa.

Pimpinan LSJ Ir Fadzar Vyaktatomo MM mengatakan, upaya penyusunan Ensiklopedi Kebudayaan Jawa memang tidak mudah. Apalagi mengingat sebelumnya belum pernah ada ensiklopedi semacam ini. Meski Serat Centini sering juga disebut sebagai Ensiklopedi Kebudayaan Jawa karena memuat berbagai macam pengetahuan kejawen dan banyak aspek kehidupan masyarakat Jawa.

Ferry Indratno selaku koordinator penerbitan ensiklopedi ini menjelaskan, penyusunan Ensiklopedi Kebudayaan Jawa dimulai Mei 1994 dari sebuah rumah sewaan di Jl MT Haryono 40 Surakarta. Ketika itu diadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh dari Surakarta dan Yogyakarta, yang masing-masing dipandang menguasai salah satu aspek kebudayaan Jawa. Inisiatifnya datang dari sebuah lembaga bernama Lembaga Studi Asia Bidang Kajian Budaya. Lembaga tersebut pada 1996 pindah ke Yogyakarta dan ganti nama menjadi Lembaga Studi Jawa yang sekarang ini bernaung di bawah Yayasan Studi Jawa.

Sejak awal, Ensiklopedi Kebudayaan Jawa direncanakan terdiri hanya satu jilid, seperti halnya *Geillustreerde Encyclopaedie van Nederalandsch-Indie* terbitan 1934. Akan tetapi berbeda dengan ensiklopedi 1934, Ensiklopedi Kebudayaan Jawa ini setiap tahunnya akan diikuti sebuah suplemen yang akan berisi penambahan maupun penyempurnaan materi yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Cukup banyak budayawan, seniman, dan pemerhati budaya Jawa yang memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan ensiklopedi ini yang selanjutnya disunting oleh Rustam Affandi, Dr Marsono SU dan Drs Hendro Saputro. Sementara jumlah entri yang masuk sebanyak 3.383, sedang yang telah lulus validasi dan disunting sebanyak 1.128 entri. Entri selebihnya masih memerlukan penggarapan untuk penerbitan selanjutnya.

Entri-entri yang terdapat dalam ensiklopedi ini mengacu pada 7 aspek kebudayaan menurut Prof Koentjoroningrat, yang terdiri dari kesenian, teknologi, bahasa, adat istiadat, organisasi sosial, sistem mata pencaharian dan sistem pengetahuan. Ensiklopedi dengan sampul warna jingga kehitaman bergambar relief candi ini terdiri atas 349 halaman. Di dalamnya terdapat sekitar 500 foto dan 100 ilustrasi serta tulisan Jawa.

Museum

Dalam situasi masyarakat mondial sekarang ini, salah satu hal yang mengkhawatirkan adalah kondisi masyarakat yang mulai asing terhadap akar budayanya sendiri, termasuk dalam masyarakat Jawa. Indikatornya tampak semakin sedikitnya benda-benda tradisional yang digunakan dalam kehidupan orang Jawa masa lam-

pau dalam kehidupan orang Jawa sekarang ini.

Untuk menjawab persoalan tersebut, LSJ membuat sebuah Museum Kebudayaan Jawa yang dapat memberikan informasi tentang hasil-hasil kebudayaan masa lalu. "Museum yang selama ini kita kenal memang telah banyak dan mampu memberikan informasi tentang hasil-hasil kebudayaan masa lalu. Tetapi museum yang memberikan informasi secara khusus tentang benda-benda yang dipakai untuk menunjang kehidupan sehari-hari orang jawa dapat dikatakan belum ada," tutur Jun Saptohadi, sutradara yang mengkoordinir penataan Museum Kebudayaan Jawa ini.

Dalam museum ini dapat ditemui berbagai jenis senjata tradisional Jawa seperti keris, tombak, pedang, gada dan sebagainya. Juga alat-alat permainan tradisional Jawa misalnya dhakon, benthik, bekelan, yoyo, bas-basan, egrang dan lain-lain. Ada pula sistem teknologi tradisional meliputi garu, luku, pacul, arit dan sejenisnya.

Selain itu, ditampilkan pula wayang kulit dan perangkat gamelan, alat-alat transportasi tradisional Jawa dan perkakas rumah tangga tradisional Jawa. Bahkan sampai ke hal-hal kecil seperti permainan kartu yang dikenal dengan *kertu cina*, juga dapat dilihat di situ.

(MN Hassan/Ronny SV)-z

Kedaulatan Rakyat, 24 Oktober 1999

Anggota MPR/DPR Jangan Sok Berbahasa Asing

Jakarta, *Pembaruan*

Mendikbud Prof Dr Juwono Sudarsono meminta penggunaan bahasa asing di kalangan anggota MPR/DPR yang sedang bersidang harus dihilangkan dan diganti padanannya dengan bahasa Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik lisan maupun tulisan, serta menjadi panutan setiap lapisan masyarakat Indonesia.

"Karena itu kepada lembaga Pusat Bahasa Indonesia, saya imbau untuk memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama kalangan anggota MPR/DPR yang sedang bersidang. Karena pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar menunjukkan jati diri bangsa," tegas Mendikbud di sela-sela peresmian "Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 1999" di Jakarta, Senin (4/10). Ia didampingi Kepala Pusat Bahasa, Dr Hasan Alwi,

Juwono mengatakan, sampai sekarang penggunaan bahasa asing di lingkungan anggota MPR/DPR yang sedang bersidang tetap menjamur. Semisal kata *voting* dan *one man one vote*, yang sebenarnya bisa diganti dengan pemungutan suara dan satu orang satu suara.

"Untuk menghilangkan pemakaian bahasa asing tersebut, lembaga Pusat Bahasa Indonesia saya imbau untuk melakukan pendataan dan pencatatan kata-kata asing yang dipakai dalam sidang tersebut, dan mencoba mencari padanan dalam bahasa Indonesia," ujar Mendikbud.

Inventarisasi

Menanggapi permintaan tersebut, Hasan Alwi mengatakan, pihaknya akan melaksanakan imbauan tersebut dengan mulai melakukan inventarisasi kata-kata yang sedang marak dipakai anggota MPR/DPR. Setelah itu, pusat bahasa akan menyampaikan hasilnya ke pucuk pimpinan MPR/DPR agar lebih memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun apakah masukan tersebut dipakai atau tidak tergantung kepada pimpinan sidang.

"Sebenarnya anggota MPR/DPR harus memberikan teladan kepada masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi yang berkumpul sekarang adalah wakil rakyat. Wakil berarti orang yang terbaik dan dipilih. Hendaknya mereka yang terbaik, memberikan contoh terbaik dalam penggunaan bahasa," katanya.

Menjawab wartawan tentang penggunaan bahasa di kalangan remaja, Alwi mengatakan, bahasa lisan yang dipakai banyak ragamnya. Kita jangan sekali-kali membatasi pemakaian bahasa lisan harus begini atau begitu dalam satu kesempatan. Itu sudah tidak alamiah, karena bahasa Indonesia yang baik dan benar tergantung,

pemakaian.

Untuk meningkatkan pemakaian bahasa secara baik dan benar, lanjut Alwi, ada tiga butir kegiatan yang harus dilalui. *Pertama*, pelaksanaan penyuluhan sebagai bentuk pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar. *Kedua*, penertiban pemakaian bahasa asing di tempat umum, dan *ketiga*, bantuan atau dukungan pihak pemda kepada Pusat Bahasa, dalam rangka mendirikan balai penelitian bahasa di beberapa provinsi.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan penertiban penggunaan bahasa asing tidak dapat dilakukan sendiri. Karena itu, Pusat Bahasa berusaha memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama dengan pemda tingkat I di seluruh Indonesia," ujarnya sembari menambahkan, hingga sekarang sudah ada 17 balai bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia. (AL/M-12)

Suara Pembaruan, 5 Oktober 1999

Istilah Asing di Sidang Umum MPR

TERLALU banyak istilah asing yang muncul dan dipakai oleh para peserta sidang umum (SU) MPR selama SU berlangsung. Demikian kritik Kepala Pusat Pembinaan Bahasa, Hassan Alwi, dalam perbincangan dengan wartawan pada acara pembukaan Bulan Bahasa dan Sastra 1999 di Jakarta (*Warta Kota*, 5 Oktober 1999).

Menurut Alwi, berbagai istilah asing yang muncul itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Istilah *voting*, padanannya adalah pungutan suara, istilah *one man one vote* padanannya satu orang satu suara. Demikian juga sejumlah istilah lainnya.

Pak Alwi, menurut sejumlah kolega Anda (para pakar bahasa), ada banyak sebab seseorang memiliki kecenderungan menggunakan istilah asing saat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Tetapi boleh jadi para wakil rakyat dan kelas tengah kita cenderung hidup terasing sekaligus merasa asing di negerinya sendiri terutama dalam melihat persoalan bangsa dan rakyat negeri ini.

Warkot

Warta Kota, 6 Oktober 1999

Bulan Bahasa dan Sastra 1999

Bahasa Asing Banyak Muncul di SU MPR

Jakarta, Kompas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono mengatakan, bahasa asing banyak muncul dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) yang sedang berlangsung sekarang. Untuk itu, sudah selayaknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia memperhatikannya dan mencari padanan bahasa asing dimaksud dalam bahasa Indonesia.

"Perhatikan bagaimana bahasa asing sangat banyak tumbuh dalam SU MPR," kata Juwono Sudarsono, dalam sambutannya ketika membuka Bulan Bahasa dan Sastra 1999, yang dilaksanakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia hari Senin (4/10) di Jakarta. Dalam kegiatan yang disemarakkan oleh tarian Melayu ini juga diserahkan penghargaan sastra kepada tiga sastrawan, yakni Kuntowijoyo, Hamid Jabbar, dan Taufik Ikram Jamil.

Bulan Bahasa dan Sastra 1999 ini sendiri diisi dengan berbagai kegiatan; antara lain lomba pidato mahasiswa, deklamasi, lomba berbalas pantun, sayembara penulisan naskah, pertemuan kebahasaan untuk redaktur media cetak, festival musikalisasi puisi, dan bengkel sastra bagi siswa SLTA. Selain itu diadakan lokakarya penulisan esai, konferensi internasional pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, Pertemuan Ilmiah Nasional X Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski), dan seminar nasional IX bahasa maupun sastra Indonesia.

Dalam sambutan tanpa teks pada pembukaan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra ini, Juwono mencontohkan istilah *stembus accoord* untuk menunjukkan penggabungan suara peserta pemilu yang juga digunakan dalam pembahasan-pembahasan pada SU MPR sekarang. "Saya mengamati, bukan hanya penggabungan suara saja, tetapi juga ada istilah-istilah lain," katanya.

Juwono menekankan, penggunaan bahasa Indonesia dari anggota-anggota MPR amat perlu diperhatikan karena peran mereka dalam kehidupan berbangsa sangat penting. Mereka merupakan salah satu sumber anutan dalam banyak hal, tentu juga dalam bahasa.

Kewajiban

Senada dengan Juwono, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Dr Hasan Ali mengatakan, menggunakan bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya menjadi semacam kewajiban semua orang Indonesia. Ini tersirat dalam Sumpah Pemuda 1928 pada butir tiga, yakni berbahasa satu, bahasa Indonesia.

"Dalam peran kita masing-masing, kita diharapkan tetap memiliki sikap dan perilaku bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. Artinya, kita pun diharapkan memiliki tekad dan semangat untuk menjun-

jung bahasa persatuan, bahasa Indonesia," katanya.

Di sisi lain, Hasan Alwi mengingatkan, era globalisasi abad ke-21 akan ditandai oleh meningkatnya perkembangan kehidupan sosial dan budaya serta perkembangan iptek yang ditunjang oleh kepesatan kemajuan dalam bidang teknologi informasi. Seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dalam tuntutan dan tantangan era globalisasi itu pada bahasa Indonesia, perlu dikaji dan memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

Hal itu bertujuan agar dalam era globalisasi ini bahasa Indonesia tetap berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi, sarana pendukung kebudayaan nasional, serta sarana pengembangan iptek. Untuk itu, mutu bahasa Indonesia perlu ditingkatkan dan daya ungkapnya perlu dikembangkan. Dengan demikian, dapatlah diharapkan bahwa bagaimana pun globalisasi akan melanda kehidupan Indonesia, bahasa Indonesia akan tetap mantap sebagai lambang jati diri bangsa. **(ti)**

Kompas, 5 Oktober 1999

Terlalu Banyak Istilah Asing di Sidang Umum MPR

Rawamangun, Warta Kota

Wakil rakyat, mustinya menjadi contoh. Tapi kalau Anda rajin menyimak pelbagai perbincangan selama Sidang Umum (SU) MPR, niscaya bakal ditemukan beragam hal yang tak patut ditiru. Salah satu, adalah banyaknya istilah asing yang digunakan oleh para anggota.

Dalam perbicangan dengan wartawan pada acara pembukaan *Bulan Bahasa dan Sastra 1999*, Kepala Pusat dan Pembinaan Bahasa, Hasan Alwi, mengkritik hal ini. Menurutnya, kata atau istilah asing sebenarnya tak perlu digunakan bila dalam bahasa Indonesia ada padanan katanya.

Istilah *"voting"* misalnya, punya padanan kata "pungutan suara satu lawan satu". Juga istilah *"one man one vote"* yang berarti satu orang satu suara.

"Untuk kata *voting*, sekarang ini sudah memasyarakat atau paling tidak sudah banyak yang mengerti maksudnya," kata Hasan dalam acara yang dibuka oleh Medikbud Juwono Sudarsono itu.

Hasan memang tidak menafikkan bahwa dalam bahasa Indonesia — terutama dalam pemakaian bahasa lisan — ada berbagai keragaman. "Jadi, janganlah kita mencoba membatasi pemakaian bahasa lisan itu dalam suatu kesempatan. Itu berarti sudah tidak alamiah lagi. Biarkan bahasa Indonesia berkembang sebaik-baiknya, tergantung dari pemakaiannya," tambahnya.

Menurut Hasan, Bahasa Indonesia yang baik adalah yang disesuaikan dengan situasi dan pemakaiannya. "Kalau yang berbicara golongan rendah, ya biarkan saja dengan gaya bahasa mereka sendiri," lanjutnya.

Namun, di sisi lain, dalam sebuah forum macam Sidang

Umum seharusnya yang digunakan adalah bahasa lisan yang baik, formal, dengan tidak menggunakan bahasa asing.

"Yang sedang bersidang saat ini adalah wakil rakyat. Wakil rakyat adalah yang terbaik di antara rakyat yang ada. Seharusnya, yang terbaik juga dari segi bahasanya. Kalau sekarang ternyata dalam sidang banyak digunakan kata dan istilah asing yang sebenarnya ada padanannya, berarti mereka belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar," tambah Hasan.

Pendamping bahasa

Lebih jauh Hasan menjelaskan, dalam Sidang Umum selalu ada petugas pendamping bahasa sebagai nara sumber. Masalahnya, adakah pendamping bahasa itu mau dipakai atau tidak, tergantung kepada para anggota dan pimpinan sidang. Bila pimpinan sidang mau memahami dan memanfaatkan pendamping bahasa, maka pemakaian kata atau istilah asing tak perlu ada.

Pendamping bahasa menurut Hasan, didatangkan dari Pusat Bahasa. Mereka biasanya mendampingi badan pekerja dalam menyusun GBHN dan peraturan-peraturan. Hasan mengamati, sejauh ini pimpinan sidang hanya menempatkan pendamping bahasa tersebut sebagai sumber yang tidak mempunyai suara yang menentukan.

Sementara dalam sambutannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono berharap, para anggota DPR/MPR dalam Sidang Umum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun. Karena menurutnya, saat ini wakil rakyat sedang mendapat sorotan masyarakat.

"Bagaimana mereka berpikir dan berpendapat dalam sidang akan mendapat sorotan masyarakat," ujar Juwono.

Mendikbud mengusulkan agar pusat bahasa melakukan pendataan dan pencatatan. Dari sana lantas diinventarisir sejumlah kata atau istilah untuk kemudian dicari padanannya.

Padanan ini nanti dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Juwono berharap, dalam sidang lima tahun mendatang penggunaan kata dan istilah asing semakin berkurang. (jac)

Warta Kota, 5 Oktober 1999

Bulan Bahasa dan Sastra di Rawamangun

RAWAMANGUN — Sejak tahun 1980 pemerintah menetapkan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa. Pada tahun ini Bulan Bahasa kembali diselenggarakan untuk ke-20 kalinya di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra, Rawamangun, Senin (4/10). Penyelenggaraan Bulan Bahasa dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono. Tema yang dipilih untuk Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini, *Melalui Peningkatan Mutu Penguasaan Bahasa Indonesia dan Apresiasi Sastra, Kita Mantapkan Jati Diri Bangsa dalam Rangka Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.* (jac)

Warta Kota, 5 Oktober 1999

KAMUS DAERAH-ULASAN

Uncen dan UPNG Susun Kamus Tiga Bahasa Internasional

Jayapura, Antara

Universitas Negeri Cenderawasih (Uncen) Irian Jaya dan Universitas Nasional Papua New Guinea (UPNG) menyusun sebuah buku kamus tiga bahasa internasional untuk memudahkan komunikasi penduduk RI dan negara tetangga itu. Buku setebal 209 halaman bersampul hijau itu disusun oleh Drs Nico Jakarimilena, MSc (Uncen) dan Dicks R. Thomas, MA (UPNG) dibantu Dr TR Andi Lolo dari Universitas Hasanudin (Unhas) Ujungpandang. Dia memuat bahasa Tokpisin, Inggris, dan bahasa Indonesia. Bahasa Tokpisin (Fiji) merupakan bahasa nasional sehari-hari penduduk di kawasan negara Pasifik Selatan, seperti PNG, Fiji, Solomon dan Fanuatu.

Penyusun Nico Jakarimilena di Port Madang, PNG belum lama ini menjelaskan, kamus tiga bahasa itu disusun tahun 1997 dan diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta. Dikatakan, sukses penyusuanan kamus tiga bahasa tersebut merupakan bantuan dan dukungan dari Uncen, UPNG dan Kedutaan Besar RI di Port Moresby, PNG.

Menurut Jakarimilena, kamus tiga bahasa ini untuk mempermudahkan pembacanya untuk menguasai bahasa Fiji, Inggris dan Indonesia. Selama ini penduduk RI sulit berbahasa Fiji dan Inggris, sementara penduduk PNG sulit menguasai bahasa Indonesia, sehingga penduduk kedua negara sulit berkomunikasi.

Jakarimilena mengemukakan, penerbitan kamus ini penting untuk masyarakat di kawasan Asia Tenggara karena dengan tradisinya yang panjang dan luas dalam komunikasi lisan telah membuktikan diri sanggup mempersatukan cara bertutur melalui tiga bahasa di atas.

Diharapkan penduduk RI dan PNG dapat memanfaatkan kamus tiga bahasa yang telah disusun dengan bahasa sederhana dapat membantu komunikasi penduduk kedua negara.*

Kompas, 9 Oktober 1999

KEBUDAYAAN-ULASAN

Pluralitas dalam Pembentukan Wacana Kebudayaan

(Catatan Khusus Festival Budaya Nusantara '99)

Oleh Pudentia MPSS

KEGIATAN Festival Budaya Nusantara (FBN) '99 baru saja usai. Rangkaian acara yang berlangsung 9 September-19 Oktober itu adalah salah satu peristiwa penting yang menampilkan komitmen lembaga-lembaga dan individu-individu yang terkait dalam memperjuangkan dan mengukuhkan pendekatan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping pendekatan-pendekatan lainnya yang telah ada dewasa ini.

Dari pengalaman, kita dapat melihat bahwa formula andalan kita "Bhinneka Tunggal Ika"—yang sesungguhnya lahir berabad yang lalu dari peringkasan atas berbagai pengalaman dan tradisi kita—terbukti memiliki potensi dapat menjadi kekuatan dan sekaligus peluang meraih masa depan yang berkualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. K.24/10

Menguatnya kesadaran bersama akan pentingnya pendekatan budaya dan akan pluralitas budaya melahirkan kesepakatan untuk menggelar perhelatan budaya yang baru pertama kali ini menampilkan semacam kolaborasi para pekerja ilmu, ilmuwan dan peneliti; pekerja seni, seniman dan penikmatnya, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat/LSM (seperti Yayasan Obor, Lontar, Aikon dan Studio 5), lembaga-lembaga pemerintah, insan pers dari sekitar 60 media cetak dan media elektronik, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti The Ford Foundation, KITLV Leiden, dan The Japan Foundation dengan menyepakati tema bersama "Suara-Suara Milenium: Keberagaman Budaya" sebagai payung kegiatan.

***

PERHELATAN budaya ini dimulai 9 September 1999 di salah satu daerah, wakil dari ujung timur Indonesia, tepatnya di Tirtagangga, Bali, oleh Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI) dengan tema "Mileniart: Perayaan tentang Asal, Penghormatan pada Keragaman". Taufik Rahzen selaku penanggung jawab festival mengemukakan bahwa silang budaya dapat dijadikan suatu metode untuk mengkomunikasikan keragaman seni pertunjukan di Indonesia.

Pada kenyataannya, berbagai bentuk ekspresi kebudayaan Indonesia dihadapkan pada persoalan mendasar tentang keberadaannya dan kedudukannya di tengah keragaman. Dan sejauh ini, MSPI melihat belum banyak kajian yang serius tentang berbagai upaya mengantisipasi dan memberdayakan sebuah komunitas dalam pertukaran kebudayaan. Bali sengaja dipilih sebagai tempat penyelenggaraan karena dianggap telah berpengalaman dalam persentuhan-persentuhan budaya. Telah terbukti pula kuatnya tradisi budaya setempat menyatu dengan kehidupan keseharian masyarakat yang diimbangi juga dengan keterbukaan masyarakat setempat dalam menerima unsur-unsur asing.

Putaran kedua diadakan di tengah Indonesia, di Pontianak (Kalimantan Barat) pada tanggal 22-23 September 1999 dengan tema "Keragaman Budaya Kalimantan dalam Etnografi Bahasa Lisan" yang diselenggarakan oleh Institut Dayakologi. Temuan-temuan yang menarik dari perhelatan di sini memperkuat anggapan bahwa proses kematian dan mematikan tradisi berakibat tragis pada masyarakat setempat. Kasus masyarakat Dayak Siang Murung di Kecamatan Puruk Cahu (sekitar 700 km dari Kota Palangkaraya), yang mulai kehilangan "kekayaannya" sejak tahun 1969—ketika HPH dan perusahaan pertambangan emas PT Indo Muro Kencana beroperasi di daerah mereka—dapat dijadikan contoh menarik. Di tengah-tengah kekayaan hutan ulin, damar, rotan, emas, dan intan yang mempunyai nilai ekspor yang begitu tinggi, masyarakat Dayak Siang Murung hidup dalam kondisi memprihatinkan. Sebegitu tidak berdayanya, berbagai upacara adat dan kegiatan budaya—yang sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan keseharian mereka dan sekaligus ditradisikan untuk pembentukan identitas dan memperkuat komunitas—tidak dapat diselenggarakan.

Dengan dipakainya konsep "tanah negara" untuk menggantikan "tanah ulayat", dan dengan masuknya budaya industri menggantikan konsep budaya agraris,

mereka seakan-akan dihadapkan pada situasi menjadi tamu di rumahnya sendiri. Begitupun yang terjadi pada masyarakat Bakati' Riok di Sambas, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat Bakati', hutan dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dipercayai sebagai sumber segala kehidupan manusia. Karena itu, menurut keyakinan mereka, dengan hilangnya hutan akan musnah pula segala kehidupan yang berjalan di dunia.

Putaran ketiga diadakan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada tanggal 7-9 Oktober 1999 oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Perdebatan mengenai identitas Melayu, peranan lembaga adat Melayu, dan proses kematian serta mematikan tradisi (bersamaan dengan kerusakan "alam" di Riau) yang berakibat pada kehilangan identitas Melayu menjadi topik yang hangat di dalam acara seminar di Tanjungpinang. Hasil-hasil penelitian tentang Melayu memperlihatkan bahwa tradisi lisan yang amat beragam merupakan sumber identitas kemanusiaan yang paling tinggi dalam era milenium mendatang. Yang menarik juga dalam program ini adalah adanya diskusi mengenai keragaman etnis di Riau dan penciptaan karya lisan di antara para seniman dan budayawan dengan para siswa dan gurunya.

Kegiatan Festival Budaya Nusantara '99 berakhir di Jakarta, dipusatkan di Taman Ismail Marzuki dengan penyelenggaraan tiga kegiatan, yaitu Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara pada tanggal 12-13 Oktober disertai dengan peluncuran lima buku yang digelar oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa); Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan Nusantara III Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) pada tanggal 14-16 Oktober 1999 dengan tema "Dialog Antarbudaya"; dan Pagelaran Bahasa Nusantara pada tanggal 18-19 Oktober 1999 meliputi kegiatan peluncuran buku, pameran, pertunjukan, dan Konferensi Bahasa Nusantara.

***

SECARA keseluruhan ada dua hal penting yang pantas dicatat dari penyelenggaraan Festival Budaya Nusantara '99. Pertama, adalah terlibatnya berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah, dari dalam maupun dari luar negeri, para pekerja seni, budayawan, pekerja ilmu, dan masyarakat luas yang secara sungguh-sungguh menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Inilah kali pertama penyelenggaraan "perhelatan budaya" yang disiapkan dalam bentuk semacam "kolaborasi", seperti yang telah disebutkan di atas, tentu saja lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Hal kedua adalah temuan dari berbagai diskusi yang memperlihatkan begitu mendesaknya persoalan-persoalan budaya ditangani secara profesional dan serius mulai sejak kegiatan observasi, penelitian lapangan, sosialisasi pemahaman konsep-konsep budaya, sampai ke tahap aplikasi, atau pembuatan program terapan di berbagai bidang. Kekayaan aspek dan keragaman tradisi tidak hanya menyimpan segala hal yang berharga mengenai sistem pengetahuan masyarakat, sistem religi dan kepercayaan, sumber pembentukan identitas, sarana ekspresi pemikiran, keindahan, dan kreativitas, pembentukan dan peneguhan adat istiadat dan hukum, melainkan juga memperlihatkan keberanian menggugat hegemoni dan sekaligus menciptakan resistensi diri dalam menembus masa kini dan memberikan arah pijakan ke masa mendatang.

Resistensi tradisi dalam pemertahanan diri dilakukan dengan berbagai cara. Munculnya ketegangan adalah karena di satu sisi tradisi dipakai untuk mengukuhkan "otoritas", legitimasi, dan pengabsahan; tetapi di sisi lain tradisi dianggap penghalang dan beban bagi proses pembangunan". Karena itu, industrialisasi dalam konteks tersebut—yang dipercaya sebagai salah satu simbol modernisasi menuju abad 21—dianggap dapat dijalankan tanpa pemahaman budaya.

Negara yang mengembangkan politik kebudayaan yang sentralistik cenderung mengabaikan atau meminggirkan tradisi yang ada. Ada berbagai upaya untuk mengukuhkan "otoritas", antara lain melalui pengukuhan tulisan yang muncul dalam berbagai-bagai perundang-undangan, peraturan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan, dan kebijakan lainnya. Tradisi tulisan yang dapat dianggap sebaggai wakil pemegang "hegemoni" telah digunakan sebagai kepanjangan tangan kekuasaan untuk "penyeragaman politik dan sosial". Sementara itu, keragaman budaya meniscayakan penyelenggaraan negara yang tidak sentralistik. Keberadaan sesuatu yang lokal dirasakan perlu untuk dipertanyakan kembali, terutama ketika muncul tuntutan untuk membangun kultur yang lebih luas atas nama negara. Proses penyesuaian-penyesuaian antara kepentingan lokal dan kepentingan negara inilah yang berpotensi menciptakan ketegangan.

Pertanyaannya adalah apakah kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang semakin kompleks pada milenium mendatang ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama? Sejauh mana kesadaran kita mengenai keberadaan kita sebagai warga suatu bangsa dan masyarakat dunia, di samping keberadaan kita sebagai "manusia Indonesia?" Untuk itu pula, para wakil penyelenggara FBN '99 sepakat menyatakan bahwa kedudukan dan fungsi budaya daerah (termasuk bahasanya) sebagai akar budaya bangsa perlu dicantumkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Dengan demikian, budaya merupakan pendekatan yang tidak dapat diabaikan. Daya dukung berupa *political will* dari pihak pemegang otoritas dan daya dukung

dari masyarakat dengan kondisi dan sistem yang menyehatkan kehidupan budaya agar menjadi pendekatan yang tidak dapat ditunda sungguh-sungguh diharapkan.

Pertanyaan mendesak yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan alasan tersebut di atas adalah bukankah sudah begitu mendesak dan sangat diperlukan pendekatan budaya hadir bersama-sama dengan pendekatan lainnya? Bila demikian dapatlah juga direnungkan perlunya kebudayaan mendapat tempat sendiri pada masa mendatang. Kegiatan FBN '99 telah memperlihatkan bukti bahwa jaringan kerja yang berakar dari bawah (bukan karena instruksi atau sekadar memenuhi proyek) dan yang terdiri atas berbagai lembaga dan pihak-pihak yang begitu beragam dapat menghasilkan "energi" dan "sinergi" yang luar biasa.*

* Pudentia MPSS, *penanggung jawab FBN '99, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan, dan dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia.*

Kompas, 24 Oktober 1999

Indonesia Butuh Gerakan Kebudayaan

R, 30/10-99

JAKARTA — Gerakan kebudayaan sudah menjadi kebutuhan penting bagi bangsa Indonesia. Gerakan budaya tersebut untuk menghadapi meruyaknya nilai-nilai destruktif yang berkembang dan berpotensi merusak keutuhan bangsa dan negara. R 30-10

"Nilai-nilai ini masuk ke nadi bangsa kita secara halus lewat wacana budaya. Ini sudah harus dihadapi," ujar Dr Abdul Hadi WM, pakar sastra Islam, saat diskusi budaya nasional, kemarin di Jakarta. Infiltrasi destruktif itu, sambungnya, harus disambut secara cerdas pula, bukan sekadar dengan fisik. "Sebab mereka melakukan persuasi dalam tataran pola pikir," jelasnya.

Sastrawan dari Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, kecenderungan gerakan kebudayaan yang berlangsung selama ini adalah bersifat reaktif. "Kalau ada umpan baru kita beraksi. Setelah permasalahan selesai maka selesai pula menjaga kesinambungan gerakan kebudayaan itu," katanya. Sebab tak terjaganya upaya berkebudayaan itu, sambung Abdulhadi, generasi muda mendapat terpaan bermacam wacana yang di antaranya bersifat destruktif dan tak sesuai dengan kultur bangsa kita.

Pernyataan serupa pun dikatakan sutradara sekaligus penulis skenario film kawakan Misbach Yusa Biran. "Perlu dibangkitkan kembali rasa berkebudayaan yang beradab itu," ujarnya. Selama ini, tambahnya, atmosfer suasana berkebudayaan itu telah sirna. "Maka, tak mengagetkan jika generasi muda yang telah kehilangan nilai kebudayaan itu dengan mudahnya larut dalam paham-paham destruktif," terangnya.

Generasi muda itu, papar Misbach, lantas gampang takjub dan mengkultuskan kebenaran suatu nilai asing, karena mereka kehilangan kultur orisinal mereka sebagai pembanding. Misbach menyebutkan kegagalan kurikulum selama ini yang tak menyertakan pengajaraan seni dan sastra pada anak didik. "Jadi, anak-anak sekarang tak punya contoh tokoh domestik, karena mereka tak pernah membaca Hikayat Hangtuah, Raja Ali Haji, Syeh Yusuf, Hamzah Fansuri, Hikayat Panji, Malahayati dan lainnya," jelasnya.

Dan upaya yang kian melumpuhkan kebudayaan yang beradab itu, jelas Misbach, adalah munculnya anggapan bahwa mayoritas muslim di Indonesia terkekang ekspresinya untuk berkesenian. "Padahal antara kesenimanan dengan keislaman tak ada jarak sama sekali," tegasnya. Abdulhadi juga mengemukakan ironisme berkesenian di kalangan masyarakat muslim Indonesia. "Kesenian dicap haram, tapi para orangtua membiarkan anak-anaknya menonton Madonna," tukasnya.

Seniman muslim, kata Misbach, sudah seharusnya taat beribadah, tak kumuh dan moderat. "Atmosfer suasana kebudayaan Islam yang tak jumud harus terus dikembangkan," katanya. Banyaknya kantong budaya muslim yang terserak-serak di pelbagai lapisan ma-

syarakat, terang Misbach, adalah sumber-sumber energi kebudayaan yang bisa disinergiskan. "Kita menciptakan terus suasana dan atmosfer berkebudayaan yang beradab untuk mengikat semuanya ini," paparnya.

Lebih lanjut ia berbicara soal perlunya pengembangan *Islamic Cultur Centre* di Indonesia. Ini karena upaya mengkondusifkan suasana berkebudayaan yang beradab tak terdengar lagi. Rencana yang sempat berkumandang sekitar lima tahun terakhir ini dirasa hilang *follow up*-nya. Misbach mengatakan bahwa secara fisik rencana itu telah disediakan, yaitu Museum Istiqlal dan Bait Alquran di Taman Mini Indonesia Indah. "Sayangnya, bangunan-bangunan itu tak dimanfaatkan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Bahkan Abdulhadi mengkritik sikap masyarakat yang meninggalkan begitu saja bangunan-bangunan tersebut. "*Kayak* anak kecil saja, sudah dikasih lalu ditinggal pergi begitu saja," ujarnya. ■rad

Republika, 30 Oktober 1999

Yahya Muhaimin:

Gus Dur takkan Lupakan Kebudayaan

Jakarta, Kompas 30/10-99

Sekalipun sampai hari pelantikan menteri Kabinet Persatuan keberadaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud belum juga jelas, namun Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin menyatakan yakin Presiden Abdurrahman Wahid tak akan melupakan dan meninggalkan kebudayaan; justru karena itu ia lalu mempunyai perhatian khusus.

"Beliau itu 'kan budayawan. Saya yakin sekali, beliau pasti tak akan melupakan dan meninggalkan kebudayaan, hanya saja saya belum tahu persis konsep Gus Dur. Saya merasa sedikit tahu maksud Gus Dur soal kebudayaan ini tetapi lebih baik saya bertanya kepada beliau," jelasnya saat ditanya wartawan soal keberadaan Ditjen Kebudayaan Depdikbud, hari Jumat (29/10) kemarin. K-30-10

Usai pelantikannya menjadi Menteri Pendidikan Nasional, Yahya Muhaimin langsung mengikuti salat Jumat di Kantor Departemen Pendidikan Nasional Senayan, kemudian makan siang, dilanjutkan pertemuan dengan para pejabat eselon satu (setingkat Dirjen).

Menurut pendapatnya, kebudayaan sangat berkait dengan pendidikan, tetapi kalau apa yang ia kemukakan ternyata tidak sesuai dengan maksud presiden, akan lucu. "Saya ini pembantu Gus Dur, mesti tahu persis dulu konsep tentang kebudayaan yang dimaksudkan presiden," lanjutnya, seraya melanjutkan ia akan minta waktu bertemu presiden untuk meminta penjelasan soal itu. Diharapkan, sebelum sidang kabinet pertama, sudah ada kejelasan masalah tersebut.

Kebudayaan, lanjutnya, ada di segala aspek. Itu sebabnya ia akan bertanya kepada presiden, maksudnya bagaimana. Yahya mengaku agak tahu sedikit maksud Gus Dur, tetapi karena 'barang' ini banyak dipertanyakan orang, lebih baik ia bertanya dulu kepada Gus Dur.

Pendidikan dasar

Tentang pemikiran dan program kerjanya, mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Amerika Serikat ini memiliki pemikiran keadaan pendidikan dasar terutama SD-SMP perlu perhatian utama, sebab keduanya merupakan basis. Ia ibaratkan akan membuat rumah. Kalau basisnya bobrok ya rumahnya mudah goyah. "Kita lihat mana yang perlu diperbaiki lagi atau ditambah," ujarnya. Hal lain, penyebaran pendidikan ke luar Jawa, tetapi rencana itu akan menunggu pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang dinilainya sangat berkait, terutama SD. "Saya punya determinasi, di tingkat dasar perlu perhatian khusus," ujarnya lagi.

Yahya juga menyoroti masalah etika, mental anak, kesukaan baca tulis yang bukan sekadar bisa baca tulis tetapi ada kreativitas anak serta penanaman ilmu dasar. Namun demikian, belum dijelaskan bagaimana ia akan memperbaiki mental etika anak SD-SMP.

Dirinya mengatakan, apa yang akan dilakukannya bukan berarti ganti menteri ganti kebijakan. Menurut dia, sebetulnya

masalahnya adalah tatkala menteri akan membuat program yang menyangkut kurikulum barangkali karena suatu hal bukunya tidak ada, atau kurang, tak jelas, sehingga ada buku yang harus dibeli dan akan jadi beban orangtua. Sudah begitu gurunya kurang, atau ada tetapi gajinya terpotong-potong sehingga bekerja tidak serius. "Masalahnya beruntun, sehingga yang kena tembak Depdikbud. Padahal itu tak hanya Depdikbud, pemerintah daerah juga berkait, tetapi saya tak akan menyalahkan siapa-siapa, tak akan mencari orang untuk disalahkan atau diberi pujian," tuturnya.

Sementara itu Direktur Kesenian Ditjen Kebudayaan Sri Hastanto yang hendak ditanya keberadaan direktorat yang dipimpinnya, sampai Jumat sore belum bisa dijumpai. Sejak dua hari terakhir ini, jam kerjanya diisi dengan rapat dari pagi sampai sore. Kamis kemarin, ia merencanakan melihat Festival Nasional Teater Anak-Anak di Sasono Langen Budaya TMII, tetapi ditunggu sampai festival hari ketiga usai, Sri Hastanto tak kunjung datang. **(tri)**

Kompas, 30 Oktober 1999

KOLOM GATRA . 6-11 No. 51/V



Kuntowijoyo *

Gus Dur Di Mana Kebudayaan?

KABINET baru sudah dibentuk. Sebagian orang lega, sebagian lagi resah. Karyawan Departemen Penerangan (Deppen), yang jelas akan dilikuidasi, resah. Karyawan Departemen Sosial resah, karena tidak ada kejelasan kedudukan mereka. Demikian juga karyawan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, karena tidak sepatah kata pun dalam kabinet baru berbunyi "kebudayaan". Masalah pegawai negeri sipil mudah diselesaikan, begitu menteri-menteri dilantik. Juga masalah kedudukan departemen dan ditjen secara institusional pasti sudah selesai ketika artikel ini diturunkan. Tetapi, masalah fungsi akan terus memburu kita.

Soal kebudayaan, kita sungguh khawatir. Gus Dur sering mengatakan bahwa simbol tidak penting, yang perlu adalah substansi. Bukan lambang, melainkan isi. Jangan-jangan, itu berarti juga bahwa kebudayaan adalah simbol, adalah lambang. Tidak ada pengertian apa pun yang mengarah ke kebudayaan pada Kabinet Persatuan Nasional, bahkan tidak pada Departemen Pendidikan Nasional. GATRA 6/11-No 51/V

Departemen yang biasanya bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu telah kehilangan kata "kebudayaan". Tapi tunggu dulu! Gus Dur pernah jadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta, dan pernah duduk di Dewan Juri Festival Film. Jadi, mustahil dia melupakan kebudayaan. Juga dia dulu penganjur yang gigih pendekatan kultural dalam gerakan agama. Maka, artikel ini sekadar mengingatkan kembali akan komitmennya (dan komitmen kabinet baru) pada kebudayaan. Sekaligus untuk mengingatkan kita sebagai bangsa akan pentingnya kebudayaan.

Kebudayaan setidaknya berguna bagi bangsa dalam tiga hal, yaitu sebagai bentuk luar dari perasaan-perasaan yang di dalam, sebagai jati diri bangsa, dan sebagai alat perekat yang dapat mempersatukan bangsa.

Rasa-Bentuk. Dengan berbagai variasinya, sebagai satu bangsa, ternyata kita mempunyai perasaan yang sama. Kita akan menunjuk dua hal, yaitu religiusitas dan kemanusiaan —dua kata yang menempati urutan teratas dalam Pancasila. Sebutan seperti "nasionalis-religius", "religius-nasionalis", dan "sosialisme-religius" sudah menjadi kata sehari-hari. Rasa tunduk kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita lambangkan dalam semarak kehidupan agama, kepercayaan, seni, dan perilaku. Hinduisme, Budhisme, Islam, dan Kristen, semuanya mengakar di sini.

Memanjang dalam waktu dan meluas dalam ruang. Kita ingat Candi Kalasan dari Hinduisme abad ke-8, Candi Borobudur dari Budhisme abad ke-9. Sekian masjid dan sekian gereja. Bukti ini tidak berarti bahwa agama-agama adalah kebudayaan. Agama-agama itu di sini dijalani secara serius.

Rasa kemanusiaan tampak dalam perdamaian, hak-hak asasi manusia (HAM), egalitarianisme. Akhir-akhir ini, memang rasa kemanusiaan kita di beberapa tempat telah hilang karena pelanggaran HAM dan kekerasan, tetapi percayalah itu bukan gejala permanen. Rasa kemanusiaan juga tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti keakraban, kerukunan, hormat pada orang yang lebih tua, suka menolong, dan toleransi.

Jati Diri Bangsa. Tidak ada alat yang dapat mengekspresikan satu bangsa kecuali kebudayaan. Agama, olahraga, ilmu, dan teknologi mempunyai aturan-aturan yang universal. Di Mesir dan India di dunia Timur, di Negeri Belanda dan Amerika di dunia Barat, salat wajib itu lima kali sehari semalam. Tidak ada bedanya badminton di Swedia, Cina, dan Indonesia. Rumus bahwa O adalah oksigen berlaku di mana-mana; di Kuba yang sosialis ataupun di Amerika yang kapitalis.

Kebudayaan berbeda-beda, bahkan dalam negara yang sama. Perempuan di Manado akan *jegang* bila duduk dilantai, orang Jawa *timpuh*. *Baludo* di Padang asin, sedangkan di

Yogya agak manis. Dengan mudah orang mengenali lukisan Cina klasik dengan garis-garis melengkung dan lukisan Barat dengan anatomi dan perspektif yang kental. Dangdut dan keroncong hanya terdapat di Indonesia. Sama-sama batik, tapi dengan mudah dibedakan batik Afrika dan batik Indonesia; keduanya berbeda dalam motif.

Perekat Bangsa. Kita ingin menunjukkan satu aspek saja dari kebudayaan, yaitu bahasa. Kita sungguh diuntungkan oleh proses sejarah. Bangsa-bangsa lain, seperti Filipina dan India, harus berjuang keras untuk membuat bahasa yang disetujui sebagai *lingua franca*. Bangsa Indonesia tidak usah bersusah payah. Begitu merdeka, kita sudah mempunyai bahasa yang satu. Dengan adanya satu bahasa itu, bukan saja kita dapat berkomunikasi, unsur budaya yang lain—seperti sastra—juga berkembang. Kiranya sastra juga merupakan alat perekat.

Kita sungguh takut, sebab alasan yang dipakai untuk pembubaran Deppen dapat pula dikenakan untuk Ditjen Kebudayaan, yaitu meniadakan inefisiensi dan meningkatkan peran masyarakat. Pertanyaannya adalah: bagaimana nasib sejarah, museum, peninggalan purbakala, dan *high culture*? Apakah pemerintah mau melepaskan tanggung jawab dalam mengembangkan kebudayaan sebagai amanat konstitusi?

Menyerahkan urusan kebudayaan kepada masyarakat berarti menyerahkannya kepada pasar. Dan pasar bukan pelaksana yang baik bagi kebudayaan. Sebab, selama ini pasar pilih kasih, hanya budaya yang menguntungkan yang akan dipelihara. Nanti hanya budaya populer yang dihidup-hidupkan, sedangkan sejarah, museum, peninggalan purbakala, dan *high culture* yang tak dapat dijual ditelantarkan. Dalam hal ini, subsidi masih diperlukan. ■

** Pakar sejarah dan budayawan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*

Gatra, 6 Oktober 1999

JURNALISME SENI

Hasan Junus Memahat Batu

Berita biasa kehilangan daya tariknya dengan berlalunya hari. Berita seni mestinya tak seperti menulis di atas air.

MAKA ada di situ orang bermain muzik indah-indah bunyinya. Adapun perkakas permainannya bermacam-macam. Ada yang serupa seruling, ada yang rupa serunai, ada yang rupa nafiri bersorong tarik. Ada yang seperti getar-getar nasi bergantung giring-giring kepadanya, dihentakkannya berdering-dering bunyinya. Ada yang segi tiga persegi dipukul dari sebelah dalamnya, dan ada tambur yang tiada berdempir. Ada pula tambur seperti beduk, ada pula tembaga seperti bring-bring Cina. Maka apabila bermain, berbunyilah semuanya pada tingtingnya sangat azmat bunyinya serta dengan hebatnya, terkadang merdu bunyinya memberi sayu hati mendengarnya.. GAMMA 24-10

Maka pergilah Engku Sayid dan Raja Ahmad serta anak-anak raja sekalian itu lalu dibawanya kepada satu rumah main wayang Holanda. Dan sifat rumah itu lekuk ke dalam tanah dan bertingkat-tingkat tempat segala orang-orang menengoknya, dan pada hadapan wayang itu ada beberapa bangku yang mati. Adalah permainannya ajaib-ajaiblah segala yang melihat, ada keluar kapal-kapal dan hujan, dan guruh, dan berperang, dan lainnya seperti rupa sungguh-sungguh. Dan berhenti kisahnya maka dilabuhkannya tirai. Maka berbunyilah musik, apabila terhenti musik, naiklah tirai itu, keluar pula negeri lain dan lain lakonnya. Demikianlah halnya hingga sampai pukul dua belas, berhentilah masing-masing pulanglah ke rumahnya.

Dua pragaraf dari buku *Tuhfat al-Nafis* itu telah membentangkan genre seni di Batavia abad 19. "Begitulah, laporan jurnalisme seni yang dikenal di masa itu," kata Hasan Junus, seorang budayawan Riau. Lelaki yang kocak ini tengah berbincang di hadapan peserta "Pelatihan Jurnalisme Seni" yang diselenggarakan Dewan Kesenian Riau, dua pekan lalu di Pakanbaru. "Mungkin sekali, laporan

yang ditulis oleh wartawan yang tak diketahui namanya itu lalu dikutip oleh si penulis buku sejarah," kata Hasan Junus.

Nikmatnya jurnalisme seni masa lampau bisa pula dibaca pada *Syair Pekawin Anak Kapitan Cina*. Di situ diuraikan gambaran kesenian Makyong, yang cukup tua usianya di Riau. Sebagian dari syair tersebut lalu dipantunkan Hasan Junus dengan rancak.

Siang dan malam bermain wayang/ orangnya ramai bukan kepalang/ makyong menari joget menembang/ sekalian melihat hatinya bimbang

Sekaliannya orang disuruh kampungkan/ pelantar yang buruk disuruh baikkan/ bangsal makyong disuruh buatkan/ menyuruh berhadir segala kelangkapan

Demikianlah perintah permaisuri/ di hadapan selasar makyong menari/ Sayid Husin muda bestari/ dialah memerintah di dalam puri

Setelah sudah berjamu-jamuan/ disuruhnya palu bunyi-bunyian/ makyong menari di alun-alunan/ di hadapan selasar beramai-ramian

Orang melihat terlalu banyak/ hendak menanti orang berarak/ melihat makyong sudahlah jelak/ hendak melihat pengantin pulak

Seketika duduk bermohon keluar/ serta berjalan turun ke selasar/ melihat makyong menari berbanjar/ kapitan melihat terlalu gemar

Baginda berdiri memberi titah/ orang kita baiklah dikerah/ sekalian makyong suruh bawalah/ aturkan betul janganlah salah

Kemudian nasik berastakona/ di-usung oleh muda teruna/ kemudian bandangan lembing sempena/ serta makyong dengan penjawatnya

Makyong menari sambil berjalan/ serta dengan bunyi-bunyian/ orang melihat berlari-larian/ ada laki-laki ada perempuan.

Substansi yang bisa dipetik dari *Syair Kekawin Anak Kapitan Cina* tadi, barangkali, seeloknya peristiwa kesenian dituliskan dengan bahasa yang berlimpah-ruah. Tidak kering kerontang. Bukan pula *straight news*, melainkan dengan gaya bersastra. Tentu saja bentuk pantun dari zaman *dahoeloe* itu hanya sebuah komparasi belaka.

Hasan Junus dengan suka hati mengutip penyair Ezra Pound. "*Literature is news that stays news*," kata peraih Anugerah Budaya Sagang 1999 Riau itu. Bila kesusasteraan adalah berita yang terus menjadi berita, maka berita biasa segera kehilangan daya tariknya dengan berlalunya hari. Sedangkan sastrawan adalah orang yang bagai memahat batu, dan lalu menjadi prasasti, patung, monumen dan candi, seperti di zaman nenek moyang dulu.

Adakah jurnalisme seni —atau juga berita— harus ditulis dengan gaya bahasa fiksi agar tak bagai "menulis di atas air" seperti disitir Rosihan Anwar, yang juga menjadi titel buku wartawan senior itu? "Saya pikir, iya. Saya menawarkan wacana itu," kata Hasan Junus. Bila demikian, niscaya berita kesenian adalah suatu ekspresi kesenian pula. Sebuah benih reformasi jurnalisme seni telah disemai di Pekanbaru.

Bersihar Lubis

Gamma, 24 Oktober 1999

Kebudayaan Harus di Posisi Terhormat

K, 13/10-99

Jakarta, Kompas

"Jangan karena atas nama industrialisasi dan teknologi manusia lantas dikorbankan. Kita mencoba menempatkan kebudayaan dalam tempat yang terhormat, tempat yang sentral," kata Mendikbud Juwono Sudarsono usai menyerahkan tanda jasa untuk 26 seniman dan ilmuwan berbagai bidang, di Jakarta, Senin (11/10).

Mereka yang mendapat penghargaan itu di antaranya (alm) Prof Dr Drijarkara, (alm) Mochtar Embut, Husein Mutahar, Prof Dr Satjipto Rahardjo, Prof Dr Nurhayati Hakim, dan Abdullah Totong Mahmud. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka itu tidak tampak datang.

Idris Sardi yang datang mengenakan baju batik langsung pulang begitu selesai menerima bintang jasa, sedangkan Titiek Puspa hanya diwakili putrinya Petty Tungjungsari. Sementara Dr L Manik yang masuk dalam daftar nama penerima penghargaan tidak diketahui alamatnya oleh panitia. Adapun koreografer kondang Sardono W Kusomo tidak memberi jawaban ihwal penghargaan tersebut. Rektor UGM Ichlasul Amal yang dinilai sebagai pencetus reformasi damai juga tak hadir karena sedang di Amerika.

Menurut Juwono, meski penghargaan yang diberikan pemerintah ini bukanlah untuk pertama kali dilakukan, namun pemberian penghargaan tahun ini didasarkan pertimbangan betapa pentingnya kebudayaan, terutama di saat krisis. Hal itu terungkap dari pertemuan kebudayaan di Italia pada awal Oktober lalu yang dihadiri Dirjen Kebudayaan Depdikbud IGN Anom. "Pada pertemuan itu Bank Dunia sepakat menempatkan kebudayaan sebagai sasaran perhatian utama dalam pembangunan," tutur menteri.

Mendikbud juga menyatakan dirinya sudah mengungkapkan betapa penting menempatkan kebudayaan di posisi sentral. Ketika itu ia menyebutnya sebagai rekapitalisasi budaya. "Itu jauh lebih penting daripada rekapitalisasi perbankan, karena tabungan solidaritas kita makin menipis sehingga terjadi kecenderungan sebuah kejadian merebak menjadi tindak kekerasan," katanya seraya menegaskan perlunya membangun dan menanam kembali akar-akar solidaritas. **(tri)**

Kompas, 13 Oktober 1999

Keputusan FBN

Semua Kebudayaan Setara

JAKARTA (Media) : Selasa malam lalu, seluruh rangkaian Festival Budaya Nusantara (FBN) berakhir dan ditutup secara resmi di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Dari seluruh rangkaian FBN yang dilaksanakan sejak 9 September itu, dihasilkan tiga butir utama rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah.

Pertama, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nasional, termasuk ancaman disintegrasi bangsa, pendekatan dari sisi budaya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selama ini, konflik yang mengemuka antara pusat dan daerah, atau antardaerah selalu diselesaikan secara politis, dan itu terbukti tidak dapat menyelesaikan masalah.

Kedua, kebudayaan daerah harus didudukkan sebagai akar dari kebudayaan nasional, dan bukan lagi sebagai puncak-puncak dari kebudayaan nasional. Dengan mengatakan puncak, berarti kebudayaan yang tidak puncak tidak bisa disebut sebagai kebudayaan nasional. Butir ini menengarai, seluruh kebudayaan daerah akar kebudayaan nasional.

Ketiga, tidak ada lagi istilah budaya dominan, budaya mayoritas, atau budaya minoritas. Semua unsur kebudayaan berdiri setara dan harus mendapat kesempatan serta perhatian yang sama dari pemerintah pusat dan daerah.

Pada siang harinya, FBN masih melangsungkan kegiatan berupa pameran naskah, bazar buku, dan Konferensi Bahasa Nusantara (KBN). KBN yang berakhir sekitar pukul 17.45. WIB menghasilkan suatu keputusan sebagai rekomendasi kepada pemerintah bahwa seluruh bahasa di nusantara memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada bahasa yang lebih besar dan tidak boleh ada bahasa yang ditelantarkan.

Selama ini ditengarai ada bahasa yang ditelantarkan karena penuturnya hanya sekitar 1.000 orang. Karena penuturnya sedikit, pemerintah tidak memperhatikan eksistensinya dan seakan-akan membiarkan bahasa itu mati. Padahal, secara diakronis maupun singkronis, bahasa yang penuturnya sedikit itu memberikan kontribusi sebagai bahan kajian dan komparatif serta sebagai kekayaan budaya dan bahasa daerah Indonesia.

Makanya, para peserta FBN ini menyatakan kesedihannya, jika ada bahasa daerah, seperti bahasa Lampung yang kini terancam punah akibat warga Lampung sendiri yang menggunakan bahasa daerahnya semakin punah.

Penutupan FBN secara resmi diramaikan dengan penampilan lagu-lagu daerah seperti Sunda, Banyuwangi, Batak, Maluku dan sebagainya. Tampil sebagai pengisi acara beberapa penyanyi kondang seperti Bob Tutupoli, Rita Butar Butar, Ramona Purba dan sejumlah artis ibu kota lainnya. *Ireng Maulana All Star* sebagai pengiringnya. (Daf/B-2)

Media Indonesia, 20 Oktober 1999

CERPEN-ULASAN

Cerpen Umar Kayam dalam 13 Bahasa

Cikini, Warta Kota

Cerita pendek *Seribu Kunang-kunang di Manhattan* karya Umar Kayam, yang telah diterjemahkan ke dalam 13 bahasa daerah Indonesia, diluncurkan di Taman Ismail Mazuki, Senin (18/10).

Namun, dari 13 seniman yang dijadwalkan tampil, tiga orang tak datang.

Ke-10 pembaca disesuaikan dengan daerah asal masing-masing. Riantiarno, yang asal Cirebon, membaca dalam versi bahasa daerah Cirebon. Sujiwo Tejo yang meledak-ledak, membaca versi Madura.

"Ragam bahasa Madura itu ada dua. Madura Bangkalan dan Madura Pesisiran. Masing-masing punya warna berbeda, namun sering diartikan salah. Misalnya ungkapan *bo abo.* itu tak ada dalam ungkapan Madura," tandas Tejo.

Kemudian AA Navis, novelis asal Padang, menyampaikan pembacaan cerpen dalam bahasa Minangkabau dalam intonasi yang terengah-engah.

"Saya merasa dilecehkan, karena sepanjang berkarya, saya tak pernah membuat cerpen atau novel dalam bahasa Minang. Tapi karena Umar Kayam besan saya, saya harus menghormatinya. Kalau saya menolak, takut anak saya dikeluarkan dari statusnya sebagai menantu," selorohnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara Mohamad Sobary merasakan, terjemahan ke dalam bahasa Jawa, kurang ortodok. Jawanya masih Jawa Jakarta. "Kata 'dapur' seharusnya *pawon*. Kalau *dapur* dalam bahasa Jawa bisa bermakna *dapurmu* (rupamu,—Red)," kata Mohamad Sobary.

Menurut Umar Kayam, cerpen tersebut diciptakannya tahun 1960, ketika ia bermukim di Amerika. Ia sendiri tak ingat proses penciptaan karyanya itu. Dan penerbitan buku ini, baginya patut disyukuri. Ceritanya seputar percintaan antara laki-laki Indonesia dengan wanita bule, yang punya latar belakang kultur yang berbeda. Dikemas dalam bahasa romantis.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah seniman seperti Nungky Kusumastuti, Ratna Riantiarno, Jajang C Noor. Tiga belas pembaca cerpen hanya mendapat jatah waktu lima menit, sehingga hampir semua tak menyelesaikan secara tuntas. (agi)



agi

Umar Kayam



Istimewa

PEMBACA	BAHASA	PEMBACA	BAHASA
• Muhamad Sobary	Jawa	• Dr Irwan Abdullah	Aceh
• N Riantiarno	Cirebon	• Robert Sibarani	Batak
• Ki Sujiwo Tejo	Madura	• Prof Dr Agus Rusyana	Sunda
• AA Navis	Minangkabau	• Slamet Riyadi	Sasak
• Putu Wijaya	Bali	• Mukiis Paeni	Bugis

Warta Kota, 20 Oktober 1999

Antologi Cerpen 'Ketika Jenderal Pulang' Diluncurkan

PADANG — Antologi cerpen karya Khairul Jasmi bertajuk *Ketika Jenderal Pulang* akan diluncurkan di Hotel Bumi Minang, Padang, Kamis (28/10) malam besok. Acara ditandai dengan orasi kebudayaan Halim HD dari Solo, serta oleh Prof Mursal Esten dan Prof Rizanur Gani dari Universitas Negeri Padang (UNP).

"Untuk menerbitkan dan meluncurkan sebuah kumpulan cerpen, kami di Padang merasa sanggup melakukannya," ujar Yusrizal KW, cerpenis yang menerbitkan antologi cerpen itu. Yusrizal yang mendirikan penerbitan kebudayaan Citra Budaya Indonesia (CBI) Padang, telah menerbitkan empat buku kebudayaan. "Kini saya terbitkan kumpulan cerpen Khairul," paparnya. Hari ini, CBI melaksanakan seminar bahasa dan sastra di UNP Padang, sebagai rangkaian dari acara peluncuran itu.

Menurut Yusrizal KW, *Ketika Jenderal Pulang*, berisikan sepuluh buah cerpen karya Khairul Jasmi. Selain cerpen *Ketika Jenderal Pulang* juga ada cerpen, *Mamak* yang pada tahun 1998 silam menjadi salah satu cerpen nominasi terbaik tahun 1998 versi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Selain itu, antologi ini juga memuat cerpen *Rantau, Pulang, Tanah Pusaka, Barang Siapa yang Kehilangan Alu, Seorang Ibu dari Vietnam, Nelayan, Lembah tak Bernama* dan *Suami*. Cerpen in dimuat dalam waktu yang berbeda di harian terbitan Jakarta, *Berita Buana, Republika* dan harian terbitan Padang, *Singgalang* serta *Haluan*.

Kehadiran antologi itu, dinilai oleh cerpenis Harris Effendy Thahar sebagai suatu yang menyejukkan. "Saya bangga kita di Padang bisa meluncurkan kumpulan cerpen di hotel berbintang lagi," cetusnya.

"Yang penting bukan hotelnya, tapi makna dari acara itu, saya bahagia sekali," timpal sastrawan gaek AA Navis. Hal senada juga disampaikan cerpenis/dramawan Wisran Hadi. "Saya semula mulai kecewa, tapi kini darah saya segar kembali," katanya.

Yusrizal KW menyebutkan, pihaknya pertama-tama menawarkan pada Khairul untuk menerbitkan cerpen-cerpennya, yang disambut positif. Minat menerbitkan itu, sebut Yusrizal, karena cerpen Khairul yang wartawan *Republika* itu, sarat dengan budaya, adat istiadat serta sejarah lokal Minangkabau. "Saya makin percaya, karya sastra bisa dijadikan rujukan sejarah," cetusnya. Jika sebelum ini hanya novel, seperti *Revolusi di Nusa Damai* karya Ketut Tanri yang disebut novel sejarah. "Maka kini saya berani menyatakan, cerpen Khairul adalah cerpen sejarah," paparnya.

Cerita *Ketika Jenderal Pulang* berkisah tentang ketakutan rakyat terhadap tentara di zaman PRRI tahun 1958. Dikisahkan juga bagaimana APRI melanyau Ranah Minang, sepak terjang PKI menghabisi orang Masyumi, serta puluhan korban mati sia-sia. Cerpen *Suami* berkisah tentang kehidupan keluarga di zaman revolusi, serta *Rantau* menyangkut nasib wanita Minang yang ditinggal suaminya yang pergi merantau. ■ rul

Republika, 27 Oktober 1999

KOMIK-ULASAN

"La Tour" Schuiten-Peeters Menjadi "Menara"



DUA komikus Perancis, Francois Schuiten dan Benoit Peeters, Selasa (28/9) meluncurkan komik hitam-putih mereka yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, berjudul *Menara*. Komik merupakan jilid kelima dari seri komik *Kota Suram*.

Dari tiga belas jilid seri *Kota Suram* yang sudah dihasilkan kedua komikus itu, Pusat kebudayaan Perancis (CCF) Jakarta dan Forum Paris-Jakarta (FPJ) memilih *La Tour*, judul asli komik tersebut, menjadi komik Schuiten dan Peeters yang pertama diterbitkan di Asia.

"Bukan kami yang menentukan komik yang akan diterjemahkan. Merekalah (CCF dan FPJ) yang memilih *La Tour*," kata Peeters di CCF, Salemba, Selasa (28/9) malam.

Komik yang oleh pengarangnya disebut komik novel itu ditujukan untuk remaja dewasa. *Menara* menceritakan tentang petualangan Giovanni, penjaga menara. Suatu saat, bangunan luar biasa yang dibangun untuk membawa manusia ke atas langit menuju Tuhan itu runtuh.

Giovanni yang cemas karena reruntuhan itu, memutuskan turun dari menara untuk memberi peringatan kepada inspektur. Tapi, bukannya turun ia malah naik ke puncak menara. Di sana ia bertemu dengan Milena dan Elias. Bersama Milena, Giovanni kemudian menyelesaikan tugas yang dibebankan Elias kepadanya.

Schuiten lahir di Belgia. Pria kelahiran 1956 itu bertugas menggambar komik. Ia bekerja sama dengan Peteers yang bertugas membuat *storyboard*, tokoh dan jalan cerita.

"Kami selalu berdiskusi tentang cerita apa yang akan kami buat," jelas Peteers, yang kelahiran Perancis itu.

Arsitektur yang rumit selalu menjadi ciri khas bagi karya mereka. Semua seri *Kawasan Suram* menitikberatkan gambar arsitektur yang rumit, detil dan unik. Tema kota yang suram dilatarbelakangi dengan pengalaman mereka tinggal di sebuah kota besar.

"Hubungan antara kota dan manusia yang digabungkan menjadi dasar cerita kami. Kami menggabungkan realitas dan imajinasi lewat komik itu," jelas Peteers.

Mereka memilih membuat novel hitam putih sebab menurut mereka warna hanya merupakan bagian dari buku. "Kami memilih hitam putih karena warna itu adalah bagian dari cerita kami," jelas Schuiten.

***

WALAUPUN mereka meluncurkan komik bergaya Eropa, kedua komikus yang berpenampilan sederhana itu berpesan agar orang Indonesia memilih komik dari lingkungannya sendiri.

"Lebih baik membaca komik yang diambil dari kehidupan sekeliling kita. Jangan melulu gaya Eropa, Jepang atau Amerika," ujar Peteers menasehati

Menurutnya, komik Amerika dan Jepang memang sangat mendominasi gaya komik dunia. Karena dominasi itulah, masyarakat menjadi kurang mengenal budaya komik negerinya sendiri. "Padahal, komik Indonesia bagus-bagus," kata Schuiten.

Lewat komik dari negeri sendiri, Peteers dan Schuiten yakin budaya negeri akan semakin meresap dan masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya.

Bicara soal kepekaan lingkungan, Peteers mengaku sangat terharu ketika seorang remaja peserta *workshop* komik yang diadakan di CCF berkeras mengkomikkan kerusuhan Jakarta.

"Itu bagus, sangat bagus. Jangan hanya pahlawan atau kekacauan di Jepang atau Amerika saja, 'kan?" kata Schuiten. **(sra)**

Warta Kota, 1 Oktober 1999

Ciaaat! Komik Indonesia Menggeliat!

IBARAT orang lagi sakit, dunia komik Indonesia sudah lama tidur dalam koma. Dibilang mati, ya *kagak*, hidup pun kurang terlihat nafasnya. Padahal, kalau diingat-ingat lagi, pada tahun 1960-1970-an, karya-karya komikus Indonesia pernah sangat berjaya dan merajai pasar.

RAK-RAK di beberapa toko buku di Jakarta boleh dibilang tak berisi komik Indonesia lagi. Komik Jepang, Eropa atau Amerika, itu yang laku dan mendominasi. Kalau mau cari di loakan mungkin ada satu-dua. Tetapi, lagi-lagi di pasar buku loak macam di Jalan Surabaya, yang berjaya tetap saja *Doraemon, Asterix, Kungfu Boy, Tiger Wong* dan komik impor lainnya.

Ini dibenarkan oleh Dr Rahayu Hidayat, Kepala Peneliti Kemasyarakatan dan Budaya di Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Rahayu yang juga seorang pengamat dan peneliti komik di rumahnya di kawasan Ampera Raya, Jakarta, bilang, komik impor kini mejadi bacaan favorit anak-anak muda perkotaan.

"Saya melihat garapan komik impor itu sangat bagus dan tertata rapi. Coba bandingkan dengan komik kita yang terkadang tidak digarap secara artistik. Dari segi ini saja disukai pembacanya. Kemudian juga segi cerita. Tapi untuk segi cerita sebenarnya kita bisa bersaing. Karena kita memang belum mengali potensi cerita yang ada," ujar ibu dari dua anak ini.

Sebenarnya cerita komik Indonesia bukan cuma dunia persilatan tapi juga cerita lainnya yang ada di beberapa daerah. "Dari galian cerita ini bisa dikembangkan agar menjadi menarik," ujarnya.

Perjalanan komik Indonesia ini sendiri sangat menarik dan penuh ironi. Menariknya, karena komikus di tahun 1960-an ini memang lahir dari tangan para seniman yang boleh dibilang belajar secara otodidak. Beragam jenis komik lahir. Dari yang jenis roman, silat, wayang, sampai superhero.

Maka, dalam khasanah komik Tanah Air sekali tempo sebagian dari kita pernah tergila-gila kepada karya si *Musang Berjanggut*-nya Taguan Harjo, atau *Sie Djien Koei*-nya almarhum Oto Swastika. Atau mungkin nama Hans Jaladara, Tegus Santosa, Djair, Tatang, Ganes Th, Jan Mintaraga, yang identik dengan komik silat. Di jenis lain ada Wid NS,

Hasmi yang kesohor dengan tokoh Goda, Gundala, dan Kosasih yang *ngetop* dengan kisah pewayangan.

Kalau mau dicari-cari, tentu banyak penyebab mengapa komik *made in* Indonesia bangkrut. Menurut Yayuk — begitu Rahayu kerap dipanggil — soal penggalian ide cerita serta proses produksi, cuma dua di antara sekian faktor yang bikin komik kita *tit*.

Yayuk juga melihat, proses produksi komik Indonesia cenderung digarap *one man show*. Artinya komikus membuat cerita, gambar hingga ilustrasi lainnya. Sedangkan komik luar membentuk sebuah kelompok mulai dari cerita, tukang gambar, ilustrasi hingga pemasaran.

"Hasilnya komikus luar tertata baik dibanding dengan punya kita. Lagipula komikus kita tidak ada pendalaman segi cerita. Maunya serba cepat. Beda dengan impor yang dikonsep," ujar Mbak Yayuk.

Independen

Apakah komik Indonesia sekarang sudah mati total? "Oh tidak, masih banyak diproduksi komik dengan cerita lokal," ujar perempuan yang juga kolektor pelbagai komik dalam dan luar negeri itu.

Menurutnya, setidaknya sejauh ini ada komik-komik yang diproduksi PT Mizan dengan pelbagai cerita dakwah.

Dalam pengamatan *Warta Kota*, enam tahun lalu di Bandung beberapa mahasiswa Seni Rupa ITB mendirikan semacam rumah produksi Qomik Nasional (QN). Dari situ api kecil pertanda kebangkitan komik Tanah Air mulai menyala dan memang menyulut di mana-mana.

QN sendiri sudah memproduksi beberapa judul, macam *Caroq*, *Kapten Bandung*, yang digarap dalam proses gabungan: manual dan komputer.

Mereka juga menjalankan proses produksi dalam tatacara "bau berjalan". Ide cerita, sketsa, penintaan, pewarnaan, penulis teks dilakukan oleh orang berbeda. Pun untuk sirkulasinya.

Rencananya *sih* mereka juga akan menjual *merchandising*, alias produk sampingan. Sayang, api dan cita-cita mereka itu tak berjalan mulus. Tetapi di sisi lain, nyala api — meski baru kecil-kecil — sudah menjalar. QN sendiri aktif menyelenggarakan seminar komik dalam upaya membangkitkan dunia perkomikan tanah air.

Gerakan ini disambut dengan antusias berbagai kalangan. Di sudut lain berdiri pula organisasi bernama Masyarakat Komik Indonesia (MKI).

"Kami ingin mencari jalan keluar untuk menghadapi bahan baku komik yang serba mahal, dan tekanan dari distribusi," ujar Wahyu Sugianto, ketua MKI kepada *Warta Kota* di sekretariatnya di kawasan Pejaten Barat, Jakarta.

Organisasi ini didirikan tahun 1996 ini. "Soal dana kami sedang mengusahakan. Salah satu diantaranya diversifikasi usaha," ujar Wahyu. Saat ini ada 15 kelompok atau studio komik yang aktiv membuat komik bawah tanah. Karena itu komik yang diedarkan jumlahnya terbatas dan masih dicetak dalam format hitam putih. Teknik cetakan pun beragam. Ada yang offset, ada juga yang cuma difotokopi *doang*.

Gerakan komik *underground* atau dalam istilah kerennya independen memang nongol di beberapa kota besar di Jawa. Beberapa mahasiswa di Surabaya, Semarang dan Jakarta diam-diam memproduksi komik. Di Yogyakarta malah berdiri beberapa studio komik, seperti misalnya Apotik Komik. Menurut Wahyu ini gejala wajar pada masa paceklik ekonomi.

"Yang penting bagi kami karya kami dikenal lebih dahulu," ujar Wahyu. Bukan cuma membuat komik tapi juga ikut diskusi terutama mengenai perkomikan.

Karena itu sering digelar acara Pekan Komik Merdeka, Nomic (Nomaden Comic), QQQ (Qedai Qomic Qartoon), Sanggar Komik.

Bahkan untuk tahun 2000 mendatang disiapkan Pekan Komik dan Animasi di Jakarta. "Meskipun kondisi sulit kreativitas harus tetap jalan," tegasnya. Lantas, kapan bangkit dan meraksasa lagi, *Bung*? (dharono trisawego)

Warta Kota,
20 Oktober 1999

NASKAH LAMA-ULASAN

Festival Budaya Nusantara '99

Komikkan Naskah-naskah Lama

Jakarta, Kompas

Naskah-naskah lama —termasuk sastra lisan— yang selama ini dikenal mengandung nilai-nilai luhur hendaknya bisa diaktualkan kembali dalam konteks sekarang. Untuk itu format penyajiannya pun harus lebih bersifat populer. Jika perlu, naskah-naskah lama itu ditampilkan dalam bentuk komik, sehingga bisa diakses oleh kalangan generasi muda.

Demikian salah satu gagasan yang muncul dalam *talk show* bertema "Eksistensi dan Masa Depan Pernaskahan Nusantara" di Jakarta, Selasa (12/10). Acara *talk show* yang menghadirkan Azyumardi Azra, Sapardi Djoko Damono, Anhar Gonggong, Ayatrohaedi dan Achadiati Ikram selaku ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara itu sekaligus mengawali kegiatan Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara III yang akan berlangsung hingga Rabu ini.

Simposium bertema "Tradisi Tulis Nusantara Menjelang Milenium III" itu adalah bagian dari rangkaian Festival Budaya Nusantara 1999 yang berlangsung di berbagai tempat sejak 9 September lalu dan akan berakhir hingga 19 Oktober mendatang. Selain simposium pernaskahan, agenda acara yang masih akan berlangsung adalah Festival Tradisi Lisan (14-16), Pameran Program Pemetaan Bahasa Nusantara (14-19) dan Konferensi Bahasa Nusantara (18-19 Oktober). Sedangkan pada malam harinya digelar berbagai pertunjukan tradisi, mulai dari Cokek Betawi, Hoho-Nias, Tayub-Blora, Band Yospan, hingga Gandrung Banyuwangi, bertempat di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki.

fbn '99

Dipopulerkan

Dipandu oleh Dr I Kuntara Wiryamartana, Azyumardi Azra mengingatkan pentingnya upaya memasyarakatkan naskah-naskah lama hingga ke sekolah-sekolah. Dalam kaitan itu, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana agar naskah-naskah tersebut bisa diterbitkan lewat edisi-edisi populer. Bentuknya dapat berupa esai-esai ringan, tetapi tidak menutup kemungkinan ia dihadirkan dalam bentuk komik.

"Upaya mempopulerkan naskah-naskah lama ini mungkin sebagian sudah dilakukan, akan tetapi yang sudah ada itu masih terlalu berat untuk anak SD misalnya," kata Azyumardi Azra yang sehari-hari adalah rektor IAIN Jakarta.

Sapardi Djoko Damono menyambut baik gagasan memasyarakatkan kandungan naskah-naskah lama melalui komik. Hal itu terutama dilihat dari kedekatan anak-anak pada komik. Berangkat dari pengalaman pribadi, Sapardi mengungkapkan, komik merupakan sarana yang sangat luar biasa efektif bagi anak untuk mencerap berbagai informasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah naskah. Mengutip pengakuan seorang rekannya dari luar Jawa, Sapardi menginformasikan bagaimana yang bersangkutan akhirnya mengenal dunia pewayangan hanya karena setelah ia membaca komik yang ditulis oleh RA Kosasih.

Menurutnya, anak-anak Indonesia pada dasarnya tidak terlalu diskriminatif dalam memilih bahan bacaan. Meski sepintas mereka lebih suka ba-

caan-bacaan atau komik dari luar, namun sesungguhnya apa pun yang disodorkan akan mereka baca. Sementara pada kelompok masyarakat yang lebih dewasa, pandangan terhadap karya sastra daerah cenderung mereka anggap sebagai karya sastra asing, sehingga bisa menarik mereka untuk melakukan penjelajahan-penjelajahan ke dunia baru di luar lingkungan budaya ibu mereka.

Sumber inspirasi

Dengan kata lain, bagi sastrawan sesungguhnya naskah-naskah lama itu dapat menjadi sumber inspirasi bagi penciptaan karya-karya baru. Masalahnya, kata penyair yang juga mantan dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) ini, sastrawan-sastrawan kita tidak selamanya punya akses ke sana, ke naskah-naskah daerah tersebut. Jika akses itu dibukakan, niscaya keberadaan naskah-naskah lama dan naskah-naskah daerah tersebut akan ikut memberi warna bagi khazanah sastra Nusantara.

"Sastrawan yang sudah memanfaatkan itu misalnya Mangunwijaya dengan seri *Gedhuk Duku*-nya atau karya-karya Wisran Hadi yang kental budaya Minang-nya. Saya sendiri benar-benar kagum pada puisi-puisi Jawa Kuno yang sangat indah itu, baik secara puitik maupun pilihan-pilihan katanya. Kalau sudah begitu, sempat juga terpikir: buat apa lagi saya nulis. Akan tetapi masalahnya 'kan kita harus melanjutkan tradisi-tradisi tersebut," papar Sapardi Djoko Damono.

Dalam kaitan keberadaan naskah-naskah lama, Masyarakat Pernaskahan Nusantara mencatat sedikitnya ada enam manfaat yang bisa dikembangkan. Selain sebagai penunjang apresiasi dan sumber inspirasi penciptaan, kehadiran naskah-naskah lama yang sudah lewat proses penerjemahan dan penyederhanaan akan membuka cakrawala baru dalam dunia sastra Indonesia. Di luar itu juga bermanfaat sebagai penunjang pemekaran kosa kata bahasa Indonesia, di samping sebagai alat penyampai nasihat dan penghibur.

Persoalannya, seperti dikemukakan Anhar Gonggong, "Di tengah situasi terkoyaknya kesatuan bangsa akibat kian melemahnya kesadaran sejarah, dapatkah kita mengaktualkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam naskah-naskah lama itu dalam konteks kekinian?" **(ken)**

Kompas, 13 Oktober 1999

Naskah Jangan Hanya Disimpan

Cikini, Warta Kota

Naskah, yang merupakan warisan nenek moyang, bukan hanya untuk disimpan, melainkan juga untuk dipelajari dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, naskah berisi bermacam-macam hal yang berhubungan dengan seluruh kegiatan masyarakat sehari-hari.

Hal itu mengemuka dalam acara *talk show* dalam simposium sehari *Pernaskahan Nusantara III*, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Selasa (12/10). Lima pembicara yang hadir, masing-masing Sapardi Djoko Damono, Achdiati Ikram, Azyumardi Azra, Ayatrohaedi dan Anhar Gonggong, mengemukakan berbagai terapan naskah dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sapardi, di dalam naskah tersimpan berbagai pengetahuan, baik tentang ilmu pemerintahan, agama, kebudayaan, ekonomi, hukum hingga pengobatan. Selama ini orang mempelajari naskah hanya untuk sastra. Padahal, "Sebagian naskah digunakan juga untuk usaha kita menggali khasanah budaya bangsa, menggali kekayaan budaya bangsa," kata Sapardi.

Dikatakan, kekayaan budaya itu berupa ilmu-ilmu kemasyarakatan dan ilmu-ilmu terapan lainnya. Selain isi naskah untuk ilmu terapan teknis, ungkapan melalui kata dalam naskah juga sanggup memperhalus budi pekerti dan kemampuan intelektual seseorang.

Lebih jauh dikatakan, dalam penerapan ilmu, secara teknisnya bisa diambil salah satu contoh yaitu kesusastraannya, ketika masyarakat perfilman bisa mengambil sebagian intisari dari rangkaian cerita yang ditulis dengan indahnya dalam naskah. Kehidupan masyarakat dahulu bisa dijadikan salah satu sumber untuk membuat sebuah cerita.

"Sekarang sudah tak ada kesulitan dalam menerjemahkan naskah-naskah itu, karena saat ini sudah banyak naskah yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam sebuah buku. Tinggal melihat kerajinan orang itu membaca terjemahan naskah itu," papar Sapardi.

Dari buku

Sementara Achdiyati Ikram mengatakan, di luar negeri film-film dibuat karena pembuat film itu sudah membaca buku. Film-film Hollywood misalnya, semuanya berasal dari buku. "Mereka tidak sekadar berkhayal dalam membuat sebuah film," ujar Achdiyati.

Menurutnya, banyak intisari hikayat-hikayat dalam naskah yang bisa dipakai untuk menciptakan karya-karya dan dikombinasikan dengan karya-karya modern, sehingga bisa dinikmati oleh kalangan usia pecinta film saat ini. Seringkali, cerita yang diambil dari naskah-naskah itu dilakukan begitu saja. Sehingga, seringkali menimbulkan rasa bosan dan tidak menarik. Padahal, isi cerita dalam naskah tersebut bisa dikombinasikan, sehingga memunculkan cerita-cerita yang menarik untuk kalangan pecinta seni zaman ini.

Hari pertama Festiyal Budaya Nusantara yang diisi oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara, menampilkan ahli-ahli naskah dari berbagai daerah dan dunia. Pembicara mengetengahkan berbagai hal yang berhubungan dengan naskah seperti isi naskah, fungsi naskah hingga cara pembuatan naskah. Simposium akan berlangsung selama dua hari. Setelah itu, akan diisi oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) dan Pergelaran Bahasa Nusantara (PBN). (wik)

Warta Kota, 13 Oktober 1999

Naskah Kuno bisa Dijadikan Komik

JAKARTA — Naskah kuno sastra yang ada di Indonesia dianggap masih berguna untuk dijadikan pedoman kehidupan masa kini. Banyak naskah kuno nusantara yang sebenarnya dapat dijadikan pedoman, dari hubungan ketuhanan, antar pribadi, hingga sampai masalah kemasyarakatan dan kenegaraan.

"Naskah kuno itu sebagian besar memuat nilai-nilai universal yang telah diadaptasi dalam kultur setempat," ujar Dewaki Kramadibrata M.Hum, peneliti dan analis naskah kuno, di sela-sela simposium Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) di Graha Bhakti Budaya TIM, Jakarta, kemarin. Simposium ini sendiri merupakan rangkaian gelar Festival Budaya Nusantara (FBN) yang telah berlangsung sejak bulan September lalu.

Sedangkan Prof Dr Azyumardi Azra, Rektor IAIN Jakarta, juga mengatakan bahwa tradisi aksara dan lisan yang ada tersebut memuat nilai sosio intelektual. "Naskah-naskah ini bisa menjadi rujukan saat ini, hanya saja perlu diterjemahkan menjadi bahasa yang lebih populer, misalkan lewat komik," tuturnya.

Bahasa, kata Sapardi, memang menjadi hambatan mengungkap naskah lama. "Sebab, semuanya menggunakan bahasa-bahasa setempat yang tak semua orang tahu," ujarnya. Menurutnya, Kitab-kitab kuno itu seharusnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diadaptasi juga dalam bentuk puisi dan cerita populer. "Kalau perlu naskah-naskah lama itu diterjemahkan dalam sebuah sinetron untuk mensosialisasikan nilai-nilai berikut sebagai media pengenalan sumber nilai itu sendiri," ujarnya.

Memang banyak peninggalan masa lalu yang berbentuk artefak, seperti candi, istana, masjid dan bangunan lainnya. Namun, sebenarnya ada satu artefak lagi yang seringkali diabaikan, yaitu naskah-naskah kuno yang hanya disimpan sebagai barang keramat atau bahkan tidak disimpan sebagaimana mestinya.

Penelaahan artefak selain naskah telah banyak dilakukan oleh para arkeolog. Namun, tidak demikian halnya dengan artefak dalam bentuk naskah. Naskah lama ini, kata Ketua Manassa Prof Dr Achadiati Ikram, memberikan banyak kesadaran tentang kekayaan khasanah sastra lama nusantara. Kekayaan yang dapat dikemukakan, antara lain tentang citra kepemimpinan yang tergambar dari tokoh Sri Rama dalam *Hikayat Sri Rama*.

Melalui sosok Sri Rama, papar Achadiati, dapat dibaca bahwa seorang pemimpin haruslah memenuhi berbagai persyaratan ideal, antara lain bersifat adil terhadap rakyatnya, bijaksana, berani dan menjadi pengayom bagi rakyatnya. Selain pada tokoh ini, sambungnya, citra kepemimpinan juga dapat ditemukan dalam *Hikayat Panji Jayakusuma*. "Contoh-contoh ini merupakan sedikit bukti dari banyaknya nilai yang terkandung di balik naskah-naskah kuno," jelas Achadiati. Nilai lain yang juga ada di dalam karya sastra lama adalah nilai keagamaan. ■ rad

Republika, 14 Oktober 1999

Naskah-naskah Kuno pun Menegaskan

Pria adalah Pemimpin

Citra dan kriteria pemimpin yang ideal ternyata tersimpan dalam naskah-naskah kuno Nusantara, termasuk dalam kitab-kitab Melayu dan kesultanan Islam lainnya sebelum abad ke-16 hingga 18. Dalam kitab-kitab itu diungkaplah beberapa ciri pemimpin dan kepemimpinan yang baik.

"Naskah-naskah itu memuat nilai sosio intelek yang masih relevan hingga kini," kata Prof Dr Azyumardi Azra, rektor IAIN Jakarta, pada *Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara* di Graha Bhakti Budaya TIM, 12-13 Oktober 1999. Simposium digelar dalam rangkaian *Festival Budaya Nusantara*.

Menurut Azyumardi, naskah-naskah Islam sebelum abad ke-16 tak menyebut laki-laki sebagai seorang pemimpin. "Ada toleransi terhadap perempuan. Dan sejarah membuktikan adanya empat sultan di kerajaan Aceh," paparnya. Kriteria, sambung Azyumardi, lebih menekankan pada kapabilitas, kesalehan dan ketakwaan. "Kualitas pribadi sangat ditekankan," ujarnya.

Setelah abad ke-18, terang Azyumardi, mulai terlihat adanya kriteria laki-laki sebagai seorang pemimpin. "Hal ini disebabkan semakin menuju pada abad ke-18, ortodoksi Islam di Nusantara kian kental," katanya. Hal ini, lanjut Azyumardi mengutip kitab karya Abdurrauf al Sinkili *Mir'atat Thullab*, disebabkan karena hubungan antara Nusantara dan Timur Tengah yang memiliki hirarki sangat patriarkis semakin intens.

Timur Tengah sebagai tempat lahirnya agama Islam dianggaplah sebagai Islam yang paling benar dan baik," urainya. Ia lalu menyontohkan Hikayat Raja Ali Haji, sebagai naskah kuno yang mencerminkan momentum ortodoksi Islam itu.

Kitab-kitab abad ke-18 karya Raja Ali Haji, seperti *Thamarat al-Mahammah* (Pahala dari Tugas-tugas Keagamaan) dan *Intizam Waza'if al-Malik* (Peraturan Sistematis dari Tugas-tugas Raja) berisikan nasihat akan perilaku raja dan aturan-aturan pemerintahan. Kitab-kitab ini ditulis sebagai buku peringatan wafatnya Yamtuan Muda Ali pada 1857 dan ditujukan khusus bagi Kraton Riau-Lingga.

Dalam tulisan seorang residen Belanda dan juga sejarawan yang kemudian menetap di Riau Elisa Netscher, kemahiran dalam agama, silsilah, sejarah, kesusastraan dan hukum menjadikan Raja Ali Haji tokoh amat tenar. Pada 1870, pengaruh politiknya menjangkau hampir empat dekade dan Belanda mengakui kepemimpinannya di kalangan masyarakat Pulau Penyengat. Sementara orang-orang Melayu menaruh respek kepada Raja Ali Haji sebagai seorang Muslim yang taat dan ahli dalam adat. Belanda memandangnya sebagai bahaya terhadap kontrol administratif mereka di Riau.

Residen Netscher dalam laporan pensiunnya menggambarkan Raja Ali Haji sebagai cendekiawan yang sangat fanatik, yang menginginkan hapusnya umat Kristen dan Kekristenan. Hal ini disebabkan karena sikap banggany akan keturunan Bugisnya yang sangat menentang setiap perubahan atas adat istiadat tradisional Melayu. Raja Ali Haji bersikap antagonis terhadap kehadiran orang Belanda dan ia menyatakan diri bukan kawan bagi orang Eropa.

Penjabaran Raja Ali Haji mengenai ciri-ciri pemerintahan yang tertuang dalam *Thammarat al-Mahammah*, sering mengacu pada *Ihya 'Ulum al-din* karya Al-Ghazali. Dalam kitabnya itu nampak sedikit persamaan dengan karya Al-Ghazali *Nasihat al-Muluk* (Nasihat untuk Raja-raja) yang berisi uraian terkenal mengenai kemahiran memerintah gaya Islam. Kedua karya tersebut mencerminkan pandangan bahwa fungsi negara dan kewajiban utama masya-

rakat adalah menciptakan iklim yang mendorong pelaksanaan agama yang wajar, sehingga tiap orang dapat melaksanakan tugas spiritualnya dan mempersiapkan dirinya untuk hari kiamat.

Para raja mempunyai tanggung jawab khusus dalam mempertahankan agama karena mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakannya. Mampu membedakan yang baik dan buruk. Karenanya pula merekalah yang meletakkan aturan-aturan bagi tindak moral masyarakat.

Dalam *Thammarat al-Mahammah*, Raja Ali Haji menggunakan konsep idealnya mengenai pemimpin dalam politik praktis. Pemimpin yang jelek, tulisnya, dapat dilihat dari sikapnya yang congkak, iri hati, jahat, serakah, menghambur-hamburkan uang, tidak acuh terhadap soal-soal administrasi, penipu, tidak memiliki rasa humor dan bersikap menghambat. Selain itu, semasa pemerintahannya tiada biaya untuk menghimpun ahli-ahli agama, sekolah-sekolah tidak diadakan dan pendidikan merana. Akibatnya, rakyat menjadi bodoh, tidak tahu tata sopan santun dan amoral, Dalam kondisi yang demikian banyak pencuri, perampok dan perompak.

Sebaliknya, tulis Raja Ali Haji, seorang pemimpin yang baik, pantang hal-hal keduniawian, seperti minum arak, judi dan sabung ayam serta mencurahkan perhatiannya pada pembangunan akhlak, asrama bagi musafir, jembatan, jalan umum, kota-kota, perumahan, saluran air dan kantor polisi. "Jika kedengkian, keserakahan dan iri mengancam keharmonisan negara, pemimpin yang saleh akan menentramkan keadaan dengan cepat dan mengadakan penyelidikan atas isu-isu serta melaksanakan hukum untuk mencegah pertentangan," paparnya.

Kitab *Tuhfat al-Nafis* yang merupakan karya bersama Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, mengembangkan argumentasi pemimpin yang baik itu bagi orang Melayu dengan ilustrasi-ilustrasi yang diambil dari sejarah Melayu-Bugis. Dalam uraiannya, pada abad ke-18, pada beberapa kesempatan Johor mencapai kondisi sejahtera dan damai, idealnya suatu kerajaan karena dipimpin oleh raja yang baik. Di bawah pimpinan pangeran-pangeran Johor, seperti Daeng Kemboja dan Raja Haji, pemerintahan dijalankan menurut hukum Tuhan dan agama Islam pun berkembang.

Dalam *Kitab Pengetahuan Bahasa* dan *Bustan al-Katibin*, Raja Ali Haji menekankan bahwa satu-satunya jalan untuk mengatasi hawa nafsu dan meletusnya konflik dalam masyarakat adalah ketaatan pada hukum Tuhan, pemahaman dan pendalaman Alquran di bawah *mursid* (guru yang ahli). Dengan bimbingan agama, sifat yang menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya dari makhluk lain di dunia, seperti *malu* (rendah hati), *ilmu* (berpengetahuan) dan *akal* (memiliki nalar tinggi) dapat dipelihara.

"Memiliki pengetahuan, pengertian dan rendah hati menjadikan pemimpin tak akan sombong atau mengagungkan dirinya sendiri. Justru sebaliknya, akan memiliki keinginan untuk mendalami kebenaran Tuhan dan akhirat," paparnya.

Di sisi lain, Raja Ali Haji menyadari bahwa tahta kepemimpinan bukannya tak mungkin menjadikan yang bersangkutan berambisi atau senantiasa terus bersiasat. Karya-karyanya yang bersifat didaktis dan etis menyatakan bahwa pemimpin bukannya tak peka terhadap godaan. Kitab *Tuhfat* menunjukkan contoh kasus yang diambil dari sejarah Melayu. "Jika pemimpin menyerah pada hawa nafsunya, konsekuensinya sungguh besar, karena seluruh negeri akan menderita," katanya.

Dalam *Thammarat al-Mahammah*, Raja Ali Haji dengan tegas mengatakan, seorang pemimpin yang melalaikan agamanya dengan kata dan perbuatan, yang tidak memperhatikan kebutuhan orang-orang Muslim serta gagal memperbaiki nasib rakyatnya, yang bergaul dengan wanita dengan cara yang tak dapat disetujui, tidak dapat diterima sebagai penguasa lagi. Dan jabatannya akan diberikan kepada yang paling tepat. ■ ratu ratna damayanti

Buat Tambah Ketrampilan

SANGGAR Kegiatan Belajar (SKB) Cilandak berdiri tahun 1981, merupakan lembaga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sanggar yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan ini selain memberikan pendidikan sekolah untuk anak kurang mampu, juga membimbing ketrampilan yang bisa sangat bermanfaat bagi siapa saja.

Semuanya dapat dipelajari tanpa harus membayar sepeserpun. Tenaga pengajarnya ada 32 orang, yang biasa disebut pamong belajar.

"Kami tidak terbatas memberi ketrampilan, tapi juga pemasarannya. Sebulan sekali kami selalu berikan bimbingan teknis," ujar Sayekti.

Lembaga lain yang mirip dengan SKB Cilandak adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Fungsinya sama dengan SKB Cilandak, yaitu tempat belajar siswa paket A, B dan C.

PKBM juga menyediakan ketrampilan bagi siswanya, yang bisa dijadikan sarana penambah penghasilan. PKBM Kemang dikenal dengan nama PLK Negeri 31, yang didirikan tahun 1980.

"Kami disini berusaha membantu anak-anak tak mampu agar dapat sekolah dan mempunyai penghasilan tambahan," ujar Suratman.

Namun kegiatan dua lembaga ini tidak terbatas pada anak tidak mampu. Para sarjana yang belum mempunyai pekerjaan, atau masyarakat yang berniat berbisnis, dapat menggali ketrampilan sebanyak-banyaknya dari sini. **(dam)**

INOVASI YANG DILAKUKAN SKB CILANDAK

- Pendidikan prasekolah digabung dengan pendidikan peningkatan kualitas hidup. Contohnya adalah Kelompok Bermain di Cipedak, Ciganjur, Jakarta Selatan.
- Pendidikan kesetaraan SD, SLTP untuk anak jalanan di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru.
- Pendidikan ketrampilan menjahit, tata rias, kerajinan, perakitan PC, bimbingan usaha bagi para sarjana, serta olah boga.
- Pendidikan peningkatan kualitas hidup untuk keluarga miskin di lingkungan buruk Pondok Labu, Jakarta Selatan.
- Pendidikan pengembangan minat dan bakat, bimbingan pengelolaan usaha dan jasa, musik, band dan kursus instruktur.
- Pendidikan orientasi masa depan, bimbingan agribisnis rumput hermada dan diversifikasinya. Pendidikan ini sudah dilakukan di 23 propinsi.

Warta Kota, 21 Oktober 1999

Bukan Monopoli Naskah Kuno

ZAMAN dulu, daun lontar pegang peranan yang sangat penting. Di atas daun yang masuk keluarga famili arecacea inilah, para empu di zaman "kuda gigit besi" itu menuliskan cerita, pesan-pesan dan kisah kehidupannya.

Dari daun lontar ini, kita yang hidup di zaman modern ini bisa menyibakkan sedikit tabir rahasia kehidupan di masa lampau.

Bahkan sampai sekarang, para pedanda di pura-pura Pulau Dewata, masih membacakan doa dan mantera yang ditulis di atas daun lontar.

Di Jakarta, daun lontar lebih berfungsi sebagai hiasan dibanding tempat menulis pesan. Awalnya kerajinan daun lontar berkembang di Bali. Dengan kreatif, mereka membuat segala bentuk bunga, yang hasilnya laku keras di kalangan turis luar negeri.

Melihat peluang tersebut, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mengadakan pendidikan kursus membuat kerajinan bunga lontar.

"Murid kami yang pertama berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kebetulan disana merupakan daerah penghasil pohon lontar," papar Singgih Praptanugraha, pimpinan SKB Cilandak.

Kini, ketrampilan membuat bunga lontar diajarkan kepada peserta program paket B (setara dengan SMP). Umumnya pesertanya anak-anak jalanan, pedagang asongan, pengecer koran. Tapi di luar itu, banyak juga kaum ibu kelas menengah yang tertarik mempelajarinya.

Peluang ekspor

Ketrampilan bunga lontar baru diajarkan di dua tempat, yaitu di SKB Cilandak dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kemang, Jakarta Selatan.

Kursus gratis ini diberikan dalam empat kali pertemuan, setiap Senin, dari pukul 10.00 sampai 13.00. Setelah itu mereka harus bisa mengembangkan sendiri.

Berhubung gratis, setiap peserta diberi bahan lengkap, berupa daun lontar, lem fox/aibon, floral tape, pewarna wantex, kawat/lidi. Alatnya adalah gunting, pensil dan lilin.

Dengan telaten para pengajar dari SKB Cilandak menuntun para peserta satu persatu. Pertama-tama buat pola bunga diatas kertas dalam aneka bentuk. Setelah itu baru dipindahkan ke atas daun lontar dan digunting sesuai bentuknya.

Untuk memberi warna, daun-daun lontar ini direbus kurang lebih satu jam, kemudian diangin-anginkan sebentar. Setelah itu dibentuk melengkung dengan bantuan pensil atau lilin. Setelah itu baru dirangkai hingga membentuk sekuntum bunga yang diinginkan.

"Jika kreatif, mereka tidak hanya membuat bunga mawar, sepatu dan teratai, tetapi juga bunga lain, seperti bunga matahari, melati, atau anggrek," papar Dra Sayekti Mojo, pamong belajar SKB.

Para pengajar SKB berharap, ilmu daun lontar yang didapat bisa ditularkan kepada teman atau saudara lain.

"Semakin banyak yang terampil, semakin bertambah pula produksi yang dihasilkan," katanya lagi.

Selama ini, untuk program latihan, daun lontar didatangkan dari Tuban, Jawa Timur. Satu lembar daun lontar bisa dibentuk menjadi sekuntum bunga, seharga Rp 300 tiap lembar.

Bunga lontar hasil didikan SKB Cilandak yang digarap PKBM Kemang sudah mempunyai pangsa pasar sendiri.

"*Alhamdulillah*, kami telah mempunyai *buyer*, yang siap mengekspor kerajinan ini," papar Suratman, penilik PKBM.

Menurutnya, untuk kebutuhan ekspor diperlukan 7.000 tangkai bunga lontar setiap bulannya, dengan harga jual Rp 3.000 tiap kuntum.

Kebutuhan sebanyak itu belum bisa dipenuhi, karena SKB Cilandak saja baru bisa memproduksi 700 sampai 1.000 kuntum tiap bulannya, sedang sisanya diambilkan dari Mataram, NTB. Negara tujuan ekspor adalah Amerika Serikat dan Australia. Bentuk bunga yang diminati adalah bunga sepatu, mawar susun dan teratai.

(dian anditya mutiara)

Warta Kota, 21 Oktober 1999

PUISA-ULASAN

Sepenggal Kisah dari Puisi Taufiq Ismail

Saya mendengar orang-orang bernyanyi
Bercelana pendek, cuek, Harry Roesli namanya
Kakeknya dulu membedah hewan dengan pisau operasi
Cucunya menjahit sakit politik dengan senar gitarnya.

EMPAT larik puisi di atas, dipetik dari puisi *Saya Mendengar Orang-orang Bernyanyi* (1998) karya penyair Taufiq Ismail, dimuat dalam antologi *Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia* (Yayasan Ananda 1998:34).

Terbitnya antologi tersebut merupakan sebuah respon atas bergulirnya gerakan reformasi dalam peta politik Indonesia pada tahun 1997-1998, dengan motor penggerak utama kalangan mahasiswa.

Bukan tanpa alasan jika penyair Taufiq Ismail menulis puisi tersebut, yang penulis catat pada awal tulisan ini. Setidaknya Taufiq tahu apa yang dilakukan oleh seseorang yang ikut terlibat dalam gerakan reformasi yakni musikus Harry Roesli, selama rezim Orde Baru berkuasa. Malah, hingga kini, Harry tiada henti-hentinya menyuarakan pikiran dan perasaannya yang demikian kritis terhadap berbagai permasalahan sosial-politik dan penyimpangan hukum yang terjadi di hadapan dirinya. Semua itu direspon lewat karya musik yang diciptakannya dengan penuh penghayatan.

Perlawanannya terhadap rezim Orde Baru itu, membuahkan konsekuensi hukum tanpa pengadilan bagi diri Harry Roesli. Pada tahun 1971, Harry bersama sejumlah mahasiswa lainnya, diseret ke balik terali besi, dengan kasus protes ke Cendana atas pembangunan "Proyek Taman Mini Indonesia". Ia diseret ke balik terali besi karena lagu yang didendangkannya, berjudul *Tuan Presiden*.

"Saat itu, Arief Budiman, Syahrir, dan Rendra adalah orang yang kerap mengkompori mahasiswa untuk berdemonstrasi. Saya ikut demonstrasi karena muak dengan berbagai bentuk tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para penguasa rezim Orde Baru pada saat itu. Pembangunan proyek tersebut hanya menghabiskan uang rakyat, sedangkan kemiskinan masih marak," kenang Harry.

Tak urung, masuknya Harry ke dalam sel penjara, membuat kedua orangtuanya merasa ketir. Dikatakannya, hal yang tidak terduga atas peristiwa tersebut adalah, ketika dirinya dimasukkan ke dalam sel penjara di Penjara Militer, Poncol Cimahi, Kab. Bandung, selama satu minggu. Di Poncol, Harry tidak mengira bahwa dirinya bakal satu blok dengan Dr. Soebandrio, eks Menlu dalam kabinet terakhir zaman rezim Sukarno berkuasa.

Lagu tersebut diciptakan saat dirinya tercatat sebagai siswa SMA Negeri II. Pada saat itu (1967-1969), Harry mendirikan grup band "Batu Karang" dengan anggota : Tjetjep (vokal), Harry Pocank (gitar), Buce (gitar), Harry Roesli (bas, vocal) dan Dedi (drum). Lagu yang diciptakannya dengan grup band tersebut, selain lagu tersebut adalah *Jalan Banteng No. 40, Rendra Engkau Gila, Bertarung Taring, Malaria* dan *Tembok Penghalang*.

Sedangkan lagu *Rendra Engkau Gila* yang liriknya berbunyi: *Rendra, Rendra apakah engkau gila/ Rendra, Rendra kau berkata-kata/ Katamu kosong, katamu gila/ Orang terpanah terpesona// Aku terdiam tidak tertipu/ Rendra, Rendra apakah engkau gila/ Kau banyak berkata-kata/ Katamu kosong, katamu gila//* diciptakan Harry, sehabis dirinya menyaksikan pertunjukan *Bip-bop* garapan Bengkel Teater Rendra, dengan sutradara sekaligus penulis naskah Rendra, yang ditayangkan oleh TVRI pada tahun 1969.

"Saya agak lupa, pertunjukan tersebut apakah ditayangkan pada tahun 1968 atau 1969? Yang jelas pada usia remaja saat itu saya sudah berani mengkritik Rendra. Hahahaha. Mau apa Rendra dengan lakon teaternya itu, kata saya pada saat itu. Sungguh saat itu pengetahuan saya tentang kesenian tidak seperti sekarang ini. Terus terang, jika saya menyaksikan kembali pertunjukan Rendra, pastilah penilaiannya akan lain. Rendra itu jagoan, baca puisinya sangat memikat, saya menontonnya di Belanda, dalam festival puisi di Rotterdam. Saya lupa lagi tahunnya," tutur Harry, sambil tertawa lepas.

Kini dirinya bisa memahami bila ada di antara anak-anak muda yang kerap mengkritik dirinya, sambil berkata "Mau apa Harry Roesli dengan karya musiknya yang bikin pusing kepala orang?"

Pengalaman Harry masuk penjara, terulang kembali pada tahun 1974 dengan kasus terlibat dalam *Gerakan Malari*, dan 1978 dengan kasus menentang diberlakukannya NKK/BKK di kampus-kampus. Hal itu menimbulkan gerakan demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan utama Presiden Soeharto harus turun dari kursi kekuasaannya. Titik picunya, nyaris sama dengan yang sudah-sudah, yakni maraknya korupsi, dibatasinya gerakan mahasiswa dalam berpendapat, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Puncak dari gerakan mahasiswa dalam melawan kekuasaan rezim Orde Baru itu, pada tahun 1997-1998, dengan ditandai antara lain jatuhnya korban empat mahasiswa Trisakti. Akibatnya melahirkan kerusuhan yang menyebabkan ratusan orang mati terjebak kebakaran, ketika toko-toko dibakar secara brutal oleh orang-orang yang tidak jelas dan tidak bertanggungjawab.

Jangan Menangis Indonesia, lagu yang dibuat Harry Roesli pada tahun 1970-an itu: mendapatkan makna yang signifikan: bahwa kondisi

sosial-politik Indonesia ternyata tidak berubah, selalu ditandai dengan tindak kekerasan, murung dan kelam. Lagu lainnya, *Bharatayuda* yang dinyanyikan Harry di berbagai kesempatan itu, liriknya berbunyi demikian:

Suara malam melembab membayang berbuih di awan/ Menopang mata di kurusetra tempat bharatayuda/ Turut bernafas bersama tinta membuat cerita/ Bermimpi penuh tentang nyanyian/ Yang teramat sumbang// Orang yang asing tetap terasing/ Menggigit tanah pun tidak/ Orang yang bohong akan membohong/ Jika dia sedang berbohong/ Coba hancurkan dan coba sibukkan/ Di atas peninggian// Tikus yang gagah kucing menyerah mungkin terlalu tajam/ Sibuk, resah/ Memukul pembantunya/ Menghancurkan temannya/ Merobekkan bendera/ Mencium pengkhianat/ Hati ini tak memberi pada orang begini/ Cih!!!// Siapa coba meledakkan sang mentari tercinta/

Menulis nuklir dengan diukir darahku mendesir/ Mulut yang penuh tetapi kosong ini disebut jantan/ Coba bicara tentang merdeka dalam dimensinya perawan/ Coba pikirkan tentang bharatayuda sangatlah mengerikan/ Coba bayangkan tentang kurusetra itu tak diharapkan/ Jangan-jangan/ Hati ini tak memberi jika kami harus mati!!!

Cucu kesembilan

Empat larik puisi yang dipetik dalam awal tulis ini, pada sisi yang lain tidak hanya memberikan gambaran pada kita akan apa dan bagaimana yang telah dan tengah dilakukan Harry Roesli dewasa ini; dalam menyikapi kehidupan sosial-politik yang berdenyut di hadapan dirinya, yang kemudian direspon-nya dengan berbagai karya musik yang dicipta dan dipentaskannya di berbagai tempat itu, tetapi juga mencoba memberikan gambaran yang lain pada kita akan apa dan bagaimana sosok kakek musikus Harry Roesli di masa lampau.

Dari garis ayah, Harry Roesli anak ke-empat dari pasangan Mayor Jenderal TNI (Purn) Rushan Roesli, dan dr. Edyana Soetama itu, memang keturunan langsung dari seorang dokter yang cukup punya nama pada zamannya. Dokter hewan yang dimaksud oleh penyair Taufiq Ismail itu adalah Marah Roesli (Halim) bin Soetan Aboebakar, yang lebih dikenal dengan panggilan Marah Roesli, kelahiran Padang, Sumatera Barat, 7 Agustus 1889. Ia salah seorang novelis ternama Indonesia, Angkatan Balai Pustaka. Karya novelnya yang paling monumental adalah *Siti Nurbaya*. Novel tersebut sudah puluhan kali cetak ulang, sejak pertamakali diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1922 lalu. Karya novel lainnya adalah *Anak dan Kemenakan*, *La Hami*, *Memang Jodoh*, dan *Gadis yang Malang*.

"Itu novel yang telah terbit. Ada satu novel lagi yang belum diterbitkan hingga kini. Novel tersebut hanya boleh diterbitkan kalau seluruh orang yang dekat dengan kakek saya sudah meninggal dunia. Beberapa orang dekat yang dimaksud oleh kakek saya itu, memang telah meninggal dunia, kecuali ayah saya. Hingga kini saya belum tahu, apa dan bagaimana isi dari novel tersebut. Yang menyimpan novel itu bukan ayah saya, akan tetapi dipegang oleh salah satu anak kakek lainnya yang tinggal di Bogor," ujar Harry Roesli sambil mengingat-ingat kembali wajah kakeknya, serta kepandaian kakeknya dalam memainkan alat musik biola.

Rushan Roesli, jelas Harry, merupakan anak dari pasangan Marah Roesli atas perkawinannya dengan Nyai Raden Ratna Kancana, pada tahun 1911 di Bogor. Nyai Raden Ratna Kancana merupakan turunan langsung Dalem Surya Kancana.

Ternyata, yang diwariskan kakeknya pada Harry dalam bidang musik, tidak hanya dari garis ayahnya saja, tetapi kakek-neneknya dari garis ibu, dr. Edyana Soetama, mewariskan pula hal yang sama. Kakek dan nenek dari pihak ibu, Agoes Soetama dan Wati Soetama pada masanya adalah pemain biola yang tangguh. Sayangnya, Harry tidak sempat menyaksikan kebolehan mereka bermain biola, dikarenakan kedua kakek dan neneknya telah meninggal dunia, ketika Harry masih kecil, berumur 5 tahun.

Harry, cucu Marah Roesli kesembilan, lahir pada pukul 10.25 WIB, 10 September 1951 di Jln. Supratman 59, Bandung. Oleh kedua orangtuanya, bayi mungil yang dikemudian hari suka berpakaian hitam-hitam itu, diberi nama Djauhar Zaharsyah Fachrudin Roesli. Harry adalah panggilan kesayangan kedua orangtuanya, sedangkan nama Roesli yang tercantum di belakang namanya, tentu saja nama kakeknya, Marah Roesli.

"Saya punya cerita. Pada suatu hari, saya pulang dari Jepang. Seorang petugas mengecek identitas saya, dan nanya, *Anda Harry Roesli, ya?*, saya jawab *bukan!*. Si petugas yang pegang paspor saya, yang bernama Djauhar Zaharsyah Fachrudin Roesli itu tampak bimbang, dan kemudian berkata, *Ya, sudah*. Rupanya, ia tidak tahu siapa saya," jelas Harry Roesli sambil tertawa lepas. (Soni Farid Maulana/"PR").***

Pikiran Rakyat, 2 Oktober 1999

Sosialisasi Puisi di Kudus

Oleh **Maria Magdalena Bhoemomo**

Meski sosialisasi puisi di Kudus cukup marak, setidaknya dalam satu dekade terakhir, penyair-penyair yang masih (tetap) 'hidup' di Kudus ternyata hampir semuanya berusia muda. Sedangkan penyair-penyair Kudus yang dalam dekade-dekade silam aktif menulis dan mensosialisasikan puisi, kini nampak sudah kapok menjadi penyair karena sudah memiliki pekerjaan lain yang lebih menghasilkan banyak uang.

Pada tanggal 28 Agustus 1999, di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ada acara sastra yang boleh jadi termasuk 'istimewa'. Yakni acara peluncuran dua buku antologi puisi karya penyair-penyair Kudus yang disponsori oleh sebuah perusahaan rokok terbesar (PT Djarum) di Kudus.

Buku pertama berjudul *Menara 3*, 96 halaman, yang diterbitkan oleh Pustaka KPK, memuat 68 judul puisi karya 11 penyair yang tergabung dalam Keluarga Penulis Kudus (KPK), dan dua tulisan yang mengulas tentang puisi-puisi dalam buku tersebut yang ditulis masing-masing oleh Ahmadun Yosi Herfanda dan Gunoto Saparie. Sedangkan buku kedua berjudul *Matabunga*, 120 halaman, juga diterbitkan oleh Pustaka KPK, memuat 90 judul puisi karya Yudhi MS dengan kata pengantar oleh Sunaryono Basuki KS.

Dengan diterbitkannya dua buku antologi puisi tersebut, kesan yang muncul makin kuat adalah sosialisasi puisi di Kudus tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perusahaan rokok yang ada di Kudus. Sebab penerbitan buku-buku antologi puisi sebelumnya, di Kudus, seperti *Menara* (1993), *Angin Ladang* (1996), *Menara 2* (1997), dan *Sajak Kudus* (1997) juga disponsori oleh perusahaan rokok.

Karena sosialisasi puisi di Kudus didukung (pendanaannya) oleh perusahaan rokok, maka boleh jadi penyair-penyair Kudus memang pantas merasa lebih 'gagah' dibanding rekan-rekannya di daerah lain. Misalnya, buku-buku antologi puisi terbitan Kudus selalu dikirimkan kepada peminat puisi, penyair-penyair dan perpustakaan di seluruh pelosok Indonesia secara gratis. Dengan kata lain, siapa pun yang berminat membaca buku antologi puisi terbitan Kudus, bisa meminta kepada penyair-penyair Kudus secara gratis.

Fenomena gratis-gratisan ini, boleh saja dianggap kurang ideal bagi sosialisasi puisi, karena dampak negatifnya bisa makin memperburuk pemasaran buku-buku antologi puisi yang lain. Tetapi hal ini agaknya memang di luar pemikiran penyair-penyair Kudus. Sebab di Kudus, dan daerah-daerah lain, buku-buku antologi puisi memang tidak punya pasar (sulit dijual). Dengan demikian, penerbitan buku antologi puisi dengan dana dari sponsor, lalu dibagi-bagikan secara gratis, agaknya dianggap wajar-wajar saja.

Ada kesan bahwa penyair-penyair Kudus cukup kaya karena dapat membagi-bagikan buku antologi puisi secara gratis. Kesan ini tidak sepenuhnya benar. Sebab kenyataannya, selain buku-buku antologi puisi terbitan Kudus selalu disponsori oleh perusahaan rokok, penyair-penyair di Kudus sehari-hari masih jauh dari kesan kaya. Sebagian dari mereka adalah buruh perusahaan rokok, guru, wartawan, dan bahkan pengangguran yang relatif miskin.

●●●

Peristiwa peluncuran buku antologi puisi di Pendopo Kabupaten Kudus tersebut, sebenarnya layak dikatakan lebih 'maju' dibanding acara-acara serupa sebelumnya di daerah lain maupun di Kudus sendiri. Acara tersebut dikemas dengan setting yang cukup wah: Ada beberapa meja bundar lengkap dengan piring-piring berisi kue-kue khas Kudus dan minuman (air putih dan teh manis) dalam cawan yang dilingkari kursi untuk para tamu. Sehingga ada beberapa tamu undangan (penyair) dari luar kota yang sempat berseloroh: "Wah, seperti di Indosiar!" Konon, menurut Jumari HS (ketua panitia), setting ini justru diprakarsai oleh Bupati Kudus!

Dengan setting yang cukup wah tersebut, acara peluncuran buku puisi di daerah ternyata tidak harus berkesan memprihatinkan. Mitos

bahwa setting selehan untuk acara peluncuran buku antologi puisi sudah memadai bisa jadi terpatahkan. Dan penyair-penyair daerah ternyata bisa menjadi (seperti) selebritis lokal yang jauh dari kesan memprihatinkan.

Harus diingat, bahwa Kudus merupakan daerah industri dengan perkembangan perilaku kapitalis dan materialistis yang cukup pesat. Dalam hal ini, segala aktivitas selalu dikaitkan dengan materi. Jika menulis dan mensosialisasikan puisi ternyata tidak membawa keuntungan materi sangat rentan terhadap pelecehan atau diremehkan. Mitos bahwa menjadi penyair hanya akan mengabadikan kemiskinan sangat kuat di Kudus. Mitos ini dapat dilihat secara nyata dari banyak penyair di Kudus yang telah 'mati' sebelum meninggal dunia.

Meski sosialisasi puisi di Kudus cukup marak, setidaknya dalam satu dekade terakhir, penyair-penyair yang masih (tetap) 'hidup' di Kudus ternyata hampir semuanya berusia muda. Sedangkan penyair-penyair Kudus yang dalam dekade-dekade silam aktif menulis dan mensosialisasikan puisi, kini nampak sudah kapok menjadi penyair karena sudah memiliki pekerjaan lain yang lebih menghasilkan banyak uang.

Bagi penyair-penyair Kudus yang telah 'mati', menulis dan mensosialisasikan puisi boleh jadi sudah dianggap memalukan. Dua jenis pekerjaan ini, sejak dulu sampai sekarang, memang selalu jauh dari menguntungkan secara material. Bahkan, honorarium puisi yang dimuat koran nasional tidak cukup untuk membiayai hidup selama satu pekan. Apalagi honor puisi dari koran lokal, tidak cukup untuk makan satu hari!

Dengan realita yang serba memprihatinkan tersebut, trend sosialisasi puisi di Kudus yang bersemangat gratisan atau nirlaba, mungkin dapat dijadikan alternatif untuk 'menghidupkan' kembali penyair-penyair Kudus yang telah 'mati'. Justru kalau sekarang mereka sudah relatif makmur, seharusnya kembali mencoba aktif menulis dan mensosialisasikan puisi. Dengan kekayaan yang ada, mereka sebenarnya tidak akan keberatan membiayai penerbitan buku antologi puisinya sendiri. Sebab menurut Yudhi MS, biaya menerbitkan buku antologi puisi setebal 100 halaman sebanyak 400 buku cuma sekitar satu juta rupiah saja!

●●●

'Keterlibatan' Bupati Kudus, yang memfasilitasi acara peluncuran dua buku antologi di Pendopo Kabupaten Kudus tersebut, mungkin merupakan fenomena menarik yang dapat diikuti oleh sejawatnya di daerah lain. Bahkan, mungkin fenomena ini merupakan pengejawantahan tuntutan reformasi dalam bidang kebudayaan.

Sudah bukan masanya lagi pihak eksekutif lokal mengambil jarak dari aktivitas sastra yang ada di daerahnya, seperti yang terjadi selama rezim Soeharto. Dan sudah tidak masanya lagi penyair-penyair daerah gagal mengadakan acara baca puisi karena pihak eksekutif lokal melarangnya atau tidak mendukungnya.

Sastra, khususnya puisi, selayaknya memang mendapat tempat terhormat di daerahnya sendiri. Dan penyair-penyair daerah pun sudah seharusnya dapat membaca puisi di tempat-tempat terhormat seperti pendopo kabupaten, dan bukan di tempat-tempat lain yang tidak layak seperti di trotoar dan di ruang kelas sekolah-sekolah yang sumpek!

Selain itu, perusahaan-perusahaan bisnis, seperti pabrik rokok, sudah selayaknya membuat keseimbangan dalam menangguk keuntungan. Dalam hal ini, jika sudah mendapatkan keuntungan material, maka harus berusaha untuk memperoleh keuntungan spiritual. Dan menjadi sponsor penerbitan buku antologi puisi, bisa jadi merupakan keuntungan spiritual, karena puisi adalah karya sastra, sedangkan sastra merupakan pengejawantahan spiritualitas bangsa. ■

penulis adalah aktivis sastra di kudus

Republika, 3 Oktober 1999

Malam Puisi Indonesia-Jerman

Ketika Ruang dan Waktu Terabaikan

Oleh AHDA IMRAN

PUISI pada akhirnya adalah sebuah semesta relasi. Di situ, ruang dan waktu terabaikan oleh kesadaran yang diselundupkan penyair, bergerak dengan daya luluh yang menciptakan dunianya sendiri; dunia yang mengaburkan realitas dan seluruh *catatan lahir* dalam dirinya. Pada konteks inilah puisi menjelaskan dirinya sebagai sebuah catatan batin dalam mata rantai kemanusiaan yang tak putus-putusnya lagi tak terbatas.

Maka Rabu petang kemarin (29/9) di Gedung Kesenian Dewi Asri STSI Bandung, Idonesia dan Jerman, bukan lagi sebuah realitas lahir ketika keduanya menemukan puisi. Acara pembacaan puisi yang bertajuk *Traummerei In Hellblau* (Impian dalam Biru Muda) yang diselenggarakan oleh Goethe Institut Bandung bekerjasama dengan STSI Bandung, menampilkan penyair Toto Sudarto Bachtiar, Saini KM, Soni Farid Maulana, Acep Zamzam Noor, Agus R Sarjono, Beni R Budiman, dan Nenden Lilis. Sedangkan dari Jerman tampil Berthold Damshauser yang membacakan sejumlah karya penyair Jerman. Karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bersama Ramadhan KH dalam antologi *Aku Datang Padamu;* . Puisi Jerman yang dibacakan pada saat itu, antara lain karya penyair Nietzche, Herman Hess, Sarah Kitch, Theodor Fontane, Paul Celan, Guenter Grass, dan beberapa karya penyair Jerman lainnya.

**

ACARA pertama dibuka dengan pembacaan puisi karya Nietzche oleh Berthold Damshauser yang terjemahannya dibacakan oleh penyair Toto Sudarto Bachtiar. Sebuah baris puisi penyair dan filsuf besar Jerman itu menyirobok ke dalam kesadaran manusia tentang kesepian dan lenyapnya sesuatu yang bernama kampung halaman. *Burung-burung gagak berteriak, berlengung terbang ke kota/ Celakalah mereka yang tidak berkampung halaman* (Kesepian). Lalu Toto yang dikenal sebagai penyair 'Ibu Kota Senja' membacakan puaala puisinya *Tentang Kemerdekaan;* . Sebuah baris puisinya itu terasa menekan ke arah puisi yang berhulu pada ruang dan waktu yang tak berbatas; *Kemerdekaan ialah tanah air penyair dan pengembara,* katanya.

Puisi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah pernyataan, ternyata mampu menjelaskan dirinya ketika penyair mempresentasikan kesaksian kemanusiaannya; kesaksian yang getir dengan prosedur pengucapan yang menempatkan bahasa sebagai deskripsi yang terbuka, menguraikan dirinya menjadi subjektivitas yang pahit, sinis, juga karikatural. Realitas dan seluruh peristiwa di dalamnya menjadi substansi yang dipadatkan.

Ketika sejarah adalah realitas yang pahit, kesaksian penyair bukanlah menerangkan realitas itu seperti keadaannya, melainkan ia berangkat dari sikap kemanusiaannya ketika berada di tengah realitas seperti itu. Realitas sosial-politik merupakan tema yang keras ditampilkan para penyair. Katakanlah puisi Agus R Sarjono *Demokrasi Dunia Ketiga.* Estetika sosial puisi ini secara sengajá mengerumuni dirinya dengan kesadaran logika yang serba paradoks dalam wacana demokrasi dunia ketiga, yang berakhir dengan sikap sinis penyair yang mengejutkan; *... //saya setuju, bukankah selama ini saya telah/ mencoba ... Sudahlah! Kami tak mau dengar apa alasanmu/ Tak perlu berkilah dan buang waktu/ Aku perintahkan kamu/ untuk demokratis habis perkara!/ Ingat gerombolan demokrasi yang kami galang/ Akan melindasmu habis. Jadi jangan macam-macam/ Pokoknya kamu harus demokratis/ Awas kalau tidak!*

Kesaksian penyair tentang realitas juga diucapkan penyair Guenter Grass, dengan dan dalam simbolis bahasa yang merepresentasikan kesadaran tentang sesuatu yang membatasi dan mengekang kemerdekaan eksistensi manusia. *Kita hidup di dalam telur/ Sebelah dalam dari kulitnya/ kita coreti dengan gambar-gambar cabul/ dan nama depan nabi-nabi/ kita. Kita sedang dikeram.// Siapa pun yang mengeram kita, puisi kita pun dikeram olehnya.// (Di dalam telur).* Lalu puisi

penyair Jerman yang dibacakan oleh Nenden Lilis ini menjadi relasi yang getir ketika Nenden membacakan puisinya sendiri *langit di atas batin retak-retak seperti kaca/ tanah alas perasaan belah-belah/ dan sesuatu bergerak di antaranya// (Kemarau)*.

Demikian pula penyair Soni Farid Maulana dan Theodor Fontane (1819-1898), ketika keduanya berangkat dari kesaksian yang sama atas kekuasaan yang menindas. Pada Soni dalam *Hujan Turun di Aceh* penindasan itu menjadi sebuah konstruksi sosiologis yang gamang untuk menguraikan kepastian di balik kekuasaan sejenis itu; *Ketika kubuka jendela apa yang kupandang/ Selalu kelam bersambung kelam/ Lalu angin yang mendesir ke tangkai pohonan/ Ditandai salak anjing/ Negeri kegelapan (Hujan Turun di Aceh)*. Sementara itu Theodor Fontane dengan sajaknya *Wanita-wanita Bali di Lombok*, kekuasaan yang menindas berangkat dari relasi-relasi sejarah kolonialisme Belanda yang ironisnya berlatar-belakang pada semangat keagamaan. *Mereka menjatuhkan diri ke dalam barisan musuh./ Setengahnya jatuh dan mati, setengahnya jatuh terkulai,/ Tapi-tiap dari mereka ingin mati saat itu juga/ Dan yang terakhir, dalam gairah mati berbangga -/ Menikamkan keris ke dada sendiri.// Sementara itu Meneer di kantornya/ Asyik merenungkan nilai-nilai budaya Kristennya*.

Kemerdekaan sebagai tanah-air penyair, seperti dinyatakan Toto Sudarto Bachtiar, ternyata adalah juga kemerdekaan untuk memperlakukan realitas dan sejarah itu dengan karikatural bahasa, seperti terasa pada sajak Acep Zamzam Noor yang populer itu, *Dongeng dari Kerajaan Sembako* dan *Syair-syair Tentang Partai*. Kegetiran sejarah dalam dua puisi itu diapungkan Acep menjadi realitas yang menggelikan sekaligus menyakitkan. Sebuah cara mengejek yang sekaligus menohok sebuah bagian lain dalam kesadaran kita tentang wacana kekuasaan di negeri ini.

Berthold Damshauser memberi aksentuasi tersendiri dalam acara ini. Lebih dari sebagai pengamat sastra Indonesia, ia pun adalah seorang deklamator puisi yang menarik. Puisi-puisi Jerman yang dibacakannya dari bahasa Jerman itu sendiri, menciptakan suatu nuansa untuk memasuki puisi itu, mengabaikan pengertian yang diucapkannya. Sebagai seorang pengamat sekaligus pecinta sastra Indonesia, Damshauser dengan bersemangat menjelaskan pandangan dan pemikirannya tentang sastra Indonesia, dan kehidupan sastra di Jerman itu sendiri. ***

Pikiran Rakyat, 3 Oktober 1999

PUISI-ULASAN

Sajak-sajak Cinta Rendra Di-VCD-kan

MARAKNYA bisnis *vidéo compact disc* belakangan ini, membuat banyak kalangan untuk memanfaatkan media ini sebagai wadah berkreasi. Setelah sebelumnya Emha Ainun Najib merekam dan mengedarkan *shalawat* lewat *VCD*, kini giliran WS Rendra mengedarkan puisi-puisinya dalam bentuk *VCD*.

Menurut Rendra, awal mula munculnya gagasan pembuatan *VCD* berjudul *Sajak Sajak Cinta Rendra* ini karena banyaknya permintaan dari berbagai kalangan. Mulai dari kampus, taman budaya di berbagai kota sampai para penggemarnya di pelosok-pelosok yang tak mungkin didatanginya satu persatu.

" Bayangin aja saya hampir tak bisa membagi waktu memenuhi undangan begitu banyak orang," kata Rendra. Tidak saja di dalam negeri tapi juga dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Australia dan bahkan negeri yang jauh di kawasan Eropa.

Menurutnya, banyak orang yang menyarankan kepadanya agar dia membuat rekaman dalam bentuk video, film atau VCD, sehingga para penggemarnya juga bisa menyaksikan aksi baca puisinya meski hanya lewat gambar.

Permintaan seperti itu sebenarnya sudah lama, dan dia sendiri berpikir bagaimana memproduksinya dan siapa yang mau menangani produksi itu. Tapi akhirnya ada juga orang yang punya keinginan menerbitkan *VCD Sajak Sajak Cinta* ini.

Dengan adanya VCD ini, mereka, mereka yang menggemari sajak-sajak Rendra tentu bisa menyaksikan aksi Rendra baca sajak lewat VCD, dan kalau memang ternyata diminati akan diterbitkan VCD berikutnya.

Pernah satu kali, cerita Rendra, dia pergi ke pelosok Indonesia Timur, tujuannya ingin melihat langsung cara pembuatan kapal Phinisi. Tapi sampai di tempat tersebut, orang-orang mengenalinya dan meminta dia bisa tampil baca sajak untuk masyarakat setempat. Dan kala itu ada seorang guru sekolah yang mengaku mengagumi Rendra, dan dia menunjukkan dua buah sajak Rendra dari kliping koran yang sudah *lecek*.

Dengan perederan VCD ini diharapkan mereka yang berminat dengan sajak sajak Rendra bisa tertolong (ZFL)

Merdeka, 4 Oktober 1999

OASE

Sajak-sajak H.B Jassin

MIMPI

Aku bermimpi puteri Cina
Mau mengajaknya jalan-jalan
Tapi ibunya menjaganya, menjaganya
dengan ketat

●●●

Dia rindu kepada Lian,
Dia terpekik menyambut aku
Tidak mengira aku cinta padanya
Aku bekerja, bekerja, bekerja
Habibie senang tersenyum
Senang tersenyum melihat aku
bekerja

●●●

Buku-buku dicetak,
Buku-buku baru dan cetak ulang
Buku-bukuku dicetak
Banyak, banyak sekali

●●●

Aku salat, salat Tahajud,
Subuh, Lohor, Asar, Maghrib dan Isa,
Aku salat sanah tiap salat wajib
Dan mengirim doa kepada kedua
orang tuaku,
Kepada Hamka dan kawan-kawanku
Subagio Sastrowardojo dan lain-lain

●●●

Hidupku hidup nyata dan impian
Tak dapat kubedakan mana yang
nyata mana impian
keduanya sama dalam hidupku

●●●

Aku berdoa: Ya Allah,
Bukakanlah hati semua orang
Bukakan hatinya menerima Al-Quran
Berwajah Puisi
Dan menyebarkannya keseluruh
penjuru

●●●

Tak dapat aku bedaskan pengala-
man nyata,
mpian dan harapan
Aku membaca, bacaanku pun
menjadi nyata
Aku terbang ke istana Harun
Alrasyid,
Melihat Hikayat Seribu satu Malam

●●●

Pagi-pagi ku baca koran,
Berita-berita terlukis di mata
Waktu tidur berita menjadi nyata
Bercampur baur peristiwa dan Impian
Apa yang masuk dan keluar benakku
Keduanya mempunyai nilai yang
sama
Benakku sungguh luar biasa
Apa yang keluar dari benak Taufik
Ismail, Hamid Jabbar,
dan Sutardji Calzoum Bachri, menjadi
bagian dari benakku
Alangkah besar alangkah Agung
Tuhanku!

Jakarta '96

Catatan:
Sajak ini ditulis oleh HB Jassin tahun 1996, sebelum Paus Sastra Indonesia itu terserang penyakit stroke. Menurut penuturan Ritawati, sajak tersebut berasal dari mimpi Jassin yang kemudian diubah menjadi puisi.

Republika, 10 Oktober 1999

PUISI HUMOR-ULASAN

Puisi humor di Graha Bhakti TIM

JAKARTA, *Suaka Metro*

Deklarator ulung Jose Rizal Manua, akan kembali tampil membacakan puluhan puisi humor karya sendiri maupun orang lain, di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM), Senin 8 Nopember mendatang. Meski pembacaan puisi humor tersebut bukan yang pertama dilakukannya pada tahun ini, tetapi ia akan membacakan beberapa karya puisi yang belum sempat dibaca dalam pertunjukkan yang lalu. Sebelumnya Jose tampil di Pusat Kebudayaan Jepang (1/9) dan pemukiman pemulung Bantar Gebang, Bekasi (9/9).

Pada pertunjukkan sebelumnya, Jose tampil membacakan serangkaian puisi humor yang kaya metafora dengan diiringi oleh program MIDI. Sesekali ia bernyanyi dan memelesetkan lagu-lagu yang pernah ngetop.

Berbagai *guyonan* dalam bentuk makian dan dialog yang menyerempet masalah seksual, mampu membuat para penonton yang hadir tertawa terpingkal-pingkal.

Dengan piawai, ia mengemas dan mempersiapkan pembacaan puisi sebagai sebuah tontonan, hingga membuat publik terpukau dengan gaya pembacaannya. Jose memperhitungkan susunan emosi setiap sajak, memperhatikan kostum, menata *setting* dengan tepat, demi mencapai efek maksimal dari sebuah seni pertunjukkan.

Jose sendiri mengatakan bahwa apa yang akan ditampilkannya dalam pembacaan puisi humor nanti, merupakan 'pengolahan' kembali atas sesuatu yang pernah ditampilkan, selain tentunya ia akan membacakan puisi-puisi yang belum pernah diperdengarkan pada pertunjukkan sebelumnya.

Ketika ditanyakan alasan ketertarikannya untuk terus membacakan puisi-puisi humor, Jose mengatakan, dalam diri manusia pada hakekatnya memiliki *sense of humor.*

"Karya puisi para penyair besar seperti Emha ainun Najib, Taufiq Ismail, Sutardji C. Bachri, atau WS. Rendra, menyimpan kandungan humor yang besar dan dahsyat, walaupun itu dibuat tanpa unsur kesengajaan atau sebagai sebuah wujud kenakalan personifikasi kreatif saja. Tapi kandungan humor itulah yang saya coba *gali* terus untuk menemukan hakekat bentuk yang disebut sebagai puisi humor," ujarnya.

Yang jelas, entah namanya

puisi humor, puisi serius, atáu puisi apa lagi, Jose telah membuktikan keseriusannya untuk menekuni suatu bidang yang ia yakini kebenarannya.

Semangatnya untuk terus belajar dan menjaga kualitas pembacaannyá, bahkan sampai di tempat-tempat yang bukan diperuntukkan sebagai tempat kesenian, seperti di pemukinan pemulung, membuatnya mampu bertahan sebagai seorang deklamator.

Apalagi di saat kondisi dan situasi bangsa yang rakyatnya menyimpan kemarahan terpendam seperti sekarang, mungkin adá baiknya kalau kita meluangkan waktu sejenak untuk ber-*ha-ha-hi-hi* mentertawakan keadaan dan diri sendiri. (cr-10)

Suaka Metro, 22 Oktober 1999



APRESIASI SASTRA

bersama Dr Suminto A Sayuti

Nilai Sastra: Antara yang Intrinsik dan Relasional

HAL-HAL yang sudah dikemukakan pada pembicaraan terdahulu pada dasarnya merupakan gambaran tentang penilaian yang umum. Kali ini akan dikemukakan masalah nilai sastra secara lebih khusus.

Nilai sesuatu pada umumnya dan nilai sastra khususnya bergantung pada dua hal, yaitu sistem norma subjek yang menilai dan struktur objek yang dinilai. Sudut pandangan ini mengimplikasikan adanya dua konsep tentang nilai sastra, yaitu konsep intrinsik dan relasional. Konsepsi nilai sastra yang bersifat intrinsik (atau sering juga disebut nilai imanen) menunjukkan bahwa nilai sastra merupakan entitas atau sesuatu yang benar-benar ada dan bersifat independen. Nilai itu bisa saja hadir dan bisa pula tidak hadir dalam sebuah teks tertentu. Dalam pandangan ini, nilai sastra dipertimbangkan sebagai sesuatu yang permanen atau eternal (abadi), yang membawa tujuannya dalam dirinya sendiri. Ada yang menyatakan bahwa "kata-kata indah," dalam teks sastra tentunya, misalnya sajak, merupakan sesuatu yang objektif. Akan tetapi, hal itu bisa saja membuat orang mampu memahaminya atau sebaliknya, orang bisa keliru dalam memahaminya.

Hingga kini, konsepsi nilai intrinsik tidak hanya didukung oleh para ahli teori sastra, tetapi juga oleh berbagai penulis kreatif atau para sastrawan. Jika seorang apresiator kritis atau pembaca umumnya ingin mempertimbangkan nilai sastra suatu teks yang dibacanya. Menurut perspektif ini, seorang apresiator seharusnya mencoba untuk memaparkan "kebagusan" artistik sebanyak-banyaknya, yakni kebagusan yang mungkin diaktualisasikan dalam dan melalui pembacaan terhadap teks yang bersangkutan. Asumsi yang mendasari pandangan ini ialah bahwa kualitas artistik teks sastra merupakan fakta yang mandiri dan independen. Tetapi, fakta itu berkemungkinan ganda: dapat ditemukan dan mungkin pula tidak ditemukan. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa ada kebagusan yang dapat diaktualisasikan dan ada pula kebagusan yang tidak dapat diaktualisasikan.

Misalnya saja, jika kita kembali pada sajak Asa Jatmiko atau karya Jumari HS. yang pernah kita baca minggu lalu. Niscaya kita hanya akan dapat berbuat banyak dalam kaitannya dengan apresiasi tatkala kita dapat memaparkan kualitas artistik yang diaktualisasikan dalam dan lewat sajak kedua penyair itu. Ambillah sebagai misal, mengapa Asa Jatmiko memilih kolokasi *'lambung kiri'* dan bukannya 'lambung kanan', dan ternyata pilihan kolokasi ini terkait dengan suasana sajak secara keseluruhan yang berbicara soal *'tempat hati tersembunyi'* dan berkenaan pula dengan persoalan rasa *'ketidakpercayaan'* milik si *'-mu'* yang sudah *'bertahun merangkak meniti jalan / yang (besarnya) serambut,'* yang kesemuanya itu dalam rangka membuktikan bahwa *'cinta memang lahir dari tidak / percaya,"* (Asa Jatmiko, *'Di Lambung Kiri'*).

Akan tetapi, perspektif atau konsep nilai intrinsik seperti dikemukakan di atas, salah satu sisinya, yakni yang berkenaan dengan kualitas yang tidak teraktualisasikan, dapat dipertimbangkan lebih lanjut, atau mungkin juga tidak dapat kita terima dalam konteks berapresiasi. Mengapa demikian? Karena, kendatipun sebuah objek bisa saja memiliki nilai intrinsik yang otonom dan independen, kehadirannya tidak dapat dijelaskan secara cukup memadai jika tidak teraktualisasikan. Dalam kaitannya dengan sajak-sajak tersebut kita tidak bisa hanya menyatakan bahwa sajak *'Di Lambung Kiri'* Asa Jatmiko dan *'Gelisah Burung'* Jumari HS. itu bernilai estetis hanya karena 'sajak memang (seharusnya) mengandung nilai keindahan," yakni nilai yang telah dipertimbangkan sebagai entitas yang otonom.

Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menghadapi persoalan semacam itu. Kita pernah menyaksikan 'panorama matahari tenggelam' (di pinggir pantai waktu senja hari tentunya!) atau yang sering diistilahkan *sunset*? Kalaupun belum pernah, paling tidak kita dapat membayangkannya!

Panorama *sunset* 'matahari tenggelam' seringkali dianggap memiliki nilai estetik yang mandiri. Kendati tidak seorang pun melihat

sunset, nilai estetiknya akan tetap sama. *Sunset* yang tidak kita saksikan pun tetap memiliki nilai esetetik, karena kualitas *potensialnya* yang dimiliki, bahkan secara ekstremnya, di dunia yang tidak berpenghuni sekalipun, *sunset* akan selalu disebut indah! Akan tetapi, tidak demikian halnya jika kita berapresiasi sastra. Ungkapan 'pokoknya indah', harus diabaikan dalam kaitan ini. Penilaian dalam laku apresiatif harus berdasarkan kriteria atau norma sastra yang jelas.

Oleh karena itu, jika kita menyatakan bahwa sajak Jumari HS itu indah, baik dari segi puitis, karena kita memang memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk menyatakannya demikan, yakni bukti-bukti artistik yang teraktualisasikan dalam keseluruhan sajak. Sajak Jumari itu termasuk sajak yang bagus karena, misalnya saja, sistem deskriptif yang mendukungnya secara keseluruhan menunjukkan adanya koherensi internal yang kuat. Jumari menyairkan 'gelisah burung', seperti tertera di judul sajaknya. Oleh karena itu sistem deskriptif sajak dipenuhi oleh kata-kata, begitu cerdas penyair memilihnya, yang berkaitan dengan fenomena ke-'burung'-an: *sayap, kicau, pohon, udara, terbang, hutan*. Persoalan kolokasi-kolokasi yang secara *ordinary* atau normatif membentuk sesuatu yang *ungrammaticality* atau *nonsense*, itu persoalan lain. Atau bahkan sebaliknya, yang tidak gramatik dan nonsens itu malahan menjadi kekuatan sajak itu, menjadi kualitas artistik, secara keseluruhan. Bukankah bahasa sajak memang berbeda dengan pemakaian linguistik umum. **(Bersambung)-m**

Peminat dan apresian sastra yang ingin menanyakan segala hal tentang sastra dapat mengirimkan pertanyaan lewat Redaktur Budaya SKH Kedaulatan Rakyat. Semua pertanyaan akan dijawab dalam rubrik "Apresiasi Sastra Bersama Dr Suminto A Sayuti" ini. **(R-1)**

Kedaulatan Rakyat, 3 Oktober 1999



APRESIASI SASTRA

bersama Dr Suminto A Sayuti

Nilai Sastra: Antara yang Intrinsik dan Relasional

(sambungan minggu lalu)

APA yang dikemukakan tersebut pastilah, walaupun secara instingtif, dirasakan oleh kebanyakan pembaca, bahkan oleh pembaca tak terpelajar sekalipun. Akan tetapi, meskipun benar bahwa sajak menggunakan kata-kata di luar kata sehari-hari serta memiliki 'semacam tata bahasa khusus," bahkan terkadang menggunakan tata bahasa yang tampak tidak sahih karena sempitnya batas-batas sajak yang memang harus begitu, boleh jadi juga sajak menggunakan kata-kata dan *grammar* seperti halnya bahasa sehari-hari. Kata-kata sebagai elemen konstitutif dalam 'Gelisah Burung' karya Jumari, secara keseluruhan, adalah kata-kata yang lazim kita kenal dalam penggunaan sehari-hari. Tidak ada yang aneh.

Kalaupun ada, misalnya saja: '*burung belum bersayap*' kok '*sudah bisa terbang*' ('burung' Jumari memang aneh jika dilihat dari sistem deskriptif yang biasa!), itu lebih disebabkan, sekali lagi oleh kecerdasan penyair dalam membangun kolokasi, yang semuanya diarahkan pada tercapainya bangunan makna sajak secara utuh.

Dalam kesusastraan manapun yang sejarahnya sudah panjang, kita dapat mengamati bahwa sifat sajak cenderung berganti-ganti arah. Pemilihan di antraa alternatif-alternatif tertentu, yang juga terjadi pada Asa Jatmiko dan Jumari HS, pada hemat saya, seringkali juga diarahkan oleh evolusi citarasa-kreatif dan oleh perubahan-perubahan konsep estetik sebagai bahasa pilihan yang sadar, yang terjadi secara terus menerus. Bukankah kepenyairan tidak akan berhenti pada satu terminal saja? Walaupun demikian, tetap saja ada satu hal yang tidak pernah berubah: sajak memaparkan hal-hal dan konsep-konsep secara tidak langsung. Dengan kata lain, sajak mengatakan sebuah hal, tetapi yang dimaksud adalah hal lain. Dalam hubungan inilah, 'keanehan' kolokasi dalam sajak Jumari HS dapat menemukan rele-

vansinya. Secara empirik, oleh karenanya, perbedaan antara sajak dan bukan sajak dapat dilihat secara jelas dalam hal; bagaimana sepotong teks puitik mampu membawa arti (*meaning*). Dalam kaitan inilah pentingnya penjelasan yang dan kehendak memahami secara utuh, dan tentu saja, yang tidak bertele-tele dan relatif sederhana, mengenai struktur arti dalam sajak, terutama sekali jika pada akhirnya kita akan mengaitkannya dengan penilaian terhadapnya.

Di dalam lingkup sastra yang lebih luas akan tampak bahwa sajak tak dapat dipisahkan dari konsep teks: jika kita tidak dapat memandang sajak sebagai entitas yang tertutup, kita tak akan bisa membedakan wacana puitik dari bahasa literer. Oleh karena itu, prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan adalah apa yang dapat dipahami dan diterima pembaca dalam kaitannya dengan sajak sebagai suatu konteks khusus yang terbatas.

Terdapat tiga cara yang memungkinkan terjadinya ketidaklangsungan semantik, yaitu karena penggantian (*displacing*), pemutarbalikan (*distorting*), atau penciptaan (*creating*) arti. Penggantian itu terjadi tatkala tanda-tanda berubah dari satu arti ke arti lainnya, ketika sebuah kata 'berarti' yang lain, seperti yang terjadi pada metafor dan metonimi. Pemutarbalikan terjadi manakala terdapat ambiguitas, kontradiksi, atau *nonsense*. Penciptaan terjadi pada saat *textual space* berperan sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda yang di luar butir-butir kebahasaan tidak berarti penuh atau sebaliknya (misalnya saja simetri, irama, atau ekuivalensi-ekuivalensi semantis antara letak homologus dalam satu bait).

Di antara tiga macam tanda ketidaklangsungan tersebut muncul satu faktor: kesemuanya *merupakan ancaman representatif realitas, atau mimesis*. Representasi secara sederhana dapat diubah, atau mungkin didistorsikan oleh penyimpangan gramatika atau leksikon (misalnya saja detil-detil yang saling bertentangan), yang dinamakan, seperti sudah disebutkan di atas, *ungramaticality*. Atau kemungkinan hal itu akan dibatalkan sama sekali (misalnya *nonsense*).

Ciri karakteristik sajak adalah kesatuannya, baik semantis maupun formal. Oleh karena itu, komponen apapun dari sebuah sajak yang menunjuk pada "sesuatu yang lain" itu akan menjadi suatu hal yang konstan, dan dapat dengan jelas dibedakan dari mimesis.

Kesatuan semantis dan formal ini, yang mencakup semua indeks ketidaklangsungan, disebut *significance* ('makna'). Istilah *meaning* ('arti') digunakan bagi informasi yang dibawa oleh teks pada level mimetik. Dari segi arti, sebuah teks adalah sebuah rangkaian unit informasi yang berurutan, sedangkan dari sudut makna, suatu teks sebuah unit semantis.

Oleh karena itu, tanda apapun di dalam teks akan relevan dengan kualitas puitisnya, yang mengekspresikan atau merefleksikan modifikasi mimesis secara terus menerus. Jadi, kesatuan hanya dapat dibedakan di balik multiplisitas representasi. Dan Jumari sudah mencapainya: *//burung itu belum bersayap/sudah bisa berkicau/tentang pohon tumbang, ikan teracuni/dan amis nurani//burung itu belum bersayap/sudah biasa puasa/menghayati panas udara, air limbah/dan kering kasih sayang//burung itu belum bersayap/sudah bisa terbang/mencari hutan, yang mencari hutan//*.

Berbeda dengan konsepsi nilai intrinsik adalah konsepsi nilai relasional. Pandangan ini tidak menggambarkan nilai sastra sebagai hal yang permanen dan mandiri, tetapi bergantung pada sistem norma pembaca-apresiator dan bergantung pula pada struktur tekstualnya. Sebuah teks sastra hanya menyajikan nilai tertentu bagi pembacanya jika teks itu mampu memberikan sebuah atau sejumlah hal yang dapat memuaskan atau mencukupi kebutuhan dan atau harapan pembaca(-pembacanya). Kita tentu sudah paham terhadap persoalan ini. Dengan kata lain, sebagai pembaca karya sastra, sebut saja sajak Rendra yang berjudul 'Surat Cinta' sebagai contoh, niscaya hanya akan memberikan nilai tertentu pada sajak itu jika pesan (baca: tema, amanat, sikap, perasaan, atmosfer atau suasana) sastranya mampu membangkitkan minat kita dalam atau terhadap beberapa hal. Misalnya saja karena judul sajak Rendra itu, *'Surat Cinta'*, telah membuat kita teringat pada masa muda yang nostalgik. Atau mungkin karena baris-baris sajak Rendra tersebut, misalnya yang berbunyi: *"Kutulis surat ini/Kala langit menangis/Bagai bunyi tambur mainan/anak-anak peri dunia yang gaib/Dan dua ekor belibis/bercintaan dalam kolam/jenaka dan manis/mengibaskan ekor serta bulu-bulunya yang nakal/Wahai, Dik Narti/Aku cinta kepadamu"* telah mengingatkan kita ketika pertama kali kita jatuh cinta dan kemudian menulis surat romantis pada pacar tercinta. Atau, mungkin juga sajak dengan judul yang sama dari Gunawan Mohamad berikut ini.

SURAT CINTA

Bukankah surat cinta ini ditulis
ditulis ke arah siapa saja
Seperti hujan yang jatuh rimis
menyentuh arah siapa saja

Bukankah surat cinta ini berkisah
berkisah melintas lembar bumi yang fana
Seperti misalnya gurun yang lelah
dilepas embun dan cahaya

(1992)

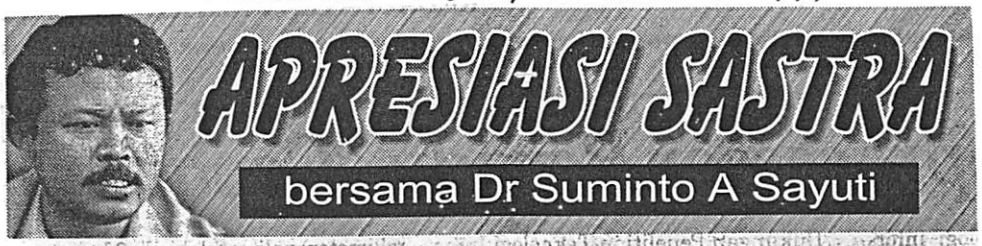
Tentu saja sejumlah teks tertentu dapat dengan mudah memenuhi hal-hal yang diharapkan pembaca atau sekelompok pembaca tertentu, se-

mentara teks lainnya mungkin tidak dapat sepenuhnya, atau mungkin juga teks-teks sastra tidak sekadar 'melayani' keinginan dan kebutuhan-kebutuhan pembaca yang bersifat individual. Hal ini mengimplikasikan bahwa berbagai elemen tekstual memang merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan penilaian pembaca untuk memberikan nilai pada teks tertentu.

Menurut teori nilai relasional, penilaian yang kita berikan kepada teks sastra tertentu itu bersifat desisif. Artinya, penilaian kita itu merupakan keputusan yang telah kita buat berdasarkan sejumlah hal yang mendasarinya. Jika sajak Rendra yang pernah dikutip untuk kepentingan pembicaraan kita, *"Pernyataan dari Rakyat: Menghadapi Kekuasaan yang Tidak Adil"* kita nyatakan bagus atau indah, niscaya kita berpegang pada kriteria tertentu.□-m

Peminat dan apresian sastra yang ingin menanyakan segala hal tentang sastra dapat mengirimkan pertanyaan lewat Redaktur Budaya SKH Kedaulatan Rakyat. Semua pertanyaan akan dijawab dalam rubrik "Apresiasi Sastra Bersama Dr Suminto A Sayuti" ini. **(Red)**

Kedaulatan Rakyat, 10 Oktober 1999



Kriteria Penilaian Sastra yang Lazim Dipakai

DALAM sejarahnya, dari waktu ke waktu, karakteristik karya sastra itu tidak pernah statis. Karakteristik tekstual itu hakikatnya dinamis, berubah setiap saat sesuai dengan habitat budaya yang mempengaruhinya, walaupun perubahan yang terjadi itu juga tidak berarti memusnahkan secara keseluruhan karakteristik yang pernah ada. Perubahan yang terjadi selalu bersifat evolutif dan bukannya revolusioner. Dengan demikian, kriteria penilaian yang dipakai untuk menilainya juga berubah. Tentunya kita masih ingat bagaimana karakteristik sajak-sajak Pujangga Baru, misalnya karya-karya Amir Hamzah. Coba kita simak lagi salah satu sajaknya berikut ini:

BERDIRI AKU

Berdiri aku di senja senyap
Camar melayang menepis buih
Melayah bakau mengurai puncak
Berjulang datang ubur terkembang

Angin pulang menyejuk bumi
Menepuk teluk mengempas emas
Lari ke gunung memuncak sunyi
Berayun alun di atas alas

Benang raja mencelup ujung
Naik marak mengorak corak
Elang leka sayap tergulung
Di mabuk warna berarak-arak

Dalam rupa maha sempurna
Rindu sendu mengharu kalbu
Ingin datang merasa sentausa
Mencecap hidup bertentu tuju

Walaupun sajak-sajak pada masa itu disebut dengan 'puisi baru' (dalam arti karya yang sudah meninggalkan 'tradisi sastra lama'), kenyataannya ciri-ciri yang melekat pada pantun (yang ada dalam khasanah sastra lama-tradisional) masih juga tampak kental. Hal itu misalnya saja tampak pada pola persajakan, periodusitas baris, dan pola pembaitan. Bahkan, hingga kini pun karakteristik karya-karya sastra 'lama' masih tampak, dan seringkali juga dominan, menjadi karakteristik karya-karya mutakhir.

Munculnya kembali ciri-ciri 'nenek moyang' semacam itu, dalam pembicaraan sastra disebut gejala atavisme. Ada pula yang menyebut arkaisme dan ada pula yang menyebut neologisme. Gejala semacam itu bisa terjadi, baik dalam karya puisi, prosa fiksi maupun naskah drama. Kita cermati salah satu sajak Sutrimo Edy Noor (KRM, 10 Oktober 1999) berikut ini.

JANTUNG FAJAR

Bagi dia yang terlahir dari jantung fajar
Sia-sia belaka setiap sihir para dewa

Di tanah ini, tidak ada yang terlahir sebagai

dewa
Kecuali setiap segala yang ingin
Memberhalakan diri.

Kelelawar boleh terbang di rembang hari
Dan malam boleh jadi berjubah kelam
Tapi bagi cerlang pikiran, bintang-bintang menyala
Sepanjang hayat!

Dari segi pola pembaitan, sajak Sutrimo EN tersebut bisa saja mengingatkan kita pada pola pembaitan karmina (pada puisi lama, yakni dua baris seuntai) atau distikon pada masa puisi baru, juga pola pantun (empat baris seuntai) atau kuatrain. Akan tetapi, pola semacam itu hanya berhenti pada unsur tipografi, karena pikiran atau perasaan yang disampaikan penyair sudah tidak lagi menggunakan pola dalam sastra lama, misalnya saja dengan memanfaatkan pola sampiran dan isi. Sutrimo EN 'hanya' mengaktualisasikan kembali pola-pola yang pernah ada sebagai bagian dari tradisi sastra. Sementara pada sisi lain ia menunjukkan kreativitasnya dengan cara melepaskan diri dari pola yang ada itu. Kamus sampiran dan isi pada sajak di atas sama sekali tidak ada. Walaupun demikian, 'isi' yang akan disampaikannya tetap terekspresikan dengan baik. Hal dapat tercapai karena Sutrimo telah berhasil, misalnya saja, memanfaatkan dan mendayagunakan metafora-metafora dalam keseluruhan sajak dalam bangunan yang koheren. Lewat metafora pilihan itulah makna sajak menjadi terkedepankan, bahkan, kalau boleh disebut, 'amanat' yang disampaikannya : *"bagi cerlang pikiran, bintang-bintang menyala / sepanjang hayat!"*

Sekali lagi, ilustrasi di atas hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada nilai sastra yang statis, dan karenanya bangunan sajak juga bukan merupakan sebuah fakta yang terisolasi, terlebih jika disadari bahwa bahasa merupakan sarana utama dan tujuan sekaligus bagi proses penciptaan. Nilai sastra selalu berada dalam dinamika, tegangan antara tradisi dan pembaharuan, sepanjang sejarah sastra itu sendiri, sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengkondisikannya.

***

Jika teks tertentu sudah diketahui dan penilaian terhadapnya dilakukan berdasarkan satu kriteria penilaian atau lebih, kita pun dapat dibenarkan untuk memperdebatkan penilaian itu. Akan tetapi, yang perlu diingat dalam hubungan ini, tidak semua kriteria yang mendasari penilaian yang diberikan selalu relevan dan sejalan dengan apresiasi sastra.

Jika kita menilai sebuah karya sastra berdasarkan, misalnya saja, kriteria bahwa suatu teks seharusnya ditulis atau dicetak dengan huruf tebal atau miring, tentu saja kriteria yang kita gunakan itu merupakan kriteria yang tidak relevan. Kesimpulannya, penilaian harus juga dibatasi pada penilaian yang didasarkan pada kriteria yang berkaitan dengan elemen dan struktur tekstual yang ada.

(Bersambung)-m

Peminat dan apresian sastra yang ingin menanyakan segala hal tentang sastra dapat mengirimkan pertanyaan lewat Redaktur Budaya SKH Kedaulatan Rakyat. Semua pertanyaan akan dijawab dalam rubrik "Apresiasi Sastra Bersama Dr Suminto A Sayuti" ini. **(Red)**

Kedaulatan Rakyat, 17 Oktober 1999



Apresiasi Sastra

Bersama Dr. Suminto A Sayuti

Kriteria Penilaian Sastra yang Lazim Dipakai

DALAM melakukan penilaian sastra, sejumlah kriteria dapat dibeda-bedakan. Tentu saja, persoalan ini tentu bukan merupakan barang baru. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan penilaian terhadap objek-objek. Kita juga menggunakan kriteria yang berbeda-beda. Misalnya saja, kita menilai sepedamotor. Sepedamotor yang baik adalah sepeda motor yang modelnya sport, mesinnya bandel, bensinnya irit, dan seterusnya. Kriteria-kriteria itu dikenakan pada elemen dan struktur sepedamotor yang kita nilai. Demikian pula halnya dalam menilai karya sastra tertentu.

Suatu ketika pikiran dan perasaan kita sedang tidak enak, sumpek dan gelisah. Kita bisa saja mencari hiburan lewat membaca cerpen, misalnya saja cerpen 'Parfum' karya Arwan Tuti Artha, yang dimuat di lembaran ini beberapa

waktu lalu. Setelah selesai membacanya ternyata kesumpekan itu hilang. Hal itu berarti bahwa cerpen Arwan Tuti Artha tersebut telah memenuhi keinginan atau horison harapan kita untuk berhibur dan melepaskan diri dari kesumpekan perasaan dan pikiran. Kita pun bisa saja menyimpulkan bahwa cerpen 'Parfum' karya Arwan itu merupakan karya sastra yang baik dan berhasil. Dalam kaitan ini, kriteria penilaian yang dipakai bersifat individual dan dibatasi pada *pleasure* (kesenangan) belaka.

Akan tetapi, bagi orang lain, mungkin cerpen yang telah berhasil membuat kita senang itu bisa saja dianggap sebagai cerpen yang jelek. Penilaian ini didasarkan pada kenyataan bahwa untuk memahami 'Parfum' diperlukan pemusatan pikiran, akumulasi pengalaman, dan wawasan pengetahuan yang cukup memadai tentang tema atau persoalan yang dikemukakan, terlebih jika disadari bahwa cerpen 'Parfum' memang menggunakan logika pengaluran yang cenderung meloncat-loncat, yang bagi pembaca belum terbiasa dengan genre macam itu bisa menyulitkan. Ilustrasi ini mengindikasikan bahwa penilaian yang kita berikan pada karya itu didasarkan pada kriteria *inteligibilitas* atau kemudahannya untuk dipahami.

Sementara itu, sebagian yang lain malahan sangat menyukainya karena cerpen tersebut memberikan pengalaman baru (*novelty*) yang berbeda dengan pengetahuan dan pengalaman yang bersifat keseharian (*familiarity*), misalnya saja karena kesederhanaan persoalan yang diungkap dan keunikannya.

Di samping kriteria tersebut, secara historis, kriteria-kriteria penilaian yang penting dalam apresiasi sastra adalah imitasi, fiksionalisasi, pemakaian bahasa yang menyimpang, pelanggaran sistem norma sosial dan atau pelanggaran sistem norma sastra pembaca, kompleksitas, kesatuan (*unity*) dan *test of time*.

Imitasi merupakan salah satu di antara kriteria-kriteria tertua dalam apresiasi dan kritik sastra. Dunia fiksional teks sastra seharusnya merefleksikan realitas sosial. Dalam konteks ini pula istilah *truthfulness* 'kebenaran' dipergunakan.

Karya sastra akan dinilai baik jika di dalamnya terkandung unsur kebenaran, yakni mampu membayangkan atau merefleksikan kehidupan atau peristiwa kehidupan yang (pernah dan akan atau dimungkinkan) ada. Maksudnya, apa yang diungkapkan dalam dan lewat karya sastra bukan hanya merupakan hasil lamunan atau khayalan belaka. Dalam konteks ini tentu saja wiracarita semacam *Mahabarata* dan *Ramayana* (juga cerita Panji) tidak dapat dikatakan sebagai 'karya besar'. Mengapa? Karena, walaupun cerita-cerita itu bertutur tentang kepahlawanan, di sana-sini terdapat bumbu-bumbu keajaiban dan kehidupan para dewa yang tak masuk akal.

Kriteria kebenaran dalam memberikan penilaian sastra hendaknya ditafsirkan sebagai 'kebenaran yang sesuai dengan kadar yang benar'. Jadi, ia bukannya kebenaran yang persis samadengan kenyataan pengalaman keseharian, melainkan lebih luas dari itu. Kebenaran dalam hubungan ini lebih berhubungan dengan kebenaran ideal. Istilah yang sering dipakai untuk menyebut kebenaran semacam itu adalah *the truth to life* (kebenaran hidup), kebenaran yang berakar pada kenyataan dan kebenaran yang secara ideal dikehendaki.

Fiksionalisasi. Norma fiksionalisasi mengimplikasikan bahwa tanda-tanda linguistik yang berfungsi dalam teks sastra tidak merujuk secara langsung pada dunia kita, tetapi pada dunia fiksional. Dalam teks sastra, fungsi estetik bahasa bersifat dominan, dalam arti bahwa hubungannya dengan realitas menghasilkan atau tampak dalam hubungan antarelemen dalam teks. Salah seorang ahli sastra, Jurij Lotman, mengemukakan bahwa bisa saja tanda-tanda bahasa yang dalam perspektif linguistik bersifat faktual, tetapi dalam perspektif kesastraan berkarakter fiksional. Kriteria ini berkaitan dengan kriteria kebenaran yang sudah dikemukakan di atas.

Pemakaian bahasa yang menyimpang. Pemakaian bahasa yang menyimpang atau penyimpangan konstruksi bahasa merupakan salah satu faktor yang menghasilkan kerenggangan pada tingkatan *signifie* 'petanda'. Penekanan pada konotasi dalam teks sastra —dalam kontradiksinya dengan teks-teks ilmiah dan 'bahasa biasa'— dapat pula dipandang sebagai satu bentuk penyimpangan. **(Bersambung)-o**

Peminat dan apresian sastra yang ingin menanyakan segala hal tentang sastra dapat mengirimkan pertanyaan lewat Redaktur Budaya SKH Kedaulatan Rakyat. Semua pertanyaan akan dijawab dalam rubrik "Apresiasi Sastra Bersama Dr Suminto A Sayuti" ini. **(Red)**

Kedaulatan Rakyat, 24 Oktober 1999

SASTRA INDONESIA-ULASAN

Angkatan Sastra 2000 Kembali Diperdebatkan

JAKARTA — Apa yang harus dikatakan oleh seorang guru bahasa dan sastra bila muridnya bertanya adakah angkatan sastra baru pasca Angkatan 66? Apakah perlu kita menyebut satu angkatan sastra baru? Apakah tepat kalau angkatan baru itu dinamakan Angkatan 2000? Jangan-jangan, keinginan memunculkan nama angkatan baru di bidang sastra ini lebih merupakan keinginan para penyair muda agar keberadaan mereka diakui.

Berbagai pertanyaan tadi mengemuka dalam diskusi *Angkatan Sastra 2000* yang digelar di Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (2/10). Diskusi yang diadakan oleh Komunitas Sastra Indonesia (KSI) bekerja sama dengan harian umum *Republika* dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) itu menampilkan empat pembicara. Mereka adalah: Hasan Alwi (kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), Abdul Rozak Zaidan (wakil Indonesia di Majelis Sastra Asia Tenggara, anggota Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), serta Sunu Wasono dan Maman S. Mahayana (kedua-nya dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia). Moderator Irwan Kelana (redaktur Budaya *Republika*). Diskusi yang berlangsung pukul 14.00 hingga 17.05 itu dihadiri tak kurang dari 100 orang. Baik dari kalangan sastrawan, pengamat sastra, kritikus, dosen, guru bahasa/sastra, mahasiswa, pelajar, dan wartawan.

Menurut Ketua KSI Wowok Hesti Prabowo, diskusi ini merupakan kelanjutan diskusi dengan tema serupa yang digelar setahun silam. Acara yang juga diadakan oleh KSI bekerjasama dengan *Republika* dan DKJ kala itu menampilkan kalangan sastrawan. Mereka adalah: Edy A. Effendi, Sitok Srengenge, Korrie Layun Rampan, dan Eka Budianta. "Kali ini kita ingin mendengar pandangan yang jernih dari mereka yang berada di luar komunitas sastrawan, yakni para akademisi," tutur Wowok.

Maman S. Mahayana mempertanyakan perlukah sebuah angkatan sastra dilahirkan. "Bagi saya, yang lebih perlu adalah merevisi konsep angkatan itu sendiri, karena istilah angkatan justru mendatangkan persoalan — karena banyak biasnya. Saya lebih

setuju istilah priodisasi sastra," tandasnya.

Sunu Wasono juga mempertanyakan hal yang sama. "Apa sih perlunya membicarakan angkatan baru? Istilah angkatan justu merepotkan guru bahasa/sastra. Apalagi kerap tercampuraduk antara angkatan dan priodisasi," tegasnya.

Abdul Rozak Zaidan berpendapat Angkatan 2000 terlalu prematur untuk diumumkan saat ini. "Dalam tradisi Paus Sastra Indonesia HB Jassin, penamaan sebuah angkatan — misalnya Angkatan 45 dan Angkatan 66 — baru diumumkan setelah tahun keramat itu dilewati," tuturnya memberikan alasan.

Meski demikian, dia mengaku setuju perlunya penghargaan terhadap keberadaan para sastrawan muda, yang — meminjam istilah penyair Chairil Anwar seperti dikutip Toto ST Radik dalam *Jurnal Angkatan* edisi November 1998 — disebut sebagai *"tulang-tulang berserakan"*.

Hasan Alwi, yang membawakan makalah berjudul *Sastra dan Tingkat Keberaksaraan* menyebut adanya pertalian yang kuat antara sastra dan bahasa. "Bahan baku yang diperlukan oleh seorang pengarang adalah bahasa yang tata bahasanya mantap, kosakata dan peristilahannya lengkap, serta daya ungkapnya tinggi. Dengan kualifikasi bahasa seperti itu, pengarang yang terampil dapat menghasilkan sastra yang baik dan bermutu," ujarnya.

Diakui, diskusi tersebut tidak menjawab tuntas perlu atau tidaknya penamaan Angkatan Sastra 2000. Apakah penamaan tersebut memang cukup pantas? Korrie Layun Rampan, penggagas nama Angkatan Sastra 2000 pun pada prinsipnya tidak terlalu ngotot dengan nama itu. "Angkatan Sastra 2000 itu hanya sebuah nama," katanya.

Namun, di atas semua itu, yang lebih penting bagi para sastrawan muda adalah berkarya dan terus berkarya, terlepas dari ada atau tidak nama Angkatan Sastra 2000 tadi. Seperti dikatakan oleh Arwanto, seorang guru bahasa/sastra SMU Kanisius Jakarta, "Bagi kami soal angkatan itu tidak penting. Yang penting adalah para sastrawan berkarya sebanyak-banyaknya, sehingga dapat menjadi sumber bacaan bagi para anak didik kami." ■ ika

Republika, 4 Oktober 1999

Sebutan Angkatan Sastra 2000 Masih Prematur

Jakarta, *Pembaruan*

Proses kelahiran sebuah angkatan sastra sesungguhnya berasal dari gagasan-gagasan para sastrawannya untuk lepas dari kejenuhan kultural. Kemudian untuk menilai sebutan angkatan 2000, persoalan harus dikembalikan dulu pada tiga hal, yakni definisi istilah angkatan, penafikan karya sastra di media massa dan penamaan angkatan 2000 itu sendiri.

Jika persoalan masa lalu tentang penamaan angkatan dalam sejarah sastra Indonesia masih perlu direvisi, maka urgensi angkatan 2000 perlu dipertanyakan kembali. Sayangnya, pembicaraan mengenai hal itu masih berada dalam konteks prediksi-prediksi yang baru melahirkan kecenderungan. Lagi pula, persoalan sastra tahun 1970-an dan 1980-an masih memerlukan perumusan yang lebih dalam.

Demikian pendapat kritikus sastra, Drs Maman S Mahayana, pembicara dalam diskusi *Angkatan Sastra 2000* Sabtu (2/10) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Diskusi yang diselenggarakan oleh Komunitas Sastra Indonesia (KSI) bekerja sama dengan Harian Umum *Republika* dan Dewan Kesenian Jakarta ini juga menghadirkan pembicara lainnya, seperti Hasan Alwi dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (PPPB), Abdul Rozak Zaidan dari Majelis Sastra Asia Tenggara dan Sunu Wasono, dosen Fakultas Sastra UI. Sebagai moderator Irwan Kelana.

Maman menyebutkan beberapa nama yang dianggap potensial dan cukup signifikan untuk diperhitungkan kontribusinya sebagai sastrawan penting awal abad 21. Nama-nama seperti Taufik Ikram Jamil (Riau), Acep Zamzam Noor (Bandung), Naim E Prahana (Lampung), Seno Gumira Ajidarma, Jujur Prananto, Yanusa Nugroho (Jakarta) dan sebagainya memberikan harapan besar bagi kesusastraan Indonesia di masa datang.

Menimbulkan Masalah

Sementara itu Sunu Wasono berpendapat, kehadiran nama-nama angkatan seperti angkatan 1970-an, 1980-an, 1990-an, angkatan reformasi atau angkatan 2000 lebih banyak menimbulkan masalah daripada memperjelas masalah. Selain itu tidak ada kriteria yang jelas, karena penamaan angkatan kerap bercampur aduk dengan istilah periodisasi. Padahal, periodisasi berkaitan dengan soal pembabakan atau kurun waktu.

Sedangkan angkatan berkenaan dengan kesamaan konsepsi sekelompok sastrawan dalam penciptaan karya sastra.

Suatu angkatan dapat saja muncul dalam kurun waktu tertentu. Tapi kemunculannya tidak harus diikuti angkatan lain sebagai reaksi yang terdahulu. Menu-

rut Sunu, pembagian sejarah sastra Indonesia atas angkatan-angkatan sama sekali tidak tepat. Terutama berkaitan dengan soal penamaan angkatan itu sendiri yang hingga kini masih simpang-siur tanpa kriteria yang jelas.

Lebih jauh dikatakan, masalah yang esensial bukan lagi pada pernyataan angkatan baru, melainkan persoalan penataan, pencatatan dan pemetaan kembali sejarah kesusastraan Indonesia. Usaha yang telah dilakukan seperti penyusunan buku sejarah, antologi penulisan kritik masih terasa kurang dan belum menjangkau sebagian besar karya sastra yang ada.

Sehubungan dengan sebutan angkatan 2000 dan umur kesusastraan Indonesia yang masih muda, Sunu menilai fakta yang menunjukkan adanya sastrawan yang masih hidup dan masih berkarya akan menyulitkan proses pemetaan. Adalah sebuah ironi memasukkan sastrawan dalam sejarah kalau dia dan karyanya belum menjadi "sejarah" dan masih dalam proses "menyejarah"

Menurut Sunu, sastrawan seharusnya tidak usah terganggu oleh perasaan dan kekhawatiran bahwa karya-karyanya tidak akan dicatat dan dipetakan orang. Persoalan angkatan bukan merupakan hal yang penting bagi sastrawan. Karena untuk dapat memuaskan semua orang dan membuka peluang tercatat dalam sejarah sastra, seniman sebaiknya hanya berpikir bagaimana untuk terus berkarya.

Pada kesempatan lain, Abdul Rozak mengatakan, persoalan angkatan 2000 tidak dapat dijawab dengan gamblang. Lagi pula, istilah angkatan 2000 masih terlalu dini dilontarkan karena penamaan tersebut dibuat sebelum angka tahun yang dinyatakan tersebut. Dia juga mengungkapkan, sebutan angkatan 2000 yang ditawarkan Korie Layun Rampan merupakan upaya penghargaan kepada karya-karya sastra dan satrawannya.(UW/F-3)

Suara Pembaruan 4 Oktober 1999

Angkatan Sastra 2000, Apa Pula Itu?

Cikini, Warta Kota

Sejak munculnya angkatan sastra '45 dan '66, hingga akhir abad ke-20, sudah tak ada lagi angkatan yang muncul dalam bidang sastra. Tetapi, belakangan mulai kembali diributkan tentang angkatan sastra 2000. Hanya saja, bagaimana dan seperti apa bentuk angkatan sastra 2000 itu, memang masih menjadi permasalahan.

Demikian inti sari pemikiran yang mengemuka dalam diskusi "Angkatan Sastra 2000" di Gedung HB Jassin, Jalan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/10). Tampil tiga pembicara yaitu Hasan Alwy (Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), Maman S Mahayana (dosen sastra UI), Abdul Rozak Zaidan (wakil di Majelis Sastra Asia Tenggara) dan Sunu Wasono (dosen sastra UI).

Dalam pandangan ke empat pembicara, mereka masih belum bisa memastikan seperti apakah bentuk dan ciri angkatan sastra 2000 itu. Sebab, karya sastra yang muncul setelah angkatan '66, masih sangat minim dan belum menunjukkan ciri khasnya sendiri. Selain itu, mereka masih mempermasalahkan angkatan '45 dan '66 yang pemunculannya dianggap kontroversial.

"Sejauh ini, angkatan '66 memang menimbulkan kontroversi, karena angkatan '66 itu dikukuhkan melalui sebuah tulisan di majalah perdana *Horison* yang muncul pada pertengahan tahun 1966," kata Abdul Rozak melalui makalahnya, "Upaya Memberi Harga pada Tulang-tulang Berserakan".

Menurut Rozak, sejauh ini memang tak ada masalah dalam mendeklarasikan sebuah angkatan. Hanya saja, sebab-musabab sebuah angkatan itu lahir memang seringkali merupakan hal yang paling penting. Seperti angkatan '45 atau angkatan Balai Pustaka, yang lahir karena dorongan kondisi politik yang tengah terjadi.

Dikatakan, untuk angkatan 2000 masih terlalu prematur untuk diumumkan. "Angkatan '66 dan angkatan '45 saja diumumkan ketika tahunnya sudah berlalu. Angkatan '45 diumumkan tahun 1950-an dan angkatan '66 diumumkan pertengahan tahun 1966," ujarnya.

Kesamaan gagasan

Sementara Maman Mahayana mengatakan, membahas dan mendeklarasikan angkatan 2000 memang sah-sah saja,

namun akan lebih baik bila para seniman lebih memprioritaskan bagaimana memproduksi karya-karya sastra yang bermutu. Juga sah-sah saja bila seniman ingin mengklaim dirinya sebagai angkatan '70, angkatan '80 ataupun angkatan 2000. Tapi ia mengingatkan, pemunculan angkatan itu haruslah disertai karya sastra yang cirinya seragam.

Sampai saat ini, seniman masih banyak memproduksi karya sastra yang beragam. Padahal, karya sastra dalam sebuah angkatan haruslah satu gagasan dan satu pemikiran. "Dalam sebuah angkatan, yang paling penting adalah kesamaan gagasan dan memiliki konsep sendiri," ujar Maman.

Pentingnya kesamaan gagasan, visi dan misi dalam sebuah angkatan, menyebabkan sulitnya muncul sebuah angkatan setelah angkatan '45 dan '66. Maman berharap, biarlah tahun 2000 berlalu lebih dulu, sehingga kritikus sastra dan sastrawan bisa melihat sendiri seperti apakah karya sastra yang muncul di penghujung abad ke-20 ini.

Kurang minta baca

Pembicara lainnya, Sunu Wasono, lebih menyoroti masalah minat baca. Baginya, membahas sebuah karya sastra tak pernah lepas dari pembacanya. Menurutnya, sampai saat ini pembaca karya sastra masih sangat minim. Bahkan, di sekolah-sekolah siswa yang menyukai karya sastra sangat memprihatinkan. Banyak siswa yang merasa kesulitan untuk mencerna karya-karya sastra angkatan '45 dan angkatan '66. Sedangkan untuk mempelajari karya sastra terbaru, bukunya masih sangat jarang.

Kata Sunu, selama ini membaca karya sastra masih dinomorduakan, terutama bagi siswa-siswi yang hendak mengikuti ujian akhir. "Mereka seringkali diharamkan untuk membaca karya sastra. Mereka harus menomorsatukan bimbingan belajar," katanya.

Kesalahan ini pada akhirnya terbawa sampai kepada pendidiknya. Sebagian besar guru sastra tidak mengetahui dengan detil bentuk pengajaran karya sastra. Yang paling penting saat ini adalah membuat sebuah kurikulum yang benar dan bentuk pengajaran yang sesuai, agar seorang guru bisa mempengaruhi anak didiknya dan minat baca akan tumbuh dalam diri si anak.

Dengan majunya perkembangan teknologi, otomatis minat baca seorang anak akan makin berkurang. Mereka akan lebih memilih mempelajari teknologi baru yang serba mutakhir ketimbang membaca karya sastra yang bahasanya terkadang sulit dimengerti. Untuk itu, harus ada kerjasama antara pengarang, penerbit dan pendukung dana, sehingga mutu karya sastra dapat ditingkatkan dan bisa meningkatkan kecerdasan masyarakat. (wik)

Warta Kota, 4 Oktober 1999

Sastra di Sekolah:
Tak Kenal Maka Tak Cinta

Ian Renasa, kini duduk di kelas 2 SMU Al-Izhar, di Pondok Labu, Jakarta Selatan, mengaku sangat senang dengan pelajaran seni dan sastra. Namun ia lebih tertarik membaca buku komik ketimbang buku-buku sastra. "Lebih baik baca komik karena ceritanya disampaikan dalam bentuk gambar hingga enak dibaca." Hal senada juga dikatakan Nico, siswa kelas 2 SMU Bina Dharma, Ciracas, Jakarta Timur. Dia senang dengan karya sastra khususnya puisi namun dia juga lebih tertarik membaca komik karena ceritanya lucu. "nggak suka karya sastra, saya nggak tahu ceritanya sebab susah dimengerti."

Hal di atas merupakan gambaran kecil betapa kurangnya apresiasi siswa sekolah terhadap karya sastra. Tak heran jika siswa-siswa sekolah lebih tertarik dengan komik yang lebih mudah dimengerti dan ringan ceritanya. Menurut Agus R. Sarjono, anggota Dewan Kesenian Jakarta, apresiasi terhadap kesenian Indonesia termasuk yang terburuk di dunia. Hal ini terjadi karena kondisi yang tidak kondusif seperti kurangnya sarana pendukung seperti perpustakaan yang baik dan guru-guru yang baik pula. "sebenarnya minat mereka terhadap sastra bagus, hanya porsi untuk mengajarkan sastra belum cukup. Ini merupakan masalah nasional yang harus diperbaiki" papar Agus yang juga seorang redaksi di majalah sastra HorizoMelihat permasalahan tersebut, kata Agus R Sarjono, Dewan Kesenian Jakarta pada bulan Agustus lalu mengadakan program Kesenian Masuk Sekolah, termasuk sastra di dalamnya. Kami datang ke sekolah-sekolah dan memberikan pertunjukan berbagai seni. Dengan memperkenalkan berbagai jenis seni bertujuan meningkatkan apresiasi dan minat siswa sekolah terhadap seni. "Inti permasalahan adalah selera, mereka belum mempunyai selera yang baik terhadap sastra," jelas Agus. Tapi setelah mereka dikenalkan berbagai karya sastra minat mereka ternyata bagus.

"Sastra harus dikenalkan sejak awal pada para siswa, karena dalam sastra terdapat unsur pendidikan dan kebudayaan. Selain itu siswa dapat mengetahui seni yang modern dan kontemporer. Hingga dapat menumbuhkan rasa cinta pada seni dan budaya,"tutur Agus R. sardjono.

Adanya program Kesenian Masuk Sekolah, Oleh Drs. Sugito, Guru Bahasa Indonesia, SMU Al-Izhar, di Pondok Labu, Jakarta Selatan, disambut baik karena selain dapat menambah wawasan siswa dan guru. Dengan diadakannya lomba menulis apresiasi seni dapat menjadi wahana untuk mengembangkan keterampilan menulis anak.

Sebenarnya di SMU Al-Izhar, agar siswanya mampu mengekpresikan pendapatnya secara tulisan. Secara rutin setiap tahun selalu menerbitkan buku yang berisi karya tulis para siswanya. Buku ini berisi berbagai tulisan karya ilmiah atau sastra. Program ini merupakan kegiatan intra-kurikuler "Kami ingin menghargai kemampuan yang dimiliki siswa, semua karya tulis baik yang bagus atau biasa saja kami muat agar pada tahun berikutnya siswa terpacu untk membuat tulisan lagi,"Katanya.

Sedangkan untuk meningkatkan minat membaca, Sugito, tidak pernah memaksakan anak didiknya untuk membaca buku tertentu. Saat ini mereka mempunyai banyak pilihan untuk bacaannya sendiri, cerpen dan komik misalnya. "Dengan membaca mereka mempunyai masukan dan pengetahuan hingga akan meningkatkan wawasanya serta dapat membentuk prilakunya."

Sementara itu, menurut Dra Sita, Guru Bahasa Indonesia SMU 38, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ia tidak mengetahui adanya kegiatan ini. Dan kegiatan tersebut tidak pernah masuk ke sekolahnya, tanpa diketahui apa penyebabnya. "Apakah peserta yang mengikuti kegiatan ini dibatasi untuk sekolah tertentu saja?," tanyanya ketika dikonfirmasi oleh Reporter Agenda.

Untuk meningkatkan apresiasi sastra para siswa, menurut Dra. Sita, bukan hanya memberikan waktu yang cukup tapi yang terpenting adalah bagaimana cara penyampaian apresiasi guru terhadap siswa dengan baik. "Biasanya saya menunjukan buku karya sastranya atau membacakan isinya sebagian di kelas lalu dilanjutkan oleh siswa. Kemudian kami membahasnya bersama-sama,"terang Sita.

Baik Dra Sita maupun Drs.

Sugito, mengakui bahwa minat siswa untuk membaca karya sastra yang bermutu seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, masih kurang. Salah satu sebabnya adalah gaya bahasa yang digunakan cukup berat. Meski para siswa mengakui bahwa karya-karya sastra itu memiliki nilai yang tinggi. "Sebenarnya anak-anak suka karya sastra, biasanya yang dibaca cerpen yang ada di majalah Anita. Sedangkan cerpen dari Surat Kabar dan Majalah yang berkualitas agak kurang,"papar Sita.

Sementara itu menurut Achmat Rivai, Penerbit Pustaka Jaya, kurangnya apresiasi siswa sekolah terhadap karya sastra dapat diatasi dengan dua cara. Pertama melalui jalur formal atau sekolah dan kedua pemerintah harus mempunyai kemauan politik untuk meningkatkan apresiasi siswa sekolah terhadap sastra. Selama ini pemerintah orde baru tidak menganggap penting karya sastra. Padahal sastra penting untuk kehidupan suatu bangsa.. "Orang bilang yang dapat memperbaiki kehidupan manusia adalah sastra dan agama,"katanya.

Sebenarnya minat baca siswa, kata Achmat Rivai, sudah baik. Buktinya mereka suka baca koran atau novel. Tapi masalah sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan minat baca mereka dari novel pop menjadi membaca karya sastra. Dan yang tak kalah pentingnya adalah juga meningkatkan apresiasi sastra pada para guru. "Jjika pemerintah mau dan mengangap karya sastra penting, seharusnya diadakan program guru sastra," kata Achmad.

Kurangnya minat siswa sekolah, juga berpengaruh terhadap buku-buku sastra yang diterbitkan. Sebagai contoh sebuah karya sastra yang dicetak sebanyak 2000 ekseplar baru habis dalam tempo dua tahun. Hanya karya sasta tertentu saja yang cepat terjual seperti buku Khalil Gibran. "Secara umum buku-buku sastra yang diterbitkan hasilnya kurang memuaskan," tutur Achmad yang telah berkecimpung selama 28 tahun di dunia penerbitan.

Gejala apa ini, ada baiknya sebelum berkomentar kita mengingat sebuah pepatah "Tak Kenal Maka Tak Cinta." Hingga karya sastra tidak ditinggalkan oleh Ian-Ian dan Nico-Nico lainnya.

Wasis Wibowo

Agenda, 7-13 Oktober 1999

Sastra di Dalam dan di Luar Koran

Oleh AGUS R. SARJONO

SASTRA Indonesia, sebagaimana seringkali saya kemukakan baik di koran dan majalah maupun berbagai seminar di dalam dan luar negeri, dua dekade belakangan ini mengalami ledakan besar di koran-koran. Hampir bisa dipastikan, kepada koran pulalah hampir sebagian besar sastrawan muda belakangan ini menyandarkan dirinya. Dan koran - diakui maupun tidak - telah memberi kontribusi besar bagi kehidupan sastra belakangan ini. Setiap tahunnya harian *Kompas* memilih, memberi hadiah dan menerbitkan buku berisi kumpulan bagi cerpen terbitannya yang dianggapnya terbaik. Serangkaian buku yang terbit nyaris tak berkeputusan itu telah meneguhkan lahirnya sebuah genre sastra koran.

Sekurang-kurangnya genre sastra Kompas. Jika langkah ini diikuti dengan cara berbeda-beda oleh berbagai media massa besar di Indonesia, niscaya akan makin kukuhlah sosok sastra koran itu. Sekurang-kurangnya jika langkah itu dilengkapi oleh penilaian, pemberian hadiah dan penerbitan karya unggulan dalam bidang puisi oleh *Pikiran Rakyat* (tempat puisi terbitannya menjadi sesuatu yang disegani banyak kalangan), maka lengkaplah sastra koran di Indonesia mendapat representasi yang memadai.

Kita tentu ingat bahwa Chairil Anwar dan umumnya penyair Angkatan 45 lahir di lembar kebudayaan *Gelanggang*. Yogyakarta melahirkan penyair kaliber Emha Ainun Nadjib dan Linus Suryadi melalui *Persada Studi Klub*. Dan tidak bisa tidak banyak penyair Bandung seperti Juniarso Ridwan, Beni Setia, Diro Aritonang, Acep Zamzam Noor, Soni Farid Maulana bahkan hingga Cecep Syamsul Hari lahir dari ruangan "Pertemuan Kecil" *Pikiran Rakyat*. Bahkan nama-nama seperti Saini KM, Sutardji Calzoum Bachri, Sanento Juliman dan Hamid Jabbar lahir di media ini, lewat lembaran *Kuntum Mekar* ketika itu.

Sekalipun begitu, tidak setiap koran berhasil membangun sebuah "komunitas" sastra yang mantap dan berkesinambungan, yakni sebuah wadah prestisius yang menyemai bibit sastrawan, merawat dan membesarkannya. Di Yogya dan Jawa Tengah banyak koran bertebaran, namun belakangan ini para sastrawan di Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluhkan tak adanya tanah yang gembur, subur dan terawat di berbagai koran di sana untuk memungkinkan lahirnya benih-benih sastra dan gagasan budaya. *Pikiran Rakyat*, dengan "Pertemuan Kecil" dan "Khasanah"-nya hingga kini masih dianggap sebagai lahan subur semacam itu oleh berbagai sastrawan di Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah bahkan hingga Sumatera. Cuaca buruk memang membuat lahan subur semacam "Pertemuan Kecil" maupun "Khasanah" makin menyempit, namun -- jika tidak digusur demi keceriwisan berita politik, soksibuknya perkara ekonomi dan urusan-urusan olahraga yang menghabiskan dana negara hanya untuk membikin malu kita -- lahan persemaian sastra (umumnya seni dan budaya) di *Pikiran Rakyat* tetaplah menjadi tumpuan dan disegani orang serta menjanjikan hasil yang melimpah dan bermartabat.

**

ADA banyak alasan sebenarnya mengapa sastra belakangan ini mengalami ledakan *(booming)* di kora-koran. Yang pertama, tentu saja kenyataan yang tak terbantahkan bahwa media massa khusus sastra jumlahnya terbatas. Kini bahkan bisa dibilang hanya terdapat sebuah saja majalah sastra, yakni *Horison*, bagi negeri yang penduduknya 200 juta ini. Sebagai majalah sastra satu-satunya dan terbit bulanan pula, maka sudah barang tentu majalah ini tak mampu mewadahi ledakan sastrawan di hampir berbagai belahan Indonesia. Sekali terbit Horison hanya dapat memuat 4-5 cerpen, 5-10 sajak dan 1-3 buah esai pendek. Sebagai media kebudayaan umum, *Basis* yang juga terbit bulanan memuat lebih sedikit sajak dan lebih sedikit cerpen dibanding Horison. Jurnal *Kalam* memuat lebih banyak esai namun jauh lebih sedikit cerpen dan sajak, sementara jurnal bersangkutan terbit tiga bulan sekali. Maka wajarlah jika para sastrawan tidak bisa menunggu dan mengantre lama lalu mencari peluang di koran-koran yang selain jumlahnya jauh lebih banyak, terbitnya pun lebih kerap.

Kedua, selain memuat karya sastra, koran pun memuat berbagai berita dan persoalan umum, mulai dari kabar negara sampai kabar artis, dari opini dan artikel sampai iklan mini, dari lawakan KPU sampai lawakan Srimulat. Pembaca sastra koran sekaligus bisa membaca berbagai muatan koran bersangkutan, sementara pembaca berbagai berita dan muatan koran, bisa ikut membaca karya sastra pula. Setiap pembaca berita mendapat bonus sastra, dan setiap pembaca sastra mendapat bonus berita. Sastrawan yang menulis di koran memiliki kesadaran bahwa ia dibaca oleh khalayak yang lebih luas dan umum.

Ketiga, pada dasarnya masyarakat Indonesia

adalah masyarakat umum. Mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan umum, menanggapi persoalan-persoalan secara umum dan tergoda untuk bertahan pada persepsi yang umum terhadap berbagai gejala umum. Tidaklah mengherankan jika media massa khusus jarang dapat hidup dan bertahan dengan baik.

Tidaklah mengherankan pula mengapa para dokter -- baik dokter umum maupun spesialis -- tidak berlangganan dan menghidupi jurnal khusus kedokteran; ahli hukum tidak berpikir dan berdiskusi secara mendalam di jurnal hukum serta berlangganan dan menghidupinya. Maka jumlah fakultas maupun jurusan pendidikan sastra yang sivitas akademiknya demikian melimpah di seluruh Indonesia, tidak identik dengan pembaca majalah sastra. Kalangan ini -- yang jumlahnya banyak, apalagi jika ditambah dengan guru sastra di sekolah di seluruh Indonesia -- tidak menjadi bagian penting dan menentukan dalam seluruh diskusi dan kehidupan sastra Indonesia.

Dilihat dari sini, situasi sastra modern Indonesia sebenarnya belum beranjak jauh dari kelahirannya. Kelahiran sastra Indonesia modern dimotori oleh ahli hukum, dokter hewan, aktivis politik, wartawan dan kalangan yang tidak (belum) dididik oleh sekolah sastra. Setelah lebih setengah abad merdeka, tetap saja sastra dihidupi oleh ahli hukum, dokter hewan, wartawan dan hanya sesekali saja lulusan atau mahasiswa (apalagi dosen) jurusan Sastra. Ahhasil, sementara lulusan fakultas pertanian sudah menanam ribuan pohon, lulusan arsitektur telah membangun ribuan rumah, pemain PSSI sudah bertanding ratusan kali serta kemasukan ribuan gol; dan lulusan kedokteran telah menyuntik ribuan pasien, lulusan fakultas sastra masih berkutat jatuh bangun mengurusi cara menulis satu dua bahasa sastra dan membaca baku sastra tidak lebih dari jumlah keluarganya. Jadi majalah dan buku sastra masih akan lama untuk mendapat jumlah publik yang setara dengan kepantasan rasa budaya sebuah rubrik dengan penduduk 200 juta.

Di tengah situasi semacam ini, kepada koranlah sastrawan menyandarkan diri. Dan koran, dalam banyak hal telah menyediakan bahu yang lumayan gempal dan kokoh untuk jadi sandaran.

Namun cukuplah sastra sebuah negara hanya bersandar pada koran semata? Sayangnya tidak. Koran sebenarnya sebuah etalase dari sebuah tradisi dan khasanah sastra. Bagaimanapun setiap koran memiliki keterbatasan untuk menerima keberbagian eksperimentasi sastra. Tanpa majalah dan jurnal, tidak bisa dibayangkan lahirnya cerpen-cerpen master piece Danarto yang di antaranya diberi judul gambar jantung tertusuk panah. Tanpa majalah sastra, tidak bisa dibayangkan akan muncul cerpen-cerpen sebagaimana ditulis Budi Darma, baik semacam *Kritikus Adinan* maupun yang terkumpul dalam *Orang-orang Bloomington*. Jika cerpen-cerpen Budi Darma yang begitu detail mendeskripsikan perwatakan dan gejolak batin tokoh-tokohnya dalam puluhan halaman tersebut dimuat di koran maka akan memakan dua halaman penuh koran dan tak akan ada satu pun koran yang bersedia berlaku serupa itu.

Bagaimana pula kita membayangkan sebuah koran akan memuat sajak-sajak Sutardji Calzoum Bachri dalam periode O, Amuk, Kapak dan cerpen Hamsad Rangkuti *Sukri Membawa Pisau Belati*? Sejauh ini hanya *Pikiran Rakyat* lah satu-satunya koran yang begitu nekad berani memuat sajak Rendra *Disebabkan oleh Angin* yang memakan satu halaman koran. Namun kenekatan semacam itu tentunya tak mungkin dilakukan terus-menerus.

Jadi, dunia sastra tidaklah cukup hanya menyandarkan diri pada koran semata, sebagaimana ia tidak akan memadai jika hanya hidup dalam majalah sastra. Baik koran maupun majalah menempati posisi yang penting dan saling mengisi bagi perkembangan sastra di Indonesia.

Di majalah berbagai eksperimenasi sastra dapat dilakukan dengan leluasa. Di majalah dan jurnal pula kritik dan telaah sastra yang mendalam dapat dilakukan tanpa dibebani aktualitas dan keterbatasan halaman dan metode. Namun, di koranlah berbagai pencapaian eksperimenasi yang dilakukan sastrawan di majalah itu bisa mendapat pembesaran dan menemui publik yang lebih luas dan umum.

Maka, sastra hanya akan hidup dengan baik jika sekaligus bersandar pada media massa umum dan media massa khusus, sebagaimana sebuah rumah tanggal hanya akan hidup sejahtera jika anasir-anasirnya bisa melakukan kegiatan umum dan kegiatan khusus. Kegiatan khusus yang terus-menerus tanpa diimbangi kegiatan umum akan kehilangan landasannya yang kokoh bagi hidup dalam kewajaran umum; sementara kegiatan umum yang terus-menerus tanpa diimbangi kegiatan khusus akan menghilangkan kehangatan intimitas dalam pergaulan khusus sebagai landasan reflektif dan visioner bagi pemahaman terhadap yang umum. ***

Pikiran Rakyat, 9 Oktober 1999

Angkatan Sastra 2000

Oleh **Maman S Mahayana**

Komunitas Sastra Indonesia (KSI) bekerjasama dengan harian umum *Republika* dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) kembali menggelar diskusi bertajuk *Angkatan Sastra 2000* di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin Jakarta, Sabtu, 2 Oktober 1999. Diskusi tersebut merupakan kelanjutan diskusi tahun sebelumnya dengan tema serupa yang memunculkan pembicara dari kalangan sastrawan. Kali ini yang bicara adalah kalangan akademisi, yakni **Maman S. Mahayana, Sunu Wasono** (keduanya dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia), Hasan Ali (kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), dan Abdul Rozak Zaidan (wakil Indonesia di Majelis Sastra Asia Tenggara, anggota Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa). Berikut ini makalah yang dibawakan oleh Maman S. Mahayana.

Tulisan Pertama

Masalah angkatan dalam kesusastraan Indonesia, belakangan ini, ramai menjadi wacana perdebatan. Perlukah sebuah angkatan dilahirkan? Sesungguhnya, sebuah angkatan lahir dan bergulir dengan sendirinya mengikuti gejolak dan tuntutan zaman. Ia lahir dan mengada dari sebuah gerakan yang memperlihatkan adanya semangat, cita-cita, ideologi, elan atau pemberontakan yang relatif homogen. Homogenitas inilah yang mempertemukan berbagai gagasan dalam sebuah wadah besar yang lalu disebut sebagai angkatan.

Tengoklah semangat para sastrawan kita terdahulu. Pada zaman Balai Pustaka, misalnya, karya-karya yang dihasilkannya memperlihatkan kecenderungan semangat pemberontakan pada kultur etnis, Pujangga Baru pada dunia ideal untuk membangun kultur masyarakat Indonesia di masa datang; Angkatan '45 pada semangat revolusioner untuk membentuk kultur keindonesiaan dalam perhubungannya dengan kultur dunia; Angkatan '66 pada semangat protes atas tirani kekuasaan; sastrawan tahun 70-an pada masalah profetis melalui berbagai wacana eksperimental, dan sastrawan dekade ini, tentu dengan persoalannya sendiri. Demikianlah, kelahiran sebuah "angkatan" sangat ditentukan oleh alasan yang melatarbelakanginya, sekaligus juga dengan visi yang melatardepaninya.

Protes penjadian sebuah angkatan, sesungguhnya tidaklah lahir lewat desakan banyak pihak, melainkan dari gagasan-gagasan sastrawannya sendiri untuk lepas dari kejenuhan kultural. Ada persoalan kultural yang mengganjal yang terjadi pada zamannya. Inilah alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Lalu dengan alasan itu, ada harapan-harapan untuk lepas dari ganjalan itu dan sekalian menawarkan sesuatu yang mungkin dapat mencairkan persoalan kultural itu. Ia menyampaikan visi tertentu. Inilah alasan-alasan yang melatardepaninya.

Mengingat persoalannya sudah menjadi kegelisahan kolektif dan dilakukan oleh sebuah gelombang semangat bersama, elan yang sama, maka ia menjadi sebuah gerakan (*movement*). Jika gerakan ini diberi semacam label, apakah label itu tepat jika disebut angkatan? Istilah "angkatan" itu sendiri sesungguhnya masih perlu memperoleh penjelasan; landasan kultural apa sebuah gerakan disebut angkatan. Apakah ia juga menampung gagasan lain yang mungkin sangat beragam. Oleh karena itu, istilah angkatan dalam konteks ini, kiranya masih perlu diperdebatkan!

Bagaimanakah dengan Angkatan Sastra 2000? Sudahkah ia mempunyai kege-

lisahan bersama atas ganjalan-ganjalan kultural yang terjadi pada zamannya? Bagaimana pula elan yang dimilikinya? Adakah ia menawarkan visi kultural dalam menatap masa depan masyarakatnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada tiga persoalan signifikan yang perlu kita cermati. Pertama, soal istilah angkatan itu sendiri. Kedua, soal penafikan karya-karya yang dimuat di surat kabar dan majalah, dan ketiga soal penamaan Angkatan Sastra 2000 itu sendiri. Mari kita periksa duduk soalnya satu per satu.

Angkatan atau Periode?

Sesungguhnya persoalan penamaan angkatan dan periode bagi pembabakan sejarah kesusastraan Indonesia, pernah disinggung Ajip Rosidi. Menurutnya, istilah angkatan dalam sastra Indonesia telah menimbulkan berbagai kekacauan. *"Dalam suatu periode mungkin saja kita menemukan aktivitas lebih dari satu golongan pengarang yang mempunyai konsepsi yang berbeda-beda; sedangkan munculnya periode baru tidak pula usah berarti munculnya angkatan baru dengan konsepsi yang baru."* 1)

Meski alasan yang dikemukakan Ajip tidak cukup meyakinkan, setidak-tidaknya gagasannya patut dipertimbangkan kembali. Istilah angkatan lebih dekat kepada pengertian generasi yang memperlihatkan adanya semangat, cita-cita, elan atau ciri tertentu. Homogenitas menjadi salah satu ciri penting dalam sebuah angkatan. Untuk pembabakan sejarah kesusastraan, niscaya istilah angkatan dalam pengertian tersebut sangat mungkin malah mendatangkan persoalan. Dengan demikian, istilah angkatan untuk pembabakan sejarah sastra Indonesia sejak awal kelahirannya sampai sekarang, sama sekali tidak pas.

Berbeda dengan istilah angkatan, istilah periode lebih netral dan melingkupi rentang waktu relatif panjang. Satu periode dapat saja melingkupi masa lebih dari satu dasawarsa. Tetapi persoalannya tidak sekadar menyangkut soal rentang waktu, melainkan juga semangat, cita-cita, elan atau ciri-ciri yang lebih beragam. Periode bisa mengacu pada nama penguasa, nama sastrawan besar, nama peristiwa atau lembaga penting atau suatu masa yang panjang. Selain itu, periode tidak mengacu pada satu konsepsi seni tertentu, mengingat di dalam satu periode, mungkin saja lahir berbagai kecenderungan.

Meskipun periode bersifat statis karena terikat oleh ruang dan waktu, ia lebih dapat menampung kemungkinan adanya keberagaman pemikiran atau bahkan juga aliran. Dengan demikian, penamaan periode (atau periodesasi) dalam konteks sejarah kesusastraan Indonesia lebih representatif dibandingkan angkatan. Persoalannya akan menjadi lebih jelas manakala kita mencoba mencermati berbagai persoalan dalam catatan sejarah kesusastraan Indonesia.

Periode Balai Pustaka

Pembabakan yang dilakukan Ajip Rosidi menyebutkan, periode awal kesusastraan Indonesia tahun 1900-1933, di dalamnya termasuk sastrawan-sastrawan Balai Pustaka2). Namun, dalam bukunya yang lain3), Ajip berpendapat, bahwa kesusastraan Indonesia lahir sekitar tahun 1920. Sementara Zuber Usman, eksplisit mengatakan Zaman Balai Pustaka (1908) sebagai yang mengawali kesusastraan Indonesia modern4). Sedangkan A Teeuw, meski tidak secara tegas menyebutkan Balai Pustaka, ia menunjuk angka tahun 1920 sebagai lahirnya kesusastraan Indonesia modern.5)

Benarkah kesusastraan Indonesia modern dilahirkan pada (sekitar) tahun itu? Menurut Teeuw, *"Pada ketika itulah para pemuda Indonesia untuk pertama kali mulai menyatakan perasaan dan ide ... yang pada pokoknya menyimpang dari bentuk-bentuk sastra Melayu, Jawa, dan sastra lainnya yang lebih tua...."* Sementara alasan Ajip menunjuk tahun itu lantaran pada saat itulah para pemuda Indonesia (Yamin, Hatta, dll) mengumumkan sajak-sajak mereka yang bercorak kebangsaan.

Dapat dipahami kedua alasan itu, mengingat keduanya bertumpu pada karya yang dipublikasikan sebagai buku. Akibatnya, karya sastra di luar itu, ditiadakan. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: Mengapa karya-karya yang bertebaran di media massa tidak dipandang sebelah mata? Apakah alasan pemakaian ba-

hasa Melayu pasar menjadi salah satu faktor penting untuk menyebut sastra di luar Balai Pustaka sebagai bukan sastra? Inilah bahayanya jika penentuan sastra dan bukan sastra hanya bertumpu pada publikasi buku. Ia tidak hanya menafikan dinamika sosiologis, tetapi juga berdampak pada peniadaan banyak nama yang mestinya tercatat sebagai bagian dalam perjalanan kesusastraan Indonesia.

Menjelang berakhir abad ke-19 dan awal memasuki abad ke-20, sedikitnya ada belasan surat kabar dan majalah berbahasa Melayu. Beberapa di antaranya, memuat juga cerita bersambung, cerpen, dan puisi. Majalah *Sahabas Baik* (1891) yang terbit di Betawi, misalnya, mencantumkan subjudulnya seperti ini: *"Hikayat, tjerita, dongeng, sjair, pantoen, dan lain-lain daripada itu."* Surat kabar *Selompret Melajoe* (terbit di Semarang, 1860-1910) malah sering sekali memuat surat-surat pembacanya dalam bentuk puisi. Cara demikian, ternyata juga kita jumpai dalam majalah *Poetri Hindia* (terbit di Bogor, 1908) dan beberapa Majalah *Bintang Hindia* (1903) dan *Wanita Swara* (terbit di Kediri, 1912), harusnya dikecualikan, karena ia tidak memakai bahasa Melayu pasar.6)

Jelas, Teeuw dan Ajip Rosidi secara apriori telah menyimpulkan kelahiran kesusastraan Indonesia modern hanya berdasarkan karya-karya yang dipublikasikan sebagai buku. Karya yang terbit dalam majalah dan surat kabar telah ditenggelamkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, pelacakan lebih lanjut mengenai sumbangan media massa itu bagi kesusastraan Indonesia, agaknya merupakan tuntutan yang mendesak. Dengan demikian, pemahaman mengenai Periode Balai Pustaka, mesti dimaknai sebagai masa menjelang dan awal berdirinya lembaga penerbitan itu?7)

Jika dikatakan bahwa sastrawan Balai Pustaka memperlihatkan kecenderungan semangat pemberontakan pada kultur-etnis, maka sastrawan di luar Balai Pustaka memperlihatkan semangat yang sangat beragam. Ada yang mengangkat persoalan emansipasi, edukasi bagi penduduk pribumi, bahkan ada juga yang menunjukkan elan kebangsaan. Jadi, jika periode Balai Pustaka hanya diwakili oleh sastrawan Balai Pustaka, maka dinamika sosiologis yang terjadi di luar BAlai Pustaka, hilang begitu saja. Padahal, dari kegandrungan mereka mengirimkan tulisannya ke media-media massa itu, tampak bahwa di antaranya ada yang justru memperlihatkan mekarnya embrio semangat kebangsaan.

Periode Pujangga Baru

Popularitas Pujangga Baru bermula dari usaha Takdir, Armijin, Sanusi, dan Amir Hamzah untuk menerbitkan majalah yang kemudian bernama Pujangga Baru. Lewat majalah inilah, para sastrawan di pelosok tanah air —termasuk dari Semenanjung Melayu— mengirimkan karya-karyanya. Beberapa dari kaum terpelajar waktu itu, juga menulis di majalah itu. *Polemik Kebudayaan* yang dikumpulkan Achdiat Karta Mihardja merupakan bukti sumbangan majalah itu bagi perkembangan kebudayaan dan kesusastraan kita.

Begitu populernya majalah itu, sehingga para pengarang yang berkarya pada masa itu, dikatakan sebagai sastrawan Pujangga Baru. Sesungguhnya, masih banyak majalah lain yang juga punya kontribusi seperti itu. Satu di antaranya adalah majalah *Pedoman Masjarakat;* sebuah majalah mingguan terbitan Medan (1935-1942). Di antara para pengelola majalah itu, tercatat Helmi Yunan Nasution dan Hamka. Mengapa majalah ini tidak pernah disinggung para pengamat sastra Indonesia? Secara kuantitas, majalah ini jelas lebih unggul, karena ia terbit mingguan. Kontribusinya bagi sastra Indonesia, juga tidak kecil. Tercatat, nama Aoh K Hadimadja, Muhammad Dimyati, lahir lewat majalah ini. Karya-karya Hamka sendiri, seperti *Tenggelamnya Kapal van der Wijck, Dijemput Mamaknja, dan Di Bawah Lindungan Kabah,* pernah menjadi cerita bersambung majalah ini. Selain itu, majalah ini juga tercatat pernah menyelenggarakan lomba penulisan roman.

Pada periode ini, jumlah majalah dan surat kabar yang terbit waktu itu, jauh lebih banyak lagi. Bahkan ada majalah yang khusus memuat cerpen dan cerita roman. Sesungguhnya, majalah seperti itu sudah ada sejak tahun 1923, seperti majalah *Tjerita Melajoe* (Weltevreden, 1923), *Tjerita Pilihan* (Bandung, 1924), *Tjerita Baroe* (Padang, 1924), *Tjerita Novel* (Bandung, 1930), dan *Tjerita Roman* (Malang, 1930). Meskipun beberapa di antara majalah itu lebih menyerupai format sebuah buku, penyebarannya kepada masyarakat pembaca yang dilakukan dengan cara berlangganan, menunjukkan bahwa kehidupan kesusastraan Indonesia masa itu, tidaklah sekadar karya-karya terbitan Balai Pustaka dan Pujangga Baru semata-mata, melainkan juga karya yang dimuat majalah-majalah itu.

Demikian, menafikan sastra yang dimuat di majalah dan koran, sama halnya dengan menenggelamkan sebagian dari khazanah kesusastraan kita. Hal yang sa-

ma juga terjadi pada periode zaman Jepang dan terus berlanjut sampai kini.

Dalam sistem sastra, majalah atau surat kabar merupakan bagian penting dalam proses reproduksi karya sastra. Lewat majalah atau surat kabar itulah, karya sastra direproduksi dan sekaligus didistribusikan. Yang juga perlu dicatat bagi kepentingan sejarah sastra adalah karya-karya yang bertebaran dan tercecer itu. Malahan, lantaran karya itu dimuat di media massa, maka beberapa pembaca tidak jarang menuliskan tanggapannya, baik dalam bentuk surat pembaca, maupun dalam bentuk esai. Dengan demikian, pelacakan data kesastraan dalam majalah dan surat kabar itu juga sekaligus untuk menangkap dinamika yang terjadi pada masyarakat pembacanya.

Secara keseluruhan, periode Pujangga Baru memperlihatkan adanya kesadaran pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Selain itu, persoalan keindonesiaan, tampak tidak hanya dari surat kabar atau majalah yang berlandaskan agama (Islam dan Kristen), tetapi juga dari surat kabar atau majalah etnis daerah dan Tionghoa. Dengan begitu, semangat sastrawan Pujangga Baru pada dunia ideal untuk membangun kultur masyarakat Indonesia di masa datang, sesungguhnya dalam konteks membangun kultur masyarakat Indonesia yang merdeka. Dan elan kemerdekaan ini, justru muncul dalam surat kabar dan majalah yang terbit ketika itu.

Jika ditarik garis dari Periode Balai Pustaka sampai Angkatan '45, ada kesadaran kolektif yang menjadi ciri para sastrawan masa itu, yaitu kesadaran pada kebutuhan tradisi pemikiran, kecendekiaan, dan ilmu, sebagaimana dikatakan Budi Darma8). Kesadaran ini pun, justru dalam kerangka elan nasionalisme dan cita-cita membangun kultur masyarakat Indonesia yang merdeka.

Periode Angkatan '45

Konsepsi seni Angkatan '45 dapat kita tangkap pada pernyataan "Surat Kepercayaan Gelanggang". Kalimat pertamanya yang berbunyi: *"Kami adalah ahli waris jang sah dari kebudajaan dunia dan kebudajaan ini kami teruskan dengan tjara kami sendiri,"* mengisyaratkan terbukanya angkatan ini menerima pengaruh asing dan kemudian merumuskannya sendiri berdasarkan keberagaman kultur keindonesiaan. *"Kebudajaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara jang disebabkan suara-suara jang dilontarkan dari segala sudut dunia dan jang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri".*

Secara umum, semangat para sastrawan Angkatan '45 memang tampak homogen, meski sejumlah perbedaan tetap mereka hargai. Konsepsi seni Chairil Anwar yang menekankan pada harga diri manusia *(human-dignity)*, misalnya, secara substansial tidaklah berbeda dengan konsepsi seni Affandi: kemanusiaan *(humanism)*9). Sesungguhnya, harga diri manusia —Chairil— dan humanisme —Affandi— berorientasi pada arah yang sama, yaitu kesusastraan Barat. Sebagaimana dinyatakan Budi Darma, *"Humanisme universal dalam manifesto "Surat Kepercayaan Gelanggang" tidak lain mengacu pada pemikiran Barat. Karena pemikiran Barat pada dasarnya menguasai seluruh dunia, maka humanisme Barat adalah juga humanisme universal."*10)

Dalam konteks pembicaraan sejarah kesusastraan Indonesia, penamaan Angkatan '45, agaknya yang paling pas mewakili suasana dan dinamika zamannya. Tetapi kemudian menjadi persoalan jika kita menariknya sampai ke tahun 1965. Bahwa antara tahun 1945 sampai Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, akhir 1949, kecenderungan pada semangat dan cita-cita yang sama, masih tampak kental, tetapi kemudian pecah selepas LEKRA berdiri, 17 Agustus 1950, dan menyatakan sikapnya sebagaimana terungkap dalam Mukaddimah-nya. ■

Republika, 10 Oktober 1999

Sajak-Sajak Cinta Si "Burung Merak" Rendra



Setelah medium audio, Rendra si "Burung Merak" mengarsipkan karya-karyanya puisinya dalam VCD bertajuk "Sajak-sajak Cinta Rendra - Wajah Dunia Yang Pertama". - (Foto: Ist)

Jakarta, (HIM).

MENGAKU sudah tidak punya waktu lagu untuk mentas di Jakarta, karena terlalu banyaknya jadwal pertunjukan di daerah, WS Rendra, akhirnya merampungkan proses kreatif berkesenianmya dengan meluncurkan album VCD "Sajak-Sajak Cinta Rendra".

Budayawan yang lahir 64 tahun lalu di Jogyakarta ini membawakan sajak-sajaknya yang bertajuk "Sajak-sajak Cinta Rendra - Wajah Dunia Yang Pertama". Dalam album VCD ini, Si Burung Merak Rendra membawakan karya-karyanya seperti, "Kupanggil Namamu", "Sajak Seorang Tua Untuk Istrinya", "Wajah Dunia Yang Pertama", "Kelelawar", "Sajak Cinta Ditulis Pada Usia 57", "Hai, Ma", "Nyanyian Fatimah Untuk Suto", "Nyanyian Suto Untuk Fatimah", dan "Wanitaku".

Dalam "Nyanyian Fatimah Untuk Suto", dan "Nyanyian Suto Untuk Fatimah", Rendra berduet membawakan puisinya dengan Ken Zuraida, istrinya. Sedangkan dalam "Sajak Joki Tobing Untuk Widuri" dan "Sajak Widuri Untuk Tobing", Rendra yang juga pernah membintangi film berjudul "Alkautsar" ini berduet dengan Lies Hadi.

Rendra bertutur, bila album sajak-sajaknya yang di-VCD-kan tercipta atas desakan lembaga dewan bahasa yang diperuntukkan untuk murid-murid sebagai apresiasi seni. "Di desa-desa apresiasi seni, khususnya puisi, sangat tinggi dibandingkan dengan di kota besar. Dan saya sangat terharu sekali menyaksikan ini," begitu kata Rendra mengenang pengalamannya.

Di sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu, masih kata Rendra, ia diminta untuk membawakan puisi-puisi karyanya. Padahal ketika itu ia sedang dilarang oleh Pemerintah Orba dalam berkesenian. Masyarakat tidak mau tahu dan mereka akhirnya memberitahukan Dandim setempat untuk membujuk Rendra berpuisi.

"Saya katakan kepada pejabat tersebut apakah ia tidak takut dengan jabatannya itu bila dirinya berpuisi nanti? Apa jawabannya? Saya tidak tahu ada larangan pentas, karena tidak ada sepotong kertas pun yang saya terima," begitu Rendra menirukan percakapannya dulu dengan seorang penguasa wilayah kecil di ujung Jakarta sekitar tahun 70-an. - **(Gus)**

Harian Indonesia, 10 Oktober 1999

■ AJIP ROSIDI

Dari Jatiwangi ke OSAKA

Bersastra sejak usia 14 tahun, kemudian memilih pembinaan bahasa dan sastra. Mengaku "kejeblos", tapi menulis lebih dari 100 karya sastra.

RANCAGE adalah kosakata Sunda yang berarti —kurang lebih— kreatif atau cekatan. Meski berasal dari bahasa daerah, kata itu boleh dibilang punya "misi nasional". Rancage kini adalah nama hadiah sastra yang diberikan tiap tahun kepada para sastrawan Sunda, Jawa, dan Bali. Penggagasnya, Ajip Rosidi, berharap kelak Hadiah Sastra Rancage bisa pula diberikan kepada tokoh sastra modern dari daerah lainnya di Indonesia.

Tahun ini, penganugerahan Hadiah Sastra Rancage diselenggarakan di Denpasar, Bali, medio Agustus lalu. Pemenangnya: Darpan Ariawinangun dan Duduh Durahman (sastra Sunda), Suharmono Kasiyun dan Sulistyautami Iesmaniasita (Jawa), serta I Komang Berata dan Profesor INgurah Bagus (Bali). Sebagai unsur kekayaan budaya bangsa, kata Ajip, kelestarian sastra daerah harus diperhatikan. "Kalau tidak, sastra daerah mungkin akan tinggal bahasa lisan," katanya.

Hadiah Rancage dicetuskan pada 1989. Mulanya hanya untuk para pengarang Sunda, sebagai wujud perhatian Ajip pada sastra daerahnya. Empat tahun kemudian, Ajip melembagakan penghargaan rutin ini dengan mendirikan Yayasan Rancage. Dan sejak 1994, cakupannya diperluas dengan memberikan hadiah itu kepada pengarang dan tokoh sastra Jawa. Hadiah uangnya, yang semula cuma Rp 1 juta, ditingkatkan menjadi Rp 2 juta untuk tiap pemenang. Tak besar memang.

Mulai tahun lalu, Rancage juga diberikan kepada sastrawan Bali, dengan jumlah hadiah yang sudah "disesuaikan" menjadi Rp 5 juta. "Alhamdulillah, tahun ini Hadiah Rancage sudah yang ke-11," kata Ajip kepada Kholis Bahtiar Bakri dari GATRA. Sebelumnya, kata Ajip, tak pernah ada hadiah sastra yang tahan lama.

Sulung dari dua bersaudara, Ajip lahir di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, 1938. Sejak usia 14 tahun, saat duduk di

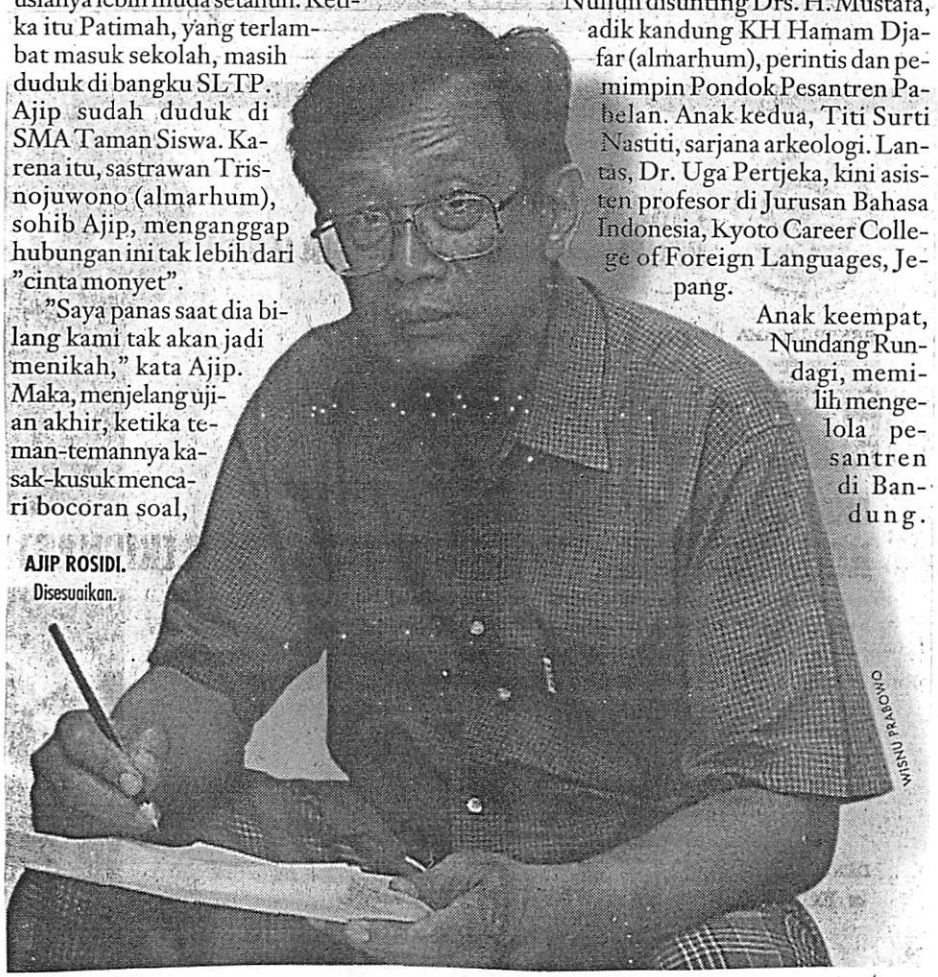
bangku SMP Negeri 8 Jakarta, Ajip sudah jago mengarang. Tulisannya berupa sajak, cerita pendek, roman, dan drama bertebaran dalam bahasa Sunda dan Indonesia di majalah-majalah terkemuka. Antara lain *Mimbar Indonesia*, *Zenith*, *Kisah*, *Siasat*, *Konfrontasi*, *Budaya*, dan *Membimbing*. Buku pertamanya, *Tahun-tahun Kematian*, sebuah kumpulan cerita pendek, terbit saat usia Ajip 17 tahun.

Pada usia itu pulalah ia memacari Patimah, dara kelahiran Tasikmalaya, yang usianya lebih muda setahun. Ketika itu Patimah, yang terlambat masuk sekolah, masih duduk di bangku SLTP. Ajip sudah duduk di SMA Taman Siswa. Karena itu, sastrawan Trisnojuwono (almarhum), sohib Ajip, menganggap hubungan ini tak lebih dari "cinta monyet".

"Saya panas saat dia bilang kami tak akan jadi menikah," kata Ajip. Maka, menjelang ujian akhir, ketika teman-temannya kasak-kusuk mencari bocoran soal, Ajip memilih keluar. Ia memutuskan untuk kawin! Tapi, pada 1955 itu, dia memang sudah punya penghasilan. Sebagai redaktur Majalah *Prosa* dan *Suluh Pelajar*, ia mengantongi Rp 500 sebulan. Lumayan untuk ukuran masa itu. "Lebih besar dari gaji teman saya yang letnan AURI," tutur Ajip.

Perkawinan mereka dikaruniai tiga putri dan tiga putra. Putri sulung, Nunun Nuki Aminten, 43 tahun, kini menjadi kepala desa di Pabelan, Muntilan, Jawa Tengah. Nunun disunting Drs. H. Mustafa, adik kandung KH Hamam Djafar (almarhum), perintis dan pemimpin Pondok Pesantren Pabelan. Anak kedua, Titi Surti Nastiti, sarjana arkeologi. Lantas, Dr. Uga Pertjeka, kini asisten profesor di Jurusan Bahasa Indonesia, Kyoto Career College of Foreign Languages, Jepang.

Anak keempat, Nundang Rundagi, memilih mengelola pesantren di Bandung.



AJIP ROSIDI.
Disesuaikan.

WISNU PRABOWO

Adik Nundang, Rangin Sembada, menjadi konsultan bidang ketenagakerjaan di Jepang. Sedangkan si bungsu, Titis Nitiswari, 34 tahun, masih *sorangan* dan saat ini dosen di Universitas Osaka, Jepang. Adik kandung Ajip, Profesor Ayatrohaedi, beken sebagai guru besar sastra di Universitas Indonesia.

Setelah menikah, pasangan Ajip dan Patimah mengontrak rumah di daerah Kramat Pulo, Jakarta Pusat. Ajip kemudian bekerja sebagai redaktur pada Penerbit Balai Pustaka. Sastrawan belia ini aktif pula di Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional. Empat tahun setelah menikah, ketika penghasilannya mulai berkurang, Ajip membawa istrinya pulang kampung ke Jatiwangi.

Di sana dia mendirikan perusahaan Tjupumanik, yang menerbitkan buku-buku bahasa Sunda. Enam tahun kemudian, mereka pindah ke Bandung. Di kota sejuk ini, Ajip menjadi dosen luar biasa di Universitas Padjadjaran (Unpad). Bersama kawan-kawannya, ia juga mengelola Penerbit Kiwari dan Majalah *Mingguan Sunda*. Hubungan dengan rekan-rekannya di Jakarta tetap terbina.

Pada 1971, Ajip mendirikan Penerbit Dunia Pustaka Jaya. Ajip juga termasuk salah satu penggagas Dewan Kesenian Jakarta, dan pada 1972 terpilih menjadi ketuanya. Tahun berikutnya, dia ditunjuk menjadi Ketua Ikatan Penerbit Indonesia. Karena seabrek tugas itu, pada 1975, Ajip boyong kembali ke Ibu Kota, dan tinggal di Kompleks Batan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hingga sekarang.

Di rumah yang cukup besar itu, ia mengoleksi banyak lukisan karya perupa tenar, seperti Affandi, Hendra, Popo Iskandar, dan Nashar. Ia lalu sempat diangkat sebagai staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, anggota Dewan Film Nasional, dan anggota Dewan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional. Pada 1979, Ajip turut membidani berdirinya The Japan Foundation di Jakarta.

Kebetulan, Pustaka Jaya, miliknya, sering mencetak terjemahan buku-buku Jepang. Ajip lantas diminta menjadi penghubung dengan pihak-pihak yang berkompeten di Jakarta. Atas "jasanya" itu, setahun kemudian, Japan Foundation mengundang Ajip ke Jepang. Di Negeri Sakura itu, ternyata Ajip menemukan keberuntungannya.

Dia dipercaya mengajar bahasa dan budaya Indonesia di beberapa perguruan tinggi. Sejak 1981 hingga sekarang, Ajip menjadi *visiting professor* di Universitas Osaka. Ia pernah pula menjadi guru besar luar biasa pada Universitas Tenri, selama setahun. Pada 1983-1996, ia menjabat guru besar luar biasa di Universitas Kyoto.

Rumah pribadi Ajip di Hashimotocho, Abeno-ku, Osaka, dibangun dengan gaya khas Jepang. Rumah panggung bertingkat dua, seluas 80 meter persegi, itu berdinding kayu. Pekarangannya ditumbuhi bambu Jepang dan pohon biwa. Beberapa rekan Ajip, seperti Rendra, Kuntowijoyo, Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Umar Kayam, dan mendiang Arifin C. Noer, pernah singgah di sana. Selama di Jepang, Ajip sempat menyelesaikan buku *Mengenal Jepang* (1981) dan roman *Anak Tanah Air* (1985).

Sampai sekarang, Ajip sudah menghasilkan lebih dari 100 karya sastra, sebagian di antaranya berbahasa Sunda. Antara lain, 10 kumpulan sajak, lima kumpulan cerita pendek, 22 esai dan kritik, dua roman, dua drama, delapan cerita rakyat, enam cerita anak-anak, dan tujuh bunga rampai. Ajip mengaku memilih jadi pengarang karena terpengaruh pemikiran Eropa abad ke-19. Saat itu, peran sastrawan sangat besar. [illegible] pendapat mereka mengenai berbagai isu selalu ditunggu dan didengarkan," katanya. Belakangan, dia mengaku "kejeblos", karena di Indonesia, yang budaya membacanya masih rendah, peran pengarang ternyata kurang penting. Lantas, Ajip merasa dihadapkan pada dua pilihan: mun-

dur dari sastra, atau membina apresiasi sastra masyarakat. Dia memilih yang terakhir. Sejak 1960-an, Ajip mulai menulis buku tentang pembinaan bahasa dan sastra.

Tak ayal lagi, buku-bukunya tentang telaah sastra dan antologi karya sastra Indonesia dan Sunda digunakan sebagai buku pegangan di berbagai sekolah dan universitas. Sejak 1967, Ajip sempat menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Tanah Air. Pada Kongres Kebudayaan 1957 dan 1960, dia mendapat Hadiah Sastra Nasional. Hadiah Seni diterimanya dari pemerintah pada 1993. Pemerintah Australia pernah pula menganugerahkan Cultural Award, pada 1975.

Unpad pernah berniat memberinya gelar *doctor honoris causa*. Tapi, sebelum terwujud, muncul aturan pemerintah yang hanya membolehkan pemberian gelar itu kepada orang yang, setidaknya, bergelar sarjana. Ajip tak kecewa. "Biarlah, toh banyak pahlawan yang tak dikubur di makam pahlawan. Sebaliknya, ada koruptor yang malah dimakamkan di sana," Ajip bertamsil. "Saya lebih suka pada pertanyaan mengapa Ajip tak mendapat gelar daripada mengapa Ajip mendapat gelar." ■

Endang Sukendar

Gatra, 11 Oktober 1999

ISTILAH ASING:
Biar Salah Asal Gagah

PENGGUNAAN istilah asing belakangan ini kian merajalela lagi. Bukan pada nama perusahaan atau toko, karena sudah ada larangannya, tapi dalam bicara. Misalnya, paling sering dimamah-biak adalah istilah *substansi*—sadapan dari bahasa Inggris *substance*. Padahal dalam bahasa Indonesia ada padanannya. Yaitu, inti atau pokok soal atau hakikat.

Istilah *pemulihan* dalam bahasa Indonesia, biar keren lalu disebut *recovery*. Begitu pula untuk *perundingan*, supaya terdengar gagah disebutlah *negosiasi*. Hanya di bibir reporter *TVRI* istilah ini selalu disebut sebagai *nègoisasi*—berulang kali. Tak ada yang mengoreksi rupanya di sana.

Khusus untuk istilah substansi, rekoveri, negosiasi, untung tidak meleset dari makna aslinya. Lain halnya dengan istilah *opsi*, yang sering disampirkan dalam kasus Timor Timur. Yakni berkaitan dengan pilihan mau merdeka atau menerima status otonomi. Dalam urusan ini istilah opsi jelas kelirul Yang tepat adalah: alternatif.

Opsi atau *option*, kata orang Inggris, memang berarti pilihan. Cuma harus dipahami, dalam pengertian *option* terdapat banyak peluang memilih. Bukan hanya satu antara dua. Contoh sederhana, siang ini kita berencana makan di restoran. Biar keren, ada yang *nyeletuk*: "Kalian punya opsi menentukan restorannya."

Nah, dalam kasus Timor Timur, pilihannya cuma satu antara dua; mau tetap di dalam republik ini atau tidak. Pilihan untuk situasi begini istilah asingnya ya *alternative*, bukan *option*.

Khazanah kata dalam bahasa Indonesia tidaklah miskin-miskin amat. Untuk apa bergaya memulung orang punya, dan salah kaprah pula?

EKO SULISTYO
Bintaro Jaya Sektor VI
Jakarta Selatan

SINETRON INDONESIA:
Bergurulah ke India

ORANG boleh bilang, film India itu membosankan dan bertele-tele. Tapi nyatanya hampir tiap pagi di layar televisi ditayangkan film India, bukan hanya oleh satu stasiun swasta. Ini tentu indikasi pemirsanya banyak. Apalagi tema ceritanya menelanjangi kelancungan para pejabat, mulai dari polisi sampai menteri.

Korupsi dan kesewenang-wenangan orang yang sedang berkuasa, rupanya juga subur di India. Hanya saja, di India cerita itu diangkat ke layar putih. Sedangkan di Indonesia belum ada tema film seperti itu. Kita baru tahap perbincangan, dan lebih sering bisik-bisik. Baru belakangan ini masalah korupsi muncul di berbagai media cetak dan elektronik. Kapan ya, orang kita mampu bikin film yang membongkar kebusukan di tengah elite kekuasaan itu?

SHOLIKAH
Bekasi Barat
Bekasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM:
Arena Dagelan Politik

SEBAGAI rakyat awam saya mengurut dada melihat cara kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti yang tersurat dan tersirat dalam media

massa akhir-akhir ini. Begitu banyak trik dan dagelan politik yang diperagakan tanpa malu-malu. Begitu banyak tindakan yang tidak mencermikan mutu seorang politikus.

Bahkan Rudini pun tak luput dari permainan kepentingan pribadi dan golongan yang begitu plin-plan. Sangat kentara bahwa sang jenderal hanyalah kancil kecil yang begitu mudah disetir para petualang politik picisan. Berapa juta sih suara rakyat yang mereka bawa? Sampai-sampai suara partai yang didukung mayoritas anak bangsa ini perlu dikalahkan? Itukah demokrasi?

Kalau demokrasi hanyalah silat lidah, buat apa pemilihan umum? Rakyat jelata yang tak memimpin partai pun bisa mencari kelemahan undang-undang. Tak perlu buang-buang biaya untuk pemilihan umum yang telah mengorbankan banyak nyawa dan harta. Lelucon yang diperagakan oknum yang mengaku pemimpin masa depan itu betul-betul menjemukan.

Rasanya masa-masa sekarang tidaklah lebih indah dari masa otoriter Orde Baru. Memulai memang selalu lebih sulit. Namun kami doakan semoga Tuan-tuan yang tidak dipercayai rakyat, cepat-cepat memiliki rasa malu pada diri sendiri. Supaya cibiran dan dengusan hidung pelan-pelan berkurang dari wajah Indonesia yang telah merdeka 54 tahun.

Dirgahayu Indonesia, bercerminlah kita semua. Jangan sampai politikus hanya seperti tikus.

SURIANTO
Rantau Kujang RT V/II—232
Jenamas
Barito Selatan

Gatra, 11 Oktober 1999

Pasar Tari Kontemporer 1999,

R. 12110 - 99

Intervensi Sastra ke Dalam Tari

Suatu hal menarik. Begitulah yang terjadi dalam kegiatan "Pasar Tari Kontemporer 1999" (PTK). Pada kegiatan seni tersebut, boleh dibilang telah terjadi intervensi sastra ke dalam tari. Sebab, sebagian besar karya koreografi yang digelar pada malam pertama dan kedua PTK di Gedung Teater Arena Dang Merdu, Pekanbaru, Kamis dan Jumat pekan lalu, banyak menampilkan teks sastra di dalamnya.

Fenomena di atas, antara lain tampak pada tari *Senandung Kematian di Akhir Abad* karya Tom Ibnur (Jambi), *Sirih Besar II* karya Iwan Irawan Permadi (Pekanbaru) dan *From The Timepiece* karya Eko Supriyanto (Solo).

Mengangkat tragedi kematian dan kekejaman kemanusiaan yang terjadi di Jakarta, Ambon, Aceh, Timtim dan berbagai belahan dunia lainnya, Tom Ibnur tidak hanya mengandalkan gerak. Tapi, juga memanfaatkan puisi yang dibacakan di tengah-tengah pertunjukan oleh salah seorang penarinya — Didin Siroz. Petikan puisi tersebut adalah:

Kepan sayap burung hitam
Telah menerbangkan aku, jauh
Ke dalam rongga kegelapan

Melayang-layang di atas ribuan mayat
Yang menggigil ketakutan
Melayang-layang di atas persujudan
Yang sepi peribadatan
Melayang-layang di atas jutaan anak
Yang kehilangan bapaknya
Melayang-layang di kota mati
Yang hangus terbakar...

Sejak di atas seperti mencoba ikut memperjelas ide dan cerita yang dikemas dalam gerak tari kontemporer yang dimainkan Tom Ibnur sendiri. Sementara sajak tersebut dibacakan, ia amenari berputar-putar seperti gasing dengan kain merah putih di tangan, ditingkahi jeritan suling dan dendang *randai* yang menyayat-nyayat perasaan. Sementara, delapan penabuh rebana di latar belakang, menunduk dalam ekspresi duka.

Ketika tarian sampai pada puncaknya, jeritan seruling dan senandung duka sampai pada titik yang paling menyayat, suara *istighfar* berton catan dari mulut Tom, menjadi ekspresi penyesalan atau keprihatinan yang dalam dan luar biasa. "Tari ini memang ungkapan rasa keprihatinan yang dalam atas berbagai tragedi dan kekejaman yang menimpa manusia pada akhir abad ini," kata Tom Ibnur usai pertunjukan.

Dan, seperti beberapa karya Tom lain yang diberi sentuhan religius, ekspresi keprihatinan itu dipertajam dengan baris-baris puisi: *Tuhan, adalah Engkau menemani/Dalam ruku dan sujudku/Kerana tuak rindu yang kureguk hari ini/Nanah melulu.*

Iwan Irawan Permadi (Pekanbaru) juga menghadirkan teks-teks verbal ke dalam karya tarinya, *Sirih Besar II*. Tari ini mengangkat mitos *Sirih Besar*, salah satu alat kebesaran (*regalia*) kerajaan Melayu Riau-Lingga. Menurut adat setempat, seorang raja akan sah keberadaannya jika memegang *regalia* tersebut. Di tengah pertunjukan masuk kata-kata verbal, "Kalian mau dimakan sumpah! Hai, budak tak tahu diri...!"

Koreografer Eko Supriyanto (Solo) dalam nomor *From The Timepiece* yang tampak matang dalama mengemas tema ke dalam gerak tari, juga masih memerlukan narasi putus untuk mengantarkan tarinya. Tari yang ia persembahkan untuk kakeknya ini mengangkat perjalanan usia manusia dari muda hingga tua, yang penuh

suka cita, namun dihadang ketakutan menghadapi kematian.

Hadirnya teks-teks sastra (teks verbal) itu seakan menunjukkan kepercayaan yang makin menipis kepada kemampuan gerak untuk menyampaikan ide koreografer kepada publiknya.

"Memang bisa juga ditafsirkan begitu. Tetapi, sepanjang tidak mengganggu harmoni dan keutuhan koreografinya, saya kira tidak masalah," komentar pengamat tari Sal Murgiyanto, seusai pertunjukan.

Menurut Sal — yang khusus diundang ke Riau sebagai pengamat bersama Ben M Pasaribu dan Tom Ibnur, ide untuk memasukkan teks sastra ke dalam tari merupakan gagasan yang bagus. Namun, menurutnya, tetap ada bahayanya yakni jika koreografer jadi terlena sehingga teks sastranya justru yang mendominasi karya tari tersebut.

"Jika ini yang terjadi, maka justru akan ada penyempitan bagi ruang eksplorasi gerak yang sebenarnya menjadi unsur utama karya tari," katanya.

Di antara karya-karya yang tampil pada malam pertama, hanya *Bundo Kanduang* karya Ery Mefri (Padang) dan *Potret* karya Anton Sitepu (Medan) hampir sepenuhnya memanfaatkan kekuatan gerak untuk mengeksplorasi idenya.

Namun, masuknya teks sastra ke dalam tari sebenarnya bukan fenomena baru. Dalam *Senimania Republika* di Taman Ismail Marzuki tahun 1995, Tom Ibnur juga menghadirkan teks sastra dalam pergelaran tarinya. Menurut Sal, ini merupakan pengaruh akrabnya para koreografer dengan para sastrawan.

Event tari PTK yang dibuka oleh Gubernur Riau Saleh Djasit ini berlangsung hingga 9 Oktober silam. Koreografer lain yang juga tampil dalam pasar tari ini, antara lain dari Yogyakarta (Bagus Budi Indarto dan Muhammad Amien), Korea (Sen Hea Ha), Jakarta (Ekadamayanti), dan Bengkulu (Intan HS).

Bersamaan dengan pasar tari yang diselenggarakan oleh Pusat Latihan Tari Laksemana — bekerja sama dengan Taman Budaya dan Dewan Kesenian Riau — itu diadakan pula *work shop penulisan* dengan nara sumber Bersihar Lubis (Redpel Majalah *Gamma*) Hasan Junus (Redpel Majalah *Sagang*) dan Ahmadun YH (redaktur senior Harian Umum *Republika*).

■ ayh

Republika, 12 Oktober 1999

Musik dan Teater

Tasyakuran dengan Puisi

Dari Syekh Sana'i sampai Iqbal
Lagu penyair ialah Cinta
Di mana pun kelopak mawar ini mekar
Dari cinta dan kasih sayangNya berasal

EMPAT larik puisi di atas dipetik dari puisi *Sajak-sajak Kelahiran*, ditulis sekaligus dibacakan oleh penyairnya Dr. Abdul Hadi WM, pada Minggu siang (3/10) di Studio Jeihan, Jl. Pasir Layung, Bandung, dalam acara *Tafakur dan Syukur* kelahiran pelukis sekaligus penyair Jeihan Sukmantoro yang ke 61.

Acara yang diselenggarakan dari pagi hingga malam itu, tidak hanya diisi oleh pembacaan puisi dari Abdul Hadi WM saja. Dalam kesempatan tersebut tampil pula penyair Leon Agusta, Miranda Risang Ayu, Cecep Syamsul Hari, Acep Zamzam Noor, Ahmadun Yosi Herfanda, Atisi Amin, Deddy Koral dan Asep Berlian, dengan pembawa acara penyair Ahmad Syubbanuddin Alwy. Selain itu, dimeriahkan pula dengan pertunjukan musik dari Harry Roesli dan Ully, lawakan Aom Kusman, pertunjukan teater dari Laskar Panggung Bandung, Kelompok Teater STISI Bandung, M. Cahya, serta beberapa kelompok lainnya yang tampil secara spontan.

Bersamaan dengan acara tersebut, digelar pula pameran lukisan sehari, menampilkan sejumlah karya para pelukis Bandung. Antara lain karya almarhum Prof. H. Ahmad Sadali, A. Satari, Abu Djumhur M., Azeta Arif, Dadan Gandara, Dani Sepriyono, Dodo Abdullah, E.S. Edos, Gilang Cempaka, Kidot, H. Mier Komara, M. Hasan Pratama, M. Nuh, Muharam Abdullah, R. Sjehi Setiayu Roedyat, Rahmat Jabaril, Rieswandi, Satrio, Tjahja MS, Yana Surya dan Jeihan Sukmantoro.

**

PUISI yang dibacakan penyair Abdul Hadi WM dalam kesempatan tersebut, tidak hanya sarat dengan renungan religius, dan ungkapan cintayang makna dan pengertiannya tidak hanya mengarah kepada hal-hal yang bersifat fisikal semata, tapi juga bermuatan nilai-nilai spiritual. Malah puisi yang dibacakan oleh Abdul itu rimbun pula dengan renungan sosial, dalam hal

menyikapi secara kritis akan kezaliman dari para penguasa di masa lampau hingga zaman kini.

Antara lain, hal itu terungkap pada bait-bait puisi berikutnya yang berbunyi demikian: *Cinta ialah keyakinan teguh Bilal/ Dan kesaksiannya yang penuh kepada Yang Satu/ Walaupun ia hanya seorang hamba sahaya/ Jiwanya lebih merdeka dari ribuan majikan// Karena setiap langkahnya dibimbing Cinta/ Api Namrud hanya curahan hujan bagi Ibrahim/ Ratusan berhala batu dia hancurkan seketika/ Di atas puingnya dia bangun benteng emas keimanan//.*

Bilal dan Ibrahim dalam teks sejarah Islam, adalah dua orang yang secara keras menentang kezaliman yang dilakukan para penguasa pada saat itu. Bilal yang sahabat Rasulullah itu, lebih suka menyerahkan dirinya pada Allah daripada berserah diri kepada para penguasa yang bengis dan keji, meniadakan Tuhan. Apa yang dilakukan Bilal, sama dan sebangun dengan apa yang dilakukan oleh bapak para nabi, yakni Nabi Ibrahim yang terang-terangan menghancurkan ratusan berhala di kuil pemujaan milik Raja Namrud. Lebihnya Ibrahim dari Bilal, Ibrahim mendapat tugas dari Allah untuk menyebarkan agama Allah SWT di muka bumi. Sedangkan Bilal menerima agama Allah dengan rasa keimanan dan ketaqwaan yang demikian dalam. Agama tersebut, yakni Islam, yang disampaikan melalui nabiNya, Nabi Muhammad SAW.

Dalam bait-bait sajak berikutnya, Abdul Hadi WM berkata demikian: *Penjajah Eropa telah pergi, angkat kaki/ Namun perampok masih bercokol di sini/ Kerajaan Fir'aun dan Qarun mereka dirikan lagi/ Dengan kuil pemujaan berhalanya// Siapa kau, mengapa mencemaskan kami/ Kerumunan orang tertindas yang kekayaannya/ Dirampas oleh Balam dan penguasa Wastani/ Tiap peralihan musim silih datang berganti//.* Sungguh indah puisi yang dibacakan oleh Abdul Hadi WM, sekalipun puisi yang ditulisnya itu menggunakan pola lama, puisi empat seuntai dengan perhitungan bunyi *(lagu/irama)* yang demikian ketat.

Suasana religius yang menyelusup ke dalam kuping para apresiatornya, tidak hanya dilantunkan oleh Abdul Hadi WM saja. Tetapi juga disuarakan oleh penyair cantik, Miranda Risang Ayu lewat empat buah puisi yang ditulisnya, masing-masing berjudul *Doa Pesakitan, Doa Kembang Malam, Doa Mati* dan *Doa Sunyi*. Salah satu bait puisinya berjudul *Doa Pesakitan* berbunyi begini: *Tuhan,/ aku tidak ingin melihat lidah ular keluar dari mulutku/ atau kuku serigala tumbuh dari jari-jariku/ atau iblis bersuara dari leherku/ Aku tidak ingin melihat puji syukur putih mawarku/ menjadi senyum seorang perempuan jalang/ yang hendak mengucapkan malam terakhir/ dengan lilitan tali di lehernya//.*

Indah. Sungguh indah, puisi yang dibaca Miranda pada malam itu, karena: *Malam biarlah malam asal Kau ada/ Pada ingatanku yang minta ampun penuh mimpi dan lupa/ Malam biarlah malam asal Kau ada/ mematikan sakitku menghidupkan matiku/ Malam biarlah malam asal Kau/ senantiasa berkata bahwa/ besok/ ada cahaya/ dan anak-anak tetap tertawa dengan putihnya/ dan bunga-bunga tetap mekar dengan sari dan putiknya/ dan semesta tetap teguh dengan dzikirnya//.*

Tentu saja, sejumlah puisi yang dibacakan oleh para penyairnya malam itu, tidak hanya puisi dengan tema religius atau sosial religius saja.

Penyair Atasi Amin, anak cikal pelukis Jeihan Sukmantoro yang memilih dunia puisi sebagai jalan kesenimanan yang ditempuhnya, membacakan sejumlah puisi yang sarat dengan permainan logika. Salah satu puisinya yang dibacakan pada saat itu, berjudul *Waktu*, berbunyi demikian: *Kataku, waktu adalah paralel/ Jawabmu, waktu adalah serial/ Kataku, abstrak/ Jawabmu, nyata/ Kataku, ruang/ Jawabmu, uang/ Tanpa uang tak ada peluang// Materialis?/ Kapitalis?// Ah lebih baik aku/ (Maaf) pipis!//.* Mau tidak mau, mendengar puisi semacam itu, banyak orang dibuat tertawa karenanya. Sedangkan Cecep Syamsul Hari dan Deddy Koral, selain membacakan puisinya bertema sosial, juga tem. cinta yang makna dan pengertiannya meluas, tidak menyempit. Pendek kata sejumlah puisi yang dibacakan para penyairnya pada malam itu, benar-benar memberikan sebuah pengalaman spiritual yang sarat dengan nilai-nilai cinta dan kasih sayang, dan kekerasan ditolak di dalamnya.

**

DALAM pandangan penyair Leon Agusta dan musikus Dr. Harry Roesli, pelukis Jeihan Sukmantoro, kelahiran Surakarta 26 September 1938, adalah orang kreatif sekaligus penyebar *virus kesenian* yang cukup berhasil pada zamannya. Jeihan dalam konteks yang demikian merupakan salah seorang tokoh gerakan puisi *mbleing*.

"Gagasannya tentang puisi *mbling* yang dilontarkannya bersama Remy Silado memberikan warna yang lain, atau kelokan-kelokan yang lain bagi arus besar perpuisian Indonesia yang lirikal itu. Apa yang digagas Jeihan tersebut, di satu pihak berpengaruh pula pada daya kreatif saya dalam menciptakan sejumlah puisi yang terhimpun dalam puisi-puisi *auditorium*," ujar Leon Agusta, yang pada saat itu selain membacakan puisi karya dirinya sendiri, ia juga membacakan sebuah puisi karya penyair Chairil Anwar, *Catatan Tahun 1946*.

"Sungguh disayangkan, kata Leon Agusta lebih lanjut, hingga kini belum satu kritikus sastra pun yang secara khusus membahas tentang peran Jeihan dalam gerakan puisi tersebut. "Bandung adalah kota yang sarat dengan kreativitas dalam dunia sastra, khususnya, dan kesenian pada umumnya. Yang dicatat dan diingat orang hanya kasus *Pengadilan Puisi* saja yang terjadi pada tahun 1974, dan melambungkan nama penyair Sutardji Calzoum Bachri. Padahal di luar itu, ada gerakan lainnya. Saya sangat berharap ada orang yang mau melakukan penelitian tentang hal itu secara tuntas dan cermat," jelas Leon.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Harry Roesli mengatakan, Jeihan adalah *virus* yang menyesatkan kehidupan Harry Roesli dari dunia "normal".

"Seandainya saya tidak bertemu dengan orang yang namanya Jeihan dan Remy Silado pada tahun 1970-an, mungkin kehidupan saya tidak seperti sekarang ini. Bisa jadi saat ini tengah memegang jabatan Menristek, karena saya kuliah di Jurusan Teknik Mesin ITB pada saat itu. Kedua orang tersebut kerap *mencekok* saya dengan buah pikiran yang *edan-edan*, dan abnormal. Jeihan adalah virus," bicaranya meledak-ledak. Pokoknya, *gila* dan *edan*," tutur Harry Roesli yang disambut *ger* oleh sejumlah penonton. Jeihan sendiri pada malam itu, tam-

pak terpingkal-pingkal.

Malam itu, Harry selain menyanyikan lagunya yang cukup terkenal, *Jangan Menangis Indonesia* dan *Burung Camar*, juga menyanyikan lagu *Garuda Pancasila* yang liriknya di plesetkan.

Ketika mendengar lagu yang liriknya diplesetkan itu, tak ayal lagi, suasana yang tadinya hening dan mencekam saat Harry menyanyikan lagu *Jangan Menangis Indonesia*, berubah jadi riang, dan sarat dengan tawa. Dalam kesempatan tersebut, Harry bersama Ully menyanyikan pula lagu *Sialan*. Harry meniup *harmonika* penuh dengan perasaan, mengiringi Ully.

Suasana kembali mencekam ketika Harry menyanyikan sebuah puisi Jeihan sebagai kado ulang tahun. Puisi tersebut berbunyi demikian: *Mari kita cuci/ Diri kita dengan/ Peluh sendiri/ Di siang hari ini// Dan/ Mari kita basuh/ Hati kita dengan/ Air mata sendiri/ Di malam hari nanti//*. Lagu tersebut diciptakan secara spontan.

Lagu tersebut, ketika dilantunkan Harry, membuat Jeihan terdiam, seperti menahan rasa haru dan duka sekaligus. "Harry benar-benar hebat. Bakat yang dipunyai anak itu sungguh luar biasa. Sangat jarang saya temukan musikus macam dia," ujar Leon Agusta, mengomentari penampilan Harry malam itu, yang bercelana pendek dengan kaos hitam. Hadirnya Harry, merupakan salah satu pembuktian bahwa Bandung memang kota yang kaya dengan seniman kreatif.

Sungguh acara *Tafakur dan Syukur* yang digelar Studio Jeihan pada hari itu, benar-benar merupakan sebuah peristiwa kesenian yang sarat dengan makna. Berbagai kalangan seniman, baik yang akademis maupun non-akademis, bersatu. Saling bahu membahu, menawarkan karya-karya kreatifnya pada publik seni di Bandung yang hadir di situ.

Dalam kesempatan terpisah, Dr. Abdul Hadi WM mengatakan, Jeihan adalah orang yang baik. Sejumlah karya yang diciptakannya, mempunyai ruang dan waktu kesejarahan tersendiri. "Rumahnya di Cicadas pada tahun 1970-an dulu, jadi markas para seniman Bandung saat itu. Saya, Remy, dan Sutardji kerap mangkal di situ," kenang Abdul Hadi WM.

Sungguh sayang penyair Sutardji Calzoum Bachri yang direncakan hadir pada malam itu, berhalangan, karena sakit tenggorokan. Demikian juga penyair Taufiq Ismail berhalangan hadir karena ada sebuah acara yang tidak bisa ditinggalkannya di Jakarta.

Selamat ulang tahun, Jeihan. **(Soni Farid Maulana/"PR").*****

Pikiran Rakyat, 12 Oktober 1999

Makna Retorika

Tokoh-tokoh penguasa, pejabat, ataupun partai-partai politik dan lembaga sosial dalam masyarakat, akhir-akhir ini sering memakai istilah retorika. Kita masih ingat apa kata pengamat ekonomi Rizal Ramli ketika mengomentari pidato Presiden B.J. Habibie tahun lalu. Pidato itu bagus, katanya. Tapi, ada hal yang perlu diperhatikan: Kita harus mampu membedakan antara pidato dan realitas. Sebab, realitas banyak berbeda dengan retorika.

Bagi Rizal, rupanya, makna retorika itu ada unsur negatifnya. Seakan-akan retorika tidak memperlihatkan kebenaran realitas. Karena itu, retorika dapat membuyarkan pengertian yang obyektif dan real. Jadi, retorika dianggap "cacat" dalam sebuah wacana *(discourse)*.

Kita perhatikan pula pidato wakil PDIP dalam sidang umum MPR baru-baru ini, ketika menanggapi pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Kata dia, pidato itu tak dapat diterima karena banyak fakta yang tidak benar dan yang banyak cuma retorika.

Di sini terlihat, bagi juru bicara PDIP, retorika juga telah membuat cacat ucapan Habibie. Anggapan ini sejalan dengan Rizal. Tapi, pidato juru bicara PDIP tadi penuh pula dengan retorika yang "keras". Rupanya, ia tidak begitu mengerti makna retorika. Bagaimana ini?

Sebelum kita menjawabnya, agaknya kita tambah anggapan lain yang disampaikan Jenderal Wiranto baru-baru ini dalam imbauannya kepada semua anggota masyarakat, agar jangan terjebak pada situasi yang tidak menguntungkan. Masyarakat jangan sampai didominasi oleh "retorika permusuhan" yang jelas membahayakan keutuhan bangsa.

Bagaimana pula pengertian retorika di sini dibandingkan dengan penggunaan retorika dalam contoh sebelumnya?

Apa yang dimaksud Rizal dan juru bicara PDIP tadi jelas memperlihatkan atau menonjolkan makna yang negatif saja, seolah-olah retorika itu jelek.

Bila bagi Wiranto ada "retorika permusuhan", tentu saja ada pula "retorika persahabatan". Dalam makna asalnya tidak ada istilah retorika persahabatan atau retorika permusuhan. Ini dapat diterima jika kita kembalikan kepada makna semula. Hanya

dalam pemakaiannya kemudian ada yang menyimpang artinya.

Apa makna retorika sebenarnya? Ada beberapa perumusan dari para ahli. Pertama, retorika merupakan bentuk tutur yang berbunga-bunga. Ada yang menyebutnya ilmu silat lidah dan ada pula sebagai seni dan ilmu pemakaian bahasa untuk meyakinkan khalayak atas kebenaran yang dikemukakan. Karena itu, dapat dikatakan retorika dipakai untuk mengendalikan pendengar atau pembaca. Seorang pembicara atau pemidato tentulah harus menguasai teknik berbicara yang baik dengan alat kata-kata sampai kepada makna yang tepat. Pilihan kata harus selektif. Jangan sampai terjerumus dalam nuansa bombasme, arogansi, snobisme, dan sloganisme murahan, sehingga pidato tidak bermutu.

Dalam karya sastra, retorika besar sekali peranannya. Sebuah dialog, umpamanya, akan lebih menyentuh bila pilihan kata yang tepat untuk mendukung citra pengarang. Misalnya, dengan menyampaikannya dalam bentuk kalimat tanya dengan pilihan kata yang tepat dan yang tak memerlukan jawaban lagi karena jawabannya terkandung dalam kalimat itu. Dalam wacana sehari-hari, dapat kita lihat pada contoh di bawah ini.

"Bukankah kita sudah mengerti maksud Datuk Maringgih berbuat demikian?"

"Herankah kita bila melihat koruptor itu selalu berusaha membersihkan dirinya dari tuduhan korupsi?"

Kedua contoh kalimat yang tidak memerlukan jawaban tersebut, terlihat unsur retorikanya. Kita sudah mengerti maksud Datuk Maringgih berbuat demikian. Kita tidak heran akan sikap koruptor tersebut tanpa disebut lagi sebab sang koruptor melakukan perbuatan itu.

Coba perhatikan pula retorika yang menjiwai ucapan pengarang dalam kutipan di bawah ini.

"Akan tetapi, tiba-tiba kita menganaktirikan kehidupan. Dan, berapa lagikah sisi-sisi yang bagaikan kita sepakati untuk mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari mengenai manusia yang tidak sama? Sementara kita senantiasa memamah dan menggaungkan nilai moral, nilai-nilai yang universal dan nilai kehidupan. Atau, apakah ini yang dinamakan kemunafikan? Kemunafikan umat manusia pada

abad ini?" (Darman Moenir, *Dendang*, 1988).

Kesimpulan yang dapat kita ambil: arti retorika maksudnya baik, asal tepat pakai seperti dalam kutipan novel di atas. Yang "menimbulkan permusuhan" adalah datang belakangan. Hal yang sama juga terjadi pada istilah rekayasa yang sebenarnya bermakna baik, kemudian menyimpang ke arah yang tidak baik.

Itulah istilah retorika. Kita tinggal pilih retorika dengan pengertian mana yang disukai. □

Gatra, 14 Oktober 1999

SENI

■ NOVEL ARUS BALIK

Gus Dur Merindukan Kejayaan Majapahit

Pemerintahan baru republik mencanangkan negara maritim. Pramoedya Ananta Toer pun diundang ke Istana Negara.

SORAK-SORAI kemenangan belum hilang. Balatentara Portugis berhasil ditumpas dari Kadipaten Tuban. Senapati Wiranggaleng dan pasukannya menepi. Terpekur dalam permenungan. Jangan lalai. Lihatlah, musuh tetap mengintai di mana-mana. Dan....Demak justru menyerang kerajaan-kerajaan kecil lain di saat armada gabungan Aceh-Tuban-Makassar menggempur Malaka. Gagal menghadapi musuh di lautan, bangsa sendiri dijajah di daratan. Arus telah berbalik.

"Dahulu, di zaman kejayaan Majapahit, arus bergerak dari Selatan ke Utara, dari Nusantara ke "Atas Angin". Majapahit adalah kerajaan laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi. Kapal-kapalnya, muatannya, manusianya, amal perbuatannya, cita-citanya, itulah arus Selatan ke Utara. Segala-galanya datang dari Selatan. Majapahit jatuh. Sekarang orang tak mampu lagi membuat kapal besar. Kapal kita makin lama makin kecil seperti kerajaannya. Karena, ya, kapal besar hanya bisa dibikin kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil membuat arus tidak bergerak ke Utara, sebaliknya, dari Utara sekarang ke Selatan ....."

Untaian kalimat yang diucapkan Wiranggaleng, tokoh dalam novel *Arus Balik* (1995) karya Pramoedya Ananta Toer yang berlatar Nusantara lima abad

silam rupanya terus terngiang di telinga Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tak heran, di awal kepresidenannya, Gus Dur sangat obsesif dengan negara maritim. Angkatan laut diberi porsi besar. Sebuah kementerian yang mengurusi kelautan pun dibentuk. Sebagai orang yang menghormati sejarah, Gus Dur mengundang Pram ke Istana Negara, akhir bulan lalu.

Sikap Gus Dur itu adalah arus balik juga. Bukankah orang-orang yang dianggap terlibat G-30 S PKI sudah tiga dasawarsa dianggap kuman berbahaya?

"Anehnya, waktu saya dilepas tahun 1979, saya diberi surat yang menyebutkan bahwa secara hukum saya tidak terlibat G-30 S PKI," tutur Pram ketika ditemui GAMMA di rumahnya yang asri, Utan Kayu, Jakarta.

Raut wajah Pram, 74 tahun, keras, seperti tubuhnya yang ditempa oleh kerja paksa 10 tahun di Pulau Buru. Tapi, ia suka saja bercerita tentang pertemuannya dengan Gus Dur. Beberapa kali ia meminta pertanyaan diulangi. Pendengarannya terganggu akibat siksaan yang dialaminya di Pulau Buru.

Pertemuan, layaknya dua orang sahabat. "Gus Dur bilang, ia sudah baca *Arus Balik*," kata Pram. Novel itu memang ditulis untuk menyadarkan orang bahwa Indonesia adalah negara maritim. "Saya bersyukur, ada tanggapan terhadap gagasan saya," kata Pram.

Keganjilan Indonesia pernah disindir Pram dalam pidatonya pada 14 Juli lalu di Perpustakaan Nasional Jakarta. Saat itu, ia heran kenapa di negeri berbelasribu pulau ini banyak didudukki oleh Angkatan Darat — presiden, gubernur, bupati, kadang-kadang sampai kepala desa. "Ini kesalahan historis. Kesalahan lain dengan kekeliruan. Kesalahan berasal dari otak, sedangkan kekeliruan adalah kesalahan dalam pelaksanaan," kata Pram.

Pram mengajak hadirin menyimak VOC, Serikat Dagang Belanda, yang membangun imperium maritim beribu kota Batavia pada abad ke-16. Tegaklah Jawa Sentrisme, yang semua diukur demi kepentingan Jawa. VOC mengirimkan pembunuh dari Jawa untuk menundukkan daerah-daerah di luar Jawa. Dari luar Jawa membawa harta ke Jawa. Tetapi, kemudian VOC bangkrut, karena korupsi para pejabatnya. Bangkrutnya VOC digantikan pemerintah Hindia Belanda, yang sudah tidak mempunyai kekuasaan laut lagi.

Semenjak itu, pertahanan Hindia Belanda itu didasarkan pada pada pertahanan darat — dan sistemnya diteruskan sampai sekarang. Padahal, sistem pertahanan Indonesia harus pertahananan laut. Pram lalu memberi contoh ketika Hindia Belanda dikurung oleh Inggris dari laut, dan dalam beberapa hari saja Belanda angkat tangan pada 1812. Waktu diserang Jepang pada 1942, dalam beberapa hari saja Belanda juga angkat tangan.

Hal lain, Pram juga melihat kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara sering saling berebut kekuasaan di daratan, hingga mereka lupa pada lautan. Padahal, semasa armada lautan Demak masih dipimpin Adipati Unus, visi membangkitkan kembali kejayaan maritim bergelora. Sepeninggal Adipati Unus, ibunya, Ratu Aisyah, mencoba meneruskannya cita-cita itu. Namun, setelah Sultan Trenggono berkuasa, situasi berubah 180 derajat.

Pram belum lama ini membaca sebuah buku tentang seorang rahib Katholik dari Roma yang mengunjungi Demak pada abad ke-14. Diceritakan, saat itu orang Jawa suka membunuh. "Kalau ada yang memesan pe-

dang, keris, atau tombak, begitu selesai, dijajalkan langsung kepada rakyat. Dan tidak ada (hukum) apa-apa. Kecuali kalau orang bangsawan dan orang bangsawan bertarung, yang membunuh membayar denda kepada raja, begitu saja," kata Pram.

Kenapa Belanda yang begitu kecil bisa menguasai Indonesia? Pram menjawab, "Karena kolonial Belanda membasmi golongan yang terdiri atas pemilik kapal serta pedagang antarpulau dan internasional. Kapal-kapal mereka dihancurkan oleh kapal meriam Belanda di laut. Mereka terdesak terus ke pedalaman sampai kembali menjadi petani".

Adakah kekeliruan itu yang mendorong Gus Dur membangkitkan kembali sejarah kemaritiman, setelah ditelantarkan rezim Orde Baru?

Berbeda dengan wacana yang berkembang, Pram tak setuju jika konsep negara maritim harus dibarengi sistem federasi. "Negara maritim *nggak* ada persoalan dengan sistem federasi," katanya. Dalam negara federasi, antardaerah dibatasi hukum. Dalam negara maritim malah dibatasi laut.

Di Perpustakaan Nasional dulu, Pram juga berbicara tentang gerakan separatis. Semua itu terjadi, lagi-lagi, karena Indonesia sebagai negara maritim tapi diduduki oleh Angkatan Darat. Kalau dikelola sebagai negara maritim, laut akan menjadi penghubung antarapulau. Tapi, dengan pendudukan Angkatan Darat, laut justru menjadi pemisah antarpulau. "Ini sangat memudahkan terjadinya disintegrasi bangsa," katanya.

Sebetulnya, tak aneh bila Gus Dur memanggil Pram. Gus Dur pernah kuliah di Fakultas Sastra Universitas Baghdad, Irak (1970). Penikmat lagu klasik dan Michael Jackson —juga dendang penyanyi legendaris Mesir, Ummi Kaltsum— ini juga Ketua Dewan Kesenian Jakarta (1983-1985). Di ujung pertemuan, Gus Dur berkata, "Kalau saya memerlukan nasihat, saya akan temui Pak Pram". "Saya sih nggak keberatan," sahut Pram, tertawa kecil.

Siang itu, empat hari seusai bertemu Gus Dur, tak ada yang berubah pada sosok Pram. Ia tetap teguh. Seperti keteguhan Wiranggaleng untuk mengembalikan kemaritiman nusantara.

Bersihar Lubis, dan Akuat Ecky Supriyanto

Gatra, 14 Oktober 1999

Tak Menuntut Rehabilitasi

SINAR mata Pram berbinar-binar. Penulis novel *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* bercerita tentang naskahnya yang belum diterbitkan. Umpamanya, novel *Arok-Dedes* yang akan diterbitkan oleh Hasta Mitra Jakarta. Bahkan, ada pula *Mangir* berupa teks sandiwara.

Luar biasa. Seorang profesor musikolog Amerika yang mendapatkan *Mangir* dari Universitas Cornell telah mengubahnya menjadi sebuah opera diiringi musik hibrida Barat dan gamelan Jawa. "Wah, dua tahun ia gubah musiknya, dan tampaknya baru bisa dipergelarkan pada 2001. Sekarang, ia sibuk mencari pemainnya sampai ke Gunung Kidul," kata Pram, dengan mimik setengah melamun.

Sedangkan *Arok-Dedes* lahir di Pulau Buru. Novel ini berkisah tentang orang yang melakukan kup pertama dalam sejarah Jawa. "Seperti...," katanya menyebut sebuah nama. Sayang, penerbitannya tersendat karena Hasta Mitra kesulitan keuangan. "Habis, buku-buku Hasta Mitra terbit, dilarang. Disita. Bangkrut jadinya," kata Pram.

Pram kini dihinggapi penyakit gula. Tadinya tidak ada apa-apa, karena setiap hari ia makan bawang putih. Tapi, dalam perjalanan kelilingnya ke Belanda, Juni lalu, gangguan gulanya jadi serius. "Kan *nggak* bisa dalam acara makan resmi *nggigiti* bawang putih. Eh, kalau gula turun, bisa sampai geme-

tar badan saya. Kalau naik, *nggak* bisa berbuat apa-apa. Efeknya di otak," keluhnya.

Salah satu kebahagiaan Pram, kini, adalah bermain dengan cucu-cucunya. Cuma seorang anak, menantu, dan dua cucu yang masih tinggal di rumahnya. Tujuh dari delapan anaknya perempuan, yang rata-rata menjadi ibu rumah tangga. Tapi, mengenang-ngenang masa lalu, ia kecut. Sejak kecil, mereka hidup ketakutan. "Sudah dihina, dikucilkan, tak berkembang wajar. Mereka tumbuh jadi penakut. Perubahan angin politik tak memberanikan mereka," kata Pram.

Anak keempatnya pernah sekolah asisten apoteker. Nilai akademiknya tak ada yang di bawah delapan, tapi tak bisa mengikuti ujian akhir. Pun si bungsu, satu-satunya lelaki. "Dulu, ia sekolah di SMA Cikini, dihina karena anak tahanan politik, lalu dikeroyok. Ketika polisi datang, ia ditangkap, di kantor polisi dianiaya, dan wajib lapor," kisahnya.

Sekarang, Pram harmonis dengan masyarakat sekitar. "Memang, awalnya ada yang *nglempari* kerikil. Tapi, kini malah pemuda-pemuda lingkungan saya lebih banyak menjaga saya," katanya.

Bila pun ada yang mengganjal, itu adalah hak-hak sipil Pram yang dirampas penguasa Orde Baru. Entah kapan diganti. "Gus Dur berpesan agar daftarnya dikirim ke istana," katanya. Sebutlah, perpustakaannya, yang berisi dokumen-dokumen sejarah, dihancurkan tentara, usai peristiwa tahun 1965.

Meski bertemu dengan presiden, Pram tak menuntut rehabilitasi. "Saya ini korban, *nggak* pernah memusuhi. Yang memusuhi itu mereka (penguasa Orde Baru, *Red.*). Yang memberikan rehabilitasi itu mestinya kami kepada mereka. Yang berkelakuan buruk itu mereka," kata Pram.

BLU, dan AES

Suara Pembaruan, 14 Oktober 1999

Pesta Sastra Tasikmalaya 1999

BANDUNG — Sanggar Sastra Tasik akan menyelenggarakan 'Pesta Sastra Tasikmalaya 1999' pada tanggal 13-15 November mendatang di Gedung Kesenian Tasikmalaya (GKT). Kegiatan yang ditujukan untuk mengakrabkan masyarakat Tasikmalaya khususnya dengan sastra ini akan menampilkan banyak kegiatan yang berkaitan dengan sastra. Baik itu Lomba Cipta Puisi Nasional. Lomba Baca Puisi Terbuka, Bursa Buku dan Diskusi Terbuka bertajuk 'Sastra dan Politik'.

Bagi yang berminat, panitia menunggu hingga tanggal 10 Novermber di Sekretariat SST, Jl Argasari 18 Tasikmalaya telp (0265) 327386 atau ke GKT di Jl Lingkar Dadaha. Acep berharap acara ini akan didukung banyak pihak dari berbagai kalangan, tidak melulu dari kalangan sastrawan seperti kecenderungan yang dialami acara serupa selama ini. ■ ira

Republika,, 14 Oktober 1999

Kesusastraan Lama Perlu Direproduksi Ke Bentuk Populer

JAKARTA – Apresiasi masyarakat terhadap kesusastraan lama baik secara lisan maupun tulisan termasuk naskah-naskah kuno masih sangat memprihatinkan. Walaupun sudah cukup banyak usaha yang dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala seperti bahasa, hasil yang dicapai masih belum memuaskan. Agar dapat lebih dipahami bersama, cerita-cerita dalam naskah tersebut dapat diubah sedemikian rupa.

Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) dan semua pihak diharapkan dapat berupaya mengemas kembali hasil kesusastraan lama itu ke dalam bentuk yang lebih modern. Adalah tantangan bagi Manassa untuk tidak hanya mentransliterasi naskah, tapi juga mereproduksinya ke bentuk populer seperti puisi, prosa, drama, atau bahkan sinetron.

Demikian pemikiran Dekan FSUI Prof Dr Sapardi Djoko Damono dalam sebuah *talk show* Selasa (12/10) yang mengawali Simposium Internasional Pernaskahan III di Jakarta. Simposium yang bertema "Tradisi Tulis Nusantara Menjelang Milenium III" ini bermaksud mengangkat berbagai persoalan pernaskahan kuno menghadapi milenium III. Selain Direktur Kebudayaan Depdikbud Anhar Gonggong, Ketua Manassa Prof Dr Achadiati Ikram, Ahli Arkeologi Prof Dr Ayatrohaedi dan Rektor IAIN Jakarta Azyumardi Azra, ada pula 24 pemakalah yang tampil bergantian dari dalam maupun luar negeri serta sederetan ahli filologi seperti Willem van der Molen (Univ. Leiden, Belanda), Ananabel Teh Gallop (British Library, London), Ding Choo Ming (Malaysia).

Berharga

Dikatakan pula kesusastraan lama tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat berharga bagi generasi mendatang. Lagi pula, kehadiran karya sastra lama itu dapat menunjukkan kearifan nenek moyang dalam menghadapi pengaruh budaya luar pada saat itu. Itulah sebabnya, pengolahan kembali karya sastra masa lampau sangat penting dilakukan. Upaya tersebut tidak boleh hanya dianggap sebagai sastra atau pengajaran sastra tapi sekaligus juga usaha menggali khazanah budaya bangsa sebagai kekayaan.

"Suatu bangsa yang ingin membangun masa depan tanpa perspektif masa lampau hanya akan berjalan di tempat," ujar Sapardi. Kehadiran naskah-naskah itu menunjukkan ada sesuatu yang berubah sekaligus tetap bertahan dalam budaya kita. Masa lampau harus dapat diletakkan pada tempat yang benar yakni sebagai perspektif ke masa depan.

"Harus ada kerja sama yang baik antara Manassa dengan

penulis-penulis cerita yang bisa menciptakan kembali karya sastra masa lampau itu menjadi karya sastra modern yang bisa dipahami sekarang," tambah Sapardi yang juga seorang sastrawan. Bentuk pengolahan tersebut dapat berupa prosa atau saduran yang pada akhirnya dapat diintegrasikan dalam suatu pelajaran di sekolah sehingga menjadi perekat bangsa.

Disosialisasikan

Hal serupa juga diungkapkan Azyumardi Azra yang hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, naskah-naskah tersebut perlu disosialisasikan lebih luas dalam masyarakat. Sebagai permulaan, upaya tersebut dapat dilakukan dalam lingkungan pendidikan dari mulai sekolah hingga perguruan tinggi. Bahkan mungkin untuk, menjangkau segmen yang lebih luas, cerita dalam naskah kuno itu dapat ditampilkan dengan paduan komik atau esai sehingga memiliki unsur didaktik. Cara lain yang juga dapat ditempuh ialah melakukan kerja sama dengan para penerbit yang memiliki perhatian khusus pada kesusastraan.

Sementara itu, Achadiati Ikram mengatakan, jumlah naskah yang cukup banyak itu menunjukkan keberagaman budaya Indonesia. "Dulu kita fobia pada suatu keberagaman. Padahal, semboyan Bhineka Tunggal Ika diakui. Maka sekarang kita harus memberikan tempat pada kebhinekaan itu," ujarnya. Oleh karena itu, ia juga sangat mendukung prakarsa pengolahan karya sastra lama agar dapat diserap oleh seluruh anak-anak Indonesia.

Di sisi lain, Ayatrohaedi mengutarakan berbagai hal yang dapat ditemukan dalam naskah-naskah tersebut. Beberapa di antaranya, ada yang mengungkapkan sejarah kata, pemisahan tanggung jawab suami istri, atau bahkan sistem ijon di masa lampau. Walaupun teks dalam naskah kuno tersebut merupakan gambaran sejarah politik masa silam, nilai-nilai yang dikandung masih dapat dikaitkan dengan masa depan.

Kepemimpinan

Pendapat senada juga diutarakan oleh Anhar Gonggong. Menurutnya, dalam naskah-naskah kuno itu, ada hal-hal yang patut menjadi bagian dari pemahaman kita sebagai bangsa. Disebutkan pula, naskah-naskah tersebut memiliki berbagai hal yang kita butuhkan, seperti persoalán kepemimpinan yang sangat krusial dewasa ini.

"Mengapa kita harus menentukan masalah kepemimpinan dari tulisan-tulisan luar negeri," tanya Anhar menggugat. Ia berpendapat, banyak hal-hal penting yang dapat diambil dari naskah-naskah itu yang mungkin hasilnya lebih baik. (UW/W-9)

Suara Pembaruan, 14 Oktober 1999

Menunggu Lahirnya Penyair Angkatan Reformasi

YOGYA (KR) - Reformasi di Indonesia, ternyata tak hanya menggerus persoalan politik. Melainkan juga persoalan lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Berkait keberhasilan gerakan demokrasi dan reformasi di Indonesia, dunia kesusastraan (kepenyairan) Indonesia juga turut mewarnai hiruk-pikuk demokrasi dan reformasi. Jika di masa Orde Baru kebebasan berekspresi para penyair Indonesia selalu 'diberangus' oleh penguasa, hal semacam itu kini sudah tidak terjadi lagi.

Pada hakikatnya, kepenyairan Indonesia tidak pernah lepas dari dinamika politik, baik sebelum Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945 maupun sesudahnya. Bermula dari lahirnya Angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 66, semuanya memiliki relevansi dengan dinamika politik. Jika sekarang ada keinginan untuk membentuk Angkatan Kesusastraan baru oleh insan-insan kesusastraan, hal itu erat kaitannya dengan keberhasilan gerakan reformasi menumbangkan Orde Baru. Masuk akal jika kemudian ada yang menginginkan terbentuknya Angkatan Reformasi, sebagai penutup abad 20.

Pendapat itu dikemukakan Dekan FPBS UNY dan penyair, Dr Suminto A Sayuti, dan Seksi Sastra Indonesia Balai Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Drs Herry Mardiyanto, saat ditemui *KR*, Rabu (13/10).

Menurut Suminto, sepanjang sejarah kesusastraan Indonesia, setiap zaman akan melahirkan penyair yang saling berbeda. Baik ideologi estetis maupun tema-tema puisinya. Dicontohkan, pada masa Angkatan 45 ideologis estetis para penyair adalah realis-simbolik dengan tema sentral heroisme. "Ini berkaitan dengan situasi kondisi politik saat itu, di mana bangsa Indonesia berada dalam penjajahan Jepang," katanya.

Jika sekarang para penyair muda Indonesia menginginkan lahirnya angkatan kesusastraan baru (Angkatan Reformasi), menurut Suminto, hal itu sangat lumrah. "Derasnya arus reformasi dalam upaya menumbangkan Orde Baru juga dilakukan oleh para penyair muda Indonesia. Mereka menjadi inspirator, sekaligus juga sebagai mediator bagi para mahasiswa saat melakukan unjuk rasa," katanya. Maka, bukan merupakan pemandangan aneh, jika pada setiap unjuk rasa selalu disertai dengan pembacaan puisi. Menurutnya, hal itu sebagai bukti bahwa terjadi relasi dan relevansi antara kesusastraan dengan politik.

Hal senada juga diungkap Drs Herry Mardiyanto. Setiap periode waktu pasti akan melahirkan penyair yang berbeda. Selepas Chairil Anwar, lahir Rendra, Sutardji Calzoum Bachri, Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi AG, Afrizal Malna, dan penyair-penyair yang lain. Lebih khusus Herry mengatakan, setiap periode waktu tertentu pasti akan melahirkan sosok penyair yang bisa mewakili zamannya.

Dalam catatan sejarah kesusastraan Indonesia, Rendra menempati 'ruang khusus' dalam peta kepenyairan Indonesia. Menurut Herry, sosok kepenyairan Rendra benar-benar sulit tertandingi oleh penyair lain. Rendra hadir dengan ideologi estetis spiritual romantisme. Sosok Rendra sendiri sangat menarik, senantiasa tidak mau terikat dalam satu kelompok tertentu. Bahkan Rendra menyebut dirinya sebagai 'penyair yang berumah di atas angin'. Menurut Herry, kebesaran seorang penyair tidak semata-mata ditentukan kualitas puisinya, melainkan juga ditolong oleh zamannya.

Sekarang ini ada upaya secara komunal untuk mempersatukan ideologi estetis di kalangan penyair muda Indonesia. Selaras dengan laju reformasi, para penyair Indonesia berusaha untuk membuat satu konsep tentang masa depan kepenyairan Indonesia. Menurut Suminto, yang dilakukan KSI (Komunitas Sastra Indonesia), melobi penyair-penyair daerah untuk menggagas kemungkinan pembentukan angkatan kesusastraan baru merupakan langkah positif. Tema-tema reformasi sekarang memang mendominasi puisi-puisi penyair muda Indonesia.

Hal ini, menurutnya, merupakan bukti bahwa penyair memiliki kepekaan sosial, politik, dan budaya. Selebihnya, hal itu juga merupakan cermin bahwa karya sastra merupakan kontinuitas garis sejarah.

Herry menyorot, para penyair muda saat ini berproses dalam dinamika sosial politik mirip dengan masa akan lahirnya Angkatan 66. Pengaruh politik terasa dominan dalam mendukung penciptaan karya. Jika pada masa Angkatan 66, Taufiq Ismail dan Bur Rasuanto menjadi penyair garda depan mendobrak penguasa, hal yang sama kini juga dilakukan oleh penyair-penyair muda. Herry menyebut nama Afrizal Malna, Sitok Srengenge, dan Wowok Hesti Prabowo sebagai penyair yang sangat intens bersentuhan dengan persoalan sosial politik.

Kenyataan bahwa proses kreatif para penyair muda kini dalam iklim keterbukaan dan kebebasan, baik Suminto maupun Herry mengharap, semestinya dunia kepenyairan Indonesia bisa lebih maju lagi. Dengan iklim keterbukaan dan kebebasan, diharapkan kepenyairan Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari penyair-penyair luar, dan potensi penyair-penyair Yogya memungkinkan untuk menjadi pioner bangkitnya kepenyairan Indonesia. (*-1)-m

Kompas, 14 Oktober 1999

Medy Lukito Masuk Ensiklopedi Penyair Dunia

JAKARTA — Penyair wanita Indonesia, Medy Lukito, berhasil masuk ensiklopedi penyair dunia. Berarti ia menjadi penyair Indonesia pertama yang mendapat penghargaan bergengsi tersebut.

"Syukur *Alhamdulillah*, nama saya berhasil masuk dalam *International Who's Who in Poetry and Poets' Encyclopaedia 1999* terbitan International Biographical Centre, Cambridge, Inggris," ungkapnya saat dikonfirmasi *Republika*, kemarin.

Medy merupakan satu di antara sedikit sastrawan Indonesia yang menembus ensiklopedi dunia tersebut. Sastrawan lain yang pernah tercantum namanya di ensiklopedi dunia antara lain Motinggo Busye, yakni Ensiklopedi Tokoh Dunia. Menurut Medy, proses *screening* untuk masuk dalam ensiklopedi ini memakan waktu satu tahun.

Prosesnya, kata penyair kelahiran Surabaya tahun 1962, pertama, ada rekomendasi dari orang lain yang diakui oleh institusi tersebut. Kedua, kirim aplikasi dan karya. "Ketiga, screening atau seleksi, sedangkan keempat adalah konfirmasi terakhir," tuturnya. Ditambahkannya, salah satu karya yang dikirim dan ikut andil menjadi penentu adalah puisi berjudul *"Sendiri di Sudut Petang"*.

Medy, ibu dari dua anak, mulai menulis puisi sejak tahun 1978. Pembimbing pertama adalah Kardy Syaid yang ketika itu ada di Banda Aceh, tapi beralih ke film. Pembimbing kedua adalah Sutan Iwan Soekri Munaf, yang ketika itu ada di Padang, tapi kini beralih ke jurnalistik. "Saya banyak berutang budi kepada Motinggo Busye (alm) yang selalu memberi spirit, antara lain dengan memberikan kepercayaan sebagai editor buku kumpulan cerpennya. Saya juga berutang budi pada beberapa penulis senior yang banyak membimbing, seperti Slamet Sukirnanto, Sutardji Calzoum Bachri, Korrie Layun Rampan, Eka Budianta, Daniel Dhakidae, dan Budi Darma," papar wanita yang mengaku cuma lulus SMP itu.

Sebagai penyair warga keturunan, Medy mengaku ada beberapa kendala yang menyebabkan dia tidak bisa berekspresi secara total. "Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan di zaman Orde Baru," kata sastrawan yang puisi, cerpen, maupun artikelnya tersebar di media massa daerah, nasional dan luar negeri. Selain menulis, dia juga aktif menggerakkan kegiatan seni untuk anak-anak, dan sejumlah kegiatan sosial lainnya, misalnya untuk pembauran, korban kekerasan, dan korban bencana alam.

Dalam ensiklopedi tersebut, halaman 178, ditulis LOEKITO Medijanti (Medy Loekito) adalah salah seorang penyair yang menjadi delegasi Indonesia di bidang seni untuk beberapa konferensi di luar negeri, SEA Literature Festival, dan Festival Seni November. Di sana juga disebutkan buku-buku Medy yang sudah diterbitkan: *In Solitude* (1993), Festival Puisi XIV (1994), *Trotoar* (1996), *Jakarta, Jangan Lagi* (1996), dan *Antologi Puisi Indonesia 1997*.

"Sebagai penyair wanita, saya merasa sedih dengan terlupakannya para penyair wanita," tutur mantan pemandu wisata yang kini bekerja sebagai "rewang" di sebuah perusahaan asing. Jiwa seni Medy mengalir dari ayahnya, Karel Loekito. "Anak pertama saya mengikuti jejak kakeknya, menjadi pelukis. Anak kedua masih balita," tutur wanita yang belakangan beralih menjadi muslimah.

Keberhasilan Medy mencatatkan dirinya dalam ensiklopedi penyair dunia bukan satu-satunya penghargaan internasional yang diterimanya. Tahun ini, dia juga ditunjuk sebagai *advisor* dalam *The American Biographical Institute*. Kritikus sastra Korrie Layun Rampan dalam ulasannya yang dimuat majalah *Romansa* menilai, sajak-sajak Medy ditandai oleh pengucapannya yang singkat, sehingga beberapa sajaknya mirip *aforisme* Cina maupun *tanka* Jepang. Sajak-sajaknya kadang terdiri atas kuatrin, terzina dan distikhon. "Hal utama yang muncul dari sajak-sajak Medy adalah suasana. Suasana itu sering membawa imaji kontras dan imaji dalam yang memberi arah pada makna sajak," tulis Korrie. ■ ika

Republika, 16 Oktober 1999

Taufiq Ismail: "Saya Menangis Menyaksikan Situasi Sosial-Politik Saat Ini

Siapa memindahkan Bosnia dan Kosovo 10.000 kilometer ke sini
Tak terdengar lagi nyanyi pela gandong yang merdu menyentuh hati
Mana tampak orang bertolong-tolongan membangun masjid dan gereja lagi

PENYAIR Taufiq Ismail tak kuasa lagi menahan airmatanya, ketika membaca tiga larik puisi tersebut, dalam acara *talk show* yang mengetengahkan tema *Kesenjangan Sastra Dalam Kehidupan Masyarakat*, dan *Eufisme, Reformasi, Sarkasme, Dalam Bahasa Sastra, Sejarah dan Pers*, Minggu sore kemarin (10/10) di GK. Rumentang Siang, Jl. Baranang Siang No. 1 Bandung.

Pada acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Jendela Seni Bandung bekerjasama dengan PBS Indonesia FKIP Uninus dan GK. Rumentang Siang Bandung, Taufiq membacakan sebuah puisi panjangnya, berjudul *Beratus Ribu Pengungsi, 1999*. Tiga larik puisi di atas mengungkap kasus kerusuhan di Ambon. Hingga kini kasus tersebut belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Lebih lanjut, puisi yang dibacakan oleh penyairnya dengan penuh perasaan itu berbunyi: *Tak terasa angin sejuk yang menyapu hutan cengkeh dan teluk Ambon yang teduh ini/ Kekejaman tidak masuk akal dalam sandiwara politik luar biasa keji/ Penulis skenario pembantaian luar negeri, operator di dalam negeri/ Inilah yang tersaji: darah, puing, abu, mayat dan api//*

Sebuah kekejaman yang tragis sekaligus ironis. Betapa tidak hal itu terjadi, justru ketika Indonesia tengah merdeka selama 50 tahun lebih. Seharusnya pada usia kemerdekaannya yang ke 54 itu, rakyat dan bangsa Indonesia harus saling bahu-membahu, tidak mudah dipecah belah oleh hal-hal yang bersifat SARA. Apa hanya karena gara-gara dibentur badai ekonomi, lantai bangunan moral dan spiritual juga lantas ikut rubuh karenanya? Inilah sebuah pertanyaan besar — yang tidak hanya disuarakan Taufiq dalam sajak-sajaknya. Tetapi juga disuarakan oleh banyak pihak, baik dari kalangan agamawan, politisi, para pakar hukum, maupun pakar ekonomi yang akal sehatnya masih waras.

**

"SUNGGUH, hati saya menangis menyaksikan situasi sosial-politik saat ini di Indonesia. Saya tidak habis mengerti, mengapa orang-orang yang tidak berdosa harus dibantai sedemikian rupa oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Kekejaman semacam itu, tidak hanya terjadi di Ambon saja. Tetapi juga di Aceh, Madura, Sambas dan Timor Timur. Di sini, di ruang ini, kita bisa enak-enakan tertawa, makan dan berdiskusi. Sementara di luar gedung, ada saudara-saudara kita yang kesulitan mencari nafkah, bahkan terusir dari tanah airnya sendiri.

Untuk itu, mari kita berdoa, membacakan surah *Al Fatihah*, semoga mereka secepatnya diangkat Allah SWT dari lumpur penderitaan," ajak Taufiq, sebelum membacakan puisinya yang menggetarkan sekaligus menonjok perasaan para apresiatornya itu.

Dalam percakapannya dengan "PR", seusai acara tersebut, Taufiq mengatakan, dirinya benar-benar prihatin menyaksikan bangsa dan negara Indonesia saat ini — yang hancur dalam segala bidang. "Rupanya bangsa kita saat ini sudah tidak punya *hati nurani* lagi? Gampang marah, tersinggung, main bakar dan merusak barang orang. Kerusuhan bisa tumbuh di mana saja dan kapan saja, tanpa bisa kita cegah. Apalagi kita mengerti akar permasalahannya," jelas penyair kelahiran Bukittinggi, 25 Juni 1935 juga menyesalkan atas terjadinya bentrokan sesama orang kecil di Bandung, dalam kasus PKL dan Tukang Becak, di Cibadak Mall.

Tugas utama yang paling berat dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini, lanjut penulis antologi puisi *Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia* adalah merekatkan kembali rasa persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek, baik yang bernuasa politik maupun budaya. "Jangan lupa, Allah SWT

telah memberikan rahmatNya yang luar biasa kepada Bangsa dan Negara Indonesia, ketika para pendiri bangsa ini pada tahun 1928 memilih *Bahasa Indonesia* sebagai bahasa persatuan. Kalau dilihat dari jumlah suku yang paling besar pendukungnya, tentu Bahasa Jawa. Untung saja bahasa yang feodalistik itu tidak jadi bahasa nasional kita. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang demokratis. Coba lihat di negara lain, banyak di antara rakyatnya yang berperang, karena masing-masing suku ingin menjadikan bahasa sukunya sebagai bahasa nasional. Indonesia, negara yang kita cintai ini, kan tidak mengalami kesulitan tentang hal tersebut," tandas pendiri sekaligus mantan pimpinan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Berkaitan dengan itu, jelas Taufiq lebih lanjut, ada baiknya bangsa dan negara Indonesia saat ini, kembali mencari sekaligus menemukan format baru dalam berbangsa dan bernegara. Format itu harus mampu mengasah kepekaan hati nurani, sehingga tidak terjadi tindak kekerasan yang menyebabkan banyak korban. "Sekecil apapun tindak kekerasan itu harus dihindarkan. Tujuan utama reformasi, bukan melahirkan tindak kekerasan. Tetapi membangun kembali bangsa dan negara ini dari segala kehancurannya. Terutama kehancuran moral," tegasnya.

**

SEMENTARA itu, dalam acara *talk-show* yang juga menghadirkan pembicara Agus R. Sardjono, Moh. Wan Anwar dan Acep Iwan Saidi yang diseling dengan pembacaan cerita pendek dan puisi dari penyair Nenden Lilis A, R. Diro Aritonang, dan cerpenis R. Budi Sabarudin, penyair Taufiq Ismail berkata, bahwa salah satu penyebab bangsa dan negara Indonesia tidak lagi peka terhadap nilai-nilai moral dan kemanusiaan, dikarenakan pembelajaran sastra telah lama diabaikan oleh pihak-pihak terkait, khususnya penyelenggara pendidikan.

"Selama ini pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia hanya bermuara pada pembelajaran tata-bahasa saja. Sedangkan pengenalan *ruh* bahasa, jarang diajarkan. Semisal mengemukakan pendapat dalam bentuk karangan kreatif, sangat terabaikan," paparnya. Yang dimaksud dengan *ruh* bahasa, tentu saja karya sastra.

Berkaitan dengan itu, kata Taufiq lebih lanjut, pihaknya lewat majalah sastra *Horison*, berupaya menghadirkan sisipan *Kaki Langit* yang didalamnya memuat tulisan para siswa SLTA, baik dalam bentuk puisi, esai maupun cerita pendek. Tulisan tersebut tidak hanya menampilkan karya sastra para siswa saja. Tetapi juga menampilkan sejumlah karya para kritikus sastra dan pemerhati Bahasa Indonesia.

"Kaki langit dilengkapi pula dengan esai mengenal sastrawan Indonesia, berikut karyanya.

Hingga kini, sudah 33 edisi. Para sastrawan Indonesia yang pernah di bahas di situ, antara lain Amir Hamzah, Sutan Takdir Alisyahbana, Rendra, Chairil Anwar, Toto Sudarto Bachtiar dan beberapa sastrawan lainnya.

Maksud diterbitkannya *Kaki Langit* tiada lain ingin membantu para guru sastra dan bahasa Indonesia yang kerap berkata sangat kekurangan bahan, dalam mengajar. Jadi apa yang disajikan oleh *Kaki Langit* pada sisi-sisi tertentu bisa juga dijadikan sebagai salah satu bahan pengajaran sastra yang cukup repesentatif," papar penulis buku *Benteng dan Tirani*, sambil menambahkan bahwa Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa itu – seharusnya paling ideal punya majalah sastra sebanyak 200 buah dari 200 penerbit.

"Ini ironis sekali. Di negara yang berpenduduk 200 juta itu, hanya punya satu majalah sastra, yakni *Horison*. Sementara di Mesir, dengan penduduk 40 juta terdapat 12 terbitan majalah serupa *Horison*. Jadi negara ini benar-benar miskin, tidak hanya secara ekonomi, tetapi dari segi pengembangan intelektual pun, miskin pula. Jangan lupa, dunia sastra sangat erat dengan dunia

intelektual, entah itu dengan filsafat atau sains," jelas penulis puisi *Takut'66, Takut'98* yang berbunyi demikian: *Mahasiswa takut pada dosen/ Dosen takut pada dekan/ Dekan takut pada rektor/ Rektor takut pada menteri/ Menteri takut pada presiden/ Presiden takut pada mahasiswa!//*

Menjawab pertanyaan, Taufiq mengatakan, adanya kesenjangan karya sastra dalam kehidupan masyarakat bisa dilihat dari sisi oplah penerbitan buku. Misalnya, ketika pertamakali terbit, novel *Siti Nurbaya* dicetak sebanyak 3.000 eksemplar, dengan jumlah penduduk Indonesia ketika itu sekitar 40 juta orang.

Kini di tahun 1999, dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta orang, buku tersebut masih dicetak sebanyak 3.000 eksemplar. Seharusnya, buku tersebut dicetak sekitar empat atau lima kalilipat dari cetakan pertama.

Pada bagian lain, Taufiq mengharap, dengan seiringnya fajar reformasi yang kini telah digulirkan oleh banyak pihak, semoga pengajaran sastra mendapat tempat yang signifikan dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini.

Di samping itu, Taufiq mengharap pula bahwa situasi sosial-politik maupun ekonomi di Indonesia segera membaik dan tidak terjadi lagi hal-hal yang menakutkan, seperti yang ditulis pada bait terakhir puisinya itu, yang berjudul *Beratus Ribu Pengungsi, 1999* yang berbunyi: *Kini di tanah Teuku Umar, Cut Nyak Din, Keumala Hayati/ Tempat-tempat perjuangan kemerdekaan dalam sejarah tak tertandingi/ Tanah penyair Chik Pantee Kulu yang menulis puisi Hikayat Prang Sabi/ Jadi pengungsi di kampung halaman sendiri/ Dizalimi, disiksa, dibakari, digagahi di sini/ Suram, suram langit keadaan/ Nestapa, nestapa cuaca bangsa/ Kini tak dapat kita cuma menundukkan kepala/ Walau duka demikian besar luar biasa/ Saudaraku/ Kita mesti berbuat sesuatu/ Membantu saudara-saudara kita itu.//* **(Soni Farid Maulana/"PR")*****

Pikiran Rakyat, 17 Oktober 1999

■ ANGKATAN 2000

Generasi yang Hilang

Kisah sulitnya meraih pengakuan publik. Kegelisahan kreatif atau gerakan politik sastrawan muda?

ALAF baru sudah di ambang pintu. Diam-diam berbaris generasi yang meninduhkan stempel zamannya. Sebelum abad lewat, jejak prestasi kudu dicatat. Semangat penantian itu merasuk dalam diskusi "Angkatan Sastra 2000" di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yassin, Sabtu dua pekan lalu.

Komunitas Sastra Indonesia (KSI) bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta dan harian *Republika* kali ini menampilkan kaum akademisi. Pembicara Hasan Alwi (Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa) dan Abdul Rozak Zaidan (wakil Indonesia di Majels Sastra Asia Tenggara) bersahutan ide dengan Sunu Wasono dan Maman S. Mahayana (dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia).

Diskusi serupa tahun silam menampilkan kalangan sastrawan dan kritikus muda: Edy A. Effendi, Sitok Srengenge, Korie Layun Rampan, dan Eka Budianta. "Sekarang kami ingin mendengar suara pengamat di luar komunitas sastrawan," ungkap Wowok Hesti Prabowo, Ketua KSI. Catatan mereka bernada skeptisisme berat. NP 34/5

Maman, misalnya, mempertanyakan keperluan adanya sebuah angkatan dalam sastra. Bahkan, ia mendesakkan revisi konsep angkatan. "Lebih tepat periodisasi sastra," ujar Maman. Tak perlu ada tokoh yang ditahbiskan. Cukup deskripsi karya dan proses kreatif serta kesinambungan sejarah.

Sunu malah menyesalkan tekanan eksistensial sastrawan muda justru merepotkan guru bahasa dan sastra. Acap kali pengertian angkatan dan periodisasi sastra jadi campur aduk. Dalam penegasan Abdul Razak, "Angkatan 2000" terlalu prematur diprok-

lamasikan. Tengok saja, tradisi "Paus Sastra" Indonesia, H.B. Yassin, yang mencuatkan Angkatan 1945 dan 1966 setelah tahun keramat itu lewat.

Tapi, semuanya sependapat penghargaan wajar atas keberadaan sastrawan muda diperlukan. Jangan sampai mereka menjadi —pinjam istilah Chairil Anwar seperti dikutip Toto St. Radik dalam jurnal *Angkatan* pada November 1998—bagai "tulang-tulang berserakan". Tak ada kritikus yang memberi makna.

Keterampilan berbahasa, disinggung Hasan Alwi, sebagai modal dasar yang kurang dipupuk. Tata bahasa yang mantap, kosakata dan peristilahan lengkap, serta daya ungkap tinggi. Hanya dengan kualifikasi itu, pengarang menghasilkan karya terbaik dan bermutu.

Karena itu, Korie Layun Rampan, pelontar ide "Angkatan 2000", tidak terlalu *ngotot* dengan tawarannya. "Itu hanya sebuah nama," tutur Korie. Ia sedang menuntaskan antologi karya yang akan diterbitkan pada awal milenium ketiga. Sudah ratusan nama sastrawan muda terkumpul. Karena dirasa sesak, kontributor disaring menjadi 70 pengarang.

Diskusi dan penerbitan antologi ternyata bagian dari strategi sosialisasi, kristalisasi, dan proklamasi angkatan baru. Selama ini pelajaran sastra di sekolah cuma menyebut: Angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 1945 dan 1966. Ada juga yang menyodorkan Angkatan 1970 (Sutardji Calzoum Bachri) dan Angkatan 1990 (Afrizal Malna). Namun, sejarah resmi belum bergeser.

Akar kegelisahan angkatan baru bisa dilacak, Maret 1998, dengan terbitnya jurnal *Bubutan* (Budaya Buruh Tangerang). Sebulan kemudian, pasar puisi di Taman Budaya Solo membentuk tim kecil perumus visi angkatan muda. Bersamaan gerakan reformasi Mei, diluncurkan antologi puisi "Pabrik" di Roda-roda Budaya Tangerang. Hingga, puncaknya debat "Reformasi Sastra" yang menyimpulkan angkatan sastra terkait dengan latar politik bangsa.

Angkatan baru penting guna menyelamatkan satu generasi berikut capaian estetik agar tak hilang dalam rimba sejarah. Ciri angkatan itu ditandai sastra yang peduli dan mandiri, bersemangat demokrasi dan pluralisme. Spirit yang sama diekspresikan secara heterogen. Dalam setahun pergumulan, gerakan meluas ke luar Jawa. Kegelisahan kreatif meruyak akibat krisis politik dan krisis kebangsaan.

Sayang, belum lahir wacana baru yang matang, macam Surat Kepercayaan Gelanggang (1948) dan Manifes Kebudayaan (1966). Tesis Dami N. Toda (1977) dan esai Sutardji (1984) pernah menjadi tonggak penyadaran. Siapakah juru bicara angkatan baru?

Akibatnya, tuntutan pengakuan dipandang sinis sebagai "gerakan politik" sastrawan muda yang ditelantarkan publik. Ekses posisi marjinal dalam etalase media massa. Baru Afrizal Malna dalam puisi, dan Seno Gumira Ajidarma dalam prosa, yang terekspose memadai.

Dulu, sempat menjalar polemik Revitalisasi Sastra Pedalaman (RSP). Penggagasnya: Sosiawan Leak, Kusprihyanto Namma, Beno Siang Pamungkas. Mereka menyerang elite sastrawan yang diuntungkan publikasi media. Setelah muncul beberapa pentolannya, karya mereka redup segera. Persis polemik sastra kontekstual yang digulirkan Arief Budiman.

Langkanya kritikus dituding sebaga tumbal. Padahal, cukup banyak skripsi dan artikel yang menyorot karya sastrawan muda. Tak cuma Chairil Anwar dan Taufik Ismail yang di-*obok-obok* sebagai pemuka angkatan terdahulu. Beribu cara bisa ditempuh untuk mendapat pengakuan. Cuma satu jalan membuktikannya: terus berkarya tak kenal pamrih.

Akuat Edy Supriyanto

Gatra, 17 Oktober 1999

■ SASTRA BURUH

Tak ada Kisah Bahagia

Tak dinyana, puisi berkecambah dari kaum buruh. Mereka menulis tentang dunia mereka yang penuh derita.

Di pabrik kini ada kritik. Hadir lewat puisi yang ditulis oleh buruh pabrik. Fenomena tersebut menggejala di kota-kota industri di Indonesia sejak lima tahun ini. Misalnya, di Solo, Kudus, Surabaya, dan terutama di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Puisi-puisi itu ditulis ratusan orang buruh. Mereka menyebutnya puisi buruh.

Bila dibanding ribuan penyair Indonesia, jumlah mereka belum seberapa. Tapi, tak ada satu profesi pun di Indonesia yang menulis tentang dunia profesinya sebanyak itu. Misalnya, tak ada mahasiswa yang menulis tentang dunia mahasiswa dalam jumlah sebesar itu. Begitu juga guru, dokter, pengacara, dan sebagainya.

Jumlah itu makin membesar bila ditambah dengan para buruh yang menulis puisi, tapi bukan dengan tema perburuhan. Jumlah mereka jauh lebih besar dari para buruh yang menulis puisi perburuhan. Sebab, media untuk mereka pun lebih banyak. Hampir setiap pabrik yang memiliki majalah atau terbitan berkala biasanya menyediakan ruang puisi untuk buruh. Tapi, puisi majalah-majalah pabrik ini umumnya bertema cinta. Maklum, majalah itu diterbitkan sebagai corong dari pengusaha.

Fenomena buruh berkesenian marak sejak awal 1990-an. Mulanya, mereka aktif di seni rupa, terutama melukis. Mereka juga berteater dan menulis puisi. Publikasinya cukup marak di media-media cetak. Terakhir, beberapa sopir angkutan kota di Tangerang pun mulai memainkan sejenis musik tradisional gaya baru, yakni keroncong campur sari.

Semua aktivitas itu tak bisa dilepaskan dari adanya kesadaran buruh untuk mengubah pola hubungan buruh-majikan yang cenderung timpang. Kesadaran mengubah nasib ini muncul lantaran sistem industri yang tidak bersahabat. Sifat kritis masyarakat, termasuk buruh, pun makin berkembang. Salah satunya ditopang oleh upaya yang dilakukan para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Mekarnya keunikan ini tak bisa dilepaskan dari gerakan buruh. Pada periode sekitar akhir 1980-an sampai saat ini, gerakan buruh antara lain ditandai oleh aksi pemogokan. Kesenian, terutama puisi, seringkali turut mewarnai protes kaum buruh. Antara puisi dan pe-

mogokan bisa berjalan berbarengan.

Pemogokan itu muncul sebagai akibat dari tindakan sewenang-wenang mengeksploitasi tenaga buruh. Padahal, upah yang diterima para buruh umumnya berada di bawah upah minimum regional (UMR). Kalaupun UMR ini dipenuhi, sebetulnya para buruh pun tetap sulit untuk hidup sederhana.

Akhirnya, unjuk rasa berupa mogok kerja dan demonstrasi pun merebak. Biasanya, aksi diiringi dengan pemberhentian kerja terhadap para penggeraknya. Tak sedikit pula yang ditangkap polisi. Fakta yang paling mengenaskan adalah tewasnya Marsinah, buruh pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur, yang kemudian dijadikan simbol perjuangan para buruh.

Lalu, mereka jadikan seni sebagai alat penyadaran. Mereka menulis puisi di WC-WC pabrik, saat jam istirahat tiba. Pabrik akhirnya bukan hanya tempat untuk menghasilkan barang dan jasa, melainkan juga puisi. Di rumah-rumah petak, rumah kontrakan mereka, pun mereka tetap memproduksi puisi.

Maka, bertaburanlah puisi dari tangan mereka. Ini sebuah fenomena yang bagi orang lain terasa ironis di tengah begitu sulitnya mereka mencari uang. Misalnya, bisa dicatat *Antologi Keberangkatan* karya Dingu Rilesta dan Nurjana Sutarji (1993), *Mencari Tanah Lapang* karya Wiji Thukul (1994), *Rumah Petak* karya Wowok Hesti Prabowo dan Dingu Rilesta (1996), *Rumah dan Limbah* karya Saidul Anam (1996), *Antologi Puisi Ririwa* karya Aef Sanusi (1996), *Tolong Catat Perihku, Antologi Puisi Perih* karya Dingu Rilesta (1996), *Kau, Aku, dan Tuhan* karya Aef Sanusi (1997), *Pabrik (Antologi Puisi Buruh Tangerang-Kudu)* (1998), dan *Buruh Gugat* karya Wowok Hesti Prabowo (1999). Masih ada sejumlah antologi dalam bentuk fotokopi, yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Sebagai alat perjuangan, kontribusi karya seni mereka itu memang tidak bisa diharapkan sebesar mogok kerja. Tapi, minimal keterlibatan mereka dalam berkesenian ternyata membuat mereka lebih peka dan kritis. Konon, mereka jadi lebih militan.

Citra lain dari buruh pun muncul —selama ini buruh dicitrai sebagai manusia bodoh dan hanya mengandalkan otot. Dengan menulis puisi, mereka sebetulnya melakukan kerja intelektual. Tapi, apakah puisi-puisi mereka benar-benar mencerminkan sebuah hasil kerja intelektual?

Puisi mereka hanya mengekspresikan keterjajahan di pabrik. Mereka melihat pabrik sebagai dunia yang represif. Sepertinya, tak ada cerita bahagia.

Iwan Gunadi

** Kelompok Tikar Pandan, Jakarta.*

Gatra, 17mOktober 1999

Angkatan Sastra 2000

Tulisan Kedua (terakhir)

Apa yang terjadi kemudian dalam catatan buku sejarah kesusastraan Indonesia? Kembali kesalahan yang sama terjadi. Pengungkapan keanekaragaman tema karya-karya yang terbit pada masa itu, hanya muncul pada karya yang diterbitkan sebagai buku. Karya sastra yang terbit di media massa, luput dari catatan. Padahal, dibandingkan dengan situasi kesusastraan zaman sebelumnya, tahun 1950-an merupakan masa yang paling semarak. Begitu banyak majalah dan surat kabar terbit, termasuk majalah khusus cerpen11), dan hampir semuanya memuat karya-karya sastra. Dengan demikian, pembabakan sesudah Angkatan '45 ke Angkatan '66, sebenarnya mengandung rumpang. Di antara kedua Angkatan itu, mestinya ada satu angkatan lain, sebagaimana yang diusulkan Ajip Rosidi mengenai Angkatan Terbaru12). Persoalannya akan menjadi lain jika pembabakan itu berdasarkan periodesasi, dan bukan angkatan.

***

Pembicaraan beberapa periodesasi tersebut di atas (Balai Pustaka sampai Angkatan '45) sekadar hendak menunjukkan bahwa catatan sejarah kesusastraan Indonesia, perlu segera direvisi. Satu hal yang juga penting dipertimbangkan adalah keberadaan sastra yang dimuat di berbagai media massa. Tanpa melibatkan itu, maka catatan sejarah kesusastraan Indonesia akan tetap menampilkan potongan-potongan tidak lengkap dari perjalanan kesusastraan kita.

Penamaan Angkatan '66, sesungguhnya juga mengandung beberapa persoalan, oleh karena itu terbuka pula untuk diperdebatkan. Dasar pemikiran Jassin mengenai Angkatan '66 ini, bertumpu pada peristiwa tahun 1966 ketika mahasiswa dan para pelajar kita mendobrak kebobrokan dan penyelewengan negara." *...kita pun menyaksikan satu ledakan pemberontakan dari penyair, pengarang dan cendekiawan, yang telah sekian lama dijajah jiwanya dengan slogan-slogan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa."13)* Selanjutnya Jassin mengatakan: *"Siapakah pengarang-pengarang yang termasuk Angkatan '66 ini? Ialah mereka yang ketika tahun 1945 berumur kira-kira enam tahun dan ... tahun 1966 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka inilah yang telah giat menulis dalam majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 55-an, seperti* Kisah, Siasat, Mimbar Indonesia, Budaya, Indonesia, Konfrontasi, Tjerita, Prosa, Basis..."14)

Demikianlah, kita melihat bahwa penamaan angkatan-angkatan yang lalu diajarkan di sekolah-sekolah, sebenarnya mengandung banyak persoalan. Jika persoalan masa lalu penamaan sejarah kesusastraan kita masih perlu perevisian, lalu perlu dan sudah amat mendesakkah Angkatan 2000 dilahirkan? Persoalan tahun 70-an yang semarak dengan karya eksperimentasi dan tahun 80-an yang beragam, juga masih perlu perumusannya sendiri. Oleh karena itu, pembicaraan angkatan 2000, seyogianya di dalam konteks prediksi-prediksi yang serba mungkin melahirkan kecenderungannya sendiri.

Sastra Indonesia Tahun 2000

Sejak itu, "Sastra Pedalaman" digulirkan, sastrawan berbagai daerah di luar Jakarta seolah-olah hendak berteriak keras dan "mendesak" legitimasi keberadaan mereka. Keberadaan sastrawan daerah yang kemudian mengirimkan karya-karya ke pusat-pusat kota, sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Balai Pustaka berdiri. Lalu, perlukah legitimasi itu diberikan, jika secara faktual mereka memang ada dan mengada?

Dalam konteks sejarah kesusastraan Indonesia, kehadiran mereka — apalagi yang tidak menulis di media-media ibu kota — memang acapkali tenggelam dan ditenggelamkan. Beruntung mereka kemudian mempublikasikan sendiri karya-karyanya — meski dengan biaya swadaya dan dengan hasil cetakan yang tidak mewah. Lalu, apakah keberadaan mereka akan ditenggelamkan lagi? Inilah tugas besar lembaga-lembaga penelitian untuk menginventarisasi dan mengkodifikasi karya-karya mereka.

Sementara itu, terbitnya koran-koran dan majalah lokal, sekaligus merupakan wadah yang telah memberi peluang bagi mereka untuk menyalurkan karyanya. Jadi, sesungguhnya publikasi mereka dapat dilakukan secara lokal dan nasional. Di sini pula, penelitian mengenai sastra koran dan majalah, mutlak perlu dilakukan.

Dalam situasi demikian, perubahan besar dalam tatanan kehidupan sosial politik di negeri

ini, niscaya juga akan berdampak besar bagi kehidupan sosial budaya di berbagai daerah. Tawaran otonomi daerah yang lahir dari keinginan untuk tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, membuka ruang yang lebih luas bagi sastrawan di berbagai daerah untuk menunjukkan jatidirinya dan bersaing secara sehat dengan sastrawan ibu kota. Jakarta, niscaya tidak akan lagi menjadi pusat orientasi.

Kecenderungan itu sudah tampak ketika isu "Sastra Pedalaman" digulirkan, dan keberadaan mereka akan sangat penting dalam tahun 2000 nanti. Lalu, apakah cukup signifikan kontribusi mereka bagi perkembangan kesusastraan Indonesia? Sekadar contoh, mari kita periksa beberapa nama mereka.

Dalam tahun 2000 nanti, Gus tf (Padang) dan Taufik Ikram Jamil (Riau), agaknya tinggal menunggu waktu pembaptisannya sebagai sastrawan penting awal abad ke-21 ini. Bahwa keduanya memperlihatkan penguasaan bahasa Indonesia dengan begitu jernih, tentu tak terlepas dari latar sosio-kulturalnya. Meski keduanya memperlihatkan problem kultural yang berbeda —dan terasa lebih kental pada diri Taufik, *Sangkar Daging*, Gus tf dan *Tersebab Haku Melayu*, Taufik, merupakan karya *jadi* dan menjanjikan. Sekali lagi, pembaptisannya sastrawan penting tinggal menunggu waktu.

Hal yang sama juga terjadi pada sastrawan Bandung, Acep Zamzam Noor, Soni Farid Maulana, Agus R Sarjono, tak pelak lagi adalah tiga nama yang juga sudah *jadi* dan keduanya tidak perlu lagi menunggu waktu. Jangan lupa pula nama Cecep Samsul, Hari dan Oka Rusmini, dua nama yang kiprahnya penuh pengharapan. Disusul dengan nama-nama Ahmad Syubbanudin Alwy, Saeful Badar, Karno Kartadibrata, Doddi Achmad Faqzy, Juniarso Ridwan, Beni

Oleh Maman S Mahayana

Setia, Atasi Amin, Ahda Imran. Bandung kelak sangat mungkin akan menjadi salah satu pusat kegiatan sastra yang penting yang tidak dapat diabaikan kontribusinya bagi perkembangan kesusastraan Indonesia.

Lampung juga patut diperhitungkan. Nama-nama Naim Emel Prahana, Hasanuddin Z Arifin, Isbedy Stiawan ZS, Syaiful Irba Tanpaka, Panji Utama, tidak hanya penting bagi penyemarakan kehidupan sastra di sana, tetapi juga penting dalam mendorong lahirnya (calon) sastrawan yang kemudian.

Kesemarakan kehidupan kesusastraan Indonesia belakangan ini, dimungkinkan pula oleh peran yang dimainkan komunitas-komunitas sastra. Riau, Bandung, Lampung, Padang, Makasar, Banten, Depok, Tangerang, dan entah di mana lagi komunitas-komunitas sastra itu bertebaran. Keberadaannya jelas punya kontribusi yang tidak kecil. Komunitas Sastra Indonesia, misalnya, secara berkala menyelenggarakan kegiatannya cukup punya arti penting dalam konteks pemerkayaan catatan sejarah kesusastraan kita. Penelitiannya mengenai komunitas sastra di Jabotabek, memperlihatkan,

Perubahan besar dalam tatanan kehidupan sosial politik di negeri ini, niscaya juga akan berdampak besar bagi kehidupan sosial budaya di berbagai daerah.

betapa kehidupan kesusastraan kita sesungguhnya tidak sepi. Usahanya menerbitkan kumpulan puisi terbaik15), tahun 1998 merupakan salah satu cara "melahirkan" sastrawan.

Beberapa nama yang juga patut dicatat, antara lain, Anil Hukma (Ujungpandang) yang telah menghasilkan beberapa antologi, Tomon Haryowisobo (Yogyakarta) jika cukup menjanjikan, dan Tomy Tamara (Makasar) sangat gigih menekuni bidang sastra. Selain itu, sejumlah nama lulusan FSUI, agaknya tidak mau ketinggalan Yudhi Sunarto, dan kemudian Asep Sambodja, Ihsan Abdul Salam, Purwad Djunaedi, Rizal, dan belakangan Zeffry J Alkatiri, memberi warna lain dalam peta kesusastraan kita.

Nama-nama lain, pasti masih banyak yang tercecer. Yang jelas, mereka adalah penyair (yang sudah jadi) dan (calon) penyair yang sungguh menjanjikan. Merekalah yang kelak akan turut menentukan maju tidaknya kesusastraan Indoensia abad ke-21.

Sementara itu, para cerpenis muda kita—

yang juga bertebaran di pelosok tanah air ini— beberapa di antaranya niscaya akan menjadi sastrawan penting. Seno Gumira Ajidarma, Jujur Prananto, Yanusa Nugroho, —jelas— tidak perlu diperkatakan lagi. Dari Surabaya, M Shoim Anwar (telah menghasilkan sejumlah antologi) dan Sirikit Syah (juga telah menghasilkan antologi) memperlihatkan kualitas yang mumpuni, kemudian Kusprihyanto Namma dan Aria Kamandaka, Sony Karsono memberi banyak harapan bagi karya-karya selanjutnya. Dari Yogyakarta, dua nama Agus Noor dan Joni Aridinata; di antara penulis wanita, Helvy Tiana Rosan dan Lea Pamungkas, patut pula kita perhitungkan.

Sesungguhnya, masih banyak nama yang memberi pengharapan besar bagi penyemarakan kesusastraan kita di masa mendatang. Merekalah yang kelak diharapkan "menguasai peta" cerpen Indonesia.

Bagaimanakah dengan prosa Indonesia mendatang? Harapan besar tentu jatuh pada nama Ayu Utami, Taufik Ikram Jamil, dan para cerpenis kita. Meski para cerpenis itu belum menghasilkan novel, dari cara bertutur dan tema yang dikedepankan, teristimewa Seno, Yanusa, dan Jujur, novel dari tangan mereka tinggal menunggu waktu dan maunya mereka.

Apa yang melandasi pemikiran bahwa mereka akan berperan penting dalam penyemarakan kesusastraan Indoensia abad ke-21. Peran media massa, terutama surat kabar Minggu, baik terbitan ibu kota, maupun daerah, tetap akan memberi kontribusi penting dalam melahirkan dan mematangkan kesastrawanan mereka. Kondisi itu juga dimatangkan lewat peran komunitas-komunitas sastra.

Sementara itu, di luar peran media massa dan komunitas sastra, terjadinya perubahan mendasar dalam kehidupan sosial politik pemerintah, memberi ruang yang cukup luas bagi penyemarakan kehidupan sosial budaya —termasuk sastra— di negeri ini. Adanya penataran bagi guru-guru sastra, sebagaimana yang sudah, sedang dan terus akan dilakukan Taufiq Ismail, membuka terjadi perubahan cara pengajaran sastra di sekolah-sekolah. Yang lebih penting dari itu, memungkinkan citra sastrawan dalam pandangan guru dan siswa, berubah secara meyakinkan. Anggapan bahwa membaca karya sastra sebagai pekerjaan yang membuang-buang waktu, profesi sastrawan sebagai "pengangguran" dan pelajaran sastra sebagai materi yang tidak penting —dalam penataran itu— tampak mulai berubah secara meyakinkan.

***

Kehidupan sastra tahun 2000, jika melihat fenomena yang terjadi dewasa ini, agaknya sangat melegakkan hati. Persoalannya tinggal, apakah para sastrawan kita, mampu mengeksploitasi dan mengeksplorasi berbagai problem sosio-kultural kita. Tanpa usaha pendayagunaan dan penjelajahan itu, tanpa usaha penggalian dan pendalaman keberagaman kekayaan kultur kita, niscaya karya-karya yang akan dihasilkannya hanya sebagai karya yang baik, tidak monumental. Jika begitu, ia hanya sekadar meramaikan belaka dan tidak cukup penting untuk melengkapi catatan sejarah kesusastraan Indonesia.

Demikianlah, jika tahun 2000 nanti, sejumlah nama yang telah disebutkan itu secara kolektif cukup signifikan mewarnai peta kesusastraan Indonesia, penamaan sebagai Periode Reformasi Kita lihat saja nanti!***

1) Ajip Rosidi, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia* (Bandung, Binacipta, 1976), hlm. 13.
2) Ibid., hlm. 16-19.
3) Ajip Rosidi, *Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir?* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm 1-8.
4) Zuber Usman, *Kesusastraan Baru Indonesia* (Djakarta: Gunung Agung, 1957), hlm. 1-2.
5) A Teeuw, *Sastra Baru Indonesia* (Ende: Nusa Indah, 1978), hlm. 15-18.
6) Majalah *Poetri Hindia* yang dikelola Titro Adhi Soerjo sengaja menggunakan bahasa Melayu Pasar, karena menurutnya bahasa Melayu seperti itu adalah bahasa masyarakat pribumi. Ia menolak menggunakan Ejaan Ophuijsen, karena selain logat yang dirumuskan orang asing, juga secara teknis menambah biaya jika berkirim telegram (kawat). Ia mau menggunakan logat van Ophuijsen jika pemerintah Belanda mendanai penerbitan majalah itu. Inilah kalimat terakhirnya: *"Kalau Gouvernement tida maoe kesempoernaan maksoednya Poetri ini, Poetri poen tida maoe bantoe meoemoemkan pendapatnja Ophuizen jang disangkal tidak saja oleh kantor post djoega ampir semoea pers Melajoe.*
7) *Perlu diingat bahwa berdirinya Balai Pustaka (1908, 1917) terutama dimaksudkan sebagai usaha mencegah masuknya pengaruh bacaan terbitan swasta. jadi, secara tidak langsung, penerbit-penerbit swasta itulah yang "mendorong" pemerintah Hindia*

Belanda untuk mendirikan Balai Pustaka.

8) *Budi darma, "sastra Kita Menghadapi Masa Depan",* Horison, *Mei 1999, hlm. 12.*

9) *Lihat Sitor Situmorang, "Angkatan 45", Gelanggang,* Siasat, *6 November 1949, Pembicaraan mengenai Angkatan 45 yang agak lengkap, lihat Keith Foulcher,* Angkatan 45 *(Jakarta: Jaringan Kerja Budaya, 1993; dengan beberapa perubahan dimuat pula dalam "Angkatan 45 dan Warisannya: Seniman Indonesia sebagai Warga Masyarakat Dunia", Ajip Rosidi, et al.,* Asrul Sani 70 Tahun, *(Jakarta: Pustaka Jaya, 1997) hlm. 85-114.*

10) *Budi Darma, Loc. Cit, hlm. 15-16.*

11) *Majalah* Prosa, *terbit pertama kali Juli 1955.*

12) *Ajip Rosidi, Op. Cit., hlm. 138. Lihat juga, Ajip Rosidi,* Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir? *(Djakarta: Bharata, 1964).*

13) *H.B. jassin,* Angkatan 66: Prosa dan Puisi, *(Jakarta: Gunung Agung, 1976), hlm. 5.*

14) *Ibid, hlm. 19.*

15) *Untuk tahun 1998, Komunitas Sastra Indonesia telah memilih antologi puisi Toto ST radik,* Indonesia Setengah Tiang, *(KSI, 1999). Saya melihat, penyair asal Banten itu punya prospek yang baik jika terus serius menekuni bidang sastra.* ■

Republika, 17 Oktober 1999

Serah Terima Kepengurusan Komunitas Sastra Indonesia

JAKARTA — Bertempat di Lantai 2 Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, tanggal 30 Oktober nanti akan diadakan serah terima kepengurusan Komunitas Sastra Indonesia (KSI).

Selain itu itu, setelah acara serah terima jabatan pengurus KSI, juga diadakan peluncuran dan diskusi dua buku karya Wilson Tjandinegara. Dua buku karya anggota KSI itu adalah Kumpulan Cerpen Mini Yin Hua (karya terjemahan) dan Kumpulan Puisi Rumah Panggung di Kampung Halaman (Indonesia-Mandarin). Bertindak selaku pembicara dalam acara diskusi dan peluncuran buku karya Wilson Tjandinegara adalah Melani Budianta dan Korrie Layun Rampan.

Dalam kesempatan yang sama juga digelar acara hiburan berupa pertunjukan seni tradisi Tiongkon Kuno, musik kecapi Tiongkok kuno, demonstrasi melukis gaya Tiongkok. Juga diadakan acara pembacaan puisi dan cerpen oleh para penyair dan cerpenis dari berbagai kota di Indonesia. Mereka antara lain Idris Siregar (Medan), Nanang Suryadi (Malang), Asa Jatmiko, Bambang Widiatmoko (Yogyakarta), dan masih banyak lagi. Setelah itu, digelar hiburan oleh vokal grup KPS Bandung.

Sampai Oktober tahun ini, KSI telah tiga tahun hadir dan eksis di tengah komunitas para pekerja, pemerhati, dan peminat sastra di Indonesia. Selama ini banyak tafsir positif dan negatif muncul atas pelbagai aktivitas KSI. Walau begitu para pengurus KSI mengaku bisa menerima semua penilaian terhadap mereka dengan tangan terbuka. ■ sil

Republika, 19 Oktober 1999

"Kereta Kencana" WS Rendra di GKJ

Jakarta, Kompas

Setelah digelar di Surabaya dan Solo, mulai Rabu (20/10) besok pentas drama berjudul *Kereta Kencana* oleh Bengkel Teater kembali akan digelar di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ). Dramawan besar WS Rendra dan istrinya Ken Zuraida akan tampil dalam pergelaran drama berdurasi kurang lebih 1,5 jam ini.

Kepada pers di Jakarta kemarin Rendra menyebutkan, pentas *Kereta Kencana* ini ia pentaskan pertama kali di GKJ awal tahun 1960-an, ketika ia tengah merintis berdirinya teater bersama Arifin C Noer, Deddy Soetomo, dan sejumlah orang lainnya. Kini pentas ulang yang "disadur" dari naskah berjudul *Les chaises* (Kursi-kursi) karya Eugene Eunesco ini dilakukan guna membangkitkan kenangan lama itu.

Tak kalah penting dan utama, jelas Rendra, pementasan *Kereta Kencana* ini juga dilakukan untuk menghormat Prof Dr Umar Kayam yang disebut-sebut Rendra sebagai seorang sutradara berbakat dan hebat sekaligus "guru"-nya. "Saya ingin persembahkan pentas ini bagi guru saya yang pernah mengajari saya bermain drama saat masih menjadi mahasiswa tingkat satu di UGM beberapa tahun silam," ungkapnya.

Pada bagian lain Rendra mengatakan, *Kereta Kencana* sengaja digelar hari-hari ini bersamaan ketika para wakil rakyat tengah bersidang untuk, antara lain, memilih presiden dan wakil presiden. Ini ada maksudnya, karena bagi Bengkel Teater pimpinan Rendra, hari-hari sibuk Sidang Umum MPR itu sungguh sebuah tantangan menarik.

"Setidaknya bagi saya, agar bisa tahu, manakah pentas yang lebih menarik dan lebih membicarakan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dua pentas digelar hampir bersamaan, dan dengan itu saya harapkan masyarakat lalu tahu, pentas Senayan (Sidang Umum—**Red**) atau drama *Kereta Kencana* di GKJ-kah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat berkat fokus pembicaraannya tentang nilai-nilai kemanusiaan universal," jelas Rendra. **(ryi)**

Kompas, 19 Oktober 1999

Aneh, Guru Bahasa tak Pahami Sastra

JAKARTA (Media): Adalah sesuatu yang aneh jika ada guru bahasa tak memahami kesusastraan. Kewenangan guru bahasa seharusnya meliputi juga kemampuannya memperkenalkan siswa pada kesusastraan secara umum.

"Jika guru bahasa memahami sastra sebenarnya tidak perlu bahasa dan sastra dipisahkan sebagai dua mata pelajaran yang ditangani oleh dua orang guru," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Fuad Hassan di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan hal ini pada Pertemuan Ilmiah Nasioanl X Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski) dengan tema 'Sastra Masuk Sekolah'. Acara ini akan berlangsung hingga Rabu (20/10) besok.

Menurut Fuad yang juga Guru Besar Fakultas Psikologi UI, jika guru bahasa juga menguasai sastra, tak ada lagi tuntutan bahasa dan sastra diajar oleh guru yang berbeda. Ini karena beratnya beban kurikulum yang ada sekarang.

Tetapi, di pihak lain ia juga meminta para pembuat kurikulum serius dan benar-benar tahu apa yang harus dikerjakan. Mereka harus memahami bahwa bahasa bukanlah sekadar medium komunikasi; lewat penguasaan bahasalah akan terjadi pengkayaan dan pencanggihan dalam hidup manusia. "Jadi, penguasaan bahasa harus diartikan juga mencakup kesusastraan sebagai penjelamaan kebahasaan," katanya.

Sementara Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dr Hasan Alwi mengharap kurikulum pelajaran sastra dari segi alokasi waktu memungkinkan pengajar dan para siswa memiliki keleluasaan pengembangan pemahaman lebih lanjut. Dari segi isi atau muatannya, kurikulum pelajaran sastra hendaknya tidak mengisolasi diri terhadap seputar kehidupan nyata yang dihadapi siswa sehari-hari.

Untuk itu, kata Alwi, diperlukan kecermatan dan kejelian pengajar dalam memilih topik karya sastra yang akan dibebankan sebagai tugas membaca kepada siswa. "Hal ini penting karena dengan cara seperti ini para siswa secara tidak disadari akan merasa terlibat dalam permasalahan yang tersaji dalam karya sastra yang ada," kata Alwi.

Pada bagian lain, Alwi juga mengatakan perpustakaan-perpustaan sekolah mestinya terisi karya-karya sastra yang tak hanya sebagai bahan pengajaran. Kalau tidak, apresiasi dan pemahaman siswa terhadap sastra akan sangat gersang dan miskin. Siswa hanya akan mengandalkan bahan yang diberikan pengajar.

"Oleh karena itu, para pengajar sastra, dengan bantuan kepala sekolah, harus mencari upaya agar sekurang-kurangnya persyaratan minimal tentang ketersediaan buku-buku sastra di perpustakaan sekolah itu bisa terpenuhi," katanya.

Selain Fuad Hassan dan Hasan Alwi, pembicara lain dalam seminar itu adalah penyair Taufiq Ismail, Prof Dr Rizanur Gani dari Universitas Negeri Padang, dan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Prof Dr Indra Djati Sidi. (Djt/B-2)

Media Indonesia, 19 Oktober 1999

Datanglah kepada Penyair

Oleh SUPRIYANTO FZ

PENYAIR dari Tasikmalaya, *Saeful Badar* (selanjutnya SA), menulis ihwal keberadaan puisi akhir-akhir ini dengan sangat menggugah dan mengundang "gairah" pada *Pikiran Rakyat edisi Minggu 8 Agustus 1999 halaman 11*. Judul tulisannya "Penyair Harus Datang ke Madrasah?", mesti segera direspon. Salah satu responnya adalah: *"Penyair tidak harus datang ke madrasah!"* Mengapa? Ada apa pula dengan kasus sastra koran yang dibicarakan Acep Zamzam Noor?

Bukan "Barang" Asing

Terdapat pernyataan yang kontradiktif pada kalimat awal dari tulisan SA. Ia menulis *"Puisi atau juga karya sastra pada umumnya, masih merupakan 'barang' asing bagi masyarakat kita."* Kalimat pembuka ini berlawanan "kandungan maknanya" dengan paragraf ke tujuh belas tulisannya, yang berbunyi: *"Tapi menurut Acep Zamzam Noor pula, ada satu hal yang cukup membahagiakan, sebab ternyata dari hari ke hari banyak bermunculan nama-nama baru yang berminat menulis puisi. Salah satu buktinya, acara sastra di radio yang digarap SST setiap minggunya selalu 'kebanjiran' naskah puisi, yang ditulis oleh mereka yang belum dikenal sama sekali."*

Harus diakui, fenomena yang ada di masyarakat kita menunjukkan bahwa *puisi bukan lagi merupakan "barang" asing*. Fakta mem-'banjir'-nya puisi dalam acara *"Cakrawala Sastra Kita"* Martha FM, menunjukkan bahwa puisi justru merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Hampir semua orang telah mengenal puisi dan pernah "bergaul intim" dengannya – kecuali mereka yang masih bayi.

Kalau saudara SA memiliki radio yang berdaya tangkap bagus, sesekali tangkaplah gelombang-gelombang radio yang dipancarkan dari daerah lain di Nusantara tercinta ini. Saudara akan tahu bahwa acara-acara sastra di berbagai daerah lain pun sama: selalu "dibanjiri" puisi. Itu berarti pendengar alias peminatnya banyak. Selain radio-radio dalam negeri, radio-radio luar negeri pun – yang memiliki acara siaran berbahasa Indonesia dan memiliki ruang (siaran) sastra/budaya – "dibanjiri" pula oleh kiriman karya sastra dari para pendengarnya untuk dibacakan, dan dikritik.

Fakta bahwa acara-acara ber-"bau" sastra di RRI Pontianak (Kalimantan Barat), RRI Bengkulu, RRI Jambi, RRI Padang, RRI Semarang, RRI Surabaya, RSPD Tegal dan RSPD Cirebon – sekadar untuk mengambil contoh – kendati disiarkan seminggu sekali tetapi selalu kebanjiran puisi, menunjukkan bahwa puisi memang banyak peminatnya.

Mereka (para penyair yang mengirimkannya) meminta bahkan mendambakan puisinya dibacakan – lebih bergembira bila dikritik atau sekadar diperbincangkan. Saya pun acap kali terpesona oleh puisi-puisi mereka – yang bicarakan lewat radio-radio tersebut dan bisa ditangkap secara baik oleh pesawat radio saya di pesisir pantai Indramayu (daerah perbatasan Brondong-Karang Song), kendati nama mereka kurang dikenal di media massa cetak (koran) – yang ternyata selain orisinal juga menampilkan tema-tema yang selama ini tidak pernah tergarap oleh penyair nasional sekalipun.

Sesekali, memang, terdapat juga kasus di mana puisi yang dibacakan di radio (yang dikirimkan oleh penyair baru/pendatang baru) ternyata isinya merupakan hasil bajakan – setidaknya beberapa bait – dari puisi para penyair yang sudah jadi. Soal pembajakan ini memang bisa

mengundang perdebatan, sebab "dunia" publikasi puisi secara lisan -- seperti juga produk budaya lisan yang lain, selain puisi -- tidak sederhana persoalannya.

Terlepas dari masalah pembajakan tersebut, rasanya merupakan sesuatu yang *tidak pada tempatnya lagi* bila dinyatakan bahwa puisi masih merupakan "barang" asing. Pernyataan begini mesti segera ditanggapi. Kasihanilah (tidak juga, *nggak memaksa)* para guru bahasa dan sastra di sekolah yang sudah berpayah-payah memperkenalkan puisi kepada para siswanya sejak mereka (anak-anak Indonesia) berada di jenjang TK.

Sejak minimal tahun anak sudah dikenalkan dengan puisi, bahkan diajak aktif untuk mengapresiasinnya. Puisi di mata mereka amat menggembirakan. "Barang" baru yang menyenangkan, yang menawarkan eksplorasi bagi jiwa mereka. Di masa depan mereka, kelak, puisi yang mereka apresiasi di masa kecil akan berdampak pada perkembangan kejiwaan dan kemanusiaannya.

Di bidang pendidikan (setelah TK) tidak ada *missing link* atau rantai yang terputus dalam upaya memberikan pendidikan dan pengajaran sastra di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia (bila ingin lebih jelas, periksalah kurikulum sekolah-sekolah kita). Bahkan seorang calon *insinyur mesin* sekalipun, yang di lapangan industri hanya akan lebih banyak bergaul dengann mesin-mesin, pada saat kuliah mereka masih diberikan Ilmu Budaya Dasar (IBD).

Tujuannya jelas: pengajaran sastra (budaya) termasuk di dalamnya puisi terus diberikan agar manusia Indonesia mendatang masih manusia yang *manusiawi* dan menghargai karya sastra (termasuk puisi), dan hidupnya masih dipengruhi oleh karya sastra. Bukankah negara-negara besar merupakan negara yang besarpula kualitas karya sastranya, dan orang-orangnya itu sendiri menjadi besar karena membaca sastra?

Media massa: kesenjangan dan miskomunkasi

Menyoal usulan saudara Amang Sholih Hidayat bahwa para sastrawan harus rajin dan dengan tulus ikhlas mendatangi masyarakat secara langsung untuk mengenalkan karya sastra (puisi), pikiran kita mesti jernih menanggapinya. Sebab masalah, sejauh mana seorang sastrawan memperlakukan karya sastra dan menempatkan karya sastra sebagai bagiann dari dirinya.

Di Indonesia, sastrawan yang telah mapan -- biasanya -- memiliki profesi lain yang lebih menyita waktunya. Seorang *penyair* (tidak jarang) ternyata dalam kehidupan sehari-harinya adalah juga *wartawan, guru, dokter, polisi, pegawai negeri, petambak udang, bupati,* atau *tukang becak.* Profesi-profesi mereka inilah yang menjadi bahan pertimbangan tidak bisanya mereka terjun langsung ke masyarakat.

Tetapi hal ini tidak berarti membuat kadar kesastrawanan mereka menjadi "minus". Bukankah masyarakat memiliki tatanan, kelembagaan, ritus, dll. yang bisa disiasati sedemikian sehingga tanpa harus hadir langsung, karya sastra tetap sampai ke tangan masyarakat. Bahwa di kalangan masyarakat kita masih terdapat kesenjangan tingkat apresiasi sastra, itu merupakan fakta. Tetapi upaya ke arah pendidikan berapresiasi sastra terus berlangsung. Bila masih ada yang kurang bahkan *error,* itu karena adanya miskomunikasi.

Miskomunikasi bisa diperbaiki oleh media massa. Kesenjangan tingkat apresiasi masyarakat terhadap karya sastra, salah konsep *(keliru gagas)* masyarakat terhadap sastra, dan miskomunikasi antarsastrawan dan para peminat sastra, bisa diperbaiki oleh media komunikasi massa (media massa). Masalahnya, seper-

ti dikeluhkan Acep Zamzam Noor, sedikit sekali media massa umum yang mau peduli terhadap masalah ini.

Tetapi mesti diingat, masalah ini memang kompleks. Soalnya, media massa umum jelas diperuntukkan untuk umum. Yang harus dilayani banyak. Itulah sebabnya masalah ekonomi, politik, militer, pendidikan, hak asasi manusia, hukum, kriminal, gosip artis, olah raga, semuanya harus ditampung oleh media massa umum. Sastra acap kali "dipinggirkan", bahkan kehabisan lahan di media massa umum. Rasanya hal itu biasa, sebab media massa umum akan lebih mengutamakan *trend isu*nya ke arah manapun yng ada di masyarakat.

Kondisi "payah" seperti itu bukan berarti memperlemah keberadaan sastra. Semakin kompleksnya persoalan dunia, akan membuat persoalan dunia menjadi terbagi-bagi. Di negara-negara yang sudah maju, -- seperti dinyatakan Prof. Ajip Rosidi tahun 1994 dalam ceramahnya di Paguyuban Pasundan Jl. Sumatera Bandung -- setiap bidang persoalan selalu memiliki media massanya sendiri-sendiri. Mereka yang berminat pada olah raga, ada koran atau majalah khusus yang berisi berita dan tulisan olah raga. Mereka yang berminat pada soal-soal mancing, ada koran atau majalahh khusus yang berisi berita dan tulisan-tulisan tentang dunia mancing-memancing. Demikian pula dengan mereka yang menyukai sastra, terdapat koran atau majalah khusus tentang sastra.

Dengan tersedianya media massa yang khusus mengurusi masalah-masalah tertentu, kesenjangan, salah konsep, dan miskomunikasi bisa diperbaiki. Tetapi bagi negara yang sedang berkembang atau malah yang terkategori sebagai dunia ketiga, tidaklah mudah memperbaiki kesenjangan, salah konsep, dan miskomunikasi. Sebab, selain jumlah media massa yang bisa dijangkau tidak memadai, ternyata *tingkat literasi masyarakatnya memang kurang* akibat modal pendidikan mereka yang kurang pula.

Dalam kondisi masyarakat seperti ini, mengkampanyekan puisi, memperkenalkan puisi secara *door to door* belum tentu mendapat sambutan baik. Mereka tidak menunggu datangnya puisi, tetapi mereka menunggu datangnya perbaikan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan rasa senang (hiburan) yang mudah dicerna, misalnya musik dangdut. Apakah kondisi seperti ini mesti membuat para sastrawan sedih? Tentu tidak. Jangan dipaksakan. Tempatkanlah karya sastra pada tempat yang lebih beradab (pada tempatnya). Sebab, karyya sastra bukan diperuntukkan bagi pemenuhan "kebutuhan perut", melainkan pada fungsi yang lebih membumi; *fungsi penyadaran manusia akan jjati dirinya sebagai manusia*. Jadi lebih terletak pada *fungsi penyadaran*.

Oleh karena itu, penyair tidak perlu datang ke madrasah. Sebab, di madrasah telahh berlangsung kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran yang memiliki kadar *fungsi penyadaran* pula. Persoalannya, fungsi-fungsi penyadaran yang dilakukan oleh kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berlangsung secara rutin acap kali menjadi sesuatu yang menjenuhkan (membosankan) bagi para peserta didik termasuk santri.

Mereka membutuhkan "sentuhan" fungsi penyadaran yang lain. Di sinilah, puisi dann berbagai bentuk karya seni, bisa menjadi alternatif. Pada saat menghadapi acara-acara tertentu karya seni ini bisa ditampilkan. Tetapi jelas, yang mengetahui apa-apa kebutuhan para santri (murid) di madrasah/sekolah adalah para pengelola madrasah/sekolah terutama para gurunya.

Dengan demikian, merekalah (para pengelola madrasah/sekolah) yang harus datang kepada penyair untuk meminta bantuan/jasa penyair memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini seniman termasuk penyair dipesan untuk melakukan "ini-itu" lewat karya seni -- tetapi tidak mendikte kreativitas seniman/sastrawan tersebut. Jadi, bukan penyair yang harus datang ke madrasah melainkan pengelola madrasah yang harus datang kepada penyair.

Bukan hanya pengelola madrasah tetapi siapapun dia *(All of ....)* datanglah kepada penyair. Bila penyair yang datang ke sekolah/madrasah padahal penyair tidak tahu persis bagaimana kondisi fungsi penyadaran yang berkembang di kalangan siswa/santri, bisa-bisa apa yang ditampilkan penyair malah bertentangan dengan apa-apa yang diajarkan oleh pengelola/guru -guru di madrasah.

Jadi, apakah penyair harus datang ke madrasah? Boleh-boleh saja, asalkan misi mengamalkan puisi sebagai *fungsi penyadran* kepada manusia (siswa/santri) tidak bertentangan dengan misi-misi lain yang juga *berfungsi penyadaran* yang telah adadi madrasah/sekolah. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kekeliruan-keliruan. Apakah dunia pendidikan di madrasah tidak akan sedih bila suatu saat menyaksikan di madrasah berlangsung festival pembacaan puisi sementara puisi yang dibacakannya justru berisi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran di madrasah tersebut, misalnya kata-katanya penuh dengann idiom-idiom agama yang berbeda dan ajaran yang berbeda atau malah bertentangan?

Kalau begitu ke manakah penyair harus datang? Jawabnya datanglah ke masjid. Mengajilah. Perkayalah imaji-imaji dan proses kreatif penciptaan karya sastra dengan muatan-muatan yang memiliki kadar literasi tinggi. Hal itu bisa diperoleh dari masjid, Al-Quran dan sejarah tumbuh dan berkembangnya Islam menyajikan bahan kajian dan materi yang bisa melatarbelakangi proses kreatif seorang penyair. Kepada penyair yang beginilah, pengelola madrasah datang untuk mengundang penyair masuk madrasah, untuk memberikan *fungsi penyadaran* yang lain (alternatif) kepada para santri. Bila hal ini dipenuhi maka kesenjangan apresiasi, salah konsep, bahkan miskomunikasi setidaknya bisa diminimalisir.***

Pikiran Rakyat, 20 Oktober 1999

RENDRA

Seni Tak Pernah Basi

Publik selalu menggugatnya dengan kebaruan karya senantiasa. Padahal, mana ada yang baru di bawah matahari.

DRAMAWAN Putu Wijaya menyirami air kembang ke ubun-ubun Rendra. Kemudian, Rendra yang cuma bersarung dan bertelanjang dada itu dituntun menuju kamar. Ia didandani mengenakan blangkon lengkap dengan beskap dan keris di belakang pinggang. Rambutnya yang panjang dikuncir. Magrib pun tiba. Lalu, Rendra memimpin salat Magrib bersama hampir seratus undangan di Bengkel Teater Rendra, Cipayung, Depok, Jawa Barat, Kamis pekan silam.

Usai salat, Rendra memotong tumpeng ulang tahun delapan windu usianya. Potongan pertama diberikan kepada istrinya Ken Zuraida. Sebuah ciuman sayang di pipi membuat Ida, sapaan akrab istrinya, sumringah. "Kami berharap Anda menjadi bayi yang dapat cepat berlari, tumbuh, dan berkembang," kata Adi Kurdi, rekan Rendra. Ucapan selamat berhamburan.

Terdengarlah doa-doa *Puji Sulaiman* dilantunkan budayawan Murtidjono, yang datang dari Solo. Gending dandang gula karya Ki Anom Sari fasih meluncur dari bibir Murtidjono. Doa dalam bahasa Arab dan Jawa itu disimak Rendra dengan tekun. "Aku cinta kepadamu," kata Rendra kepada segenap hadirin, setelah doa-doa berakhir.

Rendra kini memang makin tambun dibanding era 1980-an. Ditemui GAMMA, sehari sebelum ulang tahunnya, Rabu pekan lalu, di Galeri Cipta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, ia memakai celana gunung warna coklat, berhem warna abu-abu. Wajahnya cerah. Tak terasa Rendra telah berkesenian selama 44 tahun. "Saya rasanya dimanjakan Allah," katanya.

Pada mulanya, Rendra berangkat dari sajak-sajak balada. Ada kisah cinta, epik-lirik tentang perempuan yang menyedihkan, ditinggal, disakiti, atau tak dimengerti, kejantanan, dan petualangan, seperti antologinya yang pertama, *Ballada Orang-orang Tercinta* (1957). Atau tentang pejuang-pejuang gerilya, korban perang, atau tawanan musuh yang kejam.

Rendra cerdas memilih metafora yang membuat visual sajaknya dramatik. Misalnya, *Bila bulan limau retak/ merataplah Patima perawan tua.../Bini Kasan ludahnya air kelapa.../ lelaki-lelaki rebah di jalanan/ lambung terbuka dengan geram srigala!.../O, bulu dada yang riap!/ Kebun anggur yang sedap!* (Balada Lelaki-lelaki Tanah Kapur).

Apakah Anda merasa ada babakan dalam sejarah berkesenian Anda?

Ada satu periode saya intens memikirkan ketuhanan. Bagaimana manusia bergumul dengan kedaulatan alam, karena itu mengandung kemauan Allah. Bagaimana pergulatan mencapai harmoni. Bagaimana pergulatan akhirnya jatuh ke dosa. Bagaimana pergulatan akhirnya jatuh kepada kemanusiaan. Dari situ, lahirlah *Balada Orang-Orang Tercinta*. Itu kan soal cinta, soal dosa, lalu *Balada Lelaki-Lelaki Tanah Kapur*.

Saya lalu banyak menggarap *folklore*, dongeng rakyat. Meskipun dari dulu saya suka belajar filsafat, tapi ternyata yang dominan pada saya rasa keagamaan, sedikit mistikisme. Terus akhirnya ada satu periode dalam kesulitan menghadapi pemerintahan yang totaliter. Kenyataan politik ini hal yang baru, yang tidak bisa saya siapkan semasa belajar di sekolah. Sebagai remaja tumbuh dewasa saya menghadapi tekanan politik Soekarno yang harus saya lawan, dengan cara perlawanan saya yang kurang pengalaman. Akhirnya saya tersingkir, dan kawin juga.

Di Amerika saya belajar sosiologi, antropologi. Saya benar-benar mengalami kejutan budaya. Syok saya, waduh... Kok ada fakta-fakta budaya yang disebut fakta sosial, fakta antropologis, fakta psikologis. Ilmu pengetahuan humaniora mulai mempengaruhi saya. Nyatanya, saya menghasilkan *Blues untuk Bonnie* itu. Akhirnya, ada periode saya berkenalan dengan agama Islam. Terus mulai berorientasi kepada kitab suci.

Dari periode-periode itu, karya saya selalu memakai bentuk amsal. Selalu bentuk narasi yang saya suka. Tetapi saya banyak menulis balada atau epos. Kenapa? Karena, biarpun saya berfilsafat atau menelaah persoalan sosial-politis, saya suka memakai bentuk amsal. Rupanya itu yang dominan sebagai bahasa ungkapan saya. Kalau berceramah, juga mengandung cerita, amsal. Biarpun mini kata, juga amsal. Puisi juga amsal. Meskipun naskah drama saya, *Kereta Kencana*, itu setengah lirik setengah amsal, bukan berarti saya tak suka lirik, tetapi kecenderungan yang kuat itu menulis amsal.

Mana periode yang paling menarik, mana puncaknya?

Semua selalu menarik, selalu intens, tetapi puncak masih terlalu jauh.

Bukankah karya Anda, seperti Teater Mini Kata, merupakan salah satu puncak, sesuatu yang baru di Indonesia?

Kalau saya tidak nonton kecak, ya *nggak* lahir itu mini kata. Saya sering tertawa dalam hati: di bawah matahari, apa sih yang baru? Yang baru itu apa? Sajak-sajak balada saya itu pun adalah tembang-tembang Jawa diterjemahkan. Dialog-dialog di dalam puisi itu, tembang Jawa kan penuh seperti itu. Paman-paman, opo wartaning ndalan. Ing ndalan akeh wong mati. Mati keno opo? Mati den kanioyo. (Paman: apa yang terjadi di jalan. Di jalan ba-

nyak orang mati. Mati kenapa? Mati teraniaya)..Kan tembang Jawa itu banyak dialognya, apalagi tembang dolanan.

Tapi, Rendra tak berhenti. Ada semacam getaran mistis-kosmis yang mempengaruhinya. Ia berhasil mengolah spekulasi panteismistik tradisional dalam kebudayaan Jawa. Maka, setelah periode *Empat Kumpulan Sajak* (1961), *Blues untuk Bonnie* (1971), dan *Sajak-sajak Sepatu Tua* (1972), kepekaan kemanusiaannya makin meningkat. Pergaulannya dengan filsafat dan wacana politik telah melahirkan sajak-sajak pamflet pada 1974.

Inilah sajakku./ Pamplet masa darurat./ Apakah artinya kesenian,/ bila terpisah dari derita lingkungan./ Apakah artinya berpikir,/ bila terpisah dari masalah kehidupan. (Pamplet Penyair).

Bila Rendra membaca sajak, ia acungkan tinjunya lurus ke udara. Berbelas-belas sajak ia serukan, dan berbalas tepuk tangan penonton. Kita kenang lagi ketika Rendra membaca puisi pada Dies Natalis 50 tahun Fakultas Sastra, UGM, pada April 1995 silam. Suara Rendra lirih, namun kuku-kuku kegetirannya menancap dalam, menggetarkan dan mengharukan. Ia bacakan *Nyanyian Saijah untuk Adinda*, tentang seorang gadis desa yang diperdaya oleh mandor menjadi buruh pabrik, akhirnya terjeblos ke dunia pelacuran, terlunta-lunta di pinggir jalan.

Pun perlawanan Rendra tak melalui sajak belaka. Dalam lakon-lakon panggungnya pun, ia sentakkan kesadaran penguasa lewat lakon-lakon seperti *Antigone*, atau *Lysistrata*. Atau, karyanya sendiri, *Kisah Perjuangan Suku Naga* dan *Panembahan Reso*. Rendra juga piawai membumikan lakon-lakon sulit semacam *Machbet* karya Shakespeare.

Rendra bergerak. Ia kawinkan teori akting Barat dengan metode kanuragan dari khazanah kejawen. Ia ingin, seni aktingnya mengerahkan unsur dalam secara total. Pribadi sang aktor lebur ke dalam tubuh, tulang-belulang, otot, hingga kulit arinya. Maka, metode semadi kejawen amat ampuh untuk menyeret seni peran hingga ke tataran intrinsik totalitas penghayatan.

Bahkan, menurut Putu Wijaya, Rendra sudah membuat teater Indonesia modern menjadi urusan para pejabat, petugas, dan pemimpin. Politik, ekonomi, pendidikan, moral, dan sebagainya berkaitan erat dengan teater. Dan Rendra sudah membayar harga yang mahal. Ia digerayangi petugas. Dicekal. Dipotong kesempatan ke luar negeri. Dan barangkali juga menjadi miskin, sementara teman-temannya yang lain kaya.

Rendra sudah membuat para pejabat menyediakan waktu khusus untuk mengunjungi gedung teater. Menyimak apa yang terjadi ketika lampu dipadamkan dalam gedung pertunjukan. Rendra berhasil mengajak orang percaya bahwa teater bisa dijadikan tempat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Setidaknya, kalau bukan satu-satunya tempat, salah satu tempat, ketika meja hijau atau sidang Dewan Perwakilan belum benar-benar bisa menemukannya.

Bakdi Sumanto, dosen sastra UGM, tak cuma menyebut Rendra sebagai pembebas dan pembaru. Baginya, Rendra juga mampu membangkitkan daya hidup manusia. Bila orang menonton lakon-lakon atau pembacaan syair-syairnya, orang terbangkitkan, dan berani menggugat kembali suatu hal yang ditaklidkan.

Terakhir, Rendra menyajikan lakon *Kereta Kencana* gubahannya atas karya Eugene Ionesco, akhir Oktober lalu di Gedung Kesenian Jakarta. Kala itu, dalam usia delapan windu, Rendra seakan-akan mengajarkan bagaimana mestinya akting diolah di atas panggung, bahwa lakon Rendra mengalahkan agitasi politik. Bahwa gerak anggota tubuhnya lebih mempesona dibanding kekerasan militer di Aceh dan Timor Timur.

Banyak yang mengatakan Anda sekarang mandek? Misalnya, dengan berkali-kali memainkan *Kereta Kencana*?

Ukurannya jurnalisme itu kan *hot*, aktual, *nggak* boleh basi. Beda dengan kesenian, tidak

akan pernah ada basinya. Picasso melukis dalam warna biru selama bertahun-tahun, tapi *nggak* pernah ditanya, apakah kehabisan cat atau daya cipta. Mereka tak bertanya seperti itu karena mereka sudah dalam tradisi kritik seni. Jadi, sudah *ngerti*. Seperti Laurence Olivier memainkan *Hamlet* sampai beribu-ribu kali, tapi tak pernah sama. Julie Andrews memainkan *The Sounds of Music* dari anaknya lahir sampai masuk sekolah (Lihat: *Rendra Dituntut Baru*).

Tapi, Anda tidak pernah menulis lagi?

Puisi saya yang belum terbit itu berapa? Saya belum mau melepas. Saya masih mau menekuninya. *Nggak* buru-buru saya, Dik...

Jika Anda dilahirkan kembali, masih tetap ingin menjadi seniman?

Saya ingin menjadi penyair yang lebih baik.

Bagimana Anda mendeskripsikan diri Anda jika diminta sepatah kata saja?

Penyair!

Bersihar Lubis, dan Akuat Edy Supriyanto

Gamma, 21 Oktober 1999

Kurikulum Pengajaran Sastra Digugat

JAKARTA (Media): Mata pelajaran sastra di lingkungan Depdikbud yang tidak memberi peluang guru melakukan apresiasi sastra, digugat peserta Simposium "Sastra Masuk Sekolah" di Jakarta kemarin. Untuk itu kurikulum seperti ini perlu segera disempurnakan.

Rangkaian acara Bulan Bahasa dan Sastra XX yang berlangsung di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) di Rawamangun, Jakarta Timur, dapat dikatakan hari-hari milik guru setelah seharian berkutat dengan persoalan kurikulum yang menjemukan. Pada hari terakhir simposium tersebut, panelis yang 'bersuara birokratis' menerima luapan emosi para guru yang hadir sebagai peserta.

"Mengajarkan sastra pada anak didik itu gampang, anggap saja sebagai sebuah hiburan," kata Nafron Hasjim, staf P3B Pusat. Ungkapan itu kiranya menggugah emosi para guru yang sehari-hari merasa kesulitan membangkitkan minat siswa terhadap kesusastraan.

Setelah para guru mendapat kesempatan menanggapi pemakalah, tak pelak, kritikan bernada sinis tertuju pada Nafron. Kenapa, Nafron mendapat kritikan pedas? Purbaningsih, dosen IKIP Yogyakarta mengakui tidak bisa menerima pendapat Nafron. "Pendapat itu mencerminkan Saudara Nafron tidak paham terhadap nasib guru ketika berhadapan dengan beban kurikulum yang memberatkan guru dan siswa," ujarnya.

Nafron yang telah satu tahun meninggalkan jabatannya di Balai Pustaka Jakarta, kemarin dituduh sebagai wakil birokrasi yang kerjanya selalu meremehkan tugas berat seorang guru. "Dalam prakteknya, guru selain menghadapi tuntutan kurikulum juga berhadapan dengan 'polisi' kepala sekolah dan kanwil yang memandang keberhasilan pendidikan dari angka-angka nilai ebtanas murni (NEM)," kata Indrajaya, guru SLTP di Padang.

Selama ini, menurut Indrajaya guru dianggap sebagai 'tukang' akibat sistem pendidikan yang sentralistis. Guru hanya dijadikan objek dari proyek-proyek pendidikan yang dibuat di Senayan (Depdikbud berlokasi di Senayan, Jakarta—red) "Mereka yang buat ukuran keberhasilan guru tapi tidak memahami kondisi guru dan murid akibat beban kurikulum," tegasnnya, ketus.

Pandangan senada juga disampaikan Maimudah. Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menegaskan, pengajaran sastra perlu memperhatikan perkembangan jiwa siswa dan tidak bisa dipaksakan dari pusat. "Beri peluang pada guru untuk berkreasi dalam mengajarkan kesusastraan pada siswa mereka," tandas Maimudah.

Sementara Hamid Jabbar, sastrawan kondang mengatakan untuk masa mendatang Depdikbud harus mengubah paradigma pengajaran sastra di sekolah-sekolah, terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ini sesuai dengan rencana desentralisasi sistim pendidikan dalam menghadapi perkembangan zaman.

"Paradigma yang mengajarkan sastra kepada siswa secara 'tekstual' harus diubah," tegas Hamid. Siswa harus diajar berpikir secara global tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal. Maksudnya, menghadapi era globalisasi yang sudah di ambang pintu, siswa sekolah dasar hingga menengah atas dipersiapkan dengan pendidikan yang merangsang berpikir kreatif mereka, tidak dikungkung dengan pengajaran tekstual. Karena dengan cara itulah, menurut Hamid bisa diharapkan lahirnya generasi muda yang siap bersaing secara global. (ST/B-2)

Media Indonesia, 21 Oktober 1999

Kuntowijoyo
Menulis tanpa Formula Khusus

Cerpenis Kuntowijoyo (56) menambah lagi koleksi penghargaan yang pernah diterimanya. Awal bulan Oktober 1999 ini Kuntowijoyo mendapat anugrah *Penghargaan Sastra 1999* dari Pusat Bahasa di Rawamangun, Jakarta. Penghargaan yang berupa sertifikat ini diberikan dalam rangka bulan bahasa.

Penghargaan ini merupakan pelengkap bagi sejumlah penghargaan yang telah diperoleh sebelumnya. Kuntowijoyo enggan berkomentar atas penghargaan yang diperolehnya. "Tidak ada komentar," ucap Kuntowijoyo seperti ditirukan anaknya, Punang Amaripuja, kepada *Republika* di Yogyakarta, Selasa (19/10).

Sebelumnya, ia menerima *South East Asia Write Award* dari pemerintah Thailand. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Putra Mahkota Kerajaan Thailand, Pangeran Maha Vajiralongkorn di Royal Ballroom Orient Hotel, Bangkok, Thailand.

Selain Kuntowijoyo, penghargaan ini juga diberikan kepada sembilan penulis sastra lainnya dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Penghargaan ini diberikan pemerintah Thailand kepada penulis sastra dari negara-negara Asia Tenggara, sejak tahun 1979.

Dijelaskan Kuntowijoyo bahwa menulis karya sastra tidak menggunakan formula apapun. Tetapi ia sangat mengandalkan pada intuisi. Artinya cerita rekaan begitu saja keluar secara langsung, alamiah dan sederhana.

Cerita, lanjut Kuntowijoyo, selalu mulai dengan gagasan yang sangat sederhana. Gagasan cerita telah mengendap beberapa lama, menjadi satu dengan pikiran saya, kemudian menggoda untuk dituliskan.

Gagasan-gagasan cerita timbul tenggelam dalam benaknya dalam waktu yang lama. Sehingga banyak cerita yang sudah terpikirkan dua puluh tahun yang lalu atau lebih tua lagi, baru dituliskan kemudian.

Misalnya, cerita *Anjing-anjing Menyerbu Kuburan* yang berkisah tentang orang yang mencari jimat dengan mengggit telinga orang yang meninggal dunia pada hari Selasa Kliwon. Tulisan ini berasal dari gagasan cerita pada pertengahan pertama dasawarsa tahun 1960-an.

Setelah dipikir-pikir, ia ragu-ragu untuk menuliskannya. Sebab jangan-jangan gagasan tersebut tidak lagi realistis. Baru pertengahan tahun 1990-an, dituliskannya ketika para tukang yang bekerja padanya minta cuti untuk menjaga kubur orang yang meninggal pada hari Selasa Kliwon. Peristiwa tersebut menggugah benaknya bahwa gagasan tentang jimat itu masih hidup di pedesaan pada tahun 90-an.

Menyimpan gagasan cerita memang dapat menjadi beban. Apalagi kalau cerita-cerita itu menumpuk dan ada kemungkinan lupa. Namun Kuntowijoyo mempunyai cara tersendiri yaitu membuat sinopsis cerita dalam buku yang disebut "Catatan Kecil" sejak tahun 1962. Sehingga gagasan itu tidak menjadi beban ingatannya.

Selain itu, "Catatan Kecil" membuatnya optimis bahwa Kuntowijoyo masih mampu menulis meskipun cukup lama "pensiun." Terbukti ia mampu menulis kembali setelah lebih dari dua puluh tahun (1973-1993) tidak menulis. Bahkan pada masa "pensiun" tidak ada satu cerpen pun yang berhasil dituliskannya.

Bagi Kuntowijoyo, mengendapkan gagasan dalam waktu "beberapa lama," ada segi positif dan negatifnya. Positifnya, gagasan itu sudah benar-benar masak dan ada perasaan ingin menuliskannya. Lagi pula, nampak bahwa karya sastra lahir dari lubuk jiwa yang terdalam, terasa suasana antik dan abadinya.

Negatifnya, ia dinilai tidak bisa menulis cerita berdasarkan peristiwa-peristiwa yang aktual. Sehingga terkesan konservatif, ketinggalan jaman dan sepertinya tidak berpartisipasi dalam sejarah yang sedang terjadi.

"Untuk menghibur diri, saya berpendapat bahwa memang seorang pengarang adalah sastrawan dan bukan jurnalis. Kebetulan saya juga belajar sejarah, sehingga "beberapa lama" itu tidak menggelisahkan," ungkap Kuntowijoyo.

Ia memang cenderung mengendapkan gagasan cerita untuk "beberapa lama," sampai yakin bahwa cerita itu ada harganya untuk diketahui orang lain. Maka menoleh ke belakang terhadap pekerjaannya, ternyata juga menggunakan formula tetapi tidak wantah begitu saja.

Ia cenderung menunggu gagasan sampai matang betul. "Matang" berarti bahwa semua unsur cerita menjadi lengkap namun tetap terasa sportan, wajar dan tanpa beban. Kelengkapana unsur-unsur cerita dapat dirumuskan sebagai *three in one* yaitu strukturalisasi pengalaman, strukturalisasi imajinasi dan strukturalisasi nilai.

Pertama, karya sastra adalah strukturalisasi pengalaman. Pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, pengalaman kolektif, pengalaman hasil riset. Ia sendiri belum pernah menulis berdasarkan hasil riset karena selama ini rasanya sudah cukup sibuk dengan pengalaman sendiri, orang lain dan kolektif.

Pengalaman menjadi bahan dasar suatu cerita itu berserakan, terletak di sana-sini, tidak pernah utuh, dan selalu sepotong-potong. Tidak pernah terjadi satu pengalaman yang menghasilkan satu cerita. Pengalaman yang utuh — yang disebut satuan kajian — lalu diberi struktur hanya mungkin dalam tulisan ilmiah, seperti sejarah, sosiologi, politik dan psikologi.

Kedua, karya sastra adalah strukturalisasi imajinasi. Pengarang dapat diibaratkan seperti tukang batu. Ia dihadapkan ada batu bata, pasir, semen, kayu-kayu, genteng tanah yang harus dibuat menjadi sebuah rumah. Dengan sendirinya, dia harus mempunyai imajinasi tentang bentuk rumah.

Demikian pula dengan seorang pengarang harus mempunyai imajinasi mengenai struktur cerita yang akan dibuatnya. Dalam Cerpen "*Dilarang Mencintai Bunga-bunga*", Kuritowijoyo membayangkan adanya seorang tua, pagar tembok, anak laki-laki usia sekolah, ibu yang bijaksana dan ayah yang suka kerja keras.

Dengan imajinasi saya melengkapi, men-

gubah, merangkai, merekat, dan menyulap pengalaman itu menjadi sebuah satuan yang mempunyai makna.

Ketiga, karya sastra adalah strukturalisasi nilai. Nilai dapat berasal dari agama, filsafat, ilmu, kata-kata mutiara, kebijaksanaan sehari-hari, peribahasa, atau dari mana saja. Secara kebetulan di universitas, ia sedang belajar tentang Max Weber. Weber diantaranya membedakan asketisisme surgawi dan asketisisme duniawi. Tokoh orangtua adalah dari tipe asketisisme surgawi (mengutamakan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin) dan tokoh ayah dari tipe asketisisme duniawi (kerja, kerja). Anak laki-laki itu terjepit di tengah-tengah.

Jadi dalam cerita itu diambil dari sosiologi klasik. Jangan sampai nilai itu membebani karya sastra, membuat pengarang lupa akan pentingnya strukturalisasi. Sebaliknya, jadikan nilai-nilai tersebut sebagai nilai tambah pada sebuah karya sastra. ■ hep

Kompas, 21 Oktober 1999

Taufik Ismail dan Sapardi Soroti Tayangan Teve

Karya Sastra Lokal di Ujung Tanduk

JAKARTA (Media): Keberadaan karya sastra lokal pada tayangan televisi nasibnya berada di ujung tanduk. Padahal, dengan semakin banyaknya jaringan teve nasional, mestinya bisa mendorong berkembangnya karya sastra lokal dengan memperbanyak tayangannya.

Hal itu terungkap dalam rangkaian Simposium Bulan Bahasa dan Sastra XX yang berlangsung di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) di Rawamangun, kemarin. Tampil dalam kesempatan itu sastrawan kondang Sapardi Djoko Damono dan Taufiq Ismail. Temanya cukup menggeljitik untuk dicermati di tengah arus deras informasi global.

Mengawali perbincangannya, Sapardi menyatakan, sebagai sebuah wahana informasi, pihaknya masih sulit mendefinisikan makna televisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. "Para ahli komunikasi sendiri masih bingung bagaimana memperlakukan televisi," jelasnya.

Kendati demikian, teve dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan masyarakat yang seharusnya menyediakan ruang bagi penayangan karya sastra. Tentu karya sastra yang ditayangkan di televisi harus disesuaikan dengan karakter teve sebagai media audio visual.

Saparu mengakui, masalah itu sebenarnya bukan suatu kendala, pasalnya karya sastra biasanya tertuang dalam tema tekstual yang dapat dimodifikasi menjadi tema gerak dan suara jika ditampilkan dalam wahana televisi. Namun, kenapa fleksibilitas itu tidak bisa mendongkrak penayangan versi sastra di media visual?

Karena itulah, Sapardi menilai kalangan teve nasional masih belum memberikan perhatian secara proporsional untuk menayangkan karya-karya sastra tadi. "Kalau mereka memberikan perhatian yang cukup, saya kira itu bisa mendorong perkembangan sastra di negara kita."

Sadar atau tidak, menurut Sapardi, era industrialisasi menghancurkan karya-karya sastra yang diekspresikan dan dilestarikan dalam tradisi lisan. Industrialisasi telah membawa orientasi susastra pada perhitungan untung dan rugi. Itu pun kondisinya di Indonesia tergolong memprihatinkan sebab buku-buku sastra lokal jarang diminati pembaca.

Hal lainnya penyampaian karya sastra pada tradisi lisan dianggap sudah menjadi hal langka. "Berapa banyak sekarang nenek atau ibu mendongengkan sebuah lakon lokal tanpa teks kepada sang cucu atau sang anak sebelum tidur," tanya Sapardi. Tapi, pada saat yang sama tidak ada orang meributkan eksistensi sastra meskipun dibawakan pada tradisi lisan. "Sekarang pada era teknologi informasi, mestinya pengembangan sastra memanfaatkan teknologi itu."

Alasan itulah, menurut Sapardi, hendaknya menjadi perspektif untuk menyelamatkan karya sastra dengan menggunakan media televisi. "Yang penting tujuan utama untuk menyebarkan karya sastra seluas-luasnya bisa tercapai. Orang tidak usah membedakan karya sastra yang ditampilkan dalam wujud tontonan, hiburan, dan pendidikan," tandasnya.

Namun demikian dosen Fakultas Sastra UI ini mengakui, penayangan karya sastra lokal melalui media televisi biayanya sangat mahal, sehingga tidak mengherankan kelangsungannya terancam. Makanya, dia tidak segan-segan dan tidak diharamkan jika penayangan karya sastra dalam media visual dikaitkan dengan promosi produk-produk konsumsi masyarakat.

Sementara itu, Taufiq Ismail [illegible] oroti kemungkinan perubahan watak sosial jika karya sastra jarang ditampilkan di teve. Dia merujuk pada tulisan David S Barry. Tahun 1951, ketika penduduk Amerika Serikat 150 juta, jumlah kekerasan nasional berupa pembunuhan 6.280 kasus, perkosaan 16.800 kasus, perampokan 52.090 kasus. Sesudah 29 tahun, ketika televisi jarang menampilkan karya sastra atau lebih sering menampilkan adegan laga yang sadis, maka aspek kekerasan secara destruktif meningkat. Pada tahun 1980, ketika penduduk AS 220 juta (naik 47%), terjadi peningkatan kasus pembunuhan sebanyak 23.000, 78.920 perkosaan, dan 548.220 perampokan. Dalam keluarga besar yang terdiri dari musik, tari, seni rupa, drama dan film, posisi sastra dihormati. "Dia menyampaikan keindahan kata, mencatat hakekat kehidupan, meneruskan bunyi nurani dan menyuarakan zamannya. Dia tidak makmur dan sedihnya, sangat sedikit dibaca bangsa." (ST/B-2)

Media Indonesia 22 Oktober 1999

Novelet Interaktif Pertama di Dunia Dirilis

JAKARTA -- Suatu langkah terobosan terjadi di bidang sastra Indonesia. Untuk pertama kalinya di dunia, sebuah karya seni berupa novelet interaktif diluncurkan untuk masyarakat luas.

Novelet interaktif yang dirilis baru-baru ini di Jakarta itu adalah sebuah novelet berjudul "*Kembara Kasih*". Acara peluncuran buku novelet tersebut digelar di Gelanggang Remaja Bulungan, beberapa waktu lalu.

Peluncuran buku novelet interaktif merupakan langkah penyejuk, bila dilihat dari kondisi sekarang yang tengah diwarnai kemelut politik nasional yang semakin meruncing. Apalagi bila dilihat munculnya sejumlah masalah remaja yang seakan terabaikan. Aksi tawuran, penyebaran narkoba (narkotik dan obat terlarang), berkejaran dengan seks bebas merupakan memunculkan rasa prihatin. Dan rasa keprihatinan itu mencuat dalam acara peluncuran buku "*Kembara Kasih*" di Gelanggang Remaja Bulungan.

Kembara Kasih merupakan sebuah novelet yang pernah dimuat secara bersambung dalam Majalah Annida (Seri Kisah Islami). Pada acara peluncuran buku juga digelar diskusi bertajuk, "Remaja antara Cinta dan Realita" di Gelanggang Bulungan.

Acara berlangsung semarak, karena diselingi hiburan kelompok Nasyid Snada dan pantomim dari Teater Kanvas. Seribu remaja Ibukota *tumplek*, sambil menyeruput es krim Walls dan ayam goreng McDonalds yang menjadi sponsor. Majalah Annida, bekerjasama dengan Klub Sejuta, didukung pula oleh Radio Prambors dan MSTri.

Kembara Kasih bisa dibilang karya unik dan istimewa, ditulis secara kerokyokan oleh enam penulis muda berbakat: Helvy Tiana Rosa, Dian Yasmina Fajri, Dewi Fitri Lestari, Ifa Avianty, Inayati, dan Ahmad Mabruri. Uniknya, para pembaca turut menentukan alur cerita dengan mengajukan usulan kepada penulisnya. Agak mirip dengan novel "Asmaraloka" yang pernah ditulis Danarto secara bersambung selama 60 hari suntuk di harian *Republika*.

Ceritanya, seputar kehidupan keluarga Bram Priambodo yang terbunuh secara misterius. Istrinya, Ratih, dituduh sebagai pelakunya, dengan alasan balas dendam akibat dikhianati Bram. Anak-anak mereka yang kehilangan kasih sayang — Andika, Mira, dan Dela — dibuat kelimpungan. Setelah melalui, drama penculikan yang menegangkan, akhirnya Andika berhasil membongkar komplotan pembunuh ayahnya. ■ ant

Republika, 22 Oktober 1999

PERTEMUAN KECIL

Meluncurkan VCD Sajak-sajak Cinta

Rendra: Penyair Harus Memiliki Olah Kapujanggan

DALAM disiplin kreativitas, seorang seniman khususnya penyair harus memiliki *olah kapujanggan*. Yakni, harus *rewes* (tanggap, memperhatikan, peduli) terhadap berbagai gerak kehidupan yang berdenyut di seputar dirinya. Entah itu berkaitan dengan masalah sosial, religius, maupun politik. Selain itu harus pula memiliki rasa *interes* terhadap karisma alam, manusia, tumbuhan, dan berbagai karisma lainnya yang bisa dilihat, diraba dan dirasa oleh mata, tangan, maupun batin. Disamping itu, harus pula mampu *merangkul* (terlibat) dengan objek yang hendak ditulisnya secara signifikan.

"Jadi, sebuah puisi tidak bisa ditulis begitu saja. Dalam menulis sebuah puisi, saya harus betul-betul memahami pengalaman yang akan saya tulis itu dengan baik. Mula-mula pengalaman itu *terhayati* dengan *kesadaran pikiran*, kemudian turun ke dalam *kesadaran kalbu*. Setelah itu, batin saya hamil oleh *greget*, yakni bertemunya kesadaran kalbu dengan daya hidup. Di situ terjadi proses dialog secara terus-menerus yang sangat menentukan; apakah pengalaman yang saya hayati itu, bisa ditulis jadi puisi atau tidak," ujar penyair Wahyu Sulaeman Rendra, yang lebih akrab dipanggil Mas Willy dalam percakapannya dengan

"PR" di beberapa tempat di Bandung, pada Sabtu-Minggu (16-17/10) lalu.

Pada Sabtu malam, Rendra secara spontan berkolaborasi dengan Tan De Seng di Toko You, Jl. Hasanudin, Bandung. Rendra dalam kesempatan tersebut membaca puisinya dan puisi Chairil Anwar, sedang Tan De Seng sekeluarga mengiringinya dengan petikan kecapi suling. Sedangkan pada Minggu malam, Rendra, Taufiq Ismail dan Agus R. Sardjono membacakan puisi-puisinya di Aula Unpad, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung, dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) Fak. Ekonomi, Unpad.

Sedangkan pada Minggu siang, di Gedung BPG Bahasa, Jl. Cimareme, Kab. Bandung, Rendra ditanggap oleh sejumlah guru bahasa dan sastra Indonesia tingkat SMU se Jawa Barat dalam acara *Diklat Menulis, Membaca dan Apresiasi Sastra* bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia, yang diselenggarakan oleh PPPG Bahasa bekerjasama dengan majalah sastra dan budaya *Horison*. Kegiatan yang berlangsung dari 11-18 Oktober itu, diikuti oleh 70 Guru Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) se Jawa Barat, dengan instruktur Prof. Dr. Yus Rusyana, Toto Sudarto Bachtiar, Saini KM, Taufiq Ismail, Agus R. Sardjono, Cecep Syamsul Hari dan Ismail Marahimin.

Lebih lanjut, penyair yang pada 7 November 1999 mendatang akan genap berusia 64 tahun itu, mengatakan, sebuah karya seni yang bagus atau bernilai hanya akan lahir jika di dalam karya seni tersebut mengandung kekuatan batin, isi pikiran dan perasaan. "Pendeknya bukan hasil rekayasa, yang diada-ada. Jika seorang seniman dalam berkarya terjebak oleh rekayasa, dan mengabaikan kekuatan batin, isi pikiran dan perasaan niscaya karya yang dibikinnya itu tidak memberikan nilai apapun yang berguna bagi apresiatornya. Karya itu hanya sampah belaka," jelas penulis lakon *Mastodon dan Burung Kondor, Panembahan Reso,* dan *Suku Naga* sambil menambahkan bahwa dirinya mulai bersentuhan dengan dunia puisi, dalam hal ini menulis tembang sejak umur 5-6 tahun. Pada saat itu, dirinya sudah mulai menulis larik-larik tembang, sekalipun isi dari apa yang ditulisnya itu berupa surat, entah untuk pamannya, ibunya, atau ayahnya sendiri. Perbarengan dengan itu, Rendra belajar pula olah kapujanggan dari pamannya.

**

LEPAS dari masalah tersebut di atas, dalam upaya memasyakatkan puisi, baik untuk kepentingan pengajaran dan pelajaran sastra maupun untuk hiburan bagi orang yang membutuhkan pencerahan batin, pada bulan Oktober tahun ini, Rendra bekerjasama dengan *Lies & Shandy Produktion* meluncurkan *VCD Sajak-sajak Cinta* yang memuat 14 buah puisi yang ditulisnya. Dua di antaranya, dibacakan oleh Ken Zuraida, istrinya, dan Lies Shandy.

"Tujuan saya *mem-VCD-kan* puisi-puisi saya, tiada lain ingin membuat teroboson dalam upaya mengkomunikasikan puisi saya baik secara *visual* maupun *audio visual*. Secara audio visual orang bisa mendengar bagaimana saya membacakan puisi-puisi saya. Sedangkan secara visual, orang bisa melihat bagaimana ekspresi saya ketika membaca puisi tersebut. Di samping itu ada juga beberapa usaha visualisasi dari imaji-imaji saya kedalam bentuk gambar. Berhasil dan tidaknya apa yang saya lakukan ini, tentu saja sangat tergantung pada respon publik atau para apresiator. Saya berharap apa yang saya lakukan ini bisa membuka lahan publikasi yang baru bagi puisi, setelah dalam bentuk buku dan publikasi di majalah atau koran," jelas Rendra, sambil menambahkan bahwa kepekaan dirinya dalam menulis puisi sosial – antara lain dipengaruhi oleh gairah dan semangat musik *blues* ketika tinggal di Amerika Serikat pada 1954-1967. Saat itu, ia men-

dapat beasiswa dari *American Academy of Dramatical Art* (AADA) untuk belajar drama dan tari. Pengaruh yang demikian itu, antara lain terlihat dalam sebuah kumpulan puisinya yang sebagian besar ditulis di Amerika, yakni: *Blues untuk Bonnie*.

Ke-14 puisi yang dirilisnya dalam VCD tersebut, adalah *Pamlet Cinta, Setelah Rambutmu Tergerai, Wanitaku! Wanitaku!, Nyanyian Fatima untuk Suto, Nyanyian Suto untuk Fatima, Sajak Joki Tobing untuk Widuri, Sajak Seorang Tua untuk Istrinya, Kelelawar, Wajah Dunia yang Pertama, Kupanggili Namamu, Hai, Ma!, Sajak Cinta Ditulis pada Usia 57*, dan *Hutan Bogor*.

Suara yang dilantunkan Rendra dalam usia 64 tahun itu, adalah suara seorang kakek dengan lima cucu. Suara tersebut masih prima dan karismatik. Bila kita membandingkannya dengan suara yang terekam pada kaset sajak-sajak cinta yang terbit pada tahun 1980-an, maka akan terasa ada perbedaan, baik dalam cara penghayatan maupun dalam volume suara. Dengan membandingkan kedua rekaman tersebut dari segi *audio visual*, maka jelas Rendra sangat menguasai teknik pembacaan puisi dengan baik, dan komunikatif.

Menjawab pertanyaan, Rendra mengatakan, dalam membaca puisi, dirinya tidak asal baca. Si pembaca harus mampu menghadirkan atau mengkomunikasikan isi pikiran, isi perasaan dan kekuatan batin yang ada pada puisi yang dibacanya itu. Jadi perkara membaca puisi itu — bukan hanya perkara penguasaan vokal yang bulat dan bening saja. Tetapi juga harus mengusai penghayatan," jelasnya

Berkaitan dengan keprihatinannya terhadap masalah sosial-politik yang memanas akhir-akhir ini, Rendra dalam VCD tersebut antara lain mengungkapnya dengan larik-larik puisi yang berbunyi: *Ma, nyamperin matahari dari satu sisi/ Memandang wajahmu dari segenap jurusan// Aku menyaksikan zaman berjalan kalang kabutan/ Aku melihat waktu melaju melanda masyarakatku/ Aku merindukan wajahmu/ dan aku melihat wajah-wajah berdarah para mahasiswa// Kampus telah diserbu mobil berlapis baja/ Kata-kata telah dilawan dengan senjata/ Aku muak dengan gaya keamanan semacam ini/ Kenapa keamanan justru menciptakan ketakutan dan ketegangan/ Sumber keamanan seharusnya hukum dan akal sehat/ Keamanan yang berdasarkan senjata dan kekuasaan adalah penindasan//... (Pamplet Cinta)*.

Puisi yang ditulis pada 28 April 1978 di Pejambon, Jakarta itu, terasa aktual. Esensinya adalah, bahwa kondisi sosial-politik di Indonesia ternyata tidak berubah. Reformasi yang selama ini didengung-dengungkan oleh banyak fihak itu, ternyata tidak menempatkan daulat hukum dan daulat rakyat pada kursi yang seharusnya. Akibatnya berbagai tindak represif kerap kita temukan di berbagai tempat dalam berbagai konteks yang melatarinya. Tentu saja puisi yang ditulisnya itu — bukan berdasar pada kebencian, tetapi lebih berdasar pada rasa kemanusiaan, cinta dan kasih sayang yang makna dan pengertiannya tidak tunggal, tapi plural.

"Ketakutan saya saat ini adalah, takut jika bangsa dan negara yang kita cintai ini terseret kedalam gelombangkan ketidakmenentuan dalam berbagai bidang. Untuk itu saya berharap para elit politik agar sadar diri dari nafsu kekuasaan yang dikejarnya. Jangan memaksakan diri kalau tidak mampu. Hormatilah *daulat rakyat* dan *daulat hukum*," ujarnya, sambil menambahkan bahwa akhir-akhir ini dirinya semakin merindukan kehadiran cucu-cucunya di sampingnya. Cucu-cucunya itu, ada yang di Inggris, Yogya dan Menado.

"Dalam usia setua ini, saya benar-benar mengalami kesepian yang demikian mendalam. Kesepian itu bukan diakibatkan koleh birahi. tetapi diakibatkan karena saya ingin selalu dekat dengan cucu saya. Saya tidak tahu, apakah saya sangat egoistis dengan hal-hal yang demikian itu atau tidak?," jelas pendiri Bengkel Teater Rendra, yang pada saat itu ditanggapi dengan anggukan kepala oleh penyair Taufiq Ismail. **(Soni Farid Maulana/"PR")***.

Pikiran Rakyat, 24 Oktober 1999

Mempermasalahkan Angkatan: Apa Perlunya?

Pengantar:
Komunitas Sastra Indonesia bekerjasama dengan harian umum *Republika* dan Dewan Kesenian Jakarta, menggelar diskusi bertajuk *Angkatan Sastra 2000*, di PDS HB Jassin, 2 Oktober silam. Diksusi menampilkan pembicara: Hasan Alwi, Maman S Mahayana, Sunu Wasono, dan Abrul Razak Zaidan. Berikut makalah Sunu Wasono, setelah disunting kecil di sana-sini.

Oleh **Sunu Wasono**

Mungkin ada sebagian di antara kita yang mempunyai hasrat kuat untuk sesegera mungkin mengumumkan berdirinya sebuah angkatan "baru" — katakanlah Angkatan Reformasi, Angkatan '90, atau Angkatan 2000. Bila ada, tentu sah-sah saja. Boleh saja orang mengumumkan angkatan ini itu. Namun, persoalannya adalah apa dasarnya. Selama ini kita telah mengenal banyak nama angkatan seperti Angkatan Balai Pustaka, Angkatan '20, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan '45, Angkatan Gelanggang, Angkatan Terbaru, Angkatan '66, Angkatan '70, Angkatan '80, dan mungkin masih ada lagi nama-nama lain. Hadirnya nama-nama tersebut ternyata lebih banyak menimbulkan masalah daripada memperjelas masalah.

Masalah di sekitar angkatan itu sendiri masih menjadi perdebatan yang hingga hari ini tidak kunjung selesai. Di samping karena tidak adanya dasar/kriteria yang jelas dalam penamaan angkatan, tampaknya ada satu sebab lagi yang membuat persoalan penamaan angkatan membingungkan, yakni dicampuradukkannya soal angkatan dengan periodisasi. Periodisasi berkaitan dengan soal pembabakan, soal kurun waktu. Sementara angkatan berkaitan dengan soal (kesamaan) konsepsi sekelompok orang/sastrawan, terutama mengenai penciptaan karya sastra. Dalam kurun waktu tertentu bisa saja muncul suatu angkatan, tetapi tidak ada suatu keharusan bahwa setelah suatu angkatan muncul akan disusul munculnya angkatan lain sebagai tanggapan atas angkatan terdahulu. Karena itu, setelah ada Angkatan '66 tidak berarti akan dan atau harus ada angkatan baru lagi. Itu pun kalau kita mengakui adanya Angkatan '66. Dalam konteks itu, pembagian sejarah sastra Indonesia atas angkatan-angkatan, menurut hemat saya, tidaklah tepat. Lebih-lebih kalau kita kaitkan persoalan itu dengan soal penamaan angkatan itu sendiri yang setakat ini masih simpang-siur karena tiadanya dasar/kriteria yang jelas.

Kiranya masalahnya jelas sekarang, yakni bahwa yang relevan untuk kita persoalkan bukanlah perlu tidaknya kita menyatakan angkatan baru, melainkan persoalan *penataan, pencatatan,* dan *pemetaan* kembali (penulisan) sejarah kesusastraan Indonesia. Usaha yang telah dilakukan oleh para pemerhati melalui penyusunan buku sejarah, antologi, dan penulisan kritik dirasakan masih kurang dan belum menjangkau sebagian besar karya sastra yang ada. Masih terlalu banyak sastrawan dan karya-karyanya yang belum diperkenalkan kepada publik melalui upaya-upaya tersebut. Dalam konteks itu, saya menduga bahwa ada semacam kebutuhan bagi kawan-kawan (sastrawan) yang berkarya pada era 80-an dan 90-an untuk dicatat (diakui) eksistensinya. Konkretnya, kini sudah tiba saatnya bagi para pemerhati sastra dan pihak-pihak lain, misalnya para penentu kebijakan — katakanlah para perancang kurikulum — untuk bukan saja memperhitungkan karya-karya sastrawan 80-an dan 90-an, melainkan "memperkenalkan" karya-karya mereka ke bangku-bangku sekolah dan perguruan tinggi lewat kurikulum.

Bagaimana dengan soal pemetaan sastra Indonesia? Hal itu sepenuhnya kita serahkan pada para pakar sejarah sastra. Yang jelas pemetaan berdasarkan angkatan-angkatan tampaknya tidak memuaskan. Mungkin harus dicari cara lain agar pemetaan itu dapat mencakup "keseluruhan" bentuk karya sastra yang ada, baik karya-karya yang selama ini dianggap sebagai karya "serius" maupun yang "tidak serius", karya-karya yang berada di tengah, depan, maupun pinggir. Sudah saatnya para kritisi merevisi pandangan-pandangan yang tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman. Pemetaan itu juga harus memperhitungkan karya-karya yang bertebaran selama dua puluh tahun terakhir ini.

Barangkali perlu dipertimbangkan kemungkinan penggunaan kriteria yang tidak senantiasa mengaitkan sastra dengan perkembangan politik. Misalnya melihat karya sastra dari segi stilistik dan tematiknya saja. Namun, kriteria yang terakhir ini pun mengundang masalah sebab ada kesan memisahkan sastra dari bidang lain, padahal justru berfungsi tidaknya sastra itu antara lain diukur dari keterkaitannya dengan sesuatu yang berada di luarnya, yakni masyarakat. Karena itu, kriteria apa pun yang dipakai, permasalahan pemetaan sastra Indonesia memang kompleks. Di Inggris yang telah memiliki tradisi kesusastraan

yang lama, soal pembabakan sejarah sastranya juga tidak begitu jelas. Misalnya dalam menandai babak/periode kadang-kadang dikaitkan dengan zaman pemerintahan, kadang-kadang dikaitkan dengan mazhab atau aliran. Jadi, dalam kesusastraan Inggris, misalnya, kita kenal periode romantik (1789-1832). Di samping itu, ada periode zaman Victoria. Juga ada periode abad XX.

Kalau kriteria yang mendasarkan semata-mata pada ciri intrinsik karya tidak dapat meminimalkan masalah, kriteria apa lagi? Mungkin kita dapat menempuh cara lain. Misalnya membagi keseluruhan sejarah sastra Indonesia ke dalam periode-periode berdasarkan hitungan tahun saja. Misalnya diadakan pencatatan dalam per sepuluh tahun. Jadi, setiap 10 tahun diadakan pencatatan, dalam pengertian diadakan semacam pendeskripsian ciri-ciri yang menandai karya-karya selama 10 tahun. Mungkin cara ini lebih netral tinimbang cara yang sudah-sudah, yakni mengadakan pembabakan berdasarkan angkatan-angkatan yang ada. Sungguhpun begitu, kriteria tersebut juga mengundang permasalahan, yakni menyangkut dasar pikiran. Apa dasarnya kita menentukan 10 tahun? Apakah setiap 10 tahun dijamin ada kecenderungan perubahan dalam penciptaan karya?

Kesusastraan Indonesia boleh dikatakan masih muda usia. Sebagian besar sastrawannya masih hidup dan tetap/masih berkarya. Fakta ini tentu sedikit banyak akan menjadi faktor yang "menyulitkan" para juru peta. Bagaimana mungkin memasukkan seseorang dalam sejarah kalau orang dengan karyanya itu belum menjadi "sejarah", masih dalam proses menyejarah.

Apakah dengan begitu tidak dapat ditulis sejarah? Tentu saja dapat. Hanya, mungkin hasilnya tidak akan memuaskan semua orang. Sambil menunggu terwujudnya keinginan akan adanya penulisan sejarah yang dapat mencakup keseluruhan sastrawan berikut karya mereka, barangkali ada baiknya kalau diusahakan cara lain agar karya-karya yang makin hari makin banyak jumlahnya ini dikenal masyarakat. Yang terlintas dalam benak saya adalah penerbitan antologi. Upaya yang dilakukan Linus Suryadi dengan *Tonggak*-nya perlu diteruskan. Juga upaya yang dilakukan Satyagraha Hoerip dengan *Antologi Cerpen*-nya. Pun yang dilakukan Korie Layun Rampan. Di samping itu, perlu diupayakan diskusi-diskusi sastra dengan "memprioritaskan" pada karya-karya yang ditulis oleh para sastrawan "muda". Hasil diskusi tersebut selanjutnya dibukukan agar tersebar ke masyarakat.

Menutup tulisan sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan penggagas pertemuan ini, saya ingin menyatakan pendapat saya bahwa soal angkatan memang tidak penting untuk sastrawan. Yang penting untuk sastrawan adalah berkarya dan berkarya. ■

penulis adalah dosen Fakultas Sastra UI Depok

Republika, 24 Oktober 1999

DIBANDING BAHASA INDONESIA

Pengajaran Sastra Dianaktirikan

YOGYA (KR).- Dari seminar ke seminar, dari satu penelitian ke penelitian lainnya pengajaran bahasa dan sastra di sekolah dilaporkan membosankan dan tidak relevan dengan kebutuhan siswa sehari-hari. Apalagi kebutuhan yang akan datang. Bahkan banyak yang menilai pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah menengah sudah tertinggal dengan dinamika masyarakatnya.

Demikian pemikiran yang mencuat dalam seminar bahasa dan sastra Indonesia bertema 'Pengajaran Bahasa dan Sastra secara Efektif dan Efisien di SLTA', di Auditorium Balai Bahasa Yogya, Jl I Dewa Nyoman Oka 34, Sabtu (23/10). Seminar yang diselenggarakan Balai Bahasa Yogya dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tersebut menghadirkan pembicara Prof Dr Muljanto Sumardi dan penyair-sastrawan Taufiq Ismail. Seminar dibuka Kepala Balai Bahasa Yogya, Drs Suwadji, juga disemarakkan pembacaan puisi oleh anggota Sanggar Sastra Indonesia.

Lebih jauh dikatakan Prof Dr Muljanto Sumardi, pengajaran bahasa Indonesia selama ini lebih banyak menghafalkan kaidah-kaidah tata bahasa atau *grammar*. Pengajaran bahasa lebih tepat disebut sebagai pengetahuan bahasa daripada pengajaran kemampuan berbahasa. "Saya mengamati, apa yang diajarkan di sekolah lebih mengenai pengetahuan bahasa atau *knowledge about language* daripada ketrampilan berbahasa atau *language skills* yang sangat dibutuhkan siswa," kata Guru Besar Fakultas Sastra UI, IAIN Jakarta, Universitas Jakarta.

Dalam pengajaran bahasa, kata Muljanto, siswa sebenarnya sangat membutuhkan, memahami bacaan, menulis lamaran pekerjaan, menterjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, membuat puisi, cerpen, daripada hanya sekadar menghafal kaidah-kaidah tata bahasa.

Sementara penyair Taufiq Ismail mengatakan, keluhan terhadap kurangnya kualitas pengajaran sastra di SLTA sudah lama terdengar. "Anehnya, sampai saat ini belum ada studi

yang benar-benar komprehensif dan mendalam mengupas fenomena ini," katanya.

Berangkat dari rasa penasaran, kurang kualitas pengajaran sastra, Taufiq Ismail kemudian melakukan pengamatan pengajaran sastra di SMU 13 negara tahun 1997. Di Indonesia termasuk paling tertinggal pengajaran sastra, hal itu diindikasikan dengan jumlah buku sastra wajib baca selama di SMU (3-4 tahun).

Pengamatan menunjukkan, siswa SMU Singapura (6 judul), SMU Malaysia (6 judul), SMU Thailand Selatan (5 judul), SMU Brunai Darussalam (7 judul), SMU Jepang (15 judul), SMU Kanada (13 judul), SMU Amerika Serikat (32 judul), SMU Jerman (22 judul), SMU Internasional Swiss (16 judul), SMU Rusia (12 judul), SMU Perancis (20-30 judul), SMU Belanda (30 judul), AMS Hindia Belanda (25 judul), dan SMU Indonesia (0 judul).

"Pengajaran sastra di Indonesia memang menyedihkan, karena sastra sekadar *dicangking* alias dianaktirikan, dibandingkan bahasa Indonesia," ujarnya. Dengan kondisi seperti ini, kata Taufiq, bagaimana mengharapkan pengajaran sastra berjalan dengan baik, itu sebuah keinginan yang sangat berlebihan. **(Jay/M-3)-z**

Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 1999

Usulan Kurikulum Baru

Kurangi Matematika, Tambah Sastra

Tebet, Warta Kota

Perubahan kurikulum pendidikan tak sekadar kulit namun substansial diusulkan. Itulah salah satu benang merah yang bisa diambil dalam Seminar Pendidikan Indonesia Untuk Masa Depan Indonesia Yang Lebih Baik, yang diadakan di Balai Sudirman, dr Sahardjo, Jakarta Selatan, Senin (25/10).

"Kurikulum sekarang ini berat sekali. Pengurangan 50 persen saja masih terasa berat," kata Antropolog LIPI Mohamad Sobary.

Menurutnya, kurikulum yang ada sekarang ini dirasakan sangat memberatkan siswa, karena bagi siswa sendiri tidak ada ruang untuk mengekspresikan diri. Sampai begitu beratnya kurikulum tersebut, pengurangan 50 persen mata pelajaran sekolah saja masih terasa sangat berat.

Sekarang ini, kata Sobary, bangsa Indonesia tidak membutuhkan sekadar orang pintar. Karena, tambahnya, orang pintar dapat dibentuk dengan menambahkan gizi kepada anak. Dalam kondisi sekarang ini, baginya yang terpenting adalah membentuk watak.

"Karena watak tidak dapat dibeli tetapi dibentuk," ujarnya. Sobary lebih lanjut mengatakan kurilulum yang ada sekarang ini tidak membentuk watak itu. "Watak tidak dapat dibentuk dalam suatu kurikulum," katanya.

Untuk mata pelajaran yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sehari hari, menurut Sobary seharusnya tidak lagi digunakan. Seperti pendidikan mengenai Pancasila, ternyata relevansinya diragukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pelajaran matematika seharusnya dikurangi, karena bagi Sobary matematika hanya untuk menghitung nomor saja.

Sedangkan pendidikan agama masih diperlukan tetapi dibedakan berdasarkan jenjang pendidikannya. "Seperti di perguruan tinggi diberlakukan pendidikan filsafat agama. Untuk membahas relasi antar agama," jelasnya.

Mata pelajaran bahasa dan sastra, khususnya untuk sastra berisi muatan mengenai moral, watak dan budi pekerti. "Sastra membuat manusia dapat mengenal seni, dan mengenal manusia dengan isi pemikirannya, aspirasi dan semua ambisi-ambisinya. Dan juga dengan seluruh lingkup kebudayaan dalam pengertian yang luas," kata Sobary.

Mohamad Sobary

Hapuskan hafalan

Budayawan AA Navis berpendapat mengganti kurikulum hafalan yang menyebabkan anak menjadi pasif, dengan program kesenian yang kreatif, olahraga beregu dan kerajinan tangan.

"Kurikulum pendidikan kesenian seperti musik, teater, dan tari serta olahraga berfungsi meningkatkan sikap mental yang diperlukan bagi hidup dalam pergaulan dengan manusia," kata AA Navis.

USULAN MATA PELAJARAN UNTUK KURIKULUM BARU

1. Matematika	dikurangi
2. Pendidikan Agama	ditingkatkan
3. Sastra	ditingkatkan
4. Pendidikan Olah raga	ditingkatkan
5. Pendidikan Kesenian	ditingkatkan

Dalam pendidikan kesenian dan olahraga tersebut terdapat prinsip keharmonisan perilaku, toleransi terhadap perbedaan sportif, dan kesadaran pada perlunya kerja sama tanpa memandang seseorang atau golongan yang berbeda yang sekarang ini menurun.

Pakar pendidikan Drost, berpendapat pengurangan kurikulum yang ideal adalah 30 persen dari muatan kurikulum sekarang. Namun menurutnya perlu ada pembidangan yang lebih spesifik.

Seperti untuk tingkat SMU pada beberapa tahun yang lalu ada pembidangan, kelas Fisika (A1), kelas Biologi (A2), kelas sosial (A3), dan kelas bahasa (A4). Sayangnya pada kurikulum sekarang ini pembidangan tersebut telah dihapus.

Namun dalam meningkatkan pendidikan, Frans Magnis Suseno berpendapat tidak hanya penyederhanaan kurikulum, tetapi perlu ditumbuhkan pula kemampuan sosial seperti kematangan emosional, kemampuan frustasi, kepekaan sosial dan empati, serta tahan konflik. yang menjadi bahan dalam pendidikan.

Fenomena tawuran antar pelajar bahkan sampai pada antarmahasiswa menunjukkan bahwa mereka tidak dapat memiliki kemampuan sosial tersebut. **(jac)**

Frans Magnis Suseno

Warta Kota, 26 Oktober 1999

Sastrawan Indonesia Diundang ke Thailand

JAKARTA — Kalangan sastrawan muda Indonesia diundang menghadiri pertemuan sastra-Melayu di Thailand, November mendatang. Pertemuan tersebut, yang bertajuk Dialog Utara VIII, bakal diselenggarakan di Selatan Thailand, 21-24 November 1999. Penyelenggaranya adalah Jurusan Bahasa Melayu, University of Prince Songkhla, Pattani, Thailand.

Peserta dari luar Thailand diundang lewat Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA). Melalui suratnya, Ketua Satu GAPENA Tan Sri Ismail Hussein, mengundang sembilan sastrawan muda Indonesia untuk menjadi peserta dialog tersebut. Mereka adalah Fatin Hamamah Rijal Syam (penyair), Hudan Hidayat (penyair, cerpenis), Wowok Hesti Prabowo (penyair), Sutan Iwan Sukri Munaf (penyair), Ahmadun Yosi Herfanda (penyair, redaktur senior harian *Republika*), dan Viddy AD Daery (penyair, novelis, sutradara).

Selain itu, juga diundang Hasan Basri Alcaff (penulis, sutradara sinetron), Isbedy Setiawan ZS (penyair, redaktur budaya harian *Lampung Post*), dan Irwan Kelana (penulis, redaktur budaya harian *Republika*). "Dialog akan berlangsung di tiga kota, yakni Narathiwat, Yala, dan Pattani," tulis Tan Sri Ismail Hussein.

Dia menambahkan, kertas kerja dalam dialog tersebut akan membicarakan masalah bahasa, sastra, sosio budaya, dan pariwisata. Dialog akan diikuti oleh peserta dari Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunai Darussalam, Singapura, maupun Filipina.

Tan Sri Ismail Hussein juga menyebutkan dialog berkait dengan kerjasama segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand (*Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle* atau IMTGT). "Dialog ini bakal menyorot pembinaan jembatan Thailand dengan Dunia Melayu di Selatan," tuturnya.

Dialog juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghayati kehidupan serta budaya masyarakat Melayu-Muslim di Selatan Thailand. Seperti diketahui, Thailand Selatan merupakan tempat bermukim kalangan Melayu-Muslim. Wilayah ini dahulunya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Islam Patani Darussalam. Kekayaan alam dan ketenangan negeri Patani mengundang minat Thailand untuk menguasainya.

Selama 182 tahun (1603-1785) mereka melancarkan lima kali serangan besar-besaran ke Patani. Namun berkali-kali pula Thailand harus menelan pil pahit, karena serangan pasukannya selalu berhasil dihalau oleh umat Islam Pattani dan para pedagang yang ada di kerajaan tersebut.

Barulah pada tahun 1785, dengan cara yang licik, Thailand berhasil membuat Patani menyerah.

"Kesempatan langka ini ingin kami manfaatkan denngan sebaik mungkin untuk saling bertukar informasi mengenai kehidupan muslim di Thailand maupun Indonesia," tutur Fatin Hamamah Rijal Syam, yang oleh GAPENA ditunjuk sebagai koordinator rombongan sastrawan Indonesia. ■ ika

Republika, 26 Oktober 1999

Guru Gagal Mengajarkan Sastra yang Mencerdaskan

Padang, Kompas

Kebanyakan guru (bahasa Indonesia) sejak satu dasawarsa terakhir gagal melaksanakan pengajaran sastra yang mencerdaskan di sekolah. Di samping rendahnya masukan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dalam pengajaran mereka pun jarang menghadirkan karya sastra itu sendiri. Pengajaran sastra selama ini keliru karena mengandalkan memori dan tidak memberikan perhatian pada pengembangan kreativitas serta tidak melibatkan anak didik dalam problematika.

Demikian benang merah yang mengemuka dalam seminar bertajuk "Pengajaran Sastra untuk Manusia Seutuhnya Guna Menghadapi Milenium Baru" yang digelar Yayasan Citra Budaya Indonesia, Rabu (27/10), di Padang. Tampil sebagai pembicara Drs Atmazaki MPd (Ketua Pusat Kajian Humaniora Universitas Negeri Padang dan Redaktur Pelaksana Jurnal *Humanus*), Prof Dr Mursal Esten (Ketua HISKI Pusat dan Guru Besar Bahasa dan Sastra UNP), dan Drs Ivan Adilla MHum (Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang). Dari sekitar 75 peserta, tampak hadir penyair Hasanuddin WS, Syarifuddin Arifin, cerpenis Harris Effendi Thahar, Yusrizal KW, dan Khairul Jasmi.

Atmazaki mengungkapkan, gagalnya guru-guru mengajarkan sastra yang mencerdaskan tidak terlepas dari rendahnya masukan ke LPTK. Data tahun 1997/1998 dan 1998/1999 di IKIP Padang (kini Universitas Negeri Padang) menunjukkan, mahasiswa calon guru bahasa (kelompok IPS) skor rata-rata nilainya 487 di bawah rata-rata kelompok IPA yang 520.

"Bahkan ketika dilakukan dua kali tes bekal awal dan akhir belajar terhadap mahasiswa itu, yaitu penguasaannya terhadap kemampuan esensial yang dituntut kurikulum 1994, hasilnya dari 80 soal, rata-rata jawaban yang benar 30,05-42,98," tandasnya.

Jadi konkretnya, rendahnya mutu pengajaran sastra disebabkan oleh rendahnya kualitas guru bahasa (dan sastra) Indonesia. Guru sendiri banyak yang tidak tertarik pada sastra sehingga sulit memahami sastra, guru kurang mampu menerjemahkan kurikuluin ke dalam praktik pengajarnya sehingga kurang mampu membelajarkan siswa dengan karya siswa.

Sementara menurut Ivan Adilla, bila masalah guru yang jadi persoalan, maka jalan keluarnya perlu pemisahan pelajaran bahasa dan sastra, sehingga perhatian kepada sastra bisa menjadi lebih besar, karena diberi porsi waktu yang lebih besar.

"Pengajaran sastra hanya satu contoh kasus dari kekeliruan sistem pendidikan kita, yang mengandalkan memori dan tidak memberikan perhatian pa-

da pengembangan kreativitas serta tidak melibatkan anak didik dalam problematika. Dunia pendidikan kita hanya mentransfer pengetahuan, tidak menyediakan kesempatan untuk meraih pengalaman keilmuan," jelasnya.

Sedang Mursal Esten berpendapat, pengajaran apresiasi sastra haruslah menghadirkan karya sastra itu sendiri. Pengajaran sastra tanpa karya sastra adalah omong kosong. Seyogianya karya sastra itu adalah karya yang telah diterbitkan, tapi mengingat karya-karya sastra diterbitkan amat terbatas, maka menghadirkannya dalam bentuk foto kopi masih bisa diterima.

"Untuk memasyarakatkan sastra sebagai khasanah budaya bangsa, usaha atau subsidi pemerintah untuk penerbitan karya-karya sastra dirasakan amat mendesak," kata Mursal seraya menambahkan, "Kegiatan apresiasi sastra bukanlah semata-mata kegiatan menghargai karya sastra, tetapi lebih-lebih dimaksudkan menghargai dan mengembangkan kreativitas siswa atau mahasiswa." **(nal)**

Kompas, 28 Oktober 1999

HARAPAN TERHADAP PEMERINTAHAN BARU

Tumbuhkan Pilar-pilar Kehidupan Sastra

YOGYA (KR) - Dunia kesenian dan kebudayaan menaruh harapan besar dengan terbentuknya pemerintahan baru yang ditandai dengan diumumkannya susunan Kabinet Persatuan Nasional. Secara umum, adanya pemerintahan baru diharapkan ada ketenangan dalam alam demokrasi yang selama ini diwarnai kekerasan. Secara khusus, diharapkan munculnya paradigma baru dalam kehidupan sastra dengan pilar-pilar kehidupan sastra. Pilar-pilar kehidupan sastra itu, meningkatkan budaya baca, kemampuan mengarang dan tumbuhnya apresiasi sastra di tengah masyarakat.



KR-EFFY

Taufiq Ismail

Demikian ditegaskan penyair-sastrawan Taufiq Ismail kepada *KR*, di Balai Bahasa Yogya, Jl I Dewa Nyoman Oka, belum lama ini, saat ditanya harapan terhadap pemerintahan baru dalam membangun pertumbuhan sastra di Indonesia.

Harapan baru tersebut, menurut Taufiq, tidaklah berlebihan, karena sesungguhnya pilar-pilar itu sudah ada. "Hanya saja, kondisi itu memang belum kondusif, karena institusi pengajaran di pendidikan formal yakni sekolah, pengajaran sastra belum memadai," ujarnya.

Taufiq buru-buru memberi contoh, kendala yang dihadapi, guru-guru yang mengajar bahasa dan sastra mayoritas guru bahasa. "Mereka mayoritas hanya dibekali pengetahuan bahasa. Pengetahuan sastra kurang memadai. Akibatnya dalam pengajaran, sastra hanya dititipkan pada bahasa," kata penulis antologi puisi 'Tirani dan Benteng'.

Di sisi lain, kata Taufiq, semua lapisan masyarakat perlu disadarkan, bahwa sastra akan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Nilai-nilai itu, kata Taufiq, bisa disemai dengan menikmati karya-karya seniman, sastrawan dalam dunia pementasan. Tak hanya itu, karya sastra yang sudah difilmkan maupun disinetronkan dapat membangun iklim yang kondusif. "Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran menonton itu berarti tanda-tanda kehidupan sastra, berkesenian mulai tumbuh," kata penulis antologi 'Sajak Ladang Jagung'. Sebaliknya, kalau ada karya-karya bagus dipentaskan, masyarakat tidak

merespon, itu berarti kehidupan sastra, berkesenian sudah mati.

Ketika didesak, apakah kehidupan bersastra, berkesenian sudah mati, Taufiq secara diplomatis mengatakan, kehidupan sastra baru bersemi. "Karena secara prinsip, apresiasi sastra masyarakat masih perlu ditingkatkan," tandasnya.

Dari sisi pengarang, kata Taufiq, sampai sekarang kehidupan sastra masih ada keluhan. Karena itu, seniman, sastrawan mencoba mencari jalan keluar dengan memberi pelatihan kepada guru bahasa dan sastra Indonesia, meningkatkan budaya baca, mengarang dan mempertemukan pengarang, sastrawan dengan guru-guru. "Apa maksud semua ini, kami berharap ada paradigma baru, pengajaran sastra agar berubah dan bergairah. Bahkan sastra itu menggembirakan, menyenangkan. Sastra tidak lagi menjadi momok," kata penyair dengan antologi barunya 'Aku Malu Menjadi Orang Indonesia'. (Jay)-z

Kedaulatan Rakyat, 28 Oktober 1999

Guru Gagal Mengajarkan Sastra yang Mencerdaskan

Padang, Kompas

Kebanyakan guru (bahasa Indonesia) sejak satu dasawarsa terakhir gagal melaksanakan pengajaran sastra yang mencerdaskan di sekolah. Di samping rendahnya masukan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dalam pengajaran mereka pun jarang menghadirkan karya sastra itu sendiri. Pengajaran sastra selama ini keliru karena mengandalkan memori dan tidak memberikan perhatian pada pengembangan kreativitas serta tidak melibatkan anak didik dalam problematika.

Demikian benang merah yang mengemuka dalam seminar bertajuk "Pengajaran Sastra untuk Manusia Seutuhnya Guna Menghadapi Milenium Baru" yang digelar Yayasan Citra Budaya Indonesia, Rabu (27/10), di Padang. Tampil sebagai pembicara Drs Atmazaki MPd (Ketua Pusat Kajian Humaniora Universitas Negeri Padang dan Redaktur Pelaksana Jurnal *Humaniora*), Prof Dr Mursal Esten (Ketua HISKI Pusat dan Guru Besar Bahasa dan Sastra UNP), dan Drs Ivan Adilla MHum (Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang). Dari sekitar 75 peserta, tampak hadir penyair Hasanuddin WS, Syarifuddin Arifin, cerpenis Harris Effendi Thahar, Yusrizal KW, dan Khairul Jasmi.

Atmazaki mengungkapkan, gagalnya guru-guru mengajarkan sastra yang mencerdaskan tidak terlepas dari rendahnya masukan ke LPTK. Data tahun 1997/1998 dan 1998/1999 di IKIP Padang (kini Universitas Negeri Padang) menunjukkan, mahasiswa calon guru bahasa (kelompok IPS) skor rata-rata nilainya 487 di bawah rata-rata kelompok IPA yang 520.

"Bahkan, ketika dilakukan [illegible] akhir belajar terhadap mahasiswa itu, yaitu penguasaannya terhadap kemampuan esensial yang dituntut kurikulum 1994, hasilnya dari 80 soal, rata-rata jawaban yang benar 30,05-42,98," tandasnya.

Jadi konkretnya, rendahnya mutu pengajaran sastra disebabkan oleh rendahnya kualitas guru bahasa (dan sastra) Indonesia. Guru sendiri banyak yang tidak tertarik pada sastra sehingga sulit memahami sastra, guru kurang mampu menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pengajarnya sehingga kurang mampu membelajarkan siswa dengan karya siswa.

Sementara menurut Ivan Adilla, bila masalah guru yang jadi persoalan, maka jalan keluarnya perlu pemisahan pelajaran bahasa dan sastra sehingga perhatian kepada sastra bisa menjadi lebih besar, karena diberi porsi waktu yang lebih besar.

"Pengajaran sastra hanya satu contoh kasus dari kekeliruan sistem pendidikan kita yang mengandalkan memori dan tidak memberikan perhatian pa-

da pengembangan kreativitas serta tidak melibatkan anak didik dalam problematika. Dunia pendidikan kita hanya mentransfer pengetahuan, tidak menyediakan kesempatan untuk meraih pengalaman keilmuan," jelasnya.

Sedang Mursal Esten berpendapat, pengajaran apresiasi sastra haruslah menghadirkan karya sastra itu sendiri. Pengajaran sastra tanpa karya sastra adalah omong kosong. Seyogianya karya sastra itu adalah karya yang telah diterbitkan, tapi mengingat karya-karya sastra diterbitkan amat terbatas, maka menghadirkannya dalam bentuk foto kopi masih bisa diterima.

"Untuk memasyarakatkan sastra sebagai khasanah budaya bangsa, usaha atau subsidi pemerintah untuk penerbitan karya-karya sastra dirasakan amat mendesak," kata Mursal seraya menambahkan, "Kegiatan apresiasi sastra bukanlah semata-mata kegiatan menghargai karya sastra, tetapi lebih-lebih dimaksudkan menghargai dan mengembangkan kreativitas siswa atau mahasiswa." **(nal)**

Kompas, 28 Oktober 1999

PROFIL

Desa Sosok Indonesia

Ahmad Tohari bangga disebut sastrawan desa. Novelnya, *Ronggeng Dukuh Paruk*, diterbitkan di Amerika.

BEBERAPA hari setelah geger 30 September 1965, sebuah rumah di daerah Banyumas, Jawa Tengah, dipadati tahanan politik anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Orang berjejal di dalamnya. Untuk menggeser tubuh saja rasanya susah. Mereka buang air bahkan sambil berdiri, sehingga menebarkan bau tak keruan.

Kebanyakan laki-laki yang berada di rumah itu seakan menunggu kematian. Tiap malam ada lima orang dibawa ke luar untuk didor. Situasi rumah tua berdinding batu bata itu dilukiskan ketika tokoh Rasus menyusul Srintil di rumah tahanan.

Itulah penggalan cerita dalam novel trilogi *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari, yang disensor penerbitnya karena ketakutan. Bisa dimaklumi. Novel *Ronggeng Dukuh Paruk* (1982), *Lintang Kemukus Dini Hari* (1985), dan *Jentera Bianglala* (1986), itu dilansir ketika rezim Orde Baru masih kokoh berkuasa.

"Bagian cerita itu sangat sensitif. Padahal itu sungguh riil terjadi," kata Ahmad Tohari. Sastrawan berusia 51 tahun itu masih setia tinggal di kampung halamannya, Desa Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas. Kini ia merasa bahagia. Sebuah jurnal sastra Universitas Hawaii, Amerika Serikat, akhir Oktober ini, menerbitkan secara utuh dan apa adanya trilogi tersebut.

Ronggeng sudah diterjemahkan ke dalam lima bahasa: Inggris, Belanda, Jepang, Jerman, dan Cina. Kebanggaan lain yang dimiliki Tohari, tidak sedikit rumah produksi yang merayunya untuk menyinetronkan triloginya. "Saya sengaja mematok harga mahal. Kalau mau Rp 45 juta," katanya kepada GATRA.

Dengan mematok tarif tinggi itu, diharapkannya penggarapan dan pemilihan pemain pasti tidak main-main. Sutradara Ami Priyono pernah menawar Rp 15 juta, Arswendo Atmowiloto juga kepingin mengangkatnya ke layar perak. Tapi, Tohari tetap bertahan dengan harganya yang memang terbilang mahal untuk ukuran novel lokal.

"Sikap saya itu hanya mewakili pembaca. Mereka akan sakit hati bila novel itu disinetronkan tidak serius," kata ayah tiga anak itu. Istrinya, Samsiyah, guru sekolah

dasar di desanya. Terhadap triloginya itu, Tohari menyatakan akan sangat rewel. Ia tak mau kecewa dua kali.

Jengkelnya belum terobati ketika novel itu difilmkan tahun 1984, hanya menonjolkan erotisme dengan bintang Eny Beatric. Karya novelnya yang sudah diangkat ke layar putih adalah: *Kubah* dan *Di Kaki Bukit Cibalak*. Masih ada novelnya yang lain, *Bekisar Merah*, *Lintang Tanah Lintang Air*, dan kumpulan cerita pendek *Senyum Karyamin*.

Ahmad Tohari adalah sastrawan yang setia merekam persoalan hidup orang desa sebagai tema. "Biarlah soal mobil dan rumah mewah digarap mereka yang di kota. Tapi, bukankah dari desa ini juga bisa memotret Indonesia," katanya. Kini ia tengah menyelesaikan novel *Bekisar Merah 2*.

Ceritanya mengalir dari kehidupan seorang gadis bernama Lasi, blasteran Jepang-Jawa. Lewat tokoh Lasi, Tohari ingin membeberkan kebobrokan pejabat-pejabat Orde Baru. Ia meminjam Lasi untuk berbicara tentang utang, kolusi, dan korupsi di Indonesia.

Ia digolongkan sebagai sastrawan angkatan 1980-an. Meski termasuk sedikit karyanya, novel-novelnya selalu bernas. Hidupnya hanya bergantung pada menulis. Anak keempat dari 12 bersaudara pasangan Muhammad Diryat dan Saliyem ini rela berhenti di tengah jalan dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta.

Tohari pernah menerima penghargaan sastra dari Dewan Kesenian Jakarta, Yayasan Buku Utama, dan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia. Pernah pula bekerja sebagai karyawan Bank Negara Indonesia 1946. Di masa awal proses kreatifnya sebagai penulis, Tohari sempat dicap kurang waras oleh keluarganya.

Hidupnya tidak teratur. Bahkan rumah tangganya sempat goncang, karena tidak ada penghasilan yang pasti. Sampai akhirnya ia bekerja sebagai wartawan di harian *Merdeka* dan majalah *Amanah* di Jakarta. Karena tak betah tinggal di Jakarta, Tohari memilih kembali ke desanya. Ia kini menjadi penulis kolom di harian *Suara Merdeka* dan *Radar Banyumas*.

Kesetiannya kepada Banyumas diwujudkan dengan menyunting *Kamus Dialek Banyumas - Indonesia*. Buku tentang "dialek inyong" juga segera diterbitkan. "Ini wujud kekhawatiran saya akan punahnya bahasa Jawa dialek Banyumasan," kata Tohari, yang dekat dengan KH Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 Republik Indonesia. ◻

Joko Syahban

Gatra, 30 Oktober 1999

Sastra dan Tingkat Keberaksaraan

Oleh **Hasan Alwi**

Pengantar: Komunitas Sastra Indonesia bekerjasama dengan harian umum *Republika* dan Dewan Kesenian Jakarta, menggelar diskusi bertajuk *Angkatan Sastra 2000*, di PDS HB Jassin, 2 Oktober silam. Dikusi menampilkan pembicara: Hasan Alwi, Maman S Mahayana, Sunu Wasono, dan Abrul Razak Zaidan. Berikut makalah Hasan Alwi.

Dalam pengertian yang sempit, keberaksaraan mengacu pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam kegiatan membaca dan/atau menulis. Dalam pengertian yang luas, keberaksaraan mengacu pada tingkat kecendekiaan seseorang dalam memahami, mengolah, dan mengembangkan sejumlah konsep dasar yang dihadapi dalam kehidupannya. Kalau dihubungkan dengan sastra, tingkat keberaksaraan itu dapat dilihat dari sisi pengarang yang menghasilkan karya sastra dan dapat pula diamati dari sisi pembacanya. Dengan demikian, tingkat keberaksaraan pengarang dan pembaca dalam konteks sastra ini masing-masing berkorelasi dengan tingkat kecendekiaan pengarang dan pembacanya. Paparan lebih lanjut mengenai hal itu akan dimulai dengan melihat hubungan antara sastra dan bahasa.

Sastra dan bahasa ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Keduanya saling melengkapi, saling memberi makna. Pertalian di antara keduanya begitu transparan sehingga hampir tidak mungkin dapat dibayangkan adanya karya sastra tanpa tersedianya bahasa sebagai bahan bakunya. Kalau begitu, pertalian tersebut harus dilihat dari sisi yang lain, yakni fungsinya. Dari sisi itu, pertanyaan yang perlu segera dijawab ialah: seberapa jauh fungsi bahasa dapat diposisikan sebagai cermin yang memungkinkan kita dapat memandangnya dengan leluasa sehingga di balik cermin itu fungsi sastra tergambarkan secara jelas.

Pendekatan seperti itu sepintas lalu memberikan kesan yang tidak adil dan tidak proporsional karena lebih mengutamakan bahasa daripada sastra. Sebenarnya kalau berpegang pada pandangan yang telah dikemukakan bahwa bahasa merupakan bahan baku dalam proses penciptaan karya sastra, pendekatan tersebut tidak usah dicurigai. Dengan mengambil perbandingan yang sederhana, kita ibaratkan saja pengarang atau sastrawan itu sama dengan seorang pematung, karya sastra yang dihasilkan sama dengan patung, dan bahasa (bahan bakunya) sama dengan tanah liat. Mutu patung yang dihasilkan oleh seorang pematung akan sangat bergantung pada mutu tanah liat sebagai bahan bakunya. Tentu saja patut dicatat bahwa mutu patung itu tidak semata-mata ditentukan oleh mutu tanah liatnya, tetapi juga oleh keterampilan yang bersangkutan dalam membuat patung. Kalau faktor keterampilan ini tidak lagi menjadi persyaratan, maka mutu patung itu sepenuhnya ditentukan oleh mutu tanah liatnya. Dengan perkataan lain, dengan tanah liat yang mutunya unggul, seorang pematung pasti dapat membuat patung apa pun yang bermutu tinggi.

Sama halnya dengan pematung yang memerlukan tanah liat atau lempung yang bermutu sebagai bahan bakunya, maka pengarang pun memerlukan kelenturan bahasa yang bermutu tinggi sebagai bahan bakunya. Untuk itu, ada dua hal mendasar yang harus dipenuhi. Pertama, norma, kaidah, atau aturannya harus mantap. Dokumen yang merekamnya biasa kita sebut tata bahasa. Kedua, khazanah kosakata dan peristilahannya harus lengkap. Dokumen yang merekamnya adalah kamus. Interaksi di antara kedua jenis dokumen kebahasaan itu akan melahirkan keterampilan berbahasa dari sisi pemakai bahasa dan akan mengakibatkan makin kuatnya daya ungkap dari sisi bahasanya itu sendiri sebagai sarana komunikasi verbal. Daya ungkap ini pada dasarnya merupakan potensi inheren dari setiap bahasa, sesuai dengan konvensi di antara masyarakat penuturnya. Lewat pemakaiannya, potensi itu dapat dikembangkan.

Pengembangan daya ungkap ini tidak lagi didasarkan pada konvensi atau kesepakatan masyarakat pemakai bahasa, tetapi diupayakan melalui kreasi dan inovasi oleh para pemakain bahasa tertentu. Dengan demikian, bahan baku yang diperlukan oleh pengarang itu adalah bahasa yang tata bahasanya mantap, kosakata dan peristilahannya lengkap, serta daya ungkapnya tinggi. Dengan kualifikasi bahasa seperti itu, pengarang yang terampil diharapkan dapat menghasilkan sastra yang baik dan bermutu.

Karya sastra yang bermutu tidak dengan sendirinya dapat disebut baik. Alat ukurnya berbeda. Karya sastra yang bermutu harus memenuhi berbagai tuntutan dan persyaratan yang biasanya sudah dibakukan secara akademis dalam sebuah *text-book* mengenai teori sastra. Adapun karya sastra yang baik adalah karya sastra yang, setelah dibaca, pembacanya akan merasa menemukan atau memperoleh sesuatu yang dia perlukan, sesuatu yang tidak sekadar dapat memperluas wawasannya, tetapi sesuatu yang sekaligus dapat memperkaya kehidupan batinnya. Upaya memenuhi tuntutan yang menyangkut kehidupan batin ini erat kaitannya dengan keberadaan sastra dalam konteks kebudayaan.

Kalau pada awalnya kebudayaan dipahami sebagai sesuatu yang bersumber pada pikiran dan akal

budi, pemahaman lebih lanjut tentang hal itu harus ditambah dengan ciri maju dan beradab. Atas dasar itu, karya sastra secara substansial juga harus menampilkan sisi kehidupan yang berperadaban yang bersumber pada pikiran dan akal budi. Potensi pikiran yang diolah akan bermuara pada kecendekiaan yang pada gilirannya akan banyak bersinggungan dengan kebenaran.

Akal budi seyogianya membimbing pikiran agar kebenaran yang dihasilkannya tidak saja menggambarkan kecendekiaan dalam bernalar, tetapi yang lebih penting lagi ialah bahwa kebenaran dan kecendekiaan dalam bernalar itu harus sesuai atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan akal budi dan hati nurani. Oleh karena itu, karya sastra yang baik harus mampu mencendekiakan penalaran, menghaluskan akal budi, dan menggugah hati nurani pembacanya. Upaya untuk memenuhi ketiga tuntutan dari sisi pembaca karya sastra ini seharusnya sudah terintegrasi di dalam visi dan misi setiap pengarang.

Integritas pengarang terhadap visi dan misinya itu dapat pula dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab profesionalnya terhadap pembaca. Fungsi atau peran sastra dalam hal pencendekiaan penalaran, penghalusan akal budi, dan penggugah hati nurani itu seyogianya makin dimantapkan di dalam kehidupan batin pengarang. Tanggung jawab profesional itu juga akan bermuara pada makin kaya dan makin kuatnya daya ungkap bahasa yang digunakannya.

Pemakaian bahasa yang didukung oleh faktor kreasi dan inovasi ini jelas terlihat pada pengarang yang menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi. Seberapa jauh keberhasilan seorang pengarang, baik dalam upaya memenuhi tuntutan dan keinginan pembaca terhadap karya sastra maupun dalam upaya mengembangkan daya ungkap bahasa yang digunakannya, pada gilirannya hal itu akan mencerminkan tingkat keberaksaraannya sebagai pengarang.

Bagaimana dengan tingkat keberaksaraan pembaca terhadap sastra? Hal ini tidak selalu berada dalam posisi yang sejajar dengan tingkat keberaksaraan pengarang. Pada umumnya tingkat keberaksaraan pengarang cenderung lebih tinggi daripada tingkat keberaksaraan pembaca. Oleh karena itu, pengarang juga harus merasa terpanggil untuk membantu meningkatkan keberaksaraan pembaca, untuk memupuk dan meningkatkan apresiasi masyarakat pembaca terhadap karya sastra yang bermutu. Kalau tidak, pengarang akan asyik sendiri dengan tingkat keberaksaraan yang merupakan "dunia"-nya, dan masyarakat pembaca, dengan tingkat keberaksaraannya yang tidak memadai seperti yang diharapkan pengarang, akan berada pada posisi yang makin jauh dari karya sastra.

Karena kita menyadari bahwa tidak mungkin ada kehidupan sastra tanpa pembaca, maka persoalan apresiasi sastra yang ditimbulkan oleh ketidaksejajaran antara tingkat keberaksaraan pengarang dan tingkat-tingkat keberaksaraan pembaca ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, termasuk dari kalangan pengarang itu sendiri. ■

penulis adalah
kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa

Republika, 31 Oktober 1999

Jakob Sumardjo

MASIH mengikuti perkembangan sastra?

Wah, sudah tidak...

Sejak kapan berhenti?

Sejak tahun 90-lah, sudah tidak mengikuti lagi.

Kenapa?

Dulu itu 'kan di *Pikiran Rakyat* Trisno Juwono meminta saya untuk menulis seminggu sekali di ruang kebudayaan. Nah, ya saya terus mengisi, antara lain ulasan mengenai novel. Kebetulan novel-novel itu diberikan oleh penerbit Pustaka Jaya. Tiap kali terbit baru, saya diberi, langsung saya ulas. Karena tiap Minggu itu ada ruangan saya, nah rutin akhirnya, tiap Minggu itu pasti mengulas novel. Nah dalam satu tahun ada 30-40 novel yang saya ulas, sehingga dalam tahun-tahun berikutnya itu menjadi terlihat karakteristik dari novel-novel yang terbit tahun 70-an, 80-an itu. Akhirnya saya kumpulkan lalu saya bikin buku, *Pengantar Novel* itu. Saya sendiri juga sedang bergairah.

Dari periode yang Anda amati itu, bagaimana pandangan Anda mengenai novel Indonesia secara umum?

Pada tahun 80-an, gairah menulis, gairah pembaruan, menulis novel secara baru, juga cerpen, memang meriah. Banyak usaha untuk menghasilkan karya-karya novel dan cerpen dalam corak baru, seperti Danarto, Budi Darma, Kuntowijoyo juga, atau yang jelas Iwan Simatupang pada generasi sebelumnya. Karya Iwan menjadi sangat populer karena suasananya cocok untuk tahun 70-an, meski itu ditulis tahun 60-an. Itu saya uraikan juga dalam buku saya. Novel-novel itu saya kelompokkan, ada tema sosial, tema kejiwaan, revolusi.

Ya, kalau mau kita lihat kembali setelah tahun 90-an itu agak menurun, bahkan sebetulnya sejak pertengahan 80-an. Mungkin itu disebabkan dulu ada lomba menulis roman Dewan Kesenian Jakarta. Itu rupanya memacu orang untuk beramai-ramai menulis, hasilnya diterbitkan oleh Pustaka Jaya.

Setelah tahun 80-an memang gairah menulis novel menurun, tetapi sebaliknya cerpen justru naik?

Saya *nggak* begitu mengikuti lagi, tetapi saya lihat tidak seperti dulu lagi. Mungkin memang ya, karena koran banyak, saya sendiri sulit mengikuti. Tetapi yang di *Horison* itu saya lihat tidak istimewa, tidak seperti tahun 70-an atau 80-an awal.

Anda pernah menulis tentang sastra Melayu Tionghoa, awal 1900-an. Kita bicara dari sastra peranakan itu...?

Tulisan-tulisan itu sudah saya kumpulkan dalam satu buku, tetapi tidak ada yang mau menerbitkan. Itu mengenai sastra Melayu rendah, masa awalnya. Jadi menurut saya begini: pada tahun 1870 itu sudah mulai banyak penerbitan-penerbitan dalam bahasa Melayu rendah. Kalau kita teliti data-datanya, kebanyakan penceritaan kembali cerita lama, kemudian terjemahan. Mulai tahun 1890-an baru ada karya-karya asli dalam bahasa itu, menceritakan kejadian di Indonesia. Itu tahun 1896 mulainya, tetapi yang menulis bukan hanya orang Tionghoa, tetapi kebanyakan malah orang-orang Indo Belanda, juga ada orang Indonesia sendiri. Penulis-penulis Tionghoa itu mengeluh karya-karya sastra mereka tidak pernah diperhatikan oleh sastrawan Indonesia. Karya mereka dianggap tidak sebagai karya sastra oleh masyarakat Indonesia. Ini mulai surutnya peranan orang-orang Tionghoa dalam penulisan.

Waktu itu karya mereka memang cukup populer?

Kalau di kalangan orang-orang Tionghoa ya, tetapi kita juga belum mempunyai data sejauh mana masyarakat di luar itu juga menyukai karya-karya itu. Zaman emasnya itu sejak 1925 sampai 1942. Waktu itu hampir tiap bulan ada novel baru terbit.

Dokumen-dokumen mengenai sas-

tra itu di mana?

Yang punya itu Ibu Myra Sidarta. Dulu dia membuka lebar perpustakannya bagi orang untuk membaca, memfotokopi.

Anda ke Jakarta untuk itu?

Ya, saya ke Jakarta, ke beliau, saya diperbolehkan meminjam, saya fotokopi di sini. Ada kira-kira 60 novel yang saya fotokopi.

Kenapa tertarik pada sastra peranakan?

Karena menurut saya tidak ada yang peduli, itu saja. Padahal begitu banyak karya mereka. Yah, kalau soal ukuran sastra itu 'kan tiap masyarakat punya batasannya sendiri. Orang-orang Tionghoa ini punya kesusastraannya juga.

Yang diceritakan apa saja?

Macam-macam, terutama masyarakat Tionghoa sendiri, kemudian hubungan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Indonesia. Misalnya ada persoalan perkawinan campuran antara orang Indonesia dengan orang Tionghoa. Itu sekitar tahun 1905, 1910. Kadang-kadang ada satu peristiwa diceritakan dua pengarang, dalam dua novel. Pandangannya berbeda, ada yang setuju dengan perkawinan campuran itu, ada yang tidak setuju, menjelek-jelekkan salah satu pihak.

Pernah mencuat satu dua yang monumental?

Pernah, Kwe Tek Wei, bukunya yang terkenal itu *Drama di Boven Digul*. Buku itu tebal sekali dan memang penting.

Dari perjalanan 100 tahun ini 'kan pasti ada magnitude-nya ya?

Benar, penelitian semacam ini sebetulnya penting. (Jakob menunjukkan manuskrip kesusastraan Melayu rendah yang diberinya judul *Masa Awal Melayu Rendah*).

Kenapa tidak diterbitkan?

Katanya buku sastra *nggak* laku. Sedangkan orang-orang Tionghoa itu berbeda dengan kita 'kan. Mereka itu kalau mementaskan untuk derma, mereka mau mendirikan kuil, nah mereka mencari dananya dengan mementaskan teater. Naskahnya mereka cetak. Di samping untuk pegangan pemain-pemainnya, juga dijual. Jadi kita untungnya di situ, bisa mendapatkan naskah-naskah mereka, seperti yang tahun 1911 ini. Jadi kalau kita lihat orang-orang Tionghoa itu memfungsikan sastra sebagai alat pendidikan. Nah, yang begitu-begitu itu termasuk karya Mas Marco Kartodikromo segala itu. Hanya saja, karena tidak sesuai dengan estetika kita sekarang, dianggap bukan sastra.

Penulis-penulis Tionghoa itu mengeluh karya-karya sastra mereka tidak pernah diperhatikan oleh sastrawan Indonesia. Karya mereka dianggap tidak sebagai karya sastra oleh masyarakat Indonesia. Ini mulai surutnya peranan orang-orang Tionghoa dalam penulisan.

Jumlah mereka padahal besar ya?

Ya, hanya yang di luar Balai Pustaka kurang dilihat, karena itu dianggap bukan sastra, bukan kesenian. Fungsi sastra mereka itu memang berbeda dari fungsi sastra kaum intelektual sekarang ini.

SEKITAR tahun 1970-an, Jakob Soemardjo menulis sekitar 15 cerita pendek. Cerpen-cerpen itu lantas dikirimkan ke Balai Pustaka. Subagyo Sastrowardoyo ketika itu setuju untuk menerbitkannya dalam sebuah buku. Tetapi, hingga kini janji itu tak terwujud. "Mungkin karena saya dulu pernah di-*blacklist* oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, gara-gara saya menulis Pramoedya terus," kata Jakob.

Mengapa berhenti nulis cerpen?

Nah ini, karena asyik *nulis* kritik-kritik itu saja.

Lebih tertarik pada dunia kritik daripada dunia penciptaan?

Ya, karena soal waktu saja. Itu yang ditantang tiap minggu untuk menulis, jadi waktunya habis di situ. Saya itu orang sejarah, sastra itu kegemaran saja, hobi.

Mulai 90-an kenapa berhenti jadi pengamat sastra?

Saya sering ditanya begitu, mengapa berhenti. Terus terang saja, alasannya pribadi juga, karena saya dengar dari teman-teman tulisan-tulisan saya tidak ada harganyalah secara keilmuan. Meskipun buku saya itu diwajibkan di perguruan tinggi, tetap saja mereka mengejek-ejek begitu. Ini 'kan hanya laporan, ini hanya sejarah, jadi itu bukan telaah sastra, lebih banyak catatannya. Saya itu hanya tukang catat saja.

Jadi terus ngambek?

Saya tidak *ngambek* ya, *lha* untuk apa saya meneruskan kalau tidak ada gunanya. Saya mengalihkan saja, saya bisa *nulis* lain. Saya itu sering dibilang, kamu itu lulusan sejarah waktu di SMA, mengajar menggambar, lalu menulis tentang sastra. Nah sekarang ini bukan tentang sastra, tetapi kolom-kolom, ya irama saya begitu saja soalnya. Sekarang 'kan saya disuruh mengajar filsafat seni, nah sekarang tertarik pada estetika. Saya mengajar filsafat seni di Seni Rupa ITB. Malah juga disuruh mengajar pascasarjana di situ. Saya ini S1 disuruh mengajar S2. Itu malah menghasilkan buku akhirnya, karena saya mengajar di situ dan menulis filsafat seni, yang mau diterbitkan oleh ITB.

Anda mengajar di mana saja?

Selain di ITB juga di STSI. Di STSI mengajar macam-macam, antropologi seni, sosiologi seni, sejarah kebudayaan, perbandingan seni. Semuanya ditimpakan kepada saya, dikira saya ini tahu segalanya. Dulu itu mengajar sejarah teater, teater Indonesia. Sejarah teater Indonesia itu dari mana, bahan-bahannya dari mana, terpaksa untuk menyusun bahan kuliah, mengadakan survei kecil-kecilan, akhirnya jadi buku juga. Perkembangannya seperti itu, karena mata kuliahnya ada tetapi tidak ada bahan-bahannya untuk diajarkan. Sejarah teater Barat dulu juga begitu. Saya membuat tulisan ringkas begitu, terus ada yang minta. Semua bermula dari keperluan mengajar saja.

Anda ke perpustakaan-perpustakaan?

Ke teman-teman, perpustakaan tidak ada. Teman yang pernah ke Amerika atau mana begitu dia punya buku-buku, kadang-kadang dia tahu 'kan saya sedang mencari. Saya fotokopikan ya... Bahkan mahasiswa saya yang S2 itu, tahu saya mengajar filsafat seni, dia menawarkan, Bapak perlu ini tidak, mereka yang memfotokopikan saya.

Mengikuti sampai ke pascamodernisme?

Literatur mengikuti, tetapi karya-karya saya tidak mengikuti.

Anda tidak pernah mengikuti semacam program atau pendidikan di luar negeri?

Tidak pernah.

Mengapa tidak pernah mengajukan permohonan?

Saya ini orangnya terlalu pasif, dikatakan orang selalu menunggu gawang saja.

Itu kan soal tinggal membikin proposal?

Saya tidak pernah, terkecuali orang minta saya, nah saya mulai kerja.

Kalau tidak disuruh mengajar filsafat seni ya tidak belajar filsafat seni juga ya?

Iya, karena itu ya ada hikmahnya juga...

PRIA kelahiran Klaten, 26 Agustus 1939, yang pindah ke Yogyakarta ketika masih duduk di kelas lima SD, ini sejak kecil memang berminat pada sastra. Jarak sekolah enam kilometer yang harus dijalaninya setiap pagi mem-

berinya kesempatan untuk melirik buku di pasar. Buku tentang pelanduk dan buaya, misalnya, menarik bagi Jakob kecil. Ia memilih tidak membawa bekal, tetapi uang untuk dipakai membeli buku. Kalau di sekolah, Kanisius, dibagi buku cerita, ia akan mencuri-curi baca terlebih dulu, sehingga saat giliran membaca, ia sudah tahu jalan ceritanya. "Sejak kecil saya senang cerita, saya suka yang bentuk cerita. Puisi saya kurang suka, saya lebih tertarik prosa," ujar pria yang sejak SMA mengenal buku-buku sastra William Saroyan segala.

Anda dulu sewaktu menjadi guru SMA juga mengajar menggambar, memang bisa menggambar?

Saya dulu tukang membuat poster-poster, kalau ada pementasan drama, saya yang membuat poster. Begitu juga kalau ada kegiatan-kegiatan pemuda Katolik. Itulah maka saya bisa mengajar menggambar di SMA, selain mengajar sejarah.

Pindah ke Bandung karena mengajar?

Ya, saya pindah ke sini tahun 1962, tahun 1967 saya melanjutkan kuliah. Tahun 70 lulus. Tahun 1969 saya mulai nulis-nulis, waktu menyelesaikan kuliah itu. Waktu itu di *Kompas*, saya menulis *Young Aphrodite*, saya *nonton*, pulang saya membuat ulasan. Itu 'kan mengenai pornografi dalam film, nah saya ikut ramai-ramai mengulas. Sebelumnya juga sudah ramai itu. Itu pertama kali saya menulis di koran. Nah setelah itu saya membikin telaah-telaah sastra, selain menulis cerpen.

Dalam esai-esai di koran, Anda banyak menulis dengan pendekatan moral. Menurut pandangan Anda, masyarakat Indonesia sekarang ini bagaimana sih?

Begini, kalau menurut saya sekarang ini saya amati ada dua kelompok cara berpikir, yang sebenarnya sudah tua juga usianya. Ada orang-orang yang puritan, kalau istilah Geertz santri, yang visinya asing dan orang-orang yang cara berpikirnya asli, *indigenous*. Cara berpikir keduanya berbeda. MPR mewakili yang puritan itu, dan tidak bisa memahami yang bawah. Mereka 'kan mengejek-ejek (yang di bawah), sebagai emosional segala. Ya memang kebenaran mereka ya seperti itu, dihayati seperti itu, bukan secara mereka. Ini sering kali, orang-orang ini tidak peduli *gitu lho* bahwa kita ini punya konteks berpikir sendiri, konteks budaya sendiri yang seharusnya kalau ini mau kita kuasai kita harus memahami mereka. Bukan memahami pikirannya sendiri, yang asalnya bukan dari konteks kita sendiri.

Tetapi 'kan ada juga yang tidak termasuk dalam pengelompokan tadi?

Cara berpikir *indigenous* itu mayoritas. Selain itu ada golongan yang bisa ke sana bisa ke sini, atau priyayinya itu. Dalam kesenian juga begitu 'kan. Kalau seni instalasi itu 'kan pikirannya ke Barat. Lalu ada kesenian rakyat yang tradisional. Nah yang di tengah itu yang tidak memahami tradisi, tetapi juga tidak memahami yang Barat. Yang konflik itu yang di situ. Kalau yang di sana tenang, karena jelas nilai-nilainya, yang tradisional juga jelas. Nah yang di tengah itu yang konflik, keresahan mencari Indonesia segala itu ya di situ, orang-orang itu.

Bagian tengah itu yang bikin ruwet?

Ya, itu yang konflik, mau ke sana bukan bagian dirinya, ke sini juga tidak. Dalam kesenian mereka akan bertanya, misalnya saya mengajarkan wayang, mereka tanya: sudah diteliti begini, lalu sumbangannya untuk seni modern apa? Ya bagi saya silakan saja, saudara sendiri manfaatkan. Kita ini pada tingkat transformasi yang belum jadi, separuh-separuh."

Pewawancara:
Bre Redana

Kompas, 31 Oktober 1999

BAHASA

Misteri Bahasa Melayu Di Negeri Bertuah

Bahasa Indonesia bermuasal dari Melayu Riau. Tapi, penduduk Pekanbaru gemar berbahasa Minang. Kenapa?

ORANG berbahasa Minang jamak terdengar di Pekanbaru. Misalnya, *bagak* (berani, hebat); *gadang* (besar), *ndak do* (tidaklah), dan *baralek* (kenduri). Para saudagar pun fasih mengucapkan *saratuih, duoratuih* (seratus, dua ratus). Seorang anak kecil malah mudah berhitung *ciek, duo, tigo*. Sangat surealis: seolah-olah ibu kota Provinsi Riau itu adalah Padang.

Lagu-lagu Minang pun mendayu-dayu dari toko-toko kaset di jantung "Kota Bertuah" itu. Ada *Kasiak Tujuah Muaro* dari Zalmon. Yang tengah top adalah Tiar Ramon. Ada juga *Kutang Barendo* oleh Melati yang melantunkan lagu Bangkinang, Kampar, Riau. Tapi, kulturnya pun menghampiri Minang. Kerinduan mendengar lagu-lagu Melayu kiranya susah-mudah terobati.

Kerinduan ini mengental, apalagi menjelang perayaan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada Kamis pekan ini. Karena, bukankah mata air bahasa Indonesia menetes dari bahasa Melayu Riau?

Sahibul hikayat bertutur, bahasa Melayu turun dari Bukit Siguntang di Palembang. Lalu menghiliri Sungai Musi sampai ke kualanya, dan terus melintasi Bangka, pulau demi pulau, dan mampir di Bintan, Tumasik, Melaka, Riau, Lingga. Dari Sriwijaya ia menyebar ke sepenjuru Nusantara.

Dari Riau, ia diajarkan di Kweekschool Bukittinggi, dan meloncat ke Batavia, Jakarta kini. Waktu berjalan, kemudian Sumpah Pemuda pun dipekikkan pada 28 Oktober 1928. Bahasa Melayu bertukar rupa menjadi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada 1954 pun menabalkan bahwa bahasa anak bangsa ini berasal dari bahasa Melayu.

Tapi, kenapa suasana surealis itu mengusik hati? Kita harus mafhum bahwa Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau baru pada 1960. Tadinya berpusat di Tanjungpinang, Pulau Bintan, di Riau Lautan sejak 1957.

Sejarah pun meriwayatkan bahwa Pulau Bintan sebagai wilayah berbahasa Melayu bermula ketika Melaka yang didirikan oleh Parameswara pada 1398 jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Sultan Mahmud lalu memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Bintan. Pekanbaru kala itu mungkin juga belum ada.

Bahkan, pusat kerajaan Melayu sejak saat itu selalu ulang-alik dari tanah Semenanjung ke wilayah yang kini dikenal sebagai Riau Lautan. Misalnya, Sultan Johor memindahkan pusat pemerintahan ke Bintan pada 1708. Lalu, balik lagi ke Semenanjung. Tapi pada 1711 kembali lagi Riau. Pernah pula pindah ke Daik Lingga di Pulau Penyengat —sampai akhirnya Kerajaan Riau-Lingga dihapuskan kolonial Belanda pada 1913.

Logis belaka bila bahasa Melayu-Riau sangat mekar di Riau Lautan. Sejarah mencatat betapa Raja Ali Haji telah menuzulkan *Bustanul Katibin*, sebuah buku ejaan dan deskripsi tatabahasa, serta *Kitab Pengetahuan Bahasa*, sebuah kamus ensiklopedia mono-

lingual berbahasa Melayu: Tapak Raja Ali Haji juga dijejaki Raja Ali Kenala dengan *Bugyat al-Ani fi Huruf al-Ma'ani* dan Abu Muhammad Adnan dalam *Kitab Pelajaran Bahasa Melayu*. Karya-karya mereka diterbitkan pada 1920 oleh Al-Ahmadiyah Press Singapura — benih dari As-Syarkah al-Ahmadiyah di Midai Pulau Tujuh Riau.

Masih ada sejumlah nama lain, baik ahli bahasa maupun sastrawan —yang mendahului *Salah Asoehan* karya Abdoel Moeis, edisi Balai Poestaka, bersamaan dengan *Soempah Pemoeda* pada 28 Oktober 1928. Kala itu malah intelektual Jawa cuma fasih berbahasa Jawa dan Belanda, tapi banyak yang gagap berbahasa Indonesia.

Kiranya, surealisme di Pekanbaru tadi pun terjawab sudah. Lagi pula sebelumnya Pekanbaru memang termasuk wilayah Sumatera Tengah (kini Sumatera Barat) yang beretnik Minang.

Bila sejak dulu jumlah sastrawan merebak di Riau, bahkan juga yang bereputasi nasional macam Sutardji Calzoum Bachri, Imrahim Sattah, Hasan Junus, hingga generasi baru seperti Taufik Ikram Jamil, Fakhrunnas M.A. Jabbar dan sebagainya, adalah niscaya.

Tapi, memelayukan bahasa penduduk Pekanbaru adalah tantangan sejarah yang unik. Bayangkan, banyak sastrawannya berbahasa Melayu-Riau dalam karyanya—justru di tengah komunitas Pekanbaru yang berbahasa Minang. Seakan kemelayuan hanya ada di teks, seperti kolom *Titian* yang saban pekan ditulis budayawan Tabrani R.A.B., di *Riau Pos Minggu*. Surealisme yang lain?

Tak sedikit pula penduduk kota Pekanbaru yang tergagap-gagap, kurang dan tidak mengerti, kata-kata bahasa Melayu yang ditulis oleh Tabrani. Maklum, ibarat bahasa Jawa, bahasa Melayu adalah "bahasa tinggi". Barangkali, diperlukan sosialisasi bahasa Melayu-Riau lewat penyeber-luasan kamus hingga bahasa Melayu bisa jadi tuan di rumah sendiri.

Tapi, bila rindu mendengar dendang lagu Melayu bolehlah pergi ke Riau Kepulauan. Lagu *Zapin Srigading* dari Suhardi akan mengalun melipur lara. Memang sesekali terdengar juga lagu *Tuanku Tambusai*, *Cik Minah Sayang*, dan *Hang Tuah* oleh penyanyi Iyeth Bustami di Pekanbaru. Tak semerebak lagu Minang, sudah barang tentu.

BLU

Gatra, 31 Oktober 1999

■ FESTIVAL BUDAYA NUSANTARA

Nyanyian dari Pedalaman

Kesenian yang muncul dari kearifan lokal tak sekadar tontonan. Tapi, setara dengan kajian politik dan ekonomi.

TUJUH tubuh bak bidadari meliuk-liuk puitis di teater arena Dang Merdu Pekanbaru. Perlahan mereka menjalin konfigurasi yang indah. Seorang dara menjunjung bebungaan berbentuk pohon beringin dikitari enam perawan lainnya. Tarian berjudul "Beringin Keutuhan" yang diusung suku Talang Mamak dari pedalaman Indragiri Hulu Riau tersebut adalah perlambang muasal hutan yang dianugerahkan makrokosmos kepada mikrokosmos.

Tatkala gendang bertalu-talu, jalinan lengan nan rancak dari sekelompok lelaki muncul mengelilingi para bidadari. Kemudian, terdengarlah nyanyian panjang seorang dukun yang mengajarkan bahwa menebangi hutan secara brutal adalah pantangan.

Tarian simbolis itu makin sublim ketika tiga lelaki bertelanjang dada datang bernafsu hendak merampok pohon beringin. Tapi, kearifan lokal dari bumi Melayu itu tetap terjaga. Tengoklah, betapa ketiga lelaki yang seolah-olah melambangkan kaum kapitalis perusak hutan gagal merampas pohon beringin —simbol hutan sumber kemakmuran rakyat.

Pertunjukan tari yang dibentangkan pada Festival Budaya Pedalaman Asia-Pasifik enam tahun silam di Pekanbaru, kini semakin menemukan esensinya —setelah sebulan Festival Budaya Nusantara ditutup di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Selasa pekan silam. Apalagi, festival yang berlangsung estafet di Bali, Pontianak, Tanjung Pinang Riau, dan Jakarta itu penuh dengan pentas seni dan diskusi tentang interaksi budaya lokal dan global menyongsong milenium baru yang sudah di ambang pintu.

Ketika sekarang ingar bingar politik mulai menyusut, agaknya kearifan lokal patut kembali dilirik. Anggapan bahwa seni-seni lokal itu kuno adalah keliru. Bila mau jujur, sebetulnya seni lokal yang lahir dari peradaban, lokal bahkan sangat canggih. Salah satu contohnya adalah tari "Beringin Keutuhan" yang sangat apresiatif terhadap pelestarian hutan. Bukankah rezim Orde Baru malah terbukti gagal melakoninya?

Pemuliaaan hutan juga pernah dicetuskan oleh mufakat pemuka Dusun Keluru, Kabupaten Kerinci, Sumatera Barat (kini masuk Jambi, *Red.*) pada 1927 silam. Dengan istilah *Rimbo Temedak* —artinya hutan pantang dirambah sembarangan— penduduk hanya boleh mengambil hasil hutan untuk konsumsi semata. Misalnya, untuk kebutuhan perumahan, obat-obatan, dan bahan pangan.

Pemikiran klasik di atas sungguh sangat

futuris. Hutan seluas 24 hektare yang berjarak cuma 10 kilometer dari Taman Nasional Kerinci Seblat itu pun terselamatkan puluhan tahun. Namun, ketika industri kayu Orde Baru datang, hutan Jambi dan bahkan taman nasionalnya mulai diiris-iris kaum kapitalis —seperti halnya di Riau, Aceh, Kalimantan, dan Irian Jaya.

Tentu saja, tak semua hutan adat telah diberangus Orde Baru. Dua ratus ribu hektare hutan adat di Desa Tenganan Pegringsingan di Karang Asem Bali bahkan masih asri hingga kini. Juga di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan di Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Hukum adat di Tenganan itu diatur sejak abad ke-12, yang antara lain mengatur pada umur berapa pohon ditebang, dan bagaimana caranya. Para pelanggar yang menebang satu pohon akan dihukum dengan menanam 10 pohon. Penduduk memang sangat berkepentingan menjaga hutan di atas bukit desa itu yang menjadi benteng agar desa mereka tak terkubur oleh longsoran tanah.

Di Tanah Batak dikenal pula ritus *Gondang Mandudu* yang ditabuh pada malam hari. Ensambel musik yang terdiri dari tujuh gendang *taganing*, satu *sarune bolon* berupa seruling dari kayu, dan empat buah *ogung* (*gong*) dan satu *hesek* terbuat dari kepingan logam ini, sesungguhnya merupakan media ekspresi dalam memuja tuhan yang mereka sebut sebagai *Mulajadi Nabolon*. Uniknya, bila ritus ini berlangsung, semua penduduk tabu bicara dan lelampuan harus dipadamkan. Sunyi pun merajalela.

Manakala *Gondang Mandudu* ditabuh, maka *taganing* yang kaya notasi terdengar riuh. Mulanya, repetitif, kemudian pindah ke notasi lain dengan tempo makin cepat. Pada saat itulah *taganing* berlomba dengan *sarune bolon* hingga terdengar bagaikan orkestra. Betapa etnik ini memuja tuhannya, dengan cita rasa keindahan yang khidmat — yang sudah barang tentu jauh dari iklim kekerasaan yang tak human.

Akhirul kalam, seni lokal seyogianya tak cuma dipertontonkan. Tapi juga harus dirumuskan esensinya hingga sejajar dengan kajian politik dan ekonomi, dalam menyongsong milenium baru yang bergema di seluruh dunia.

Bersihar Lubis

Gatra, 31 Oktober 1999

SASTRA

■ KOMUNITAS

Bersemi Lalu Layu

Rezim tunggal dalam dunia seni telah tumbang. Kantong-kantong kecil merebak. Tapi mudah bubar.

SASTRAWAN bukan penyendiri. Kegairahan mereka berkomunitas sudah marak pada 1980-an. Fenomena ini muncul, karena cara pandang terhadap pusat-pusat kesenian —seperti Taman Ismail Marzuki atau majalah *Horison* di Jakarta— sudah berubah. Pusat-pusat seni tak lagi dipandang sebagai rezim tunggal. Kantong-kantong seni pun merebak ke sudut-sudut negeri ini.

Jumlahnya, sejak 1920-an hingga kini, konon hampir 500 komunitas —meski ada yang berbaur dengan kegiatan teater, atau seni lainnya. Tapi, tak lebih dari 70 komunitas yang pernah dikenal. Bahkan, yang cukup dikenal cuma 40 komunitas. Mungkin, yang karyanya tampil di media massa lebih kecil lagi.

Ada pula potensi untuk melahirkan komunitas berlatar politik, seperti masa 1950-an dan 1960-an. Sebutlah, Lembaga Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) PKI; Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) PNI, serta Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) dengan Nahdlatul Ulama. Ada nama-nama Pramoedya Ananta Toer, Sitor Situmorang dan Usmar Ismail.

Nah, kini di Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung Leon Agusta, Aspar Paturusi, Slamet Sukirnanto, Galeb Husen, Sides Sudyarto, Toeti Heraty, M.T. Risyaf, Amir Sidharta, dan Ikranegara. Lalu, Abdul Hadi W.M. di Partai Persatuan Pembangunan. Penyair Hamid Jabbar di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dramawan Zak Sorga di Partai Keadilan (PK). Cuma, bedanya, kehadiran mereka lebih untuk memberdayakan kesenian.

Komunitas itu sejak 1990-an juga merebak ke kota kabupaten. Bahkan, di Jawa, hingga ke kecamatan. Penyebaran itu juga meluas di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Maklum, saat ini media cetak dan elektronika sudah ada di seluruh provinsi. Malah, Himpunan Penulis, Pengarang, dan Penyair Nusantara (HP3N) pada 1980-an pernah memiliki koordinat di seluruh provinsi, kecuali Irian Jaya dan Timor Timur.

Yang patut dicatat kekhususannya adalah Revitalisasi Sastra Pedalaman (1993) yang bergulir dari Ngawi, Jawa Timur; Yayasan Komunitas Sastra Indonesia (1996) di Tangerang; Forum Penulis, Pengarang, dan Pencinta Alam (Foperma) SMUN I Maja di Majalengka; Forum Sepatu Biru di Jakarta; dan sejumlah komunitas berbasis buruh, terutama di Tangerang, Jawa Barat.

Ada sejumlah komunitas yang aktivitasnya luas dan rutin. Media massa pun memublikasikan kegiatan mereka. Misalnya, Gorong-Gorong Budaya (1992) di Depok, Jawa Barat dan Komunitas Utan Kayu (1997) di Jakarta Timur. Ada pula Oncor Studio (1989) di Tangerang. Di Bandung, yang layak dicatat adalah Forum Sastra Bandung (1992). Lalu, di Padang, ada Yayasan Taraju Ekspresi Budaya (1993).

Pada 1980-an dikenal pula HPI Aksara (1981) dan Forum Indonesia Kecil (1987-1991) di Jakarta; Kelompok Sepuluh di Bandung; Kelompok Penulis Semarang dan Kumandang Sastra Semarang; Solidaritas Penyair Muda Yogya, Pabrik Tulisan, dan Kelompok Sastra Syauqi di Yogyakarta; Sanggar Minum Kopi (1985-1995) di Denpasar; HP3N (1984) di Mataram, Nusa Tenggara Barat; Forum Komunikasi Seniman Jambi; Yayasan Puisi Nusantara (1980-1982) di Pekanbaru; Kelompok Penulis Pontianak, serta Bina Informasi Sastra Banjarmasin.

Dari era 1970-an, kita bisa mencatat nama Kelompok Poci Bulungan (1970) dan Yayasan Indonesia (1972) di Jakarta; Sanggar Pelangi (1971) dan Himpunan Penulis Muda (1974) di Purwokerto serta Bengkel Muda Surabaya (1972), dan Bumi (1975) di Padang.

Bila pada 1960-an tumbuh komunitas berlatar politik, tapi yang mengapresiasi sastra tetap muncul. Misalnya, Grup Sastra Konfrontasi di Kupang, dan Persada Studi Klub (1969) di Yogyakarta. Gabungan antara aspirasi politik dan sastra terlihat pada organisasi Himpunan Pengarang Indonesia (Himpi) dan Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) pada 1960-an. Sementara, Masjarakat Seniman Djakarta Raja pernah dikenal sejak 1954, PEN Indonesia sejak 1950, dan Gelanggang Seniman Merdeka pada 1949 di Jakarta.

Pada 1920-an dan 1930-an, kegairahan para seniman berkomunitas beriringan dengan semangat pergerakan nasional. Lingkaran sahabat Du Perron, misalnya, bersatu karena aspirasi politik yang antifasis, dan antikolonial.

Tapi, rata-rata komunitas itu memiliki anggota di bawah 10 orang. Bahkan, Forum Sepatu Biru hanya penyair Afrizal Malna saja. Konon, ia ingin mengejek kecenderungan maraknya pertumbuhan komunitas sastra. Meski, ia juga terlibat dalam pendirian tiga komunitas lain di Jakarta.

Sayang, semua komunitas tak punya ikatan yang kuat. Tak mengherankan bila ada yang mudah bubar. Bersemi, lalu layu.

Iwan Gunadi

Kelompok Tikar Pandan, Jakarta

Gatra, 31 Oktober 1999

LEBIH JAUH DENGAN

PENGANTAR REDAKSI

JAKOB Sumardjo (60) selama ini dikenal sebagai penulis produktif, dengan tulisannya tersebar di berbagai kolom surat kabar. Beberapa buku telah dihasilkannya, antara lain berupa kumpulan dari tulisan-tulisan di surat kabar, baik surat kabar nasional maupun surat kabar lokal seperti *Pikiran Rakyat*, Bandung, tempat ia aktif mengisi kolom.

Selama bertahun-tahun Jakob Sumardjo juga dikenal sebagai pengamat sastra yang telaten, memberikan catatannya pada berbagai karya novel maupun cerpen. Dalam dunia sastra ini, buku-buku yang dihasilkannya antara lain *Fiksi Indonesia Dewasa Ini* (1979), *Sastra dan Masyarakat Indonesia* (1979), *Novel Indonesia Mutakhir* (1979), *Segi Sosiologis Novel Indonesia* (1980), *Elite Sastra dalam Budaya Massa* (1980), *Seluk Beluk Cerita Pendek* (1980), *Novel Populer Indonesia* (1981), *Pengantar Novel Indonesia* (1984), *Dari Khasanah Terjemahan* (1985), dan yang terbaru *Konteks Sosial Novel Indonesia 1920-1977* (1999).

Dalam buku yang disebut terakhir itu, pada pembukaannya ia mengutip Paulus Ngatiyo Djojoprajitno (1910-1980): "Jangan takabur, meskipun engkau masyhur." Dalam beberapa hal, sifat Jakob berkesesuaian benar dengan nasihat kutipan itu. Jakob, kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 26 Agustus 1939, adalah orang yang bersahaja, bicara apa adanya. Superlatif dan hiperbola tidak ada dalam gaya bahasa percakapannya.

Dia menyelesaikan sarjana muda jurusan sejarah di IKIP Sanatha Dharma, Yogyakarta, dan kemudian mengajar di SMA St Angela Bandung. Sembari mengajar itu, Jakob melanjutkan studi di IKIP Bandung sampai memperoleh gelar sarjana tahun 1970.

Dari pernikahan dengan bekas murid SMA-nya, **Siti Rochma**, ia kini memiliki tiga anak, **Rani Indraswari** (29), **Alan Baroto** (26), dan **Antonius Aswin** (19). Pekan lalu, *Kompas* berbincang-bincang dengan Jakob di kediamannya di Jl Pasir Layung, Padasuka, Bandung.

Kompas, 31 Oktober 1999

SASTRA LISAN-ULASAN

WAWANCARA KHUSUS PUDENTIA MPSS

Tradisi Selalu Menjaga Keselarasan Manusia dengan Alam

Belum pernah secara serius pemerintah menghadapi persoalan bangsa ini dengan pendekatan budaya dan pendidikan

DI tengah pergolakan politik yang memanas, ada acara yang telah dan akan digelar di berbagai kota yang dikemas dalam acara Festival Budaya Nusantara (FBN). Acara yang dikoordinasi Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) itu berupaya menampilkan potensi tradisi dan merekatkan hubungan antarmanusia dan golongan yang akhir-akhir ini terkoyak. Sebuah upaya yang memang terkesan utopis dalam ingar-bingar politik.

FBN dimulai di Karangasem, Bali (9-23 September) yang diselenggarakan oleh Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MPSI), menyusul kemudian di Pontianak, Kalimantan Barat (21-23 September) yang diselenggarakan Institute Dayakology Reasearch and Development Pontianak (IDRD).

Sebentar lagi akan digelar di Tanjung Pinang, Riau (7-10 Oktober) dengan penyelenggara Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional (Jarahnitra) Tanjung Pinang.

Acara akan dilanjutkan di Jakarta dengan Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara III dan Pameran Pernaskahan (12-13 Oktober) yang diselenggarakan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa).

Berikutnya digelar Seminar Internasional Tradisi Lisan Nusantara III dan Festival Tradisi Lisan (14-16 Oktober) dengan penyelenggara ATL sendiri. Pada waktu bersamaan di tempat yang sama diadakan pula Pergelaran Bahasa Nusantara (PBN) (14-19 Oktober). Tujuan utamanya mempresentasikan hasil-hasil pemetaan bahasa Nusantara yang telah dilakukan setahun silam.

Wartawan *Media* **Doddi Ahmad Fawdzy** dan **Djadjat Sudradjat** mewawancarai Koordinator FBN yang juga Ketua ATL **Pudentia MPSS**, di kantornya Jl Menteng Wadas Timur No.08, Jakarta Pusat, Jumat silam. "Tradisi mempunyai sifat universal yakni menjaga keselerasan manusia dengan alam. Jika potensi ini tak dimatikan oleh hegemoni negara, agaknya disintegrasi itu bisa dicegah," kata alumnus Fakultas Sastra UI itu. Pudentia adalah kandidat doktor dengan disertasi **Mak Yong: Penciptaan Tradisi Lisan Melayu**. Betikut petikan wawancara dengan dosen Fakultas Sas-

tra UI kelahiran Muntilan, Jawa Tengah, 8 Mei 1956 ini.

Apa sesungguhnya target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Festival Budaya Nasional (FBN) ini?

Ketika pertama digagas, kita tidak berhadapan dengan persoalan bangsa yang begitu pelik. Namun, kami sudah menyadari adanya ancaman disintegrasi yang sangat kuat. Jadi, FBN ini juga diharapkan menjadi perekat kembali semangat kebangsaan yang mulai memudar.

Selain itu, kami melihat pemerintah dalam menghadapi persoalan bangsa masih sama seperti dulu, yaitu dengan pendekatan sosial, politik, dan ekonomi. Belum pernah secara serius pemerintah menghadapi persoalan bangsa ini dengan pendekatan budaya dan pendidikan. Misalnya dalam melihat peristiwa pada Mei 1998 lalu. Secara politik itu dinyatakan sebagai kerusuhan. Dengan demikian perlu ditingkatkan keamanan. Padahal, kalau dilihat dengan kacamata budaya dan pendidikan, kerusuhan itu menjadi indikasi bahwa tingkat pendidikan dan budaya masyarakat kita memang rendah. Orang yang terdidik dan menghayati kebudayaannya tak akan melakukan tindak kekerasan seperti itu.

Bagaimana upaya ATL dalam mewujudkan kesadaran (budaya) seperti yang Anda sebutkan?

Untuk melaksanakan berbagai kegiatan, personel ATL telah mengeluarkan dana, pikiran, dan tenaga. Dana itu sebenarnya bukan faktor nomor satu dalam membenahi negara ini. Yang paling utama itu adalah *political will* yang datang dari pemerintah dan masyarakat. ATL berusaha memotivasi agar *political will* itu bangkit. Itu yang menjadi pegangan ATL sekaligus menjadi kekuatan ATL. Kekuatan lain dari ATL terletak pada jaringan yang bersifat internasional. Jadi, kita punya partner di banyak negara. Mungkin karena jaringan kami luas ada yang menuduh yang bukan-bukan. Terus terang memang ada bantuan dana dari Amerika, Jepang, dan Belanda. Untuk urusan kebudayaan seperti ini, bukankah tak mungkin jalan kalau hanya mengandalkan pemerintah.

Apakah memang ada persoalan (budaya) yang ditemukan di daerah, yang memang bisa mengancam integrasi nasional. Contoh konkretnya apa?

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ada kesenjangan antara kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dan kenyataan yang ada di daerah. Kesenjangan-kesenjangan itu bukan hanya persoalan fisik, tapi menyangkut hal yang lebih jauh dan mendalam. Misalnya masyarakat suku Laut di Riau yang saya tahu. Kalau dilihat secara fisik mereka tidak memiliki rumah. Lalu pemerintah pusat membuatkan rumah, tempatnya jauh dari laut. Rumah mereka di perbukitan yang terpisah oleh jurang dan bebatuan. Pemerintah sama sekali tidak memperhatian faktor-faktor budaya dan lingkungan mereka.

Secara konsep saja itu sudah salah. Artinya, sama dengan menjauhkan mereka dari lingkungan. Seharusnya rumah untuk mereka dibuatkan di pantai, atau di tempat-tempat yang tidak begitu jauh dari laut.

Kemudian jarak antara rumah satu dan yang lainnya berjauhan. Padahal, masyarakat suku Laut itu kan hidup berkelompok. Pembuatan rumah yang berjauhan itu dengan sendirinya akan memecah-mecah komunitas mereka. Dalam kebijakan ini, jelas faktor kemanusiaan dan kebudayaan tidak diperhitungkan pemerintah.

Selain kasus suku Laut, ada contoh lain?

Di Riau itu cukup banyak kasus-kasus seperti itu. Di sana, misalnya, ada suku yang dinamai suku terasing karena dianggap ketinggalan zaman dengan mereka yang mengaku dirinya modern. Penamaan ini kurang tepat karena bisa menyinggung perasaan. Pemerintah pun masuk, tujuannya mengadakan perubahan atas nama modernisasi. Perubahan itu, karena tidak berlandaskan pada penelitian di lapangan, banyak yang tidak mengena. Perubahannya hanya bersipat artifisial. Masyarakat tetap terasing dengan dunianya sendiri.

Itu artinya kekuatan lokal yang hidup dibunuh?

Memang ada semacam pemberangusan tradisi atau adat-istiadat. Contoh yang paling mengerikan terjadi pada kasus di Batam. Ketika kawasan ini akan dibangun, pulau ini dianggap tidak berpenduduk. Padahal, di sana ada masyarakat Melayu yang cukup banyak. Lalu dilakukanlah pembangunan besar-besaran dengan menggunakan sarana modern. Nah, para pemuda di sana harus memasuki lingkungan baru dengan satu kaki, yakni kaki modernisme dan meninggalkan kaki yang lainnya. Kebudayaan yang selama ini mereka peluk erat dipaksa ditinggalkan. Anak-anak gadis diajak menjadi pekerja di hotel, mereka lalu harus berseragam pakaian hotel, yang menurut adat di sana tak sopan. Ini kan terjadi kesenjangan. Artinya akan menimbulkan gejolak. Dan, memang benar.

Kasus yang seperti Batam tidak sedikit. Modernisasi berjalan tidak alamiah. Padahal, masyarakat tradisional tidak pernah menolak modernisasi. Hanya saja penerimaannya harus berjalan secara alamiah dan perlahan-lahan, tidak radikal. Kalau modernisasi berjalan dengan alamiah akan terlihat indah dan setidaknya akan mengurangi konflik dan kesenjangan.

ATL memandang fungsi tradisi sebagai apa dalam konteks modernisasi?

Tradisi itu dapat menembus alam modernisasi. Adalah menjadi pertanyaan bagi kita, apakah mungkin modernisasi dapat di-

lakukan tanpa berakar pada tradisi?

Maksudnya bagaimana?

Kita memberi contoh misalnya Jepang. Kita tahu segala hal yang berbau modern itu ada di Jepang. Tetapi juga segala hal yang menjadi tradisi juga sangat kuat di Jepang. Mereka misalnya tetap makan dengan menggunakan sumpit, tetap membungkuk bila menghormati gurunya. Mereka terbiasa menonton kesenian modern tetapi tetap akrab dengan Kabuki, (teater asli Jepang). Jadi, di sini terlihat tradisi menjadi sumber untuk bertindak. Banyak orang menganggap tradisi itu merupakan masa lalu. Padahal, tradisi itu merupakan bagian dari masa kini dan bagian dari diri kita sendiri. Hanya memang tradisi itu mesti berkelanjutan, maksudnya dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi jika memang masih bisa dipertahankan keasliannya, kita pertahankan saja. Jangan sampai tradisi itu dianggap tidak ada.

Apakah Anda melihat ada spirit yang universal dalam tradisi?

Saya melihat pada dari dunia tradisi itu selalu berusaha membina keselarasan antara manusia dengan alamnya. Itu sama di mana pun. Soal caranya saja yang berbeda. Negara kita ini sangat kaya tradisi. Namun banyak yang mati karena hegemoni pusat. Nah, adanya ancaman disintegrasi itu karena ketersinggungan atas kematian tradisi itu.

Solusinya bagaimana?

Pemerintah pusat harus memberikan kesempatan kepada daerah atau suku-suku yang memiliki tradisi untuk tampil mengelola tradisi dengan caranya sendiri. Pada dasarnya tradisi itu tidak ada yang merugikan pemerintah, tidak ada yang mengarah pada disintegrasi, sebab tujuan dari tradisi itu sama, yaitu menciptakan keselarasan. Justru dengan pemberangusan tradisi seperti itu bibit-bibit disintegrasi akan muncul dengan kuat. Di sisi lain, tradisi itu juga secara alamiah memiliki tujuan untuk bersatu dan bersama-sama. Tanpa ada keharusan pada diri kita untuk menyatukan persepsi dan menyatukan langkah supaya bisa secara bersama-sama menggulirkan satu pernyataan budaya.

Maksudnya pluralitas atau keberagaman itu jangan menjadi bencana tetapi harus bisa menjadi hikmah?

Cara ATL dalam bekerja, pertama-tama justru kami tidak mencari titik temu dulu, tetapi mengungkapkan perbedaan-perbedaan dulu. Kami menciptakan forum untuk menyatakan perbedaan. Karena tadi, kami percaya bahwa perbedaan itu merupakan hikmah, merupakan aset. Setelah semua menyatakan perbedaan atau lebih tepatnya kekhasan masing-masing, nantinya kita akan saling memahami dan mengerti yang lainnya. Jadi sederhana sekali langkah kami itu, mencoba mengerti apa yang diperlukan oleh yang lain. Setelah saling mengerti, kita jalan bersama-sama dalam satu forum tanpa harus ada yang merasa lebih unggul atau lebih kuat. Semua sama dan sejajar. Dari situ akan terlahir sesuatu untuk menampung segala perbedaan.

Kalau kita melakukan upaya penyatuan berarti kan harus ada visi dan misi yang sama. Bagaimana menurut Anda?

Memang. Tapi, dari sisi politik saya tidak tahu. Tapi kalau dari sisi kebudayaan kita menganut falsafah bhineka tunggal ika. Secara historis juga kita telah secara bersama-sama mengakui menjadi warga negara Indonesia, ada faktanya. Nah, kita akan memasuki melenium baru, di mana persoalan-persoalan itu tampak semakin kompleks. Apakah kita akan menghadapi persoalan yang kompleks itu sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Itulah pertanyaannya. Kita memang butuh perekat nasionalisme untuk bersaing atau berhadapan dengan masyarakat global. Tapi, kita juga butuh perekat untuk hidup bersama-sama dengan masyarakat global karena kita merupakan umat manusia yang sama.

Apakah ATL juga berupaya memberi masukan kepada pemerintah tentang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan? Sebab kalau hanya dipresentasikan di seminar atau simposium ini tak efektif....

ATL itu bukan lembaga politik jadi memang tidak punya kemampuan mempengaruhi. Tapi, kami terus-menerus menyajikan fakta-fakta dan ramalan-ramalan budaya. Karena bangsa ini dulunya dibangun oleh seniman dan budayawan. Lalu kita mengingatkan kepada pengambil kebijakan politik bahwa kalau kita mau membangun bangsa ini, tolong didengar pendapat-pendapat budayawan.

Memang memberi masukan itu tidak secara rutin tetapi secara konkret kami sering mengadakan penelitian yang bekerja sama dengan Bappenas. Kita juga mengundang pamerintah dalam berbagai kegiatan. Misalnya dalam acara FBN ini, kami mengundang Depdikbud, Deparsenibud, dan Bappenas. Dengan mengundang pihak pemerintah, kita bisa mendengar apa sih konsep yang dikehendaki pemerintah dalam pembangunan bangsa ini.

Anda katakan tradisi itu menjadi unsur perekat. Tapi kalau tradisi juga diartikan adat istiadat, terasa bertentangan. Misalnya, adat orang Sunda menganggap dirinya lembut sementara orang Batak itu cenderung lebih kasar. Itu bagaimana?

Makanya kita perlu dialog. Karena kurangnya dialog kita jadi sering melakukan generalisasi. Orang Batak itu begini, Ambon begini, Sunda begini, dan seterusnya. Tapi kalau kita melakukan dialog dan pendekatan, kita akan tahu bahwasanya, pada da-

sarnya manusia itu sama, selalu mencintai kebaikan. Hanya saja memang caranya saja yang berbeda. Tapi perbedaan cara itulah yang hendaknya menjadi kekayaan kita. Dengan dialog kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang orang lain. Kita harus yakin bahwa setiap tradisi itu pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Nah, bagaimana kita mau menerima kelemahan dan mengakui kelebihannya.

Tradisi juga punya caranya sendiri untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi kenapa yang terjadi sebaliknya?

Karena pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada daerah, kepada lokal, untuk memperetensikan yang terbaik dari yang mereka miliki. Pusat itu sebaiknya semacam koordinator saja. Dalam FBN ini misalnya, ATL hanya bersifat koordinator saja. MSPI atau IDRD, misalnya, punya agenda tersendiri, punya permasalahan tersendiri yang mampu mereka selesaikan. Nah, masyarakat kita sangat haus diberi kesempatan untuk berdialog dan berekspresi, mempresentasikan yang terbaik dari miliknya. Di sini pemerintah pusat menjadi koordinatornya.

Selama FBN dilaksanakan, kira-kira potensi budaya apa yang dimiliki oleh tiap daerah?

Bali misalnya, memperlihatkan antusiasme masyarakat terhadap penjagaan tradisi. Juga antusiasme untuk menerima dan mengolah tradisi luar menjadi bagian dari dirinya. Itulah kelebihan masyarakat Bali. Mereka sangat akomodatif. Mereka modern sekaligus tradisional. Makanya di Bali relatif tidak ada gejolak.

Di Pontianak kita melihat keindahan syair dari bahasa Dayak yang beragam-ragam jenisnya. Ini juga bisa menyatukan mereka. Sayangnya memang potensi ini terabaikan. Selain itu, mereka juga punya kelebihan menata lingkungan. Masyarakat Dayak juga dapat disatukan oleh kehidupan hutan. Bagi mareka hutan adalah segala-galanya. Selama hutan tidak dirusak, mereka akan dapat hidup rukun. Namun kini mereka menjadi orang miskin di daerah yang kaya, karena hutan-hutan mereka dirusak dengan adanya HPH (hak pengelolaan hutan). HPH tidak saja membuat masyarakat miskin di tanahnya sendiri juga rusaknya lingkungan mereka.

Selain Bali agaknya hanya Yogyakarta yang punya 'daya bius' yang hebat. Yang lain agak kurang....

Sebetulnya setiap daerah dengan tradisinya masing-masing punya daya bius terhadap orang luar yang datang ke daerah itu. Namun masalahnya orang sebutlah Dayak, mereka punya masalah, yakni terlalu lama terkungkung. Sudah lama terjajah di negerinya sendiri. Mereka mayoritas, tapi dalam struktur pemerintah didominasi pendatang (Melayu). Para birokrat di sana itu kebanyakan bukan orang Dayak. Mereka tersisih di negerinya sendiri. Nah, ini akhirnya menimbulkan praduga bahwa orang Dayak hanya memikirkan kedayakannya saja, mereka seakan tidak mau menerima pengaruh dari luar. Pendatang juga hidup dengan adatnya sendiri. Akhirnya mereka hidup bersama dengan dasar saling curiga. Itulah yang selama ini terjadi. M-4

Media Indonesia, 3 Oktober 1999

Ratapan dalam Sebuah Bambu

Wahai pohon.....
Terpaksa saya harus menebang kamu
Untuk dijadikan tempat saya melontarkan perasaan hati
Yang amat sedih karena saya sudah bertahun-tahun kalah judi
Dan perempuan yang saya cintai tidak mau sama saya lagi
Karena ternyata dia masih sepupu saya.....

SEPENGGAL lirik pada naskah bambu, menunjukkan ciri khas naskah Batak yang muncul pada abad ke-18. Lirik-lirik berupa ratapan ini banyak muncul dalam naskah-naskah bambu yang ditemukan di Batak. Sebagian besar, naskah-naskah dari Batak banyak memperlihatkan cerita-cerita ratapan tentang kisah cinta yang gagal serta kesedihan lainnya. Naskah-naskah ratapan sebagian besar tertulis dalam sebuah bambu.

Naskah Batak terdiri dari dua jenis. Naskah yang ditulis pada bambu dan naskah yang ditulis pada kulit kayu. Naskah yang ditulis pada kayu, memperlihatkan resep obat-obatan, ritual keagamaan dan ilmu nujum. "Naskah ini biasanya ditulis dan digunakan oleh datuk (dukun) di Batak untuk keperluan nujum," kata Uli Kozok, ahli naskah Batak dari New Zealand.

Dalam naskah ini, kata Kozok, hampir seluruhnya berkaitan dengan ilmu-ilmu gaib. Misalnya dijelaskan tentang bagaimana cara melakukan nujum yang baik. Dukun ini menggunakan ayam sebagai alat untuk meramal kapan hari yang tepat untuk membuka ladang, kapan waktu yang tepat untuk pernikahan atau hari apa yang cocok untuk berpergian.

Selain itu, naskah juga digunakan untuk mendapatkan wanita idamannya. Tulisannya diletakkan pada benda-benda seperti tempat kapur sirih atau tempat tembakau yang akan diberikan pada orang yang dituju, dengan harapan orang tersebut bisa segera jatuh cinta padanya.

Ini terjadi, karena selama itu, naskah dianggap sebagai sesuatu yang gaib dan dipakai sebagai jimat untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan. "Potensi aksara saat itu masih dianggap berhubungan dengan hal-hal yang gaib," tambah Kozok.

***

NASKAH bambu selain digunakan untuk mengekspresikan ratapan seseorang, juga digunakan untuk mengancam orang yang punya piutang dan menjadi kebiasaan masyarakat Batak. Mereka, kata Kozok, bersembunyi di hutan kemudian menempelkan naskah tersebut di depan rumah orang yang diancam. Surat ancaman ini dilakukan tiga kali dan yang terakhir mereka akan mengancam membunuh orang yang berpiutang.

Naskah Batak ditemukan sekitar abad 18 hingga 19 oleh bangsa Belanda kurang lebih dari 35 tahun. Mereka membawa naskah-naskah ini ke Belanda. Sebagian di temukan di Jerman,

Naskah Batak memang berbeda dengan naskah-naskah Jawa dan Melayu pada umumnya. Kehidupan masyarakat sehari-hari juga tentang berbagai aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dalam masyarakat Melayu diturunkan melalui naskah.

Berbeda dengan naskah Batak yang lebih banyak menurunkannya secara lisan bukan tulisan. Ini mungkin yang menyebabkan naskah-naskah Batak sepertinya diabaikan begitu saja. Penelitian terhadap naskah Batak masih sangat kurang. **(wik)**

Warta Kota, 13 Oktober 1999

Festival Budaya Nusantara '99

Tradisi Lisan, Kesamaan dan Keragamannya

Jakarta, Kompas

Tradisi lisan merupakan bagian dari kebudayaan yang sekaligus menjadi pencerminan yang sangat wajar dari keseluruhan kebudayaan itu. Di dalamnya terkandung pengalaman masyarakat pemiliknya dalam mengusahakan kesejahteraan hidupnya melalui pemahaman dan pemanfaatan lingkungan, pemecahan masalah, penyelesaian konflik, persentuhan dengan dunia luar, dan pengintegrasian analisis baru.

Demikian Prof Dr Yus Rusyana, Guru Besar IKIP Bandung pada sidang pleno pertama Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan Nusantara III yang digelar di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (14/10).

Selain Prof Dr Yus Rusyana, juga tampil sebagai pembicara pakar folklor Prof Dr James Danandjaja dari FISIP Universitas Indonesia dan Prof Dr Amin Sweeney, pakar tradisi lisan Melayu dari Universitas Berkeley, AS.

Menurut Prof Dr Yus Rusyana, tradisi lisan Nusantara menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, seperti bahasa yang digunakan, isi, bentuk, dan fungsinya. Hal itu terjadi karena beragamnya pengalaman yang dijalani oleh komunitas-komunitas pendukung tradisi lisan itu, baik secara diakronis sepanjang perjalanan waktu maupun secara sinkronis dalam persebaran ruang.

Dalam keragaman tradisi lisan Nusantara juga terkandung pelbagai kesamaan dalam hal struktur. Hal itu timbul, baik karena bawaan internal (bahasanya serumpun sehingga ungkapannya sama), maupun karena pengalaman kontak dengan budaya luar yang sejenis (kesamaan pengalaman dari zaman ke zaman, kesamaan budaya atau asal-usul). Seperti cerita mengenai padi. Di Aceh, Jawa, Bali, Madura, hingga Fak-Fak, ada pola yang sama. Pola ini bertahan sampai kemudian dipengaruhi budaya Hindu dan Islam.

Terjadi dinamika tradisi lisan, yaitu perubahan-perubahan yang timbul dari sifat kelisanannya, serta penyesuaian dan kreativitas. Kontak dengan unsur luar menimbulkan pula substitusi, integrasi, dan pembaruan. "Tradisi lisan yang ada di seluruh Tanah Air Indonesia keseluruhannya merupakan kesatuan yang dibangun dengan dua dasar yaitu keragaman dan kesamaan," ujar Yus Rusyana.

Kebhinnekaan-Ketunggalikaan

Prof Dr James Danandjaja mengemukakan, bagi orang yang pernah membandingkan cerita-cerita prosa rakyat Nusantara, akan mendapatkan ba-

nyak perbedaan (kebhinekaan) dan persamaan (ketunggal-ikaan) mereka, tergantung pada banyak atau kurangnya mendapat pengaruh dari kebudayaan besar, seperti India, Han, Eropa dan Timur Tengah, yang diwakili oleh agama-agama besar seperti Hinduisme, Buddhisme (terutama adaptasi dari Tiongkok), Nasrani dan Islam.

Walaupun kini dalam masa reformasi kebhinnekaan mulai diperhatikan, namun bukan berarti bahwa ketunggal-ikaan tidak ada. Apalagi jika dianggap hanya merupakan rekaan dari Orde Lama maupun terutama Orde Baru. Untuk meninjau kebhinekaan dan ketunggal-ikaan cerita prosa rakyat Nusantara, kita harus mengetahui terlebih dahulu hakikat dari cerita prosa rakyat (*prose narrative*). Menurut William Bascom, cerita prosa rakyat dapat dibagi menjadi tiga golongan besar: mite, legenda, dan dongeng.

Dalam kenyataan banyak cerita prosa rakyat di dunia ini, termasuk juga di Indonesia yang sama atau sedikitnya mirip satu sama lain. Untuk menerangkan mengapa ada fenomena ini, ada banyak sekali teorinya. Teori-teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni monogenesis yang berarti "asalnya satu", berkat proses difusi (penyebaran) tersebar ke tempat-tempat lain; dan poligenesis yang berarti "asalnya banyak", yang diakibatkan penemuan-penemuan yang sendiri, atau sejajar dari motif-motif cerita yang sama, di tempat-tempat yang berlainan, serta dalam masa yang berlainan maupun bersamaan.

Pembentukan wacana kebudayaan

Sementara itu, Prof Dr Amin Sweeney yang membawakan makalah berjudul *Tradisi Lisan dan Pembentukan Wacana Kebudayaan* berkomentar, konsep "keberaksaraan semesta" juga perlu dipermasalahkan. Kita sering membaca tentang keberaksaraan "tinggi", "penuh", dan "sempurna". Konsep-konsep tersebut semuanya muncul di Barat dan biasanya menggambarkan norma lingkungan sarjana yang menggunakannya. Begitu juga, sarjana itu cenderung memakai istilah "keberaksaraan terbatas" mengenai lingkungan yang tidak mencapai tahap keberaksaraan sarjana tadi.

Tentu saja terdapat berbagai-bagai tingkat keberaksaraan dalam satu masyarakat. Akan tetapi, penilaian keberaksaraan antarbudaya mengandung risikonya. Kalau dibuat perbandingan antara mutu keberaksaraan Belanda dan Indonesia misalnya, kata Sweeney, Belanda tentu menang karena ukuran yang dikenakan tentulah ukuran Belanda.

"Mereka 'kan punya dana. Bagaimana kalau kita memakai ukuran Indonesia, khususnya dalam bidang kewartawanan? Kecanggihan wartawan Indonesia menyampaikan maksudnya secara tersirat dalam suasana politik yang represif merupakan satu aspek keberaksaraan yang mengagumkan sekali dalam wacana Indonesia. Pengembangan 'kesenian' retorika politik demikian hanya mungkin kalau wicara itu mahal," ucap Sweeney. **(lok)**

Kompas, 15 Oktober 1999

Tradisi Lisan Nusantara

Mengandung Keragaman Dan Kesamaan

JAKARTA - Tradisi lisan merupakan bagian kebudayaan yang menjadi pencerminan dari keseluruhan kebudayaan itu. Dari penelaahan terhadap tradisi lisan, ada dua sifat yang ditemukan di dalamnya yakni keragaman dan kesamaan.

Kedua hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menciptakan dan mengokohkan kebudayaan persatuan Indonesia.

Keragaman atau variasi yang terdapat dalam ruang secara horisontal dan sinkronik adalah kenyataan, maka harus dicakup dan dimanfaatkan sebagai kekayaan bangsa.

Demikian pendapat Guru Besar IKIP Bandung Prof Dr Yus Rusyana dalam Seminar Internasional Tradisi Lisan III akhir pekan lalu di TIM Jakarta. Menurut Rusyana, pengabaian terhadap keragaman berarti pengingkaran terhadap sifat yang sesungguhnya dari kehidupan. Keragaman tidak dapat diganti dengan dominasi yang serba seragam karena akan menyebabkan penentangan menuju keretakan.

Rusyana menjelaskan, selain dalam bahasa yang digunakan, keragaman budaya juga dapat ditemukan dalam materi yang disampaikan. Keragaman tersebut terjadi karena perbedaan keadaan dan pengalaman yang dijalani oleh komunitas pendukungnya.

Tradisi Lisan

Keragaman merupakan sifat nyata dari tradisi lisan, misalnya dalam tradisi lisan Melayu Ambon. Terdapat cerita asal usul manusia yang beragam seperti manusia dari pisang, dari labu cina atau pohon asam. Sementara dalam tradisi lisan Tanimbar, padi itu berasal dari benih yang dibawa orang dari laut.

Di sisi lain, tradisi lisan yang beragam itu juga mengandung kesamaan. Misalnya dalam pola cerita mitos padi dalam tradisi lisan Aceh, Sunda, Jawa, Madura, Flores dan Kalimantan.

Dalam pola tersebut, kisah berawal dari situasi kelaparan dalam masyarakat, untuk itu seseorang harus mengorbankan diri. Selanjutnya, muncul tumbuhan padi dari kuburan orang itu.

Sosial-politik

Sementara itu, Mantan Dirjen Kebudayaan Prof Dr Edi Sedyawati dalam makalahnya menjelaskan dinamika perkembangan tradisi dalam perspektif sejarah. Ada asumsi yang dikemukakan tentang simbiosis yang menguntungkan antara komunitas kota dan desa dalam perkembangan kebudayaan.

Kenyataan ini dapat terlihat dalam perkembangan seni kebudayaan yang dihasilkan oleh pusat-pusat kerajaan. Bentuk yang terjadi antara lain perekrutan para seniman desa yang dapat membawa warna lokalnya oleh pihak kerajaan.

Menurutnya, kondisi sosial politik juga ikut mempengaruhi perkembangan tradisi. Tetapi, kadar intensitas pengaruh dalam satu bidang seni dengan seni lainnya berbeda. Suatu kesenian yang menjadi citra suatu golong-

an akan lebih banyak mendapat intervensi sesuai citra yang dituju. Sebaliknya, kesenian kolektif milik rakyat lebih bebas dari usaha pembentukan citra dan modernisasi teknik.

Lebih lanjut Ed. Sedyawati mengatakan, ada pihak-pihak yang sengaja mempertentangkan tradisi-tradisi warisan masa lalu dengan rumusan "negara". Padahal, sejak awal pemerintah pada masa manapun tidak pernah berniat menghapus identitas suku-suku yang tergabung dalam negara Indonesia.

Ia menegaskan ke-Indonesiaan yang dibentuk untuk bebas dari penjajahan tidak perlu dipermasalahkan.

Hal yang lebih penting diperhatikan ialah usaha merawat khazanah budaya suku-suku bangsa tersebut. Harapan tersebut sudah terlihat, karena para seniman dari berbagai daerah sesungguhnya telah menjalin interaksi sendiri yang tampak dalam karya-karya mereka.

(UW/W-9)

Suara Pembaruan 19 Oktober 1999